



PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**PEMBINAAN DISIPLIN
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT
KOTA YOGYAKARTA**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERPUSTAKAAN
SEKRETARIAT DI TJEN BUD

No. INDUK

1924

TGL. CATAL

23 MAY 1995

Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan



PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA

Tim Peneliti

Dra. Sumintarsih

Drs. Suratmin

Dra. Isni Herawati

Noor Sulistyo Budi, SH

Penyunting

Drs Gatut Murniatmo



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
TAHUN 1994/1995

PERPUSTAKAAN KEBUDAYAAN

TGL. TERIMA	-
TGL. CATAT	29-3 - 2005
NO. INDUK	033 / 2005
NO. CLASS	307 . 760 . . .
KOPI KE :	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya DIY dapat menerbitkan buku berjudul "**Pembinaan Disiplin Di Lingkungan Masyarakat Kota Yogyakarta**". Buku ini merupakan hasil kegiatan Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya DIY tahun anggaran 1992/1993. Sedang penerbitannya baru dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 1994/1995.

Upaya penerbitan buku ini dimaksudkan agar dapat menambah khasanah kepustakaan tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai salah satu program Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II).

Berhasilnya usaha penyusunan buku ini selain berkat kerja keras dari tim peneliti dan penyunting, juga adanya kerjasama yang baik dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II di Propinsi DIY serta bantuan dari para informan dan pihak lain, untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Selain daripada itu, kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY yang telah berkenan memberikan kata sambutan dalam penerbitan ini, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih, semoga buku ini ada manfaatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemimpin Proyek,



Drs. S. Sugiono
NIP 490004825

S A M B U T A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
P A D A
PENERBITAN NASKAH HASIL PEREKAMAN
PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA
YOGYAKARTA
OLEH PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN NILAI - NILAI
BUDAYA DIY

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Diiringi rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa saya menyambut baik diterbitkannya naskah hasil perekaman berjudul “ Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota Yogyakarta” oleh Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya DIY.

Saya menilai positif penerbitan naskah tersebut dalam upaya pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat agar tercipta suatu lingkungan yang aman, tertib dan sejahtera. Untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan sejahtera tersebut perlu adanya pembinaan dan pengembangan disiplin terhadap warga masyarakat, agar tidak timbul permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan yang timbul di dalam masyarakat diakibatkan antara lain kepadatan penduduk, heterogenitas masyarakat, gaya hidup, tidak memadainya sarana dan prasarana yang diperlukan, dan disamping itu hal yang sangat berpengaruh adalah tingkat kedisiplinan warga masyarakat dalam menaati segala peraturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku.

Perilaku disiplin merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, oleh karena itu perlu dibina dan dimantapkan sejalan dengan perkembangan peradaban bangsa agar tercipta suatu masyarakat yang bertanggung jawab, tertib, berwawasan kedepan dan mandiri.

Kota Yogyakarta sebagai pusat berbagai kegiatan sosial, ekonomi maupun budaya dan juga menyandang predikat sebagai kota budaya, pendidikan dan

wisata dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi akan timbul berbagai dampak yang rawan apabila tidak diiringi dengan kesadaran berdisiplin tinggi masyarakat untuk mematuhi aturan dan norma sosial yang berlaku.

Dengan diterbitkannya naskah hasil perekaman ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca yang lain agar terbina lingkungan masyarakat yang berdisiplin tinggi, yaitu mempunyai perilaku pengendalian diri yang baik, tingkah laku teratur, tertib serta mematuhi peraturan dan norma yang berlaku di masyarakatnya.

Saya menghargai karya dan kreatifitas Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya DIY dalam upayanya menerbitkan Naskah Hasil Rekaman "Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota Yogyakarta", semoga bermanfaat dalam upaya pembinaan disiplin bangsa.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Kepala

Drs. Soetopo Sahib
130439125

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR FOTO / GAMBAR	xv
DAFTAR PETA	xvii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
 BAB II. GAMBARAN UMUM KOTA DAN DAERAH PENELITIAN	 5
A. GAMBARAN UMUM KOTAMADYA YOGYAKARTA	 5
1. Letak dan Luas Kota	5
2. Keadaan Alam	6
3. Penduduk.....	6
4. Keadaan Fisik	8
5. Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya	10
B. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
1. Letak dan Luas Daerah	12
2. Keadaan Alam	13
3. Penduduk.....	14
4. Keadaan Fisik	15
5. Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya....	16
C. BERBAGAI PERMASALAHAN KOTA.....	18
1. Masalah Lalu Lintas	19
2. Masalah Kriminalitas.....	20
3. Masalah Pendatang	20
4. Kebutuhan Air Bersih	21
5. Masalah Sampah.....	23
6. Masalah Pedagang Kaki Lima.....	25
7. Slogan Yogyakarta Berhati Nyaman	26

BAB III. DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN KELUARGA KELURAHAN TERBAN	49
A. DISIPLIN DALAM PENANGANAN LIMBAH KELUARGA SAMPAH.....	50
1. Penanganan Sampah.....	51
2. Penanganan Limbah	67
3. Usaha-usaha Yang Dilakukan Untuk Kebersihan Lingkungan	71
B. DISIPLIN DALAM PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN SOSIAL	73
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Sosial..	74
2. Masalah-masalah Yang Ada	79
3. Usaha-usaha Yang Dilakukan.....	81
C. DISIPLIN TERHADAP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.....	86
1. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan...	87
2. Hambatan dan Usaha Yang Dilakukan	95
D. DISIPLIN DALAM HUBUNGAN KETETANGGAAN	
1. Hubungan Ketetanggaan	98
2. Ketetanggaan/Masalah Yang Timbul.....	101
3. Usaha-usaha Yang Dilakukan.....	103
 BAB IV. DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DI KELURAHAN TERBAN	
A. DISIPLIN DI LINGKUNGAN PASAR	118
1. Pasar Terban	119
2. Tata Tertib di Pasar.....	121
3. Disiplin Terhadap Tata Tertib di Pasar	123
4. Hubungan Pedagang Dengan Pedagang.....	127
5. Hubungan Pedagang Dengan Pembeli	129
6. Hubungan Pedagang Dengan Petugas Pasar....	130
B. DISIPLIN DI LINGKUNGAN TERMINAL	131
1. Transportasi di Kotamadya Yogyakarta.....	132
2. Sub Terminal Terban.....	133

3. Tata Tertib Di Lingkungan Pasar.....	135
4. Tata Tertib Di Luar Terminal	137
C. DISIPLIN DI LINGKUNGAN TEMPAT HIBURAN	
1. Keadaan dan Fasilitas Bioskop.....	142
2. Perilaku Penonton di Dalam dan Di Luar Gedung Bioskop.....	145 151
D. DISIPLIN DI JALAN RAYA	151
1. Sarana dan Prasarana	151
2. Keadaan Lalu Lintas	153
3. Disiplin Di Jalan Raya.....	155
4. Partisipasi Pengguna Jalan Raya Dalam Kebersihan	158
5. Penggunaan Trotoar Untuk Pedagang Kaki Lima dan Parkir	159
BAB V. UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKAT KOTA	179
A. PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH.....	179
B. PEMBINAAN OLEH TOKOH MASYARAKAT.....	165
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	189
DAFTAR PUSTAKA	195
LAMPIRAN :	
1. DAFTAR RESPONDEN DAN INFORMASI	
2. DAFTAR ISTILAH	202

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1.	Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin Kotamadya Yogyakarta, 1990	31
Tabel II. 2.	Penduduk, Luas wilayah dan kepadatan penduduk per kecamatan Kotamadya Yogyakarta	32
Tabel II. 3.	Banyaknya rumah tangga, penduduk dan rata - rata banyaknya jiwa per rumah tangga menurut kecamatan di Kotamadya Yogyakarta, 1990	33
Tabel II. 4.	Rata - rata laju pertumbuhan penduduk per tahun menurut kecamatan di Kotamadya Yogyakarta antara tahun 1980 - 1990	34
Tabel II. 5.	Banyaknya kelahiran, penduduk yang datang menurut kecamatan di Kotamadya Yogyakarta	35
Tabel II. 6.	Banyaknya kematian, penduduk yang pergi per kecamatan di Kotamadya Yogyakarta akhir tahun 1990	36
Tabel II. 7.	Banyaknya sekolah, kelas, guru dan murid menurut jenis sekolah di Kotamadya Yogyakarta 1990/1991	37
Tabel II. 8.	Panjang Jalan di Kotamdy Yogyakarta menurut jenis permukaan, tahun 1987 - 1990 (km)	38
Tabel II. 9	Panjang Jalan di Kotamdy Yogyakarta menurut kondisi jalan tahun 1987 - 1990 (km)	38
Tabel II.10.	Banyaknya penduduk menurut golongan umur, jenis kelamin di Kelurahan Terban, 1990	39
Tabel II.11.	Rata-rata anggota rumah tangga menurut kelurahan hasil Sensus Penduduk 1980 dan 1990	40
Tabel II.12.	Rata - rata laju pertumbuhan penduduk pertahun menurut kelurahan anatara tahun 1980 dan 1990	40

Tabel II. 13. Perubahan Penduduk Kelurahan Terban Periode Bulan Januari - Desember 1991	41
Tabel III. 1. Jenis dan Volume sampah perhari di Kodya Yogya - karta, 1986	105
Tabel III. 2. Sumber Sampah dan Volume sampah per hari di Kodya Yogyakarta, 1986	106
Tabel III. 3. Cara Pembuangan Sampah	106
Tabel III. 4. Jarak bak sampah dari rumah	107
Tabel III. 5. Tingkat disiplin pembuangan dapur	107
Tabel III. 6. Tempat penbuangan limbah tetangga	108
Tabel III. 7. Saling berkunjung ke tetangga	108
Tabel IV. 1 Data pasar Kotamadya Yogyakarta	109
Tabel IV. 2. Jumlah pedagang pasar Kotamadya Yogyakarta	163
Tabel IV. 3. Perkembangan jumlah pengunjung obyek wisata Kotamadya Yogyakarta 1990 -1991	164
Tabel IV. 4. Perkembangan usaha rekreasi dan hiburan Kodya Yogyakarta 1990 - 1991	166
Tabel IV.5. Jumlah gedung bioskop di DIY 1989 - 1991	167
Tabel IV.6. Nama Gedung bioskop di Kodya Yogyakarta menurut golongan, 1990	168
Tabel IV. 7. Jenis Kendaraan, 1986 - 1990	169
Tabel IV. 8. Pelanggaran menurut profesi, 1991	170
Tabel IV. 9. Jenis Pelanggaran, 1991	170
Tabel IV. 10. Jenis Kecelakaan, 1987-1991	171

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1. Kantor Kelurahan Terban	46
	2. Pola perkampungan di lembah sungai Code	46
	3. Ulah tangan usil	47
	4. Aksi corat-corek yang tak bertanggung jawab	47
	5. Monumen Yogyakarta Berhati Nyaman	48
	6. Salah satu upaya perwujudan Yogyakarta	48
	7. Salah satu saluran upaya perwujudan Yogya- karta Berhati Nyaman	110
	8. Tempat penampungan limbah rumah tangga	110
	9. Pembuangan sampah di sungai	111
	10. Mandi di sungai	111
	11. Buang hajat di sungai	112
	12. Mengambil air bersih di sumber air dekat sungai	112
	13. Slogan Kebersihan di pinggir sungai	113
	14. Bagor tempat membuang sampah rumah tangga	113
	15. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) ditengah kampung	114
	16. Tempat Pembuangan Smpah Sementara	114
	17. Truk dari Dinas Kebersihan sedang mengangkut sampah	115
	18. Gerobag kampung istirahat sejenak untuk mem- buang sampah ke TPA	115
	19. Penduduk sedang menyelesaikan urusan admi- nistrasi di Kelurahan Terban	116
	20. Salah satu kantor RT yang ada di Kelurahan Terban	116
	21. Perkampungan dilembah Code	117
	22. Perkampungan di wilayah Terban	117
	23. Suasana Pasar Terban	173
	24. Tempat penyembelihan ayam di Pasar Terban	174
	25. Sub terminal di depan Pasar Terban	174
	26. Pom bensin dekat Terminal Terban	175
	27. Lalu lintas padat semrawut di jalan C. Simanjuntak	175

28. Petugas mengatur lalu lintas	175
29. Bus Kota menunggu penumpang	176
30. Melanggar peraturan, meletakkan material di trotoar	176
31. Tertib menyeberang, di zebra cross	177
32. Kendaraan mesin, non mesin menjadi satu	177
33. Kaki lima di Jalan C. Simanjuntak	178
34. Suasana di Jalan C. Simanjuntak wilayah Terban	178
35. Slogan Kebersihan salah satu upaya pembinaan kebersihan lingkungan	188
36. Polisi memberitahu kepada pengendara, salah satu upaya pembinaan ketertiban lalu lintas	188

DAFTAR PETA

PETA	1. KOTAMADYA YOGYAKARTA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	42
PETA	2. LOKASI PENELITIAN DALAM WILAYAH KECAMA- TAN GONDOKUSUMAN KOTAMADYA YOGYA - KARTA	43
PETA	3. LOKASI KELURAHAN TERBAN DALAM WILAYAH KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTAMADYA YOGYAKARTA	44
PETA	4. KELURAHAN TERBAN KECAMATAN GONDOKU- SUMAN KOTAMADYA YOGYAKARTA	45
PETA	5. DENAH PASAR TERBAN	172

BAB I

PENDAHULUAN

Tingkat kepadatan penduduk di daerah perkotaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat. Satu hal yang sering ditunjuk sebagai penyebabnya adalah mengalirnya arus urbanisasi ke daerah perkotaan. Gaya hidup kota, lengkapnya sarana dan prasarana, tersedianya lapangan kerja, serta aneka macam barang dan jasa yang terdapat di kota merupakan daya tarik bagi para urbanis. Menurut Bintarto (1983: 36), kota merupakan suatu jaringan kehidupan manusia yang di tandai dengan kepadatan penduduk dan heterogenitas masyarakatnya yang tinggi. Kota sebagai satuan wilayah permukiman juga merupakan tempat bekerja dan tempat rekreasi. Oleh sebab itu demi kelangsungan suatu kota diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Beberapa ciri suatu kota antara lain ditunjukkan adanya tempat-tempat pasar, pertokoan, tempat parkir, dan tempat-tempat rekreasi.

Padatnya penduduk yang melebihi daya dukung wilayah menimbulkan permasalahan-permasalahan bagi kesejahteraan hidup penghuninya. Kota harus menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dapat menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan di kota. Permasalahan-permasalahan yang timbul menurut Djamiludin Ancok (1991: 6) antara lain kesempatan kerja, transportasi, permukiman, kesehatan, keamanan, pelayanan, menurutnya solidaritas sosial maupun masalah lainnya. Semuanya itu tidak terlepas dari masalah sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.

Permasalahan-permasalahan di samping ada kaitannya dengan masalah tingginya tingkat kepadatan penduduk, juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepadatan penduduk, juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan warga dalam menaati segala peraturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Seperti diketahui dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu terlibat dalam suatu sistem pemeliharaan keserasian dan kelangsungan kehidupan yang berpatokan pada kaidah-kaidah, norma-norma yang berlaku tersebut menjadi landasan hidup yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap individu, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai aparaturnegara.

Dalam GBHN disebutkan bahwa pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya. Dengan kata lain

sasaran pembangunan adalah berpusat pada manusia itu sendiri, baik sebagai individu, sebagai bagian dari kelompok masyarakat, dan sebagai kelompok bangsa. Manusia sebagai pribadi, dalam setiap kegiatannya memerlukan ketangguhan dan disiplin untuk mencapai tujuan cita-cita nasional. Jadi jelaslah bahwa sikap mental bangsa adalah unsur pokok yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan.

Sehubungan dengan itu untuk menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang tertib, diperlukan pengembangan dan pembinaan disiplin terhadap warga masyarakat yang bersangkutan; terutama masyarakat kota tempat bermukim warga kota, tempat bekerja, tempat hidup dan tempat rekreasi. Oleh karena itu untuk kelangsungannya, kota didukung sarana dan prasarana yang memadai; dan demi ketertiban dan kelancaran kehidupan sehari-hari warganya maka pemerintah mengatur lewat norma-norma dan tata hidup tertentu. Namun dengan begitu oleh kompleksnya kebutuhan warga perkotaan maka kekurangan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah maupun kurangnya pemahaman masyarakat terhadap norma-norma yang diberlakukan menimbulkan berbagai masalah. Dengan kata lain norma-norma ketertiban kota belum tertanam dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu disiplin sosial masyarakat dapat dilihat antara lain pada tingkat pelanggaran atau kepatuhan yang dilakukan oleh masyarakat (Satjipto Rahardjo, 1987). Orang disebut mempunyai pengendalian diri yang baik yaitu tingkah laku teratur, tertib, serta mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku (Warnean, 1985; Munandar, 1985) Sehubungan dengan hal tersebut pokok-pokok permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauh mana tingkat disiplin warga masyarakat di lingkungan perkotaan.
2. Aturan dan kaidah-kaidah sosial apa saja yang berlaku pada lingkungan masyarakat perkotaan.
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam rangka pembinaan disiplin pada masyarakat perkotaan.

Bahwasannya perilaku disiplin adalah merupakan kebutuhan yang mendesak untuk segera dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan perkembangan bangsa. Melalui pembinaan disiplin akan tercipta suatu masyarakat yang bertanggung jawab, tertib, berwawasan ke depan dan mandiri. Sehubungan dengan itu penelitian bertujuan :

1. Mengungkap dan mendiskripsikan tingkat kedisiplinan warga perkotaan.
2. Upaya-upaya pembinaan disiplin yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh terhadap warga perkotaan.

Penelitian tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota akan dilakukan pada dua lokasi tempat berlangsungnya aktivitas masyarakat, yaitu lingkungan permukiman dan tempat-tempat umum. Kedua lokasi tersebut merupakan daerah pusat kota yang diperkirakan terdapat berbagai permasalahan disiplin.

Lingkungan umum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat-tempat umum yaitu lingkungan pusat perbelanjaan (pasar, pertokoan), lingkungan terminal, lingkungan tempat hiburan, dan jalan raya. Data yang akan diungkap adalah disiplin terhadap kebersihan, aturan-aturan dalam pelayanan, aturan-aturan di tempat umum, dan disiplin terhadap peraturan-peraturan formal. Sedangkan disiplin yang akan diungkap di lingkungan permukiman adalah disiplin warga masyarakat terhadap penanganan limbah keluarga, kebersihan lingkungan, partisipasi warga masyarakat terhadap kegiatan sosial, administrasi pemerintah, dan hubungan dalam ketetanggaan.

Untuk keperluan tersebut dipilih salah satu lingkungan wilayah kecamatan dengan ketentuan : a) penduduk padat dan b) mobilitas dan aktivitas penduduknya tinggi. Di kecamatan terpilih tersebut dipilih dua lokasi tempat berlangsungnya aktivitas masyarakat yaitu lingkungan permukiman dan tempat-tempat umum. Kedua lingkungan tersebut harus merupakan daerah pusat kota dan termasuk dalam satu wilayah kelurahan atau lebih dengan kriteria a) penduduk padat dan b) mobilitas serta aktivitas penduduknya tinggi.

Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut dipilihlah kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman sebagai daerah penelitian. Pemilihan Kelurahan Terban sebagai daerah sampel penelitian dengan pertimbangan : Semua lingkungan umum (pasar, pertokoan, terminal, kakilima, tempat parkir, jalan raya, bioskop) kebetulan berada dalam wilayah Kelurahan Terban. Hal ini mempermudah pembahasan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Di samping itu beberapa pertimbangan lainnya adalah :

1. Lokasi tersebut cukup memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
2. Letaknya di pusat kota, lalu-lintasnya ramai (padat) antara lain menuju kampus UGM, ke pusat perbelanjaan Mirota Kampus, Golden Kampus dan sederetan toko-toko besar lainnya, ke timur ke pusat perbelajaan Jalan Urip Sumohardjo. Di samping itu ada pasar tradisional yang berdekatan dengan Stasiun Pompa Bensin.
3. Terdapat tempat hiburan (bioskop, billiard).
4. Ada sederetan toko swalayan, stasiun pompa bensin, bioskop, tempat tempat parkir yang cukup padat, kakilima dan sebagainya.
5. Masyarakatnya cukup mobil dan aktivitasnya cukup tinggi.

Dalam penelitian ini untuk pengumpulan data di lapangan menggunakan metode wawancara mendalam, pengamatan, dan studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan dapat diperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian antara lain data kependudukan, kasus - kasus pelanggaran disiplin, peraturan-peraturan yang bersifat formal.

Untuk keperluan pengumpulan data dilakukan wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara di lingkungan permukiman menggunakan kuesioner dan responden yang terdiri dari Kepala Keluarga (KK) dan yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (*purposive sampling*). Di samping itu dilakukan pula wawancara mendalam terhadap para informan yaitu para pemimpin formal : camat, lurah, ketua RW/RT, polisi, petugas pasar, petugas terminal, petugas bioskop; juga para pemimpin informal yaitu ketua- ketua organisasi sosial : PKK, LKMD, Karang Taruna, tokoh agama; wawancara dilakukan juga dengan para pengemudi, pedagang, dan mereka yang memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Selain wawancara, juga dilakukan pengamatan ke tempat-tempat tertentu antara lain bioskop untuk memperoleh gambaran perilaku penonton dalam hal kedisiplinan pada waktu membeli karcis sampai berada dalam gedung bioskop; pengamatan di jalan raya, di pasar- pasar, ke swalayan, tempat parkir, kakilima, dan sebagainya. Di samping itu pengamatan juga dilakukan di lingkungan warga masyarakat bersangkutan, untuk melihat keadaan yang sebenarnya mengenai kedisiplinan warga terhadap norma-norma maupun kaidah-kaidah sosial yang ada.

Hasil penelitian ini juga dilengkapi dengan foto-foto yang menggambarkan perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan masalah disiplin baik di jalan raya, pasar, pertokoan, bioskop, pembuangan sampah/limbah, dan sebagainya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA DAN DAERAH PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM KOTAMADYA YOGYAKARTA

Kotamadya Yogyakarta merupakan ibu kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai daerah perkotaan kota Yogyakarta menjadi pusat berbagai kegiatan sosial, ekonomi maupun budaya. Kota Yogyakarta juga menyandang predikat sebagai kota budaya, pendidikan, kota wisata. Semuanya itu tidak terlepas dari berbagai potensi yang dimiliki kota Yogyakarta.

1. Letak dan Luas Kota

Kotamadya Yogyakarta dengan wilayah yang agak sempit terletak di tengah-tengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Dati II) Yogyakarta sekitar 3,250 hektar (32,5 km²) atau 1,02% luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan terletak pada ketinggian 114 meter di atas permukaan laut. Dengan luas tanah 32,5 Km² terdiri dari 74% tanah perkarangn, 12,3% tanah sawah dan tegalan, sedang sisanya 12,8% digunakan. Wilayahnya terletak antara 110 24'19" sampai 110 28'53" Bujur Timur dan 07 49'26" sampai 07 15'24" Lintang Selatan.

Secara administratif wilayah Kotamadya Yogyakarta dibatasi sebelah utara oleh Kabupaten Dati II Sleman, sebelah timur oleh Kabupaten Dati II Sleman dan Bantul, sebelah selatan Kabupaten Dati II Bantul, sebelah barat oleh Kabupaten Dati II Bantul dan Sleman. Wilayah Kotamadya Yogyakarta terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 615 RW (Rukun Wilayah) dan 2511 RT (Rukun Tetangga).

Sebagai ibu kota propinsi maka tersedia berbagai fasilitas untuk mendukung kelancaran kegiatan sehari-hari warganya. Sederetan pertokoan, pasar, sarana komunikasi, transportasi dan sebagainya. Sarana dan prasarana transportasi yang tersedia memberi kemudahan bagi warga kota untuk pergi kemana saja sampai ke pelosok pun bisa didapat. Hal ini karena sarana transportasi seperti bus sampai *colt* tersedia cukup memadai, juga angkutan umum non mesin seperti *andong*, *becak* menambah kelancaran transportasi.

2. Keadaan Alam

Wilayah Kotamadya Yogyakarta terletak pada daerah dataran rendah dengan tipe tanah regosol atau vulkanis muda, yaitu di daerah lereng aliran gunung berapi (Gunung Merapi). Dari wilayah barat ke timur relief kota menunjukkan relief datar, dan dari utara ke selatan mempunyai kemiringan ± 10 (Humas Kotamadya, 1991). Kotamadya Yogyakarta di lewati tiga sungai yang mengalir ke selatan. Di bagian timur Sungai Gajah Wong, di tengah kota di lewati Sungai Code dan di bagian barat Sungai Winongo.

Dilihat dari adanya tiga sungai tersebut maka keadaan tanah di wilayah tersebut cukup baik untuk lahan pertanian. Namun dengan semakin pesatnya perkembangan perkotaan dan permukiman, lahan pertanian semakin menyusut, per tahunnya di perkirakan 5% (Humas Kotamadya Yogyakarta, 1991).

Rata-rata curah hujan 2.012 mm per tahun dengan 119 hari hujan, serta suhu rata-rata 27,2° C dan kelembaban rata-rata 74,7%. Angin yang bertiup adalah angin muson.

3. Penduduk

Wilayah Kotamadya Yogyakarta berpenduduk sangat padat dan heterogenitas sangat tinggi. Menurut sensus 1990, jumlah penduduk Kodya Yogyakarta 412.059 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 202.002 jiwa dan perempuan 210.057 jiwa (tabel II.1). Berdasarkan luas Kodya Yogyakarta 32,50 Km², maka kepadatan penduduk per km² 12.679 jiwa. Kecamatan yang terpadat adalah 23.830 per km² dan yang terendah kepadatannya 6.972 km² (tabel II.2). Jumlah rumah tangga 110.007 atau rata-rata per rumah tangga 3.75 jiwa. Untuk kecamatan Gondokusuman memiliki jumlah rumah tangga tertinggi, yaitu 19.367 atau 17,6%. Sedang kecamatan Umbulharjo mengalami kenaikan berlipat, bila menurut sensus 1980 jumlah rumah tangga 7.865, maka menurut sensus 1990 17.740 atau naik sekitar 98,7% (tabel II.3).

Dari tabel II.1 dapat di ketahui distribusi penduduk menurut umur, penduduk usia balita ada 6,5%. Angka beban ketergantungan penduduk Kodya Yogyakarta yaitu 38,0. Ini menunjukkan bahwa Kodya Yogyakarta mempunyai indikator demografis yang cukup baik, karena dari setiap 100 orang yang produktif hanya menanggung 38 orang yang tidak produktif. Di sini beban yang harus ditanggung lebih kecil dari yang menanggung.

Berdasarkan tabel II.1 itu pula dapat diketahui distribusi penduduk menurut umur. Diketahui penduduk usia balita (0-4 th) ada 26.893 jiwa (6,5%). Sedangkan penduduk usia muda (0-9 th) sebesar 58.334 jiwa (14,2%), dan usia (10-24 th) 159.396 jiwa (38,7%). Dengan demikian penduduk usia muda (0-24 th) sebesar 59,4% dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kotamadya Yogyakarta per tahun (data sensus 1980 dan 1990) cukup kecil yaitu 0,42. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Umbulharjo dan Kotagede, sedangkan yang paling rendah Kecamatan Gondokusuman (lihat tabel II.4).

Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh banyaknya kelahiran, penduduk yang datang, pergi dan yang mati. Jumlah penduduk yang lahir maupun yang datang priode tahun 1987-1990 tidak menunjukkan kenaikan maupun penurunan yang berarti (tabel II.5). Hanya pada tahun 1987 jumlah pendatang ada sedikit kenaikan. Dari 14 kecamatan Umbulharjo dan Gondokusuman jumlah kelahiran dan penduduk yang datang paling tinggi diantara kecamatan lainnya. Sedangkan jumlah kematian tertinggi di Kecamatan Gondokusuman dan Margangsari. Penduduk yang pergi tertinggi di Kecamatan Pakualaman dan Gondokusuman (tabel II.6).

Banyaknya tenaga kerja bila dilihat menurut sensus 1971 (10 tahun ke atas) maka potensi ketenagakerjaan di daerah Kotamadya Yogyakarta sekitar 85,8%. Bila diperhitungkan menurut batasan yang lazim 15-64 tahun ada 72,2%. Akan tetapi kalau dilihat dari batasan usia yang dianggap produktif yaitu umur 15-49 tahun, maka penduduk yang masih berumur produktif adalah 256.868 (62,3%). Bila dilihat dari angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Kotamadya Yogyakarta mempunyai potensi besar di bidang ketenagakerjaan. Hal ini perlu mendapat perhatian berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan.

Potensi di bidang kependudukan yang dimiliki Kota Yogyakarta juga ditentukan oleh jumlah penduduk usia sekolah yaitu umur 5-19 tahun yang menyebar dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Atas dasar ini penduduk usia sekolah ada kurang lebih 13,5%. Hal ini bila dikaitkan dengan sarana dan prasarana pendidikan yang ada sudah cukup memadai karena jumlah Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ada 698 yang menyerap 128.672 murid (tabel II.7), dan terdapat 34 perguruan tinggi swasta.

4. Keadaan Fisik

Seperti diketahui Kotamadya Yogyakarta yang mempunyai luas 32,50 km², wilayahnya sangat padat dengan bangunan-bangunan fisik seperti tempat tinggal, bangunan-bangunan pertokoan, rumah-rumah makan, hotel, banmngunan-bangunan perkantoran, rumah sakit, sekolahan, dan tempat-tempat perdagangan, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat ibadah, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa di wilayah tersebut sulit ditemui wilayah-wilayah yang masih terbuka. Bahkan di daerah-daerah pinggiran, pada lahan tanah persawahan yang subur banyak diubah menjadi tempat-tempat permukiman.

Padatnya rumah-rumah tempat tinggal penduduk menyebabkan tata letak bangunan rumah banyak yang tidak teratur. Artinya hadap rumah tidak jelas polanya dan jarang memiliki halaman cukup. Keadaan tersebut khususnya terdapat di kampung-kampung.

Seiring dengan kepadatan penduduk yang tinggi di Kotamadya Yogyakarta, sarana dan prasarana transportasi pun dibuat cukup memadai. Jalan-jalan utama atau jalan besar maupun jalan-jalan kecil banyak yang sudah beraspal dengan kondisi baik. Sampai tahun 1990 jalan yang beraspal mencapai 219.475 Km panjangnya dan yang masih dalam kondisi baik ada 200.604 km (tabel II.8 dan II.9). Selebihnya berupa jalan krikil campur tanah yang panjangnya kurang lebih 10 km dan jalan yang dalam kondisi rusak 5 km lebih.

Masalah padatnya penduduk berpengaruh pula terhadap penyediaan kebutuhan akan air bersih dan penerangan (listrik). Seperti di ketahui masalah penyediaan sumber air bersih menjadi masalah yang mendesak di daerah-daerah perkotaan, khususnya di kota-kota besar. Padatnya penduduk, padatnya bangunan-bangunan fisik dan banyaknya permukaan tanah yang ditutupi semen, atau kurangnya tempat-tempat terbuka, sering menimbulkan pencemaran air tanah, menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas air tanah. Air minum untuk keperluan penduduk Kotamadya Yogyakarta sebagian besar dipenuhi dari penyaluran air yang disalurkan dari Kaliurang, dan air dari sumur-sumur galian. Menurut beberapa sumber disebutkan bahwa Yogyakarta sendiri sekarang ini sudah dalam kondisi mengalami penurunan air tanah.

Masalah kebutuhan akan penerangan (listrik) sekarang ini sudah menjangkau ke pelosok-pelosok, khususnya didaerah perkotaan hampir semua sudah ada listrik. Kebutuhan penerangan tersebut sebagian dipenuhi

dari PLTA (Pusat Listrik Tenaga Air) dan sebagian dari PLTD (Pusat Listrik Tenaga Diesel) yang pusatnya berada di Yogyakarta.

Untuk menunjang kebersihan dan keindahan kota, di wilayah ini dilengkapi dengan sarana-sarana kebersihan seperti bak-bak sampah permanen, tempat-tempat pembuangan sampah berupa container yang menyebar terletak di sudut-sudut kota. Tempat pembuangan lainya berupa tong-tong sampah yang diletakan di pinggir-pinggir jalan. Untuk memudahkan pengangkutan juga disediakan armada truk yang mengangkut sampah-sampah tersebut setiap hari kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sementara itu di tempat-tempat tertentu ada taman-taman terbuka yang ditanami dengan tanaman hias untuk keindahan kota. Di sepanjang jalan, trotoar-trotoar diperlebar untuk menambah kenyamanan pejalan kaki. Di samping taman-taman untuk rekreasi tersedia tempat-tempat hiburan lainya seperti Kraton, Tamansari, Kebun Binatang GembiraLoka, Museum Sonobudoyo, Museum Yogya Kembali, Benteng Vredeburg, dan sebagainya serta bioskop.

Masalah transportasi dan komunikasi pun tersedia cukup memadai. Kendaraan angkutan umum tersedia cukup banyak untuk melayani kepentingan warga ke segala penjuru. Fasilitas lainya yaitu untuk mempermudah komunikasi di setiap tempat di sepanjang jalan kota tersedia tempat-tempat telepon umum.

Untuk memperlancarkan perekonomian dan melayani kebutuhan sehari-hari warga kota, disediakan pasar yang menjadi pusat jual beli. Pasar dengan segala fasilitasnya menyediakan berbagai keperluan warga kota, misalnya Pasar Beringinharjo, Pasar Terban, Pasar Demangan, Pasar Sentul dan sebagainya yang jumlahnya mencapai 31 pasar. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan yang lain tersedia pusat-pusat pertokoan seperti di sepanjang Malioboro, Jalan Sala, Jalan Simanjuntak dan sebagainya.

Tempat pelayanan kesehatan juga tersedia lebih dari cukup. Puskesmas-puskesmas yang tersedia di setiap kecamatan melayani perawatan kesehatan penduduk dengan biaya ringan. Di samping itu rumah sakit- rumah sakit tersedia cukup memadai untuk melayani kesehatan masyarakat seperti RS Panti Rapih, RS PKU muhamadiyah, Bethesda dan masih banyak lagi rumah sakit ataupun klinik yang tersebar di beberapa tempat.

5. Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya

a. Kehidupan Ekonomi

Seperti diketahui kondisi ekonomi suatu daerah mempengaruhi tingkat kemakmuran warga. Tingkat kemakmuran warga itu dapat dilihat dari tiga kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang, papan (rumah). Masalah papan atau rumah merupakan kebutuhan penting. Melalui bentuk rumah dapat diketahui kondisi perekonomian penduduk yang bersangkutan.

Pada umumnya rumah-rumah penduduk di Kotamadya Yogyakarta sudah permanen dengan bermacam-macam bentuk arsitektur modern maupun tradisional. Namun begitu di wilayah-wilayah tertentu masih banyak rumah-rumah dengan kondisi kurang memadai baik dilihat mewah maupun bahan-bahannya sangat sederhana (dari bambu).

Biasanya di lingkungan perkampungan seperti itu sanitasi maupun kebersihan lingkungan kurang mendapat perhatian, terutama di lingkungan perkampungan dekat sungai. Sarana-sarana untuk menunjang lingkungan bersih dan sehat masih kurang. Hal ini berkaitan dengan kondisi perekonomian mereka yang umumnya pas-pasan, sehingga sebagian besar waktunya digunakan untuk mencari nafkah.

Sebenarnya kondisi perkampungan (rumah) seperti ini tidak hanya di daerah dekat sungai, tetapi ada juga di wilayah-wilayah lain yang padat penduduknya. Pada umumnya rumah-rumah berhimpitan, sehingga halaman rumah rata-rata sempit, bahkan tidak ada. Biasanya halaman rumah merangkap juga sebagai jalan umum. Tempat pembuangan limbah kurang terpelihara, bahkan banyak yang dibuang di tempat-tempat terbuka. Jamban atau WC pada umumnya sudah ada yang memiliki tetapi kurang terpelihara, dan sebagian penduduk yang berdiam di dekat sungai memanfaatkannya sebagai tempat buang air besar.

Di beberapa tempat terdapat permukiman yang berupa kompleks perumahan elit seperti kompleks perumahan Baciro, Demangan Baru, Kota Baru, Sagan, rumah-rumah di pinggir jalan dan sebagainya. Bentuk maupun tata letak rumah tertata dengan baik dan rapi. Lingkungan bersih dan terpelihara, dan penghuninya sebagian besar adalah golongan ekonomi mapan. Demikian juga kompleks-kompleks perumahan milik pemerintah seperti perumahan Gedung Agung, perumahan Bank Indonesia, dan sebagainya.

Kebutuhan pokok lainya yaitu pangan (makan) dan sandang (pakaian). Kedua kebutuhan ini telah terpenuhi dengan baik, artinya tidak ada kekurangan. Kebutuhan akan sandang dan pangan dari yang harga

murah sampai mahal tersedia cukup banyak. Dengan kata lain bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan makan maupun pakaian terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Dilihat dari kondisi perekonomian penduduk, kebutuhan pangan dan sandang dapat dikonsumsi dengan tanpa banyak kesulitan. Hal ini bisa dilihat dari sirkulasi penjualan pakaian maupun pangan yang nampaknya tidak mengalami kemacetan. Bisa dilihat juga dari banyaknya pertokoan maupun pasar, rumah makan yang menyediakan kebutuhan penduduk tersebut.

Tinggi rendahnya taraf hidup masyarakat ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan perkapita, yang juga dipengaruhi oleh jenis mata pencahariannya. Produk Domestik Regional Bruto Kotamadya Dati II Yogyakarta menurut lapangan usaha yang dihitung berdasar harga yang berlaku pada tahun 1989 adalah 331.373 rupiah.

b. Kehidupan Sosial Budaya

Kotamadya Yogyakarta sangat padat penduduk dan mempunyai heterogenitas yang tinggi. Hal ini karena banyaknya pendatang dengan berbagai tujuan ke kota tersebut. Predikat kota Yogyakarta sebagai kota budaya, pendidikan, dan wisata, merupakan salah satu daya tarik bagi para pendatang.

Sebagai salah satu pusat kebudayaan, khususnya budaya Jawa, maka Yogyakarta menjadi tempat pemeliharaan dan pelestarian seni budaya, adat tata cara dan sebagainya. Hal ini didukung dengan adanya Kraton yang pada hakekatnya merupakan pusat budaya Jawa. Sebagai pusat budaya, berbagai seni tradisi dipelihara dan dikembangkan. Di kota ini tumbuh subur kelompok-kelompok kesenian yang kurang lebih jumlahnya sekitar 856 kelompok kesenian.

Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pendidikan. Di kota ini berkumpul suku-suku bangsa dari segala penjuru tanah air untuk menuntut ilmu. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya organisasi pelajar dan mahasiswa daerah yang terdapat di kota ini, yaitu 26 asrama pelajar dan mahasiswa dari 27 propinsi. Masih ditambah lagi banyaknya pemondokan yang tersebar di banyak tempat. Predikat kota pendidikan bisa dilihat juga dari jumlah sekolah (tabel II.7) dan jumlah perguruan tinggi yang ada yaitu 34 yang menyerap sekitar 50.089 mahasiswa dari seluruh pelosok tanah air. Demikian juga kursus-kursus singkat tersebar di mana-mana. Di kota ini pula terdapat pendidikan kesenian dan lembaga-lembaga kesenian lainnya.

Disebut sebagai kota wisata, karena kota Yogyakarta kaya akan potensi kepariwisataan baik sejarah, budaya maupun alam. Obyek-obyek wisata yang banyak di kunjungi adalah Kraton Yogyakarta, Kotagede, Tamansari, Museum Sonobudoyo, dan Maliobro yang sarat dengan barang souvenir, serta lesehan pada waktu malam hari.

Seperti diketahui kota Yogyakarta sangat padat yang di perkirakan kepadadatan tersebut antara lain di pengaruhi oleh banyaknya para pendatang yang datang ke kota tersebut. Para pendatang tersebut berbaur menjadi satu dengan penduduk asli, beradaptasi dengan adat dan budaya masyarakat setempat. Terjadi interaksi melalui kegiatan sosial seperti gotong-royong untuk kebersihan lingkungan, memperbaiki saluran-saluran air, kegiatan ronda. Kegiatan-kegiatan sosial tersebut menjadi tempat arena pertemuan untuk saling berinteraksi. Di samping itu melalui pertemuan - pertemuan secara rutin yaitu arisan, perkumpulan muda-mudi merupakan suatu kesempatan untuk saling mengenal dan berbincang, sehingga terjalin hubungan yang akrab saling menghormati.

Hubungan kerjasama antar warga juga di tunjukan pada saat memperingati hari-hari besar nasional dengan mengadakan pentas seni, olah raga, dan sebagainya yang semuanya itu menunjukan adanya persatuan dan kesatuan. Adakalanya di pentaskan kesenian daerah tertentu pada kesempatan tertentu, sehingga hal ini dapat menambah wawasan budaya mereka.

Interaksi antar warga juga terjadi pada saat mendatangi suatu perhelatan, sumbang-menyumbang, tolong menolong pada mereka yang sedang kena musibah dan sebagainya, yang semuanya itu menunjukan tingkat kerukunan warga.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Seperti telah di sebutkan bahwa daerah penelitian ini adalah Kelurahan Terban, wilayah Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya Yogyakarta. Berikut ini berbagai potensi yang di miliki Kelurahan Terban.

1. Letak Dan Luas Daerah

Kelurahan Terban merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gondokusuman yang terletak di wilayah Yogya Utara pada ketinggian kurang lebih 115 m diatas permukaan laut. Luas wilayah Kelurahan Terban 79,7244 hektar (7,9724 km), dan terdiri dari tanah untuk pekarangan seluas

30,05 hektar, untuk perdagangan/pertokoan 2 hektar, jalur hijau 0,2 hektar, perkantoran 1 hektar, pasar 0,3 hektar, wakaf 0,05 hektar, tanah perkuburan 0,5 hektar, dan jalan-jalan 5,5 km sisanya untuk perumahan.

Secara administratif, wilayah Kelurahan Terban dibatasi sebelah utara Desa Catur Tunggal, Kabupaten Sleman, sebelah selatan Kelurahan Kota Baru, sebelah barat Kelurahan Cokrodingratan, dan sebelah timur Kelurahan Klitren. Wilayah Kelurahan Terban terbagi menjadi 11 Rukun wilayah (RW), dan 60 Rukun Tetangga (RT). Rukun Wilayah (RW) dan Rukun Tetangga (RT) tersebut secara keseluruhan terbagi menjadi 4 (empat) wilayah lingkungan yaitu : Lingkungan I Terban Sari yang terdiri dari RW I-III (15 RT) ; Lingkungan II Terban Taman yang terdiri dari RW IV-VI (14 RT); Lingkungan IV Purbonegaran terdiri dari RW X-XI (11 RT). Batas- batas RW maupun RT ditandai dengan batas-batas jalan lingkungan, tembok penduduk, dan berupa petunjuk-petunjuk yang dibuat dari papan kayu. Sedangkan batas alam Kelurahan Terban berupa batas sungai yaitu di sebelah barat oleh Sungai Code dan di sebelah timur Sungai Belik.

Kelurahan Terban terletak pada jalur lalu-lintas yang cukup padat yaitu Jalan Jendral Sudirman, Jalan Simanjuntak, Jalan Cik Di Tiro. Jarak dari Kelurahan Terban ke pusat pemerintahan kecamatan $\pm$ 2 km, ke ibukota kabupaten /kotamadya $\pm$ 3.5 km dan jarak ke ibukota propinsi 3 km. Untuk mencapai ke wilayah ini sangat mudah, karena bisa ditempuh dengan bus kota, becak dan angkutan lain. Transportasi mudah dan lancar, karena terletak pada jalur jalan utama yang dilewati angkutan umum dari berbagai jurusan. Prasarana perhubungan yang dimiliki berupa jalan lingkungan 3 km, jalan kelurahan 6 km, jalan protokol 0,5 km. dan jalan propinsi 1,75 km.

2. Keadaan Alam

Kelurahan Terban terletak pada daerah dataran rendah, dengan tipe tanah regosol. Wilayah dilewati dua sungai yaitu Sungai Belik dan Sungai Code. Adanya Sungai Code ini memberikan arti tersendiri bagi Kelurahan Terban, yaitu dari segi sanitasi dan lingkungan.

Kelurahan Terban mempunyai terletak pada ketinggian sekitar 115 meter diatas permukaan laut, bercurah hujan 2000/3000 milimeter pertahun dan suhu udara rata-rata 22°-34° celcius.

PERPUSTAKAAN SEKRETARAT DJENBUD
No. INDIK
TGL. CATAT.

3. Penduduk

Menurut Sensus 1990, jumlah penduduk Kelurahan Terban 12.331 jiwa yang terdiri dari 5.855 penduduk laki-laki dan 6.476 penduduk wanita (tabel II.10). Dilihat dari luas wilayah Terban 7,9724 km, maka kepadatan penduduknya 15.467 jiwa. Jumlah Rumah Tangga menurut Sensus 1980 ada 2783 dan meningkat menjadi 4194 pada sensus 1990. Akan tetapi rata-rata anggota rumah tangga lebih kecil yaitu 2.94, sedang pada waktu Sensus 1980 rata-rata anggota rumah tangga 4.51 (tabel II.11).

Distribusi penduduk di Kelurahan Terban menurut umur, mengelompok pada umur 15-29 tahun sebesar 6698 (54,3%). Sedangkan penduduk usia balita (0-4) ada 622 (5,0%). Penduduk usia muda (0-9) ada 1310 (10,6%), dan usia (10-24) sebesar 5923 (48,0%).

Dengan demikian penduduk usia muda (0-24) ada 58,7% dari jumlah penduduk Kelurahan Terban. Angka beban ketergantungan penduduk Kelurahan Terban yaitu 26. Berarti dari 100 orang yang produktif menanggung 26 orang yang tidak produktif. Dengan kata lain dilihat dari angka ini menunjukkan indikator tingkat ekonomi yang cukup baik.

Menurut Sensus 1980 penduduk Kelurahan Terban sebesar 12.554 dan dari hasil Sensus 1990 12.331. Dari hasil sensus tersebut (1980 dan 1990) ternyata ada penurunan jumlah penduduk. Dari data tersebut dapat diketahui laju pertumbuhan penduduk Kelurahan Terban yaitu -0.18 (tabel II.12).

Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh adanya kelahiran, penduduk yang datang, penduduk yang pergi dan yang mati. Berdasarkan data yang ada di Kelurahan jumlah penduduk bulan Januari 1991 ada 13.312. Penduduk yang lahir dan yang datang selama periode tahun 1991 (Januari-Desember) ada 758 orang (5,6%) dengan rincian penduduk yang pergi dan yang mati ada 511 orang terdiri dari penduduk yang pergi 440 dan yang mati 71 (tabel II.13).

Potensi ketenagakerjaan di Kelurahan Terban bila dilihat dari tabel II.13, diketahui penduduk yang berumur 10 tahun ke atas (Sensus 1971) ada 10.241 atau 83,0%. Bila dihitung dengan menggunakan batasan yang lazim 15-64 tahun sebanyak 9755 (79,1%). Bila dilihat dengan batasan usia kerja yang dianggap produktif yaitu umur 15-49 tahun, maka penduduk yang masuk kategori usia produktif ada 8764 orang (71,1%). Jelas di sini bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Terban berpotensi sebagai tenaga kerja dalam usia produktif.

Potensi penduduk Kelurahan Terban dilihat dari usia pendidikan (dari monografi Kelurahan 1991) diketahui ada 3582) orang (5-19 tahun) atau 29%. Sarana untuk kebutuhan pendidikan sudah cukup memadai yaitu sekolah Taman Kanak-kanak ada 5 buah, sekolah dasar negeri maupun swasta ada 4 buah, SMTP negeri dan swasta 4 buah, dan SMTA negeri maupun swasta 6 buah. Jadi secara keseluruhan ada sekolah negeri 7 buah dan swasta 12 buah.

4. Keadaan Fisik

Seperti telah di sebutkan di muka, bahwa ada beberapa jenis bangunan di lihat dari kelompok masyarakat antara lain kelompok elite, kelompok kampung. Jenis bangunan pada kelompok elite pada umumnya bangunan dengan arsitektur moderen, di wilayah Kelurahan Terban misalnya di Sagan, Jalan Jendral Sudirman, Cik Di Tiro, Simanjuntak. Pada kelompok masyarakat ini, pada umumnya rumahnya sudah tertata rapi. Lingkungan kebersihan maupun kesehatannya terpelihara. Artinya saluran-saluran limbah terselenggara dengan baik, demikian juga pembuangan sampah. Jalan-jalan umum di wilayah tersebut cukup rapi dan di perkeras dengan semen. Tata letak rumah teratur demikian juga jalan-jalan arahnya jelas.

Pada kelompok masyarakat yang menempati wilayah kampung, khususnya di pinggir wilayah Sungai Code pada umumnya rumah-rumah kurang baik. Tata letak rumah kurang teratur, demikian juga arah jalan-jalan tidak teratur. Oleh karena padatnya permukiman, terkesan agak pengap. Saluran-saluran limbah yang ada kurang terpelihara, bahkan banyak limbah yang di buang di tempat terbuka. Fasilitas pembuangan sampah tidak ada, sehingga banyak penduduk di dekat aliran Sungai Code membuang sampah di pinggir sungai tersebut. Di samping itu banyaknya rumah yang berhimpitan menyebabkan jalan- jalan menjadi sempit. Jalan-jalan tersebut berfungsi juga sebagai halaman rumah mereka. Pada malam hari, meskipun ada penerangan listrik suasananya tetap gelap, karena tidak meratanya penerangan di gang-gang kecil di wilayah tersebut.

Peduduk di wilayah tersebut, banyak yang mengambil air bersih di sumur dekat rumah mereka, atau sebagian ada yang mandi-mencuci di dekat-dekat sungai. Di pinggir aliran sungai Code banyak terdapat sumber air maupun sumur yang di maanfaatkan penduduk sekitarnya untuk mandi-mencuci.

Di wilayah permukiman sekitar jalan Simanjuntak tersedia pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, demikian juga sederetan toko-toko. Di wilayah Terban kurang lebih terdapat 60 toko, 52 warung, 2 pasar swalayan, dan 47 pedagang kaki lima. Di wilayah tersebut terdapat juga subterminal bagi angkutan umum jurusan kaliurang dan Prambanan. di dekat sub-terminal tersebut terdapat setasiun pompa bensin.

Kompleks pertokoan di wilayah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan dari kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan lainnya seperti mebel, lampu, material bangunan, rumah makan, foto copy, bengkel, dan beberapa kaki lima yang menjual makanan-minuman di pinggir jalan. Demikian juga wilayah di daerah Purbonegaran dekat jalan Solo.

Wilayah Terban juga dekat dengan fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit Panti Rapih, yang sebagian Dokter-dokternya bermukim di wilayah Terban. Rumah sakit lainnya yang agak dekat yaitu rumah Sakit Bethesda, Rumah sakit Mata Yap, apotik jadi fasilitas kesehatan jadi tidak kesulitan.

5. Kehidupan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

a. Kehidupan Ekonomi

Dilihat dari lingkungan permukiman di wilayah Terban ada tiga kelompok. Kelompok pertama yang kondisi rumahnya baik, terpelihara, merupakan kelompok-kelompok permukiman elite seperti di daerah Sagan, sepanjang jalan Simanjuntak, Jala. Jendral Sudirman, Cik Di Tiro dan sebagainya. Gaya hidup mereka lain dengan mereka yang bermukim di dekat sungai Code, atau mereka yang hidup di kampung-kampung lainya. Jelas hal ini berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Tingkat konsumsi mereka tinggi, dan kelompok inilah yang bisa menikmati fasilitas-fasilitas umum yang tersedia seperti tempat-tempat hiburan yang agak mahal, berbelanja ke toko-toko swalayan dan sebagainya. Perekonomian mereka rata-rata kondisinya sudah mapan.

Kelompok ke dua yang bermukim di tengah yaitu di kampung-kampung dengan kondisi rumah yang beraneka ragam. Di sini mereka yang perekonomiannya agak baik cukup menonjol di antara yang lainnya. Biasanya kondisi rumah agak baik di dibandingkan dengan yang lainnya. oleh sebab itu di tempat-tempat permukiman seperti ini kadang-kadang ada kesenjangan tingkat kehidupan yang mencolok. Hal ini karena berbagai macam mata pencaharian, dengan tingkat pendapatan yang berbeda. dengan demikian tingkat konsumsi mereka berbeda. Beberapa di antara mereka ada yang mampu memanfaatkan fasilitas yang ada seperti pergi ke tempat-tempat

hiburan, belanja ke toko-toko yang besar, makan di rumah-rumah makan dan sebagainya. Sebagaimana lagi tidak mampu membeli sesuatu, bahkan untuk makan saja kesulitan. Jadi disini kondisi tingkat perekonomiannya tidak sama.

Kelompok ke tiga adalah mereka yang sebagian besar bermukim di aliran sungai Code. Di wilayah ini boleh dikatakan sebagian besar warganya mempunyai profesi yang tingkat pendapatannya kurang lebih sama. Oleh sebab itu kondisi rumah rata-rata hampir sama. Pada umumnya kehidupan sehari-harinya disibukan untuk mendapatkan pengasilan yang cukup bagi hidup keluarganya. Jadi jelas bahwa kondisi perekonomian mereka pas-pasan.

Sebagian besar penduduk wilayah Terban bermata pencaharian sebagai pedagang atau wiraswasta. wiraswasta dilakukan dengan membuka warung, jualan di pasar, tikang parkir, kernet, sopir, montir, penjaga malam, penjaga toko/pelayan toko, tikang jam, buruh bangunan, buruh seterika. Sebagain lagi sebagai pegawai negeri, ABRI, dan pensiun:serta pemberi jasa.

b. Kehidupan Sosial dan Budaya

Di wilayah kelurahan Terban kebersamaan antar warga terselenggara lewat pertemuan-pertemuan yang di adakan kelurahan, maupun lewat RW, RT di lingkungan masing-masing. Pertemuan yang di adakan ada yang bersifat formal, artinya di adakan karena ada instruksi dari pemerintah kelurahan, dan yang bersifat informal yaitu atas prakarsa salah satu tokoh atau pemuka masyarakat di daerah tersebut. Misalnya pertemuan warga setempat setiap Jum'at Kliwon (disebut Kliwonan), pembicaraan masaalah umum atau situasi lingkungan, kadang-kadang membicarakan instruksi baru dari pemerintah kelurahan. Di sini dalam pertemuan tersebut ada sambung rasa antar warga.

Di wilayah-wilayah yang rumahnya berhimpitan atau di kampung-kampung, setiap saat warga bisa saling bertemu, berbicara, bertandang. Mereka tidak kesulitan melakukan komunikasi, karena letaknya berdekatan. Interaksi bisa terjadi setiap waktu, setiap saat. Intensitas pergaulan antara warga frekuinsinya cukup tinggi, sehingga kadang-kadang terjadi kesalahfahaman. Akan tetapi dalam kehidupan tolong menolong pada kesempatan-kesempatan seperti khitanan, perkawinan, kematian, ada musibah dan sebagainya berjalan dengan baik. Demikian juga kerjasama dalam gotong royong kebersihan, memperbaiki saluran-saluran, jalan, siskamling, berjalan cukup lancar.

Cerminan dari kebersamaan dan rasa persatuan mereka juga terealisasi lewat pentas-pentas seni bersama pada waktu memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan, Sumpah Pemuda, dan sebagainya yang berujud keroncong, ketoprak, tarian dan sebagainya merupakan sarana komunikasi antar warga.

Sebaliknya di wilayah yang lingkungannya tidak seperti di kampung (daerah elite), terjadinya komunikasi antar warga hanya pada saat atau pada waktu tertentu. Mereka jarang bertemu, atau saling menyapa setiap saat. Interaksi terjadi hanya kalau ada keperluan dan sepele, misalnya tetangga di lingkungannya ada yang sedang mengadakan khitanan, perkawinan, ulang tahun atau lainnya.

Kegiatan-kegiatan siskamling, gotong royong lingkungan dan sebagainya biasanya berjalan kurang lancar. Pada umumnya mereka sibuk dengan urusan pribadi. Namun demikian untuk urusan lainnya cukup lancar, misalnya bantuan baik moril maupun materil.

C. BERBAGAI PERMASALAHAN KOTA

Kota, dikenal sebagai wilayah yang padat penduduknya dan tempat terjadinya proses urbanisasi yang tidak pernah berhenti. Heterogenitas masyarakatnya yang tinggi, memberikan permasalahan-permasalahan tersendiri bagi kota tersebut. Kemampuan kota untuk menampung berbagai kepentingan warganya, dipengaruhi oleh daya dukung yang dimiliki kota. Sarana dan prasarana yang cukup memadai harus tersedia untuk melancarkan kegiatan kota. Aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis diberlakukan untuk menyelenggarakan suatu kehidupan masyarakat yang teratur.

Kota Yogyakarta yang mempunyai sebagai predikat kota pendidikan, budaya, dan kota wisata, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Membanjimnya para pendatang di kota ini, sedikit banyak juga ikut menambah kesemrawutan kota, dan berbagai permasalahan-permasalahan lainnya yang memerlukan penanganan khusus.

Lancarnya dinamika kehidupan kota sangat dipengaruhi oleh kepatuhan warga masyarakatnya di dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan maupun aturan-aturan yang ada. Semuanya itu dibutuhkan disiplin dan rasa tanggung jawabnya sebagai warga yang tinggi. Hal ini tidaklah gampang, mengingat adanya keanekaragaman penduduk dari berbagai suku bangsa

yang membawa adat dan budayanya sendiri-sendiri (26 suku bangsa dari 27 propinsi).

Keanekaragaman penduduk tidak hanya diwarnai dari adanya berbagai suku bangsa, tetapi juga adanya kelompok-kelompok sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda. Heterogenitas masyarakatnya yang tinggi inilah, yang menyebabkan Kotamadya Yogyakarta sarat dengan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pemecahan secara bijaksana. Permasalahan yang cukup penting untuk dicarikan jalan pemecahannya antara lain masalah sampah, masalah lalu lintas, kriminalitas, banyaknya pendapat yang memusat di kota, pencemaran lingkungan, pedagang kaki lima, dan sebagainya.

1. Masalah Lalu-Lintas

Kota Yogya yang relatif sempit ($32,50 \text{ km}^2$) banyak menanggung beban dengan adanya wilayah-wilayah permukiman yang semakin padat, juga berkembangnya kompleks-kompleks pertokoan, perkantoran, dan sebagainya. Daerah-daerah permukiman baru terus berkembang, sehingga daerah-daerah persawahan atau tempat-tempat terbuka semakin sempit dan banyak yang beralih fungsi. Sementara itu jalan-jalan pun padat kendaraan, sehingga menambah semakin semrawutnya kota Yogya.

Semrawutnya lalu-lintas di kota Yogyakarta disamping karena jumlah kendaraan roda dua maupun empat semakin meningkat, juga diikuti tidak adanya sikap disiplin dari para pengguna jalan. Kesadaran untuk mentaati peraturan berlalulintas serta prasarana yang ada yaitu rambu-rambu, marka dan sebagainya masih kurang, sehingga sering terjadi kecelakaan yang sebetulnya bisa dihindari. Pelanggaran-pelanggaran lalu-lintas sebagian besar dilakukan oleh pelajar maupun mahasiswa (Bernas, 27 April 1992). Disamping itu banyak yang memarkir kendaraan dengan seenaknya, bus umum menaikan dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya, berbaunya kendaraan mesin dengan non mesin (becak, sepeda, andong) dan sebagainya, semuanya itu menambah kesemrawutan lalu- lintas di kota tersebut.

Padatnya lalu-lintas meningkat terutama pada pagi hari dan siang hari. pada saat-sat itu para pelajar, mahasiswa, pegawai saling berebut jalan ingin mendahului. Sementara itu para penglaju dari luar kota baik pelajar, pegawai, pedagang, buruh yang banyak menggunakan sepeda, dan sebagian pedagang menggunakan andong (kerta kuda) menambah

keruwetan lalu-lintas. Apalagi biasanya mereka ini menaiki sepedanya berbanjar tiga sampai empat sepeda.

Disamping itu meningkatnya jumlahnya kendaraan, membawa konsekuensi pada kebutuhan tempat parkir yang memadai ikut menjadi penyebab terjadinya kesemrawutan lalu-lintas.

2. Masalah Kriminalitas

Masalah kriminalitas yang sering terjadi yaitu gangguan keamanan berupa penjambrutan, pencopetan, penganiayaan, dan perkelahian. Yang terakhir ini (perkelahian) banyak melibatkan para remaja atau pelajar dan mahasiswa. Tindakan yang tidak bertanggung jawab dilakukan pula oleh kelompok ini yaitu adanya aksi coret-coret tidak hanya di gedung-gedung perkantoran, toko-toko, rumah-rumah pribadi penduduk, tetapi sudah berani melakukan pada bangunan-bangunan bersejarah yang sering dikunjungi wisatawan, selain itu slogan kebersihan dan ketertiban juga menjadi sasaran aksi corat-coret tersebut. Tindakan mereka ini jelas tindakan yang tidak berdisiplin, karena bagaimanapun di tempat-tempat bersejarah tersebut, selalu ada papan-papan peringatan untuk tidak mengganggu ataupun melakukan tindakan yang merugikan.

Tindakan-tindakan yang bersifat kekerasan seperti penodongan, perampokan, pencurian, bahkan pembunuhan juga melibatkan anak-anak remaja. Misalnya pencurian bensin yang dilakukan oleh seorang pelajar SMTP dan SMTA (Kedaulatan Rakyat, 2 April 1992), 6 pemuda diamankan polisi karena diketahui membawa 40 butir obat daftar G tanpa ijin. Pemuda tersebut ditangkap dalam Operasi Keris II di Jalan Urip Sumoharjo (Bemas, 24 November 1992); seorang pelajar SMA dididuk ketika akan menjual sepeda motor yang dicuri (Bemas, 24 November 1992), kemudian banyaknya curanmor (pencurian kendaraan bermotor), dan masih banyak lagi.

3. Masalah Pendatang

Wilayah kota yang semakin sempit setiap tahunnya dibanjiri oleh pendatang yang ingin menuntut ilmu di kota ini. Arus pendatang tersebut membawa konsekuensi pada semakin padatnya penduduk, dan kemudian berdirinya permukiman-permukiman baru, perluasan bangunan rumah untuk usaha pemondokan dan sebagainya, sehingga menambah semakin padatnya kota. Disamping itu oleh latar belakang sosial budaya yang

berbeda kadang-kadang menimbulkan permasalahan-permasalahan tersendiri.

Banyaknya pendatang dari berbagai penjuru nusantara tersebut ada sebagian yang menyebar, membaaur tinggal bersama-sama penduduk asli Yogya, atau bersama-sama dengan pendatang lain; atau mengelompok di daerah-daerah tertentu, misalnya ada yang menempati wilayah tertentu yang dikenal sebagai kampung Madura, atau mengelompok dalam asrama-asrama berdasarkan kesukuan atau asalnya misalnya Asrama Mahasiswa Kalimantan, Asrama Mahasiswa Aceh, Asrama Mahasiswa Irian Jaya dan sebagainya. Asrama-asrama tersebut menyebar yang jumlahnya ada 26 asrama mahasiswa dari seluruh pelosok Nusantara. Di kampung-kampung mereka ada yang menyewa satu rumah yang ditempati mahasiswa/pelajar dari daerah yang sama, atau ditempati karena mempunyai profesi yang sama misalnya penjual bakso dari Gunung Kidul, penjual mi ayam dari Wonogiri, ada lagi penjual-penjual sate dari Madura, mindring (penjual keliling) dari Jawa Barat dan sebagainya.

Usaha pemondokan berkembang dengan pesat, usaha ini cukup potensial untuk menambah kebutuhan bahkan keuntungan. Usaha pemondokan belum diatur dalam peraturan yang baku, sehingga pemondokan kurang dan tidak ada yang mengawasi. Podokan sangat memungkinkan terjadinya pertemuan antara tradisi kedaerahan, sehingga membuka cakrawala budaya yang luas. Di lain pihak pondokan sangat memungkinkan terjadinya masalah moral yang rawan, misalnya ada kumpulan kebo.

Padatnya penduduk, banyaknya pendatang menambah beban, pada penyediaan sarana maupun prasana yang harus disediakan oleh kota. Pada hal daya dukung yang dimiliki kota sangat terbatas. Hal-hal inilah yang harus dicari jalan pemecahannya, karena bagaimanapun kota khususnya Kotamadya Yogyakarta akan tetap dibanjiri pendatang. Biasanya fasilitas-fasilitas seperti gedung sekolah, toko-toko besar, tempat-tempat hiburan, rumah-rumah sakit dan sebagainya menumpuk di kota.

4. Kebutuhan Air Bersih

Banyaknya pemukiman, kompleks pertokoan, kantor-kantor, yang didirikan di atas lahan persawahan yang subur menambah permasalahan, karena dengan semakin berkurangnya tempat-tempat terbuka kebutuhan akan air tanah sulit didapatkan. Diperkirakan kebutuhan air tanah daerah Kodya Yogyakarta mencapai 40.000 m³/tahun. Menurut data geohidrologi,

daerah Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah hamparan pasir yang bisa menampung air tanah. Akan tetapi bila dieksploitasi terlalu berlebih dan tidak ada pemeliharaan akan terjadi kerusakan (Bernas, 3 maret 1991).

Kota Yogyakarta di lalui oleh dua sungai yang aliran sungai itu melalui daerah permukiman, sehingga kedua sungai tersebut menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga. Kedua sungai itu, Winongo dan Code, sama-sama terkena proyek Prokarsih (Program Kali Bersih). Dilaporkan bahwa sungai Winongo berkondisi paling buruk (Bernas, 21 April 1992). Hal tersebut karena jumlah penduduk di kawasan sepanjang sungai Winongo tertinggi di Yogyakarta. Dari hasil penelitian PPLH-UGM di temukan bahwa memburuknya kondisi sungai Winongo tidak terlepas dari perilaku penduduk di kawasan sungai tersebut yaitu banyak membuang hajat di sungai tersebut (40,2%0, dan membuang sampah. Di samping itu diperburuk adanya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampai yang letaknya di pinggiran sungai Winongo yang setiap harinya menampung 750 ton sampah, juga adanya peternakan babi, pabrik makanan kalengan, pabrik kerupuk, rumah makan, dan sekitar 100 industri rumah tangga yang sebagian limbahnya di buang ke sungai.

Sementara itu kualitas air sungai Code pun telah di teliti. baik Sungai Code, Sungai Winongo dan sungai lainnya yang ada di kota, mempunyai kecendrungan penurunan kualitas air. Dari hasil penelitian Sugeng Martopo tentang pro-kasih di sungai Code (Bernas, 23 November 1992) jumlah bakteri Coligrup dari arah hulu ke hilir semakin banyak. Di samping itu hasil analisis bakteorologie air sumur di sekitar lokasi sungai Code menunjukan bahwa jumlah bakteri Coligrup meningkat. Pencemaran air sungai dan sumur sekitar aliran sungai ini berdampak bagi masyarakat bersangkutan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa ada yang terkena penyakit diare (menduduki peringkat 6 dan 3). semua itu tidak terlepas dari kedisiplinan warga dalam ikut menjaga kebersihan. Perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan itu menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air. Walaupun sudah ada anjuran ataupun larangan untuk tidak menggunakan sungai sebagai tempat untuk melakukan berbagai kebutuhan, akan tetapi karena buruknya kondisi lingkungan dan kurang adanya kesadaran maka hal tersebut sulit terlaksana.

5. Masalah Sampah

Masalah sampah di kota merupakan masalah yang tidak pernah ada habisnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi masalah sampah. Akan tetapi pada kenyataannya volume sampah setiap harinya semakin bertambah. Usaha mengangkut sampah-sampah yang menumpuk tersebut ternyata tidak bisa tuntas. Artinya masih ada sisa-sisa sampah yang tidak bisa terangkut, karena kurangnya sarana dan prasarana. Volume sampah di kota Yogyakarta ini seharinya kurang lebih 1400 m^3 , dari jumlah itu sekitar 400 m^3 tidak bisa terangkut. Sumber-sumber sampah tersebut antara lain dari sampah rumah tangga, pasar, toko, rumah makan, rumah sakit.

Sarana maupun prasarana untuk menampung sampah sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa, yaitu pada sudut-sudut jalan diberi tempat-tempat pembuangan sampah atau TPS (Tempat Pembuangan Sementara). Di sepanjang jalan juga ada tempat-tempat pembuangan sampah untuk mempermudah pejalan kaki membuang sampah. Namun nampaknya kesadaran warga masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih kurang, terbukti masih banyak warga yang membuang sampah seenaknya. Untuk penertiban pembuangan sampah tersebut sudah ada peraturannya, yaitu tertuang dalam Lembaran Daerah Kotamadya nomor 1 Seri B tahun 1985, dan Peraturan Daerah Kotamadya nomor 2 tahun 1984 tentang Pembersihan Sampah. Dalam penjelasan pasal demi pasal, misal pasal 11 disebutkan tentang larangan membuang sampah a) di dalam saluran air hujan, saluran air kotor dan saluran air pembilas, b) di pinggir jalan atau tempat-tempat lain selain di tempat yang telah ditentukan, c) membuang barang-barang tertentu di tempat penampungan sampah, misalnya bongkaran bangunan, pecahan kaca, kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai hewan, buangan industri yang membahayakan lingkungan. Tetapi pada kenyataannya peraturan itu tinggal peraturan, pelanggaran pada ketiga larangan tersebut tetap sering dilakukan warga.

Meskipun pada pasal 12 disebutkan mengenai sanksi denda sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) bagi yang melanggar pasal 11 tersebut, tetapi pada kenyataannya sanksi tersebut belum pernah dijatuhkan kepada pelanggar. Dengan kata lain peraturan tersebut belum dilaksanakan secara tegas. Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh warga tersebut kemungkinan karena mereka tidak tahu adanya peraturan dan sanksi denda tersebut, di samping rasa kesadaran akan kebersihan lingkungan yang rendah.

Pengangkutan sampah di kota ini di samping ditangani oleh DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) juga dilakukan oleh pihak-pihak swasta (Cleaning Service) yang biasanya beroperasi di kompleks pertokoan, bank-bank, hotel, dan sebagainya. Di samping itu ada yang ikut berpartisipasi yaitu Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKL) dengan menyediakan tempat-tempat sampah di tempat umum. Usaha-usaha yang dikelola pihak swasta ini cukup membantu usaha penanggulangan masalah sampah. Pada Perda nomor 2 tahun 1984 pasal 4 tentang pembersihan sampah ditentukan : 1) pelaksanaan pembersihan dan pengelolaan sampah di wilayah Kotamadya Yogyakarta menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat, 2) pelaksanaan pembersihan sampah dalam kampung menjadi tanggung jawab pemerintah kecamatan, kelurahan setempat bersama-sama LKMD dan Rukun Kampung, 3) pengelolaan sampah dalam pasar dan pengangkutannya ketempat pembuangan sampah menjadi tanggung jawab Kepala Jawatan Pasar, 4) pembersihan jalan-jalan umum, pengambilan dan pengangkutan menjadi tanggung jawab Instansi Teknis. Dalam hal ini DKP.

Namun dalam prakteknya pembagian tugas wewenang pembersihan sampah tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan. Misalnya sampah pasar, karena sarana dan prasarana kurang, maka sampah pasar tidak tertangani secara memadai, sehingga kadang-kadang sampah menumpuk dan berbau sampai berhari-hari. Demikian juga pembersihan sampah di jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab dari DKP. Wewenang DKP dalam menjaga kebersihan yaitu jalan-jalan umum, jembatan, taman-taman kota dan lingkungan kantor dalam jajaran Pemda Kodya Yogya. Suasana kerja yang dimiliki DKP yaitu : Roll Trouck 6 buah, Dump Trouck 5 buah, Fixed Trouck 25 buah, Pick Up 3 buah, Bulldoser 2 buah, Container 30 buah, gerobak sampah 58 buah, becak sampah 3 buah, TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ada 141 buah, TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 1 buah seluas ± 2 hektar. Sarana untuk mengelola sampah tersebut dirasa masih kurang, karena kurang lebih 400 m^3 sampah tidak bisa terangkut atau tertampung. Dengan kata lain daya dukung belum memadai, yaitu masih kurang armada pengangkut sampah dan personilnya. Demikian juga kaitannya dengan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di tempat yang telah disediakan dan pada jam-jam yang telah ditentukan masih perlu ditingkatkan lagi.

6. Masalah Pedagang Kaki-Lima

Masalah berkembangnya pedagang kaki lima di kawasan Malioboro, Jalan Samirono -Rahayu menjadi perhatian banyak pihak, terutama Pemda yang langsung menangani masalah tersebut. Populasi pedagang kaki lima semakin lama semakin berkembang, sehingga berkesan semrawut tak tertata. Pada umumnya para pedagang kaki lima menempati sepanjang Jalan Malioboro, Samirono - Rahayu dengan tidak memperhatikan kepentingan umum (pejalan kaki).

Penerbitan terhadap pedagang kaki lima di wilayah Kodya Yogyakarta melalui SK Walikotamadya no 056/KD/1978 dan diperbarul dengan SK no 144/KD/1987, ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Penerbitan tersebut menurut ketentuan yang ada antara lain di tentukan bahwa penggunaan lokasi kaki lima harus masuk ijin, tidak boleh memindahtangankan lokasi jualan, pedagang-pedagang tersebut jam kerjanya dimulai pukul 21.00-04.00 WIB, ukuran tempat jualan maksimal 2x10 cm, tinggi tenda 2 m, alat memasak (kompor/anglo) harus diberi penyangga minimal ± 10 cm dan meyediakan Alat Pemadam Api Cepat (APAC), menjaga kebersihan lingkungan dengan menyediakan tempat pembuangan sampah dan air limbah, larangan menggunakan jalan untuk berjualan dengan membelakangi toko, harus memperhatikan kepentingan umum pejalan kaki.

Penerbitan pedagang kaki lima melalui kedua SK Walikotamadya tersebut adalah untuk membendung semakin semrawutnya pedagang kaki lima di wilayah Kotamadya Yogyakarta, khususnya Malioboro dan Rahayu - Samirono. Namun pada kenyataannya kedua SK tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya. Banyak pelanggaran terjadi, anatara lain banyak dijumpai pedagang kaki lima yang membelakangi toko, dagangannya tidak diatur dengan semestinya samapai jalan menjadi sempit, banyak bermunculan pedagang kaki lima yang liar (tidak berijin), banyak tanaman hias yang mati karena dijadikan tempat pembuangan limbah, banyak yang tidak mengindahkan kebersihan lingkungan, ada yang menjual tempat jualan tanpa ijin dan lain sebagainya.

Keberadaan pedagang kaki lima dalam satu sisi merupakan sektor informal yang harus di pikirkan pengembangannya, karena sektor ini mampu menampung para perajin yang tidak punya tempat bekerja, maupun penganggur-penganggur yang umumnya dari kalangan anak muda. Di antara mereka itu ada yang dulunya berprofesi sebagai pengamen, anak-anak nakal, dan sebagainya (Kedaulatan Rakyat, 24 April 1992). Di samping

itu sektor itu berkembang pesat dengan omset yang cukup besar, sehingga mengundang yang lain ikut beradu nasib sebagai pedagang kaki lima di wilayah tersebut.

Permasalahan pedagang kaki lima semakin kompleks. Sektor ini membutuhkan perhatian dan penanganan secara serius. Jumlahnya semakin lama terus bertambah, sementara untuk tempat berjualan sangat terbatas. Di terbitkannya SK no 056 dan 144 tahun 1992 adalah dalam rangka untuk membendung semakin berkembangnya pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Dewasa ini tercatat 635 pedagang kaki lima yang masuk anggota Koperasi Tri Dharma dan masih ratusan yang tidak menjadi anggota koperasi. Di duga mereka inilah yang tidak mentaati peraturan (Perda 056/KD/1987). Untuk itu sebanyak ± 28 Anggota satgas penertiban dan pengamanan pedagang kaki lima mulai di terjunkan di sepanjang Jalan Malioboro dan A. Yani.

Jadi bisa di sebutkan bahwa permasalahan-permasalahan di kota cukup kompleks, antara lain membanjirnya arus pendatang menambah padatnya penduduk, meningkatnya kriminalitas, masalah sampah, masalah penyediaan air bersih, masalah ketertiban di jalan raya, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Satu hal bahwa kota Yogyakarta sekarang ini sedang berbenah untuk mewujudkan slogan kota tersebut yaitu "Yogyakarta Berhati Nyaman". Untuk itu secara bertahap permasalahan-permasalahan yang ada di tekan sekecil mungkin. Partisipasi warga kota dalam hal ini sangat menentukan.

7. Slogan Yogyakarta Berhati Nyaman

Banyak kota di Indonesia yang telah memiliki slogan sebagai identitas kota bersangkutan. Kita mengenal misalnya slogan Semarang Kota Atlas, Solo Berseri, Klaten Bersinar, Magelang Kota Harapan, Sleman Sembada, Bantul Projo Tamansari, dan sebagainya. slogan tersebut tidak hanya sekedar slogan, tetapi mempunyai makna dan tujuan.

Slogan untuk kota Kotamadya Yogyakarta adalah Yogyakarta Berhati Nyaman yang artinya Bersih, Indah, Sehat, Nyaman. Lahimya slogan tersebut di latar belakang oleh sejarah yang sejak lama menjadi tradisi dan budaya masyarakat Yogyakarta. Jadi Yogyakarta Berhati Nyaman di jiwai oleh "Memayu Hayuning Bawono" yang di landasi olaeh nilai-nilai budaya daerah "Ngayogyakarta Hadiningrat" sebagaimana dari budaya nasional (Humas, 1992). Oleh sebab itu pelaksanaan Yoyakarta Berhati Nyaman harus berlandaskan pada nilai- nilai budaya masyarakat.

Yogyakarta Berhati Nyaman merupakan pedoman dan arahan untuk mencapai perwujudan Yogyakarta yang bersih, sehat dan nyaman baik lahiriah maupun batiniah yang berkaitan dengan predikat dan fungsi kota. Jadi Yogyakarta Berhati Nyaman berkedudukan sebagai arahan bagi seluruh aparatur dan masyarakat dalam menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan (Humas, 1992). Dengan demikian terwujudnya cita-cita Yogyakarta Berhati Nyaman menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk pelaksanaan Yogyakarta Berhati Nyaman tertuang dalam peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta nomor 1 tahun 1992 tanggal 11 Januari 1992.

Untuk mengaktualisasikan Yogyakarta Berhati Nyaman, warga masyarakat harus mengembangkan tiga sikap yang harus di miliki yaitu rasa memiliki (handarbeni), rasa memelihara (hangrungkebi), dan rasa tanggung jawab (mulat sariro hangrosowani). Ketiga sikap tersebut di sebut Tri Rasa.

Arti dari bersih, sehat, indah, dan nyaman merupakan satu kesatuan yang titik beratnya adalah nyaman. Jadi tujuannya adalah mencapai kondisi yang bersih, lingkungan yang sehat, dan indah. Dalam hal ini bersih tidak dalam arti fisik, tetapi juga dalam sikap dan tingkah laku dalam upayanya menata lingkungan sekitarnya. Jadi bersih di kaitkan dengan nyaman berarti menyeberang jalan aman, berjalan tenang, lingkungan nyaman; kondisi tidak aman berarti tidak nyaman.

Usaha untuk mewujudkan Yogyakarta Berhati Nyaman masih dalam proses konsolidasi. Masyarakat sendiri nampaknya belum tahu apa berhati nyaman itu sebenarnya, dan hal ini memerlukan proses yang panjang. Pemasyarakatan slogan ini sudah di tempuh melalui jalur- jalur organisasi, penyuluhan-penyuluhan, memasang slogan itu di tempat-tempat strategis, memasang stiker-stiker pada kendaraan umum, penyebaran informasi melalui media massa.

Slogan Berhati Nyaman tidak hanya untuk Adipura saja, tetapi lebih luas lagi. sesuai dengan falsafah warga Yogyakarta yang terdapat dalam lambang yaitu "mamayu hayuning bawana". slogan tersebut perwujudannya mengarah pada predikat yang melihat pada kota Yogyakarta, yaitu kota pendidikan, kota wisata, kota budaya, dan sebagainya. Jadi harus di lestarikan dari segi budaya dan geografi.

Langkah-langkah untuk mewujudkan Yogyakarta Berhati Nyaman adalah dengan menuangkannya dalam Perda. Tetapi secara garis besar masyarakat harus sudah memiliki suatu niat, kemampuan seperti yang tertuang

dalam Perda, baik sebagai pengajaran, perilaku/sikap sehari-hari warga Yogyakarta. artinya di pahami dan di barengi dengan kesadaran. Jadi di harapkan semua warga mempunyai kehendak untuk mewujudkan Yogyakarta Berhati Nyaman.

Pelaksanaan Yogya Berhati Nyaman mengalami beberapa kendala. Kendala yang ada antara lain berkaitan dengan perilaku masyarakat sendiri yang belum mencerminkan sebagai warga kota yang mempunyai tanggung jawab terhadap keindahan kotanya. Hal ini terbukti misalnya ada warga yang merusak pagar besi yang sudah di tata rapi di dekat stasiun Tugu (Bemas 9 Maret, 1992), membuang sampah sembarangan di tempat-tempat wisata, di jalan raya dan sebagainya (Bemas, 19 September 1992), aksi corat-coret di kantor, tempat wisata (Kedaulatan Rakyat, 9 April 1992), bau tak sedap di jalan-jalan pertokoan yang di mungkinkan karena pembuangan rimah penjual makanan (Bemas, 25 mei 1992) dan sebagainya. Jadi disini kendala yang pertama adalah bahwa masyarakat nampaknya belum begitu tahu Yogya Berhati Nyaman, terutama penjabarannya maupun uraian maknanya. Ketidak pahaman masyarakat Yogya terhadap slogan itu di sebabkan pemerintah daerah menganggap masyarakat sudah tahu maknanya, sehingga penjelasannya tidak di sebar luaskan lebih lanjut (Bemas, 10 maret 1992). di samping itu menurut Soedjito Sosrodiharjo (Bemas, 10 Maret 1992), pemerintah kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat yang heterogen, misalnya 1) adanya rambu-rambu lalu lintas Zebra Cross bagi penyebrang jalan dengan menggunakan lagu "Sepasang Mata Bola" sering di langgar hal ini karena tidak semua masyarakat memahami makna rambu-rambu tersebut dan tidak adanya sanksi yang menyertainya, 2) juga banuaknya tempat-tempat sampah di jalan-jalan protokol yang rusak, tetapi belum ada tindak lanjut untuk memperbaiki, 3) kurang pemeliharaan dan perawatan tempat-tempat wisata yang menjadi asset besar pemerintah.

Pemasyarkatan slogan ini sebenarnya sudah sampai pada tingkat bawah, yaitu lewat RT/RW maupun organisasi sosial seperti PKK, Karang Taruna, LKMD. akan tetapi pemasyarkatan itu baru sebatas penjelasan mengenai slogan tersebut, semacam penyuluhan belum di lakukan, karena belum mempunyai pendukung pelaksanaan yang kongkrit. Kendala yang lainnnya yaitu heterogenitas masyarakat yang tinggi, yang sebagian besar adalah pendatang. Kendala ke tiga, sarana maupun prasarana, keadaan ini memerlukan proses yang panjang, karena pelaksanaannya harus peka terhadap kebutuhan masyarkat yang heterogen. Keempat, kesadaran dan

tingkat dan disiplin masyarakatnya yang masih rendah, sehingga untuk menumbuhkan semangat memiliki dan memelihara kotanya dengan sikap yang bertanggung jawab memerlukan proses yang panjang. Jadi program Yogyakarta berhati nyaman sekarang ini dalam proses dikembangkan, di masyarakatkan dari lapisan atas sampai ke bawah. Diharapkan dengan adanya Perda Yogya Berhati Nyaman tersebut, warga kota dan aparat semakin sadar akan "Kebersihan" dalam arti menyeluruh.

Langkah-langkah yang sudah di laksanakan untuk mewujudkan slogan tersebut antara lain pembenahan taman-taman kota. Pembenahan taman-taman kota inipun di hadapi beberapa kendala, yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Instansi yang berwenang mengenai masalah itu yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) baru aktif menangani tahun 1989, sebelumnya oleh Dinas pekerjaan umum (DPU). DKP baru memiliki satu unit mobil tangki air berkapasitas 4000 liter. Pada hal luas taman di Yogyakarta $\pm 31.000 \text{ m}^2$ yang tersebar di 15 lokasi (Bernas, 25 November 1992). Keberadaan taman ini sangat di perlukan untuk menciptakan Yogyakarta Berhati Nyaman. Kendala ke dua warga masyarakat terutama para pedagang kaki lima justru memperburuk keadaan karena bukannya memelihara, tetapi malahan merusak. Tempat-tempat tanaman atau pot-pot yang sudah rusak atau kosong tidak ada tanamannya dan sebagainya belum langsung dapat di benahi, sehingga ada kesan program slogan tersebut hanya hanya sekedar slogan saja.

Sementara kebiasaan oleh warga masyarakat masih jauh dari kesan mengindahkan kebersihan dan kenyamanan. Di sini nampak bahwa slogan tersebut belum menjadi bagian dari sikap perilaku sehari-hari warga kota Yogya. Meskipun beberapa gerakan kebersihan di adakan oleh warga kota, tetapi karena sifatnya hanya sementara, jadi tidak menumbuhkan sikap yang berkelanjutan. Misalnya saja kampanye kebersihan yang di lakukan oleh mahasiswa dan pelajar dengan membawa poster dan spanduk dengan menyusuri jalan-jalan protokol sambil memungut sampah (Bernas, 24 November 1992). Namun demikian kepedulian masyarakat akan kenyamanan dan keindahan kota masih ada, misalnya saja warga RW dan RT ataupun PKK membuat taman dekat jembatan layang, atau membuat tempat-tempat pembuangan sampah di lingkungan bersangkutan dan sebagainya. Usaha ini bila terus di kembangkan bisa memotivasi masyarakat untuk peduli kepada lingkungannya. Gerakan-gerakan kebersihan dan keindahan lingkungan sedang dalam pelaksanaan, taman-taman kota di benahi, daerah-daerah yang dulunya berkesan kumuh secara

masyarakat untuk peduli kepada lingkungannya. Gerakan-gerakan kebersihan dan keindahan lingkungan sedang dalam pelaksanaan, taman-taman kota di benahi, daerah-daerah yang dulunya berkesan kumuh secara bertahap di buat taman seperti di dekat jembatan Jalan Abu Bakar Ali, dan taman yang di kelola warga penjual bunga di kawasan tersebut. Sementara itu tempat-tempat sampah di pinggir-pinggir jalan protokol yang sudah tidak memadai di bersihkan/dihilangkan.

TABEL II.1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR
DAN JENIS KELAMIN KOTAMADYA

Golongan Umur			Penduduk			
Laki-laki			Perempuan		Perempuan + Laki-laki	
	f	%	f	%	f	%
0 - 4	13.798	6,8	13.095	6,2	26.893	6,5
5 - 9	16.166	8,0	15.275	7,3	31.441	7,6
10 - 14	17.215	8,5	17.088	8,1	34.303	8,3
15 - 19	25.708	12,7	29.723	14,1	55.431	13,5
20 - 24	34.713	17,2	34.949	16,6	69.662	16,9
25 - 29	24.090	11,9	21.540	10,3	45.630	11,1
30 - 34	16.447	8,2	15.545	7,4	32.002	7,8
35 - 39	12.051	6,0	11.647	5,5	23.698	5,8
40 - 44	7.353	3,6	7.913	3,8	15.266	3,7
45 - 49	6.975	3,4	8.184	3,9	15.159	3,7
50 - 54	6.955	3,4	8.338	4,0	15.293	3,7
55 - 59	5.642	2,8	7.055	3,4	12.697	3,1
60 - 64	5.709	2,8	6.832	3,3	12.541	3,0
65 - 69	4.031	2,0	4.641	2,2	8.672	2,1
70 - 74	2.582	1,3	3.608	1,7	6.145	1,4
Jumlah	202.002	100	210.057	100	412.059	100

Sumber : Sensus Penduduk 1990 : Penduduk Kotamadya Yogyakarta 1990. Kantor Statistik Kota Yogyakarta.

TABEL II.2
PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN
KEPADATAN PER KECAMATAN
KOTAMADYA YOGYAKARTA, 1990

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Luas Kecamatan (km ²)	Kepadatan Penduduk per cm ²
	f	%		
Mantrijeron	32.842	8,0	2,58	12.713
Kraton	22.807	5,5	1,37	16.647
Mergangsan	32.188	7,8	2,33	13.815
Umbulharjo	58.026	14,1	7,58	7.655
Kotagede	23.430	5,7	1,10	6.972
Gondokusuman	56.561	13,7	4,04	14.000
Danurejan	23.430	5,7	1,10	21.300
Pakualaman	12.181	3,0	0,64	19.000
Gondomanan	17.659	4,3	1,13	15.627
Ngampilan	20.494	5,0	0,86	23.056
Wirobrajan	26.975	6,5	1,80	14.986
Gedongtengen	22.825	5,5	0,99	23.056
Jetis	30.603	7,4	1,72	17.792
Tegalrejo	32.168	7,8	2,93	10.979
Jumlah	412.059	100	32,50	12.679

Sumber : Sensus Penduduk 1990 : Penduduk Kotamadya Yogyakarta 1990.
Kantor Statistik Kota Yogyakarta.

TABEL II.3

**BANYAKNYA RUMAH TANGGA, PENDUDUK DAN
RATA-RATA BANYAKNYA JIWA PER RUMAH TANGGA
MENURUT KECAMATAN DI KOTAMADYA YOGYAKARTA, 1990**

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga		Jumlah Penduduk	Rata-rata Banyaknya Jiwa Per Rumah Tangga
	f	%		
Mantrijeron	7.366	6,7	32.845	4,46
Kraton	5.331	4,8	22.807	4,28
Mergangsan	8.310	7,6	32.188	3,87
Umbulharjo	17.740	16,1	58.026	3,27
Kotagede	5.513	5,0	23.297	4,23
Gondokusuman	19.367	17,6	56.561	2,92
Danurejan	6.078	5,5	23.430	4,23
Pakualaman	3.235	2,9	12.181	3,77
Gondomanan	4.017	3,7	17.659	4,40
Ngampilan	4.395	4,0	20.494	4,66
Wirobrajan	7.034	6,4	26.975	3,83
Gedongtengen	5.174	4,7	22.825	4,41
Jetis	8.096	7,4	30.603	3,78
Tegalrejo	8.351	7,6	32.168	3,85
Jumlah	110.007	100	412.059	3,75

Sumber : Sensus Penduduk 1990 : Penduduk Kotamadya Yogyakarta
1990. Kantor Kodya Yogyakarta

TABEL II.4**RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
PER TAHUN MENURUT KECAMATAN DI KODYA
YOGYAKARTA ANTARA TAHUN 1980 DAN 1990**

Kecamatan	Penduduk Hasil Sensus Penduduk 1980	Penduduk Hasil Sensus Penduduk 1990	Laju Pertumbuhan Penduduk %
Mantrijeron	31561	32845	0.40
Kraton	26557	22807	-1.51
Mergangsan	32683	32188	-0.15
Umbulharjo	37374	58026	4.50
Kotagede	15997	23297	3.83
Gondokusuman	57067	56561	-0.09
Danurejan	26246	23430	-1.13
Pakualaman	14309	12181	-1.60
Gondokusuman	20105	17659	-1.29
Ngampilan	22403	20494	-0.89
Wirobrajan	25312	26975	0.64
Gedongtengen	26058	22825	-1.32
Jetis	32669	30603	-0.65
Tegalrejo	26624	32168	1.91
Jumlah	394965	412059	0,42

Sumber : Sensus Penduduk Kotamadya Yogyakarta 1990. Biro Pusat Statistik Jakarta

TABEL II.5
BANYAKNYA KELAHIRAN, PENDUDUK YANG
DATANG MENURUT KECAMATAN DI KOTAMADYA
YOGYAKARTA, 1990

Kecamatan	Kelahiran		Datang		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%
Mantrijeron	521	29,8	1.227	70,2	1.748	100
Kraton	389	32,2	820	67,8	1.209	100
Mergangsan	454	25,4	1.332	74,5	1.786	100
Umbulharjo	661	19,5	2.723	80,5	3.384	100
Kotagede	356	34,5	675	65,5	1.031	100
Gondokusuman	664	22,3	2.312	77,7	2.976	100
Danurejan	347	27,4	918	72,6	1.265	100
Pakualaman	178	25,7	515	74,3	693	100
Gondomanan	221	27,9	571	72,1	792	100
Ngampilan	312	31,3	685	68,7	997	100
Wirobrajan	371	27,4	983	72,6	1.354	100
Gedongtengen	327	38,8	516	51,2	843	100
Jetis	362	25,3	1.071	74,7	1.433	100
Tegalrejo	403	24,5	1.240	75,5	1.643	100
Jumlah	5.566	26,3	15.588	73,7	21.154	100
Tahun 1989	5.691	27,1	15.315	72,9	21.008	100
Tahun 1988	5.258	24,8	15.985	75,2	21.234	100
Tahun 1987	5.594	23,5	18.177	76,5	23.771	100

Sumber: Kotamadya Yogyakarta Dalam Angka 1990 Kantor Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

TABEL II.6
BANYAKNYA KEMATIAN, DAN PENDUDUK
YANG PERGI PER KECAMATAN DI KOTAMADYA
YOGYAKARTA AKHIR TAHUN,1990

Kecamatan	Kematian		Pergi		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%
Mantrijeron	201	16,0	1.058	84,0	1.259	100
Kraton	198	19,3	826	80,7	1.024	100
Mergangsan	219	16,2	1.132	83,8	1.351	100
Umbulharjo	165	10,2	1.458	89,8	1.623	100
Kotagede	87	15,9	460	84,1	574	100
Gondokusuman	234	10,8	1.926	89,2	2.160	100
Danurejan	157	15,0	899	85,6	1.050	100
Pakualaman	76	3,1	2.363	96,9	2.439	100
Gondomanan	121	17,8	560	82,2	681	100
Ngampilan	145	17,4	688	92,6	833	100
Wirobrajan	158	17,5	745	92,5	903	100
Gedongtengen	187	19,7	760	90,3	947	100
Jetis	128	11,6	977	88,4	1.105	100
Tegalrejo	167	18,3	747	81,7	914	100
Jumlah	2.243	13,3	14.599	86,7	16.842	100
Tahun 1989	2.107	14,6	12.286	85,4	14.393	100
Tahun 1988	2.145	13,3	13.933	86,7	16.078	100
Tahun 1987	2.136	8,1	24.199	91,9	26.335	100

Sumber: Kotamadya Yogyakarta Dalam Angka 1990 Kantor Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

TABEL II.7

**BANYAKNYA SEKOLAH, KELAS, GURU DAN MURID
MENURUT JENIS SEKOLAH DI KOTAMADYA YOGYAKARTA
1990/1991**

Jenis Sekolah	Sekolah	Kelas	Guru	Murid
Taman Kanak-kanak	216	380	670	9.606
SD Negeri	113	839	1.022	21.027
SD Inpres	83	512	746	10.512
SD Swasta	88	608	708	15.682
SD Non PK	2	12	26	266
SLB	8	100	167	556
SMTP Umum	70	624	1.819	23.779
SMTP Kejuruan	3	23	122	1.122
SMTP Non PK	6	31	160	1.138
SMTA Umum	57	686	2.316	25.715
SMTA Kejuruan	33	467	1.458	15.470
SMTA Non PK	19	105	717	3.799
Jumlah	698	4.387	9.931	128.672

Sumber : Kotamadya Yogyakarta Dalam Angka 1990. Kantor Statistik
Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta

TABEL II.8
PANJANG JALAN DI KOTAMADYA YOGYAKARTA
MENURUT JENIS PERMUKAAN TAHUN 1987-1990 (km)

Jenis Permukaan	1987	1988	1989	1990
Diaspal	181,463	185,864	206,556	219,475
Kerikil	3,536	18,928	-	4,049
Tanah	1,368	15,010	9,626	6,140
Tidak dirinci	24,383	-	-	-
Beton Cor	-	-	5,508	-
Jumlah	210,750	219,802	221,690	229,664

Sumber: Kotamadya Yogyakarta Dalam Angka 1990 Kantor Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

TABEL 11.9
PANJANG JALAN DI KOTAMADYA YOGYAKARTA
MENURUT KONDISI JALAN TAHUN 1987-1990 (KM)

Kondisi Jalan	1987	1988	1989	1990
Baik	86,960	153,887	183,290	200,604
Sedang	93,736	42,396	24,622	23,728
Rusak	30,054	23,519	13,778	5,332
Jumlah	210,750	219,802	221,690	229,664

Sumber: Kotamadya Yogyakarta Dalam Angka 1990 Kantor Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

TABEL II.10
BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT
GOLONGAN UMUR, JENIS KELAMIN DI KELURAHAN
TERBAN,1990

Golongan Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%
0 - 4	331		291		622	
5 - 9	350		338		688	
10 - 14	392		388		780	
15 - 19	959		1.180		2.139	
20 - 24	1.369		1.635		3.004	
25 - 29	809		746		1.555	
30 - 34	424		403		827	
35 - 39	294		268		562	
40 - 44	141		176		317	
45 - 49	164		196		360	
50 - 54	158		232		390	
55 - 59	126		171		297	
60 - 64	136		168		304	
65 - 69	87		111		198	
70 - 74	55		81		136	
75 +	60		92		152	
Jumlah	5.855		6.476		12.331	

Sumber : Sensus Penduduk 1990 : Penduduk Kotamadya Yogyakarta 1990. Kantor Statistik Kodya Yogyakarta

TABEL II.11
RATA-RATA ANGGOTA RUMAH TANGGA
PER RUMAH TANGGA MENURUT KELURAHAN
HASIL SENSUS PENDUDUK 1980 DAN 1990

Kelurahan	Sensus 1980			Sensus 1990		
	Rumah Tangga	Penduduk	rata-rata Anggota RT	Rumah Tangga	Penduduk	Rata-rata Anggota RT
Baciro	3561	15256	4.38	4424	14162	3.20
Demangan	3338	12291	3.68	4770	12238	2.57
Klitteran	3256	12480	3.83	5113	13891	2.72
Kota Baru	796	4486	5.64	866	3939	4.55
Terban	2783	12554	4.51	4194	12331	2.94
Jumlah	1373	57067	4.16	19367	56561	2.92

Sumber : Sensus Penduduk 1990 Kotamadya Yogyakarta. Biro Pusat Statistik

TABEL II.12
RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
PER TAHUN MENURUT ANTARA TH 1980 DAN 1990

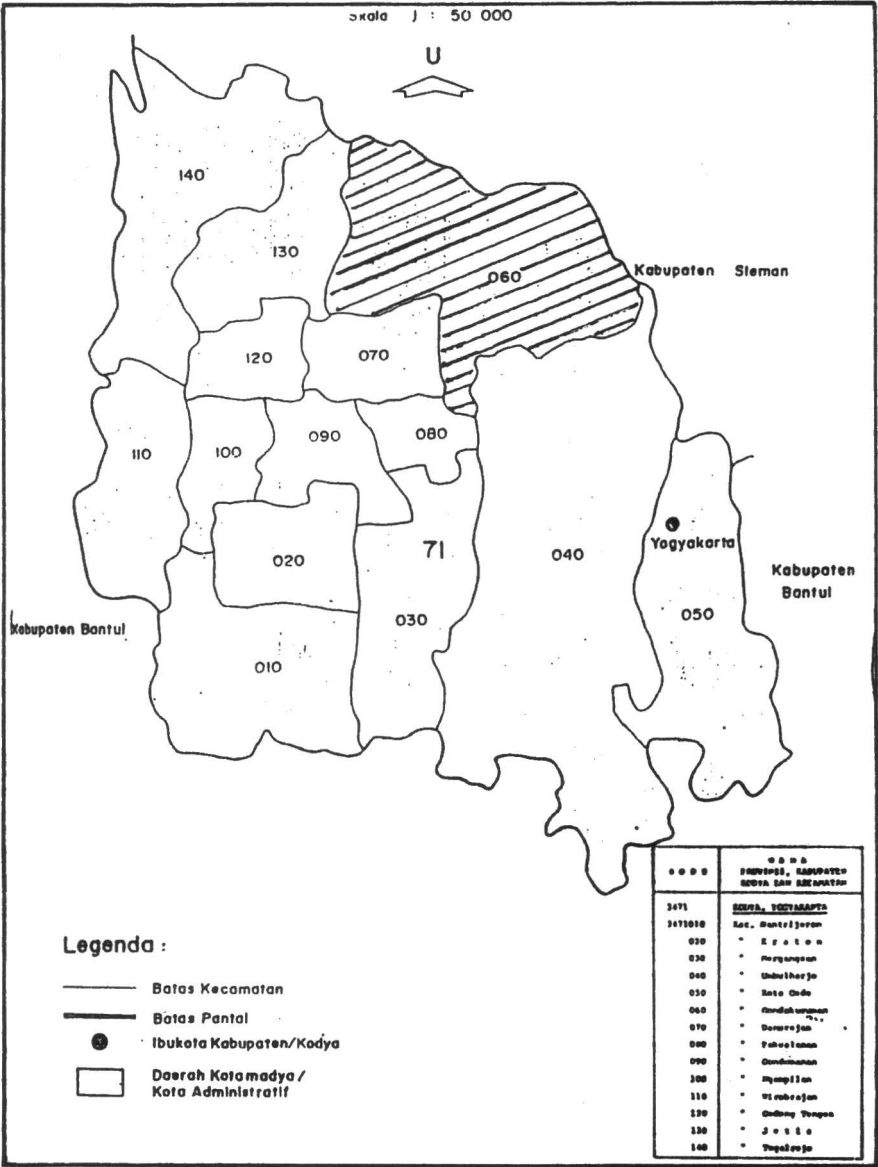
Kelurahan	Penduduk Sensus 1980	Penduduk Sensus 1990	aju Pertumbuha Penduduk (r)
Baciro	15256	14162	-0.74
Demangan	12291	12238	-0.04
Klitteran	12480	13891	1.08
Kotabaru	4486	3839	1.29
Terban	12554	12331	-0.18
Jumlah	57067	56561	-0.09

Sumber : Sensus Penduduk 1990 Kotamadya Yogyakarta. Biro Pusat Statistik

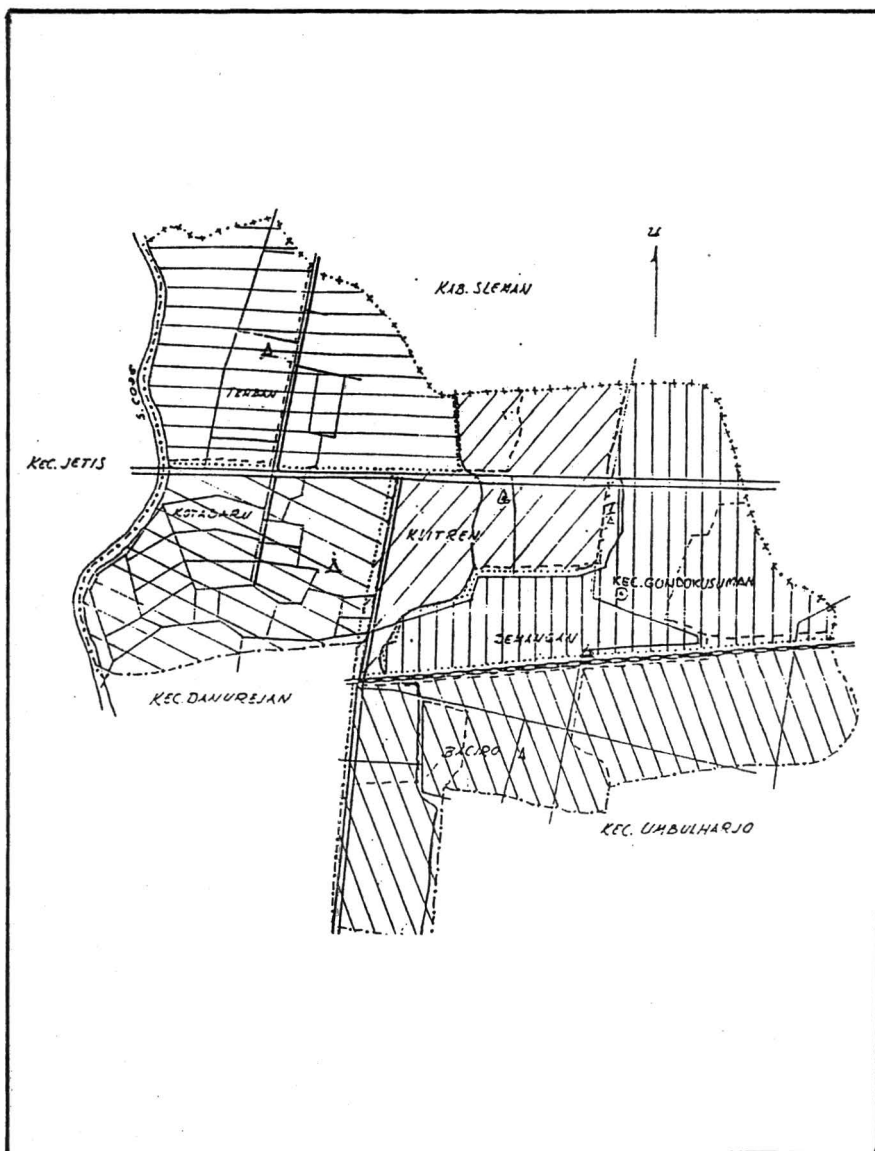
TABEL II.13
PERUBAHAN PENDUDUK KELURAHAN TERBAN
[ERIDE BULAN JANUARI-DESEMBER 1991

Bulan	Penduduk	Lahir	Datang	Jumlah	Pergi	Mati	Jumlah	Jumlah Penduduk
Januari	13312	12	10	22	143	22	165	13169
Februari	13291	10	14	24	13	5	18	13297
Maret	13286	9	30	39	34	2	36	13288
April	13282	8	25	33	12	6	18	13288
Mei	13293	13	24	37	40	4	44	13286
Juni	13306	22	40	62	35	3	38	13320
Juli	13306	22	40	62	35	3	38	13320
Agustus	13373	15	61	76	25	4	29	13386
September	13387	6	44	50	18	4	22	13407
Oktober	13422	9	44	53	36	7	43	13415
November	13438	6	18	24	22	7	29	13433
Desember	13353	58	226	284	39	6	45	13592
Jumlah		183	757	758	440	71	511	

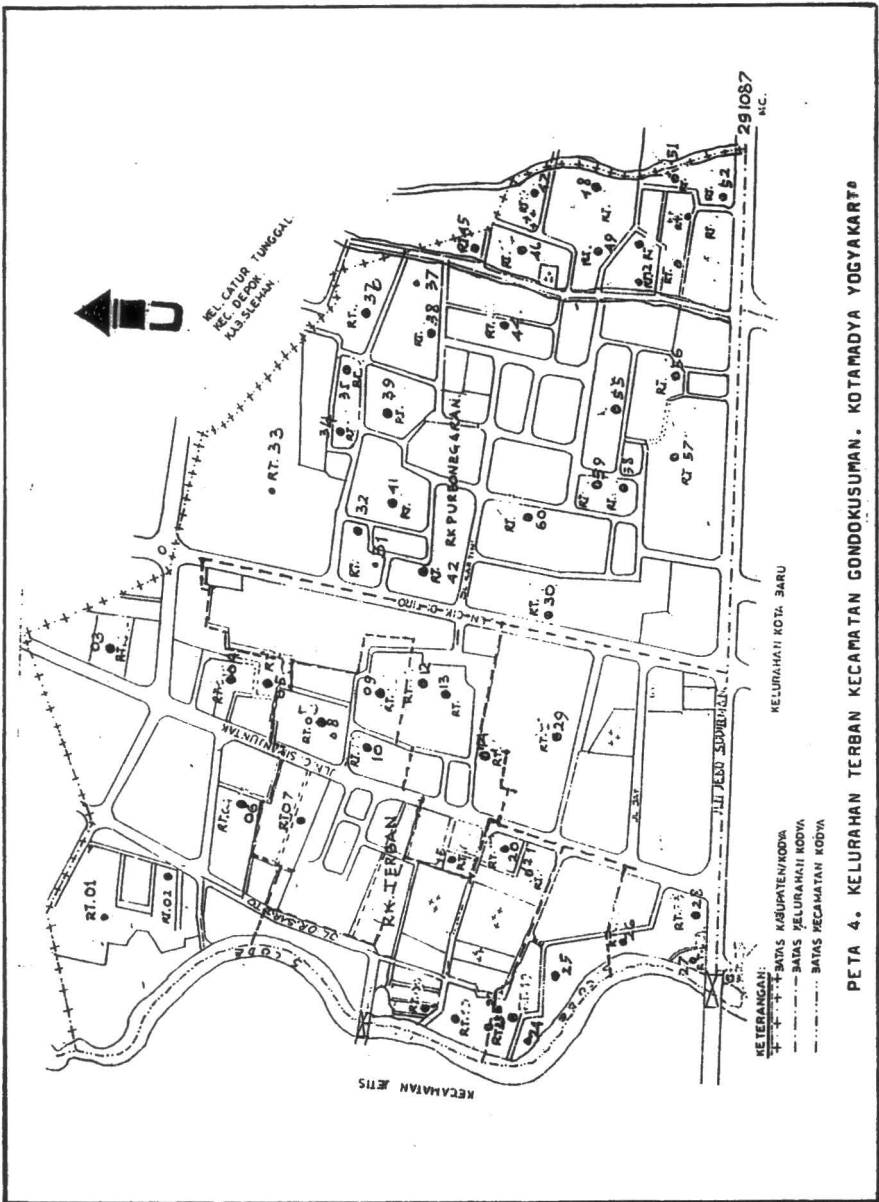
Sumber : Catatan Register Penduduk Kelurahan Terban, Periode Bulan Januari - Desember 1991



**PETA 2. LOKASI PENELITIAN DALAM WILAYAH
KECAMATAN GONDOKUSUMAN
KOTAMADYA YOGYAKARTA**



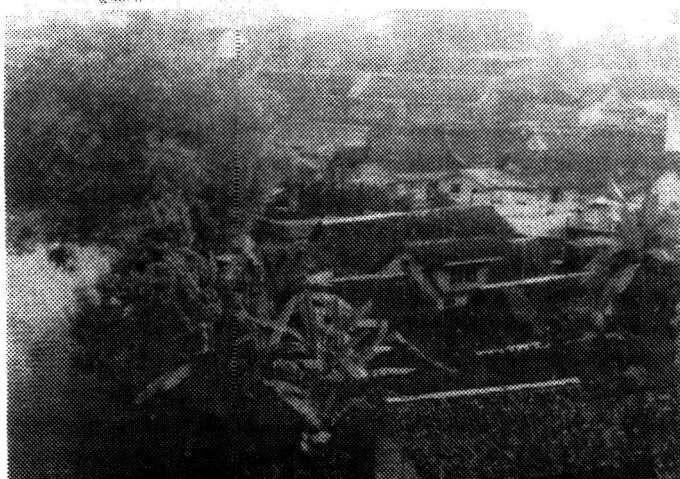
**PETA 3. LOKASI KELURAHAN TERBAN DALAM
WILAYAH KECAMATAN GONDOKUSUMAN
KOTAMADYA YOGYAKARTA**



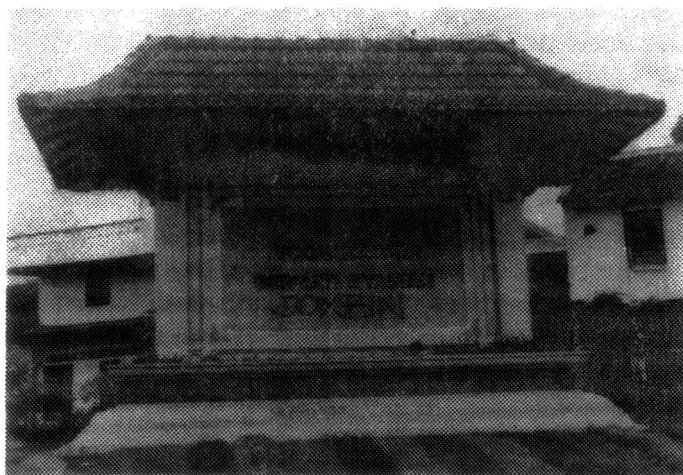
PETA 4. KELURAHAN TERBAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN. KOTAMADYA YOGYAKARTA



Gambar 1. Kantor Kelurahan Terban



Gambar 2. Pola Perkampungan di Lembah Sungai Code



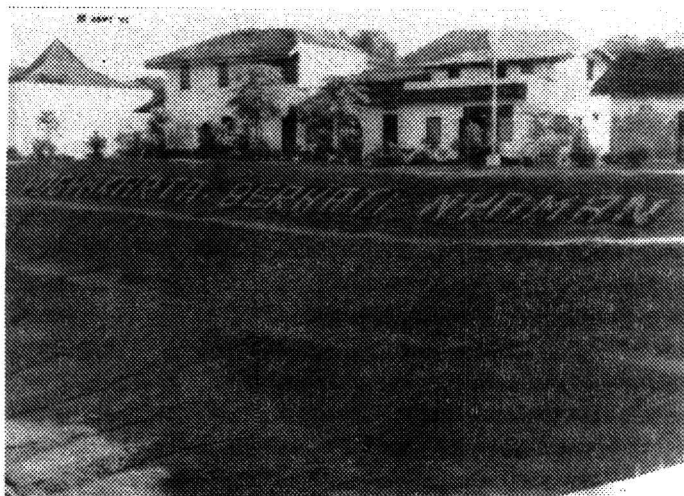
Gambar 3. Ulah tangan usli



Gambar 4. Aksi corat-corek yang tak bertanggung jawab



Gambar 5. Monumen Yogyakarta Berhati Nyaman



Gambar 6. Salah satu upaya perwujudan Yogyakarta Berhati Nyaman

BAB III

DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN KELURAHAN TERBAN

Menurut Suratman (1988 : 2-3), disiplin selalu ada kaitannya dengan manusia karena ada unsur batin, watak, dan perilaku. Disiplin juga ada kaitannya dengan jiwa manusia yang mengandung cipta, rasa dan terutama karsa. Dengan kata lain disiplin ada kaitannya dengan kemampuan manusia untuk mematuhi sesuatu, kemampuan mengendalikan karsa. Jadi untuk mengendalikan karsa ini perlu disiplin, supaya sesuatu yang dikehendaki dapat berhasil. Dapat diartikan di sini disiplin mengandung kepatuhan dengan sadar untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem, mengharuskan untuk mentaati suatu keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku.

Terwujudnya suatu disiplin tersebut menurut Bintarto (1983: 103), tergantung pada sifat seseorang, kondisi atau suasana kehidupan pada waktu tertentu, serta kebutuhan dan keinginan pada saat tertentu. Dengan kata lain kedisiplinan dipengaruhi oleh ketiga hal tersebut. Jadi tindak disiplin seseorang bisa berubah-ubah menurut situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Perilaku disiplin tersebut merupakan salah satu produk sosialisasi yang dipelajari di lingkungan keluarganya, masyarakatnya terutama dari orang-orang yang lebih tua, dan orang-orang yang lebih berkuasa (Warnaen, 1985: 21).

Untuk mengkaji perilaku disiplin sosial, menurut Satjipto Rahardjo (1987: 54-57) diperlukan suatu konteks sosial yang menjadi wilayah kerja disiplin sosial tersebut. Disiplin sosial merupakan sarana pengontrol perilaku anggota masyarakat agar kehidupan di situ dapat diselenggarakan dengan tertib dan lancar. Oleh karena itu hal tersebut tidak dapat terlepas dari karakteristik sosial berbagai lingkungan etnis, misalnya cita-cita kemasyarakatan, bagaimana seseorang harus bersikap sebagai suatu mekanisme untuk menjamin proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya. Dengan demikian kualitasnya akan ditentukan oleh kualitas hubungan antara manusia dengan lingkungannya.

Pengertian disiplin tersebut, dalam konteks masyarakat yang diteliti ini mempunyai pengertian yang kurang lebih sama. Persepsi disiplin menurut masyarakat di daerah penelitian baik itu mereka pemimpin formal

(Lurah, RW, RT) maupun masyarakat umumnya mempunyai pandangan yang kurang sama. Sebagian besar menunjuk pada pengertian bahwa, 1) disiplin adalah perilaku yang mengikuti peraturan, mengikuti tata tertib baik dari pemerintah maupun wilayah tempat tinggal diawasi atau tidak, 2) apabila melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebiasaan lingkungan atau melaksanakan pekerjaan yang selaras dengan kebutuhan hidup lingkungan masyarakat sekitar, 3) mentaati segala tata- cara atau norma baik tertulis maupun tidak dan melaksanakan semua kewajiban yang berhubungan dengan tanggung jawabnya, 4) tindakan yang tepat dengan yang telah diketahui bersama.

Berdasarkan persepsi mereka mengenai disiplin tersebut, kita akan mendapat gambaran apakah masyarakat di daerah penelitian mengerti atau tidak mengerti tentang perilaku disiplin itu. Perilaku disiplin tersebut tentunya meliputi segala hal tindakan manusia; yang dalam kesempatan ini akan dilihat bagaimana perilaku disiplin masyarakat bersangkutan, yaitu masyarakat terhadap kegiatan sosial, disiplin terhadap administrasi pemerintahan, dan disiplin hubungan bertetangga.

A. Disiplin Dalam Penanganan Limbah Keluarga Dan Sampah

Salah satu masalah yang dihadapi di berbagai kata adalah masalah buangan atau air limbah rumah tangga dan sampah. Limbah rumah tangga dan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang erat dengan masalah kebersihan dan kesehatan. Seperti diketahui air buangan rumah tangga, air hujan, dan sampah dari pengumpulan sampai ke pembuangan menjadi masalah yang mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya. Sampai sekarang ini belum ditemukan suatu sistem pengolahan sampah yang tepat.

Sebagaimana diketahui sampah dikenal menjadi penyebab utama terjadinya gangguan kesehatan lingkungan. Untuk itu sampah harus dikelola dan ditangani dengan serius. Kalau hal ini diabaikan sampah dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan lingkungan (air, udara, keindahan).

Akibat dari suatu keadaan lingkungan permukiman yang buruk dan tidak tertata, tidak saja mempengaruhi kesehatan tetapi mempunyai akibat yang secara tidak langsung merugikan aspek-aspek sosial ekonomi pada umumnya. Semuanya itu di samping dipengaruhi oleh sarana dan prasarana penampungan sampah, juga karena kurangnya kesadarannya penduduk

terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan, serta rendahnya perilaku disiplin warga dalam pembuangan sampah maupun limbah.

1. Penanganan Sampah

Masalah penanganan sampah di wilayah kotamadya diatur dalam Perda nomor 2 tahun 1984. Dalam aturan daerah tersebut disebutkan yang dimaksud *sampah adalah barang-barang buangan yang oleh pemiliknya/pemakainya dan atau atas suruhannya telah dibuang dengan maksud tidak diambil lagi*. Dalam usahanya untuk melaksanakan kebersihan sampah diatur dalam pasal 2 Perda nomor 2 tahun 1984 yaitu :

- 1) Setiap orang, lembaga dan perusahaan diwajibkan membuang sampah ditempat penampungan sampah dan atau pembuangan sampah yang tersedia serta pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Setiap orang, lembaga dan perusahaan dapat membuang sampah di tempat penampungan sampah dan atau di tempat pembuangan sampah yang dibuat di tempatnya sendiri, sepanjang tidak menimbulkan pencemaran dan mengganggu keamanan lingkungan.
- 3) Setiap orang, lembaga dan perusahaan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini terbatas pada daerah-daerah yang ditetapkan oleh Walikotaamadya.

Jadi jelas disini bahwa semua orang, kantor, perusahaan wajib untuk membersihkan sampah. Pembersihan sampah tersebut tidak boleh sembarangan, tetapi harus dibuang di tempat penampungan sampah. Tempat penampungan sampah di sini adalah tempat pembuangan sementara sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat pembuangan akhir.

Selanjutnya menurut Perda tersebut (pasal 4) ditetapkan bahwa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas pengambilan dan pengangkutan sampah adalah :

- 1) Pelaksanaan pembersihan sampah dalam kampung menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan setempat bersama-sama dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Rukun Kampung (sekarang RW).
- 2) Pengelolaan pembersihan sampah dalam pasar dan pengangkutannya

ke tempat pembuangan sampah menjadi tanggung jawab Kepala Jawatan Pasar.

- 3) Pembersihan jalan-jalan umum, pengambilan dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah menjadi tanggung instansi teknis.

Jadi ada tiga lembaga yang bertugas dalam pembersihan sampah yaitu :

- 1) Pembersihan sampah didalam kampung-kampung
- 2) Pembersihan sampah dalam pasar
- 3) Pembersihan sampah di jalan-jalan

Pembersihan sampah didalam kampung-kampung dan ditangani pengurus kampung jadi pelaksanaannya tanggung jawab kepala kelurahan lewat RT maupun RW, melalui kerja sama dengan warga. Masing-Masing RW mengatur pembersihan sampah diwilayahnya. Biasanya cara-cara pembersihan sampah diwilayah setiap RW menyesuaikan kondisi lingkungannya. Oleh sebab itu penanganan pembersihan sampah di setiap RW kadang-kadang tidak sama, demikian juga sarana yang di milikinya. Sedangkan pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan ber kewajiban menentukan kegiatan pembersihan sampah, serta membantu sarana maupun prasarana yang diperlukan di setiap RW.

Pelaksanaan pembersihan sampah di wilayah kelurahan Terban pun terselenggara lewat RT-RW maupun organisasi-organisasi sosial yang ada yaitu Dasa Wisma, PKK, Karang Taruna. Wilayah Kelurahan Terban yang terdiri dari 11 RW dengan kondisi lingkungan yang berada juga mempunyai pola pembuangan sampah yang bisa di kelola oleh warganya.

Pembersihan Sampah di Kampung - Kampung

Seperti di sebutkan dalam Perda nomor 2 tahun 1994 pasal 4 tersebut bahwa Camat bersama-sama Lurah bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing. Selanjutnya dalam keputusan Walikotamadya Nomor 025/KD/1985 disebutkan bahwa :

- 1) Camat bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan di wilayahnya.
- 2) Kepala Kelurahan dan masyarakat bertanggung jawab atas pelaksanaan pembersihan sampah dalam kampung di wilayahnya.

Untuk itu Lurah bersama-sama LKMD dan RK (sekarang RW) dengan koordinasi Camat mengatur tata cara pengambilan dan pengangkutan sampah dari kotak, tong, keranjang, kantong sampah di setiap bangunan atau rumah tangga ke tempat penampungan sampah umum. Selanjutnya Lurah bersama-sama LKMD dan RW menunjuk petugas pengambil sampah dan mengangkut sampah dari kotak, tong, keranjang sampah di setiap bangunan atau rumah tangga ketempat penampungan sampah umum.

Pembersihan Sampah dalam pasar

Dalam Perda nomor 2 tahun 1984 pasal 4 disebutkan bahwa pengelolaan pembersihan sampah dalam pasar menjadi tanggung jawab Jawatan Pasar. Menurut Keputusan Walikotamadya Yogyakarta no 025/KD/1985 pasal 4 tanggung jawab kepala Jawatan Pasar itu meliputi kebersihan pasar pada umumnya, penyediaan tempat penampungan sampah, pengambilan dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah yang ditentukan.

Pembersihan Sampah di Jalan-jalan Umum

Disebutkan dalam Perda nomor 2 tahun 1994 tersebut bahwa pembersihan jalan-jalan umum menjadi tanggung jawab instansi teknis. Instansi teknis yang di maksud disini adalah Dinas Kebersihan dan pertamanan (DKP). Wewenang dan kewajiban dalam pembersihan sampah lahan-lahan yang ada di wilayah Pemda Kodya Yogyakarta, antara lain : jalan-jalan umum, jembatan, taman-taman kota, lingkungan kantor-kantor lingkungan Pemda Kodya Yogyakarta. Kegiatan pembersihan sampah kota oleh DKP dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama kegiatan penyapuan dilakukan pukul 05.00 sampai dengan pukul 06.00 dan untuk pengangkutan dimulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 11.00 yaitu pengangkutan sampah-sampah dari Tempat Pembangunan Sementara (TPS) dan Tempat Pembangunan sampah Akhir (TPA). Tahap kedua kegiatan penyapuan khusus untuk jalan-jalan protokol dan jalan utama kota yang dilaksanakan dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 18.00, demikian juga pengambilan sampah dari TPS ke TPA. Khusus penyapuan di jalan-jalan P. Mangkubumi, Malioboro, Jendral A. Yani serta Katamso dilakukan mulai pukul 17.00 sampai dengan 23.00.

a. Jenis-jenis Sampah dan Penanganannya

Berdasarkan hasil penelitian Bappeda dan PPLH UGM 1986, jenis-jenis sampah yang banyak diproduksi oleh warga diwilayah Kodya Yogyakarta adalah jenis daun-daunan. Dari 2675,58 m³ sampah 48,1%-nya adalah jenis daun-daunan, 27,9% jenis plastik, dan jenis kertas 14,0%. Jenis lainnya adalah buah-buahan, sisa-sisa sayuran, nasi campur tanah, dan sayur, tulang dan sebagainya. Produsen sampah paling banyak adalah Rumah Tangga 66,5%, dari pasar 13,9%, rumah makan 6,0%, penginapan 5,4% (tabel III.1 dan III.2).

Jenis-jenis sampah yang dibuang setiap rumah tangga di Wilayah Terban sangat bervariasi. Namun sebagian besar sampah yang di buang warga adalah sampah yang dapat di bakar yang terdiri dari daun-daunan, kertas, kardus-kardus, kayu-kayuan. Jenis sampah lainnya yaitu plastik, campuran sisa makanan (nasi, sayur), buah-buahan, kotoran-kotoran ayam, pecahan-pecahan kaca, bongkaran bangunan, dan benda-benda lain tak terpakai seperti tas, sepatu, sandal. Sampah rumah tangga yang berupa daun-daunan terdiri dari sisa-sisa sayur, dan makanan lain, bekas-bekas pembungkus dan tumbuh-tumbuhan dari pangkasan taman. Sampah bekas pembungkus paling banyak berupa kertas dan plastik.

Sampah-sampah rumah tangga tersebut pengelolaannya bervariasi. Pengelolaan yang dimaksud di sini adalah usaha penduduk untuk mengumpulkan sampah ke penampungan sementara usaha membersihkan sampah dari lingkungannya. Ada beberapa pola penanganan sampah yang dilakukan penduduk di wilayah Terban yaitu :

1. Sampah dikumpulkan - ditampung pada sebuah keranjang, tong, ember dan sebagainya kemudian dibuang di bak sampah umum terdekat (*open jumping*)
2. Sampah dikumpulkan-ditampung (di tempatnya sendiri) kemudian dibakar.
3. Sampah dikumpulkan pada sebuah *jugangan* kemudian ditimbun bisa menjadi kompos (*sanitary land fill*)
4. Sampah dibuang di pingiran sungai.

Sampah yang dibuang di bak-bak sampah umum berupa bak-bak sampah permanen maupun *container* yang disediakan oleh instansi teknis yang bertugas di bidang kebersihan dan keindahan kota yaitu Dinas

Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Dinas kebersihan ini baru mulai menangani kebersihan kota sejak 1989, sebelumnya ditangani Dinas Pekerjaan Umum atau DPU. Tempat-tempat sampah ini terutama terdapat di pinggir-pinggir jalan-jalan besar yaitu di Jalan Sam Ratulangi, Jalan Dr. Sardjito, dan Jalan Dr. Sutomo. Dua tempat yang juga dijadikan tempat pembuangan sampah warga Terban yaitu dekat Rumah Sakit Bethesda, dan di depan Rumah Sakit Mata Yap. Sampah-sampah yang tertampung disini langsung diambil oleh petugas dari DKP.

Dari keempat pola pembuangan sampah itu, yang paling banyak dilakukan penduduk adalah pembuangan sampah di bak-bak sampah umum tersebut (66,0%). Sisanya dengan cara ditimbun di rumah (8,0%), kemudian dibakar (12,0%) dan sebanyak 14,0% dibuang di pinggir sungai (tabel III.3). Ada beberapa penduduk yang membuang sampah dengan cara dimasukkan ke got saluran air atau dibuang begitu saja di pinggir jalan. Perbuatan ini dilakukan tidak setiap hari (bila sampah hanya sedikit). Namun jelas melanggar aturan yang telah ditentukan. Dalam Perda nomor 2 tahun 1984 pasal 11 tertulis larangan pembuangan sampah di tempat tertentu :

1. Membuang sampah di dalam saluran air hujan, saluran air kotor dan saluran air pembilas, maupun membuang sampah air yang bertentangan dengan fungsi saluran tersebut.
2. Membuang sampah di pinggir jalan atau tempat-tempat lain selain di tempat yang telah ditentukan.
3. Membuang "*sesuatu*" di dalam tempat penampungan sampah tersebut.

Dalam hal ini yang dimaksud "*sesuatu*" adalah barang-barang buangan sampah yang tidak termasuk kategori sampah yaitu bongkaran bangunan, pecahan kaca dan yang sejenis; kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai hewan; barang buangan industri yang mengakibatkan pencemaran/berbahaya terhadap kesehatan lingkungan.

Berdasarkan pengamatan, nampaknya masih ada warga yang tidak berdisiplin terhadap peraturan yang ada, terutama untuk tidak membuang sampah di got-got, di pinggir jalan, membuang sesuatu yang tidak termasuk dalam golongan sampah. Pembuangan sampah di got atau pinggir-pinggir jalan tersebut, terutama disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akibat perbuatan itu. Padahal pelanggaran terhadap Perda Pembersihan Sampah

nomor 2 tahun 1984 pasal 11 tersebut ada sanksinya yaitu ketentuan pidana yang dinyatakan dalam pasal 12 :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000 (seribu rupiah).
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 11 peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 45 hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

Namun, nampaknya sanksi pidana atau denda uang ini belum berjalan dengan semestinya. Pada pasal 12 tersebut belum diberlakukan secara tegas kepada pelanggar ketentuan pasal 5) (mengenai retribusi sampah) dan pasal 11 (larangan pembuangan sampah ditempat tertentu).

Pola penanganan sampah diwilayah Kelurahan Terban seperti telah disebutkan ada 4 (empat) cara yang secara rinci adalah sebagai berikut :

Sampah ditampung kemudian dibuang ke bak sampah

Pola ini dilakukan oleh sebagian besar penduduk di wilayah Terban. Aktivitas pengumpulan sampah yang mereka lakukan ada beberapa cara :

- a) Sampah ditampung pada suatu tempat misalnya ember plastik, tong, blek/kaleng, keranjang, kantong-kantong plastic, kemudian dibawa sendiri langsung ke bak sampah umum yang ada diwilayah masing-masing. Misalnya wilayah Purbonegaran warga banyak yang membuang sampah di dekat Bethesda, di Jalan Cik Di Tiro banyak yang membuang di dekat rumah sakit Mata Yap, dan di RW lainnya ada yang ke bak-bak yang ada di pinggir jalan.
- b) Sampah ditampung di rumah, setiap hari diambil petugas pengambilan sampah dengan gerobag sampah atau *keseeran*. Petugas ini ditunjuk oleh RT-RW masing-masing, dan warga membayar secara gotong royong setiap bulan.
- c) Sampah oleh warga setempat dibuang ke bak-bak penampungan yang dibuat oleh RT-RW dengan gotong royong bersama warga, kemudian petugas pengumpul sampah mengambil di bak tersebut. Cara ini juga memerlukan iuran warga.

Ketiga cara ini hampir terdapat di setiap RT-RW di wilayah Terban. Bak-bak sampah yang menjadi tempat penampungan sementara (TPS) jaraknya dari rumah penduduk pada umumnya relatif dekat. Jarak lokasi bak penampungan sementara dari rumah penduduk (responden) yang paling dekat < 25 meter (38,3%), sedangkan yang agak jauh 100 < 300 meter (48,5%) tabel III.4).

Sampah ditampung - ditimbun di rumah/dibakar

Sampah ditangani sendiri, yaitu ditampung pada sebuah "**jugangan**" di halaman rumah. Ada dua cara penanganan sampah yang ditangani sendiri yaitu :

- a) sampah dimasukkan ke dalam "**jugangan**", setelah penuh di timbun atau ditutup dengan tanah, kemudian pada kesempatan lain membuat "**jugangan**" di tempat yang berbeda demikian seterusnya dan sampah tersebut bisa untuk kompos. Cara ini hanya dilakukan oleh beberapa penduduk yang mempunyai halaman atau pekarangan agak luas.
- b) Sampah dimasukkan ke "**jugangan**", kalau kering kemudian dibakar. Cara ini cukup banyak dilakukan oleh penduduk terutama wilayah Terban bagian selatan.

Sampah ditampung - dibuang ke pinggir sungai

Cara ini banyak dilakukan terutama oleh penduduk yang berdiam dekat Sungai Code. Oleh warga setempat sampah-sampah tersebut dibuang di pinggir sungai, di lereng-lereng sungai. Sampah-sampah tersebut beragam jenis, termasuk bongkaran-bongkaran bangunan. Pembuangan sampah secara terbuka di pingiran sungai tersebut jelas dapat meratakan lereng-lereng sungai tersebut, tanah menjadi padat, mencegah erosi. Akan tetapi kalau ada banjir besar sampah tersebut akan larut. Hal ini akan menimbulkan masalah pencemaran air sungai yang cukup mengganggu. Pembuangan sampah oleh warga yang bermukim dekat Sungai Code tersebut, pada umumnya memberikan alasan mengapa mereka membuang sampah di lereng-lereng sungai tersebut yaitu :

- 1) sudah kebiasaan dari dulu, 2) tidak ada tempat lainnya dan praktis, 3) untuk menguat lereng sungai supaya tidak longsor. Oleh aparat setempat

sebenarnya sudah dibuat larangan bahwa penduduk tidak boleh membuang sampah di sungai tersebut. Penyuluhan-penyuluhan dan pendekatan-pendekatan sudah sering diberikan kepada warga setempat. Isi penyuluhan tersebut antara lain bahwa membuang sampah di sungai menyebabkan banjir, dapat merusak lingkungan, pencemaran dan sebagainya. Akan tetapi karena keterbatasan tempat, keadaan ekonomi yang pas-pasan, rendahnya pengetahuan mereka mengenai kebersihan lingkungan maka kebiasaan membuang sampah tersebut tetap berlangsung.

Responden mengaku bahwa mereka sudah sering mendengar informasi mengenai larangan membuang sampah di sungai dengan berbagai akibatnya. Informasi tersebut mereka peroleh antara lain dari Ketua RT/RW, Lurah, camat, pengurus LKMD, Tim Penggerak PKK, juga dari petugas Puskesmas, Depkes, melalui televisi, radio, dari surat kabar.

Dari uraian tadi dikatakan bahwa penanganan sampah di wilayah Terban sebagian ditangani sendiri, yaitu dibuang sendiri di TPS (Tempat Pembuangan Sementara), ditimbun, dibakar, dan dibuang di lereng sungai. Sedangkan sebagian lagi dikelola oleh RT - RW yang kemudian diambil oleh petugas sampah.

Mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga oleh RT - RW dilaksanakan oleh petugas sampah dengan membawa gerobak atau keseren berkeliling dari rumah ke rumah; atau petugas sampah mengambil di bak-bak penampungan milik warga di wilayah RT-RW tersebut, kemudian dibuang ke Container yang tersedia (milik DKP). Waktu pengambilan sampah oleh petugas sampah tersebut antara wilayah satu dengan lainnya tidak bersamaan. Ada yang setiap hari satu kali, ada pula yang sore hari. Sedangkan warga yang membuang sampah di bak-bak umum, waktunya juga sudah ditentukan yaitu pada pagi hari atau sore hari pukul 16.00 atau jam 17.00. Jadi waktu pengambilan sampah oleh petugas, maupun pembuangan sampah oleh warga waktunya tidak tentu.

Warga (sebagian produsen sampah)

↓
Ditampung di rumah (keranjang, tong, dan sebagainya)

↓
Diambil oleh petugas

↓
Bak penampungan (TPS) → petugas DPK → ke TPA

b. Lembaga-lembaga yang Mengelola Sampah

Diwilayah Terban penanganan sampah sebagian dikelola oleh RT-RW dan lembaga-lembaga sosial yang ada di wilayah tersebut seperti PKK, Dasa Wisma, Karangtaruna. Lembaga-lembaga tersebut mengkoordinasikan beberapa orang yang diberi tugas tersebut. Pembayarannya ada yang dengan sistem tarikan, yaitu menyeter ke tempat yang mengurus sampah atau membayar langsung kepada petugas pengambil sampah.

Seperti halnya penanganan sampah yang dikelola PKK di wilayah suatu RW, setiap rumah tangga di wilayah tersebut dipungut biaya Rp 100,- (seratus rupiah) untuk diberikan kepada petugas sampah. Sampah-sampah tersebut dibuang oleh petugas sampah di Jalan Sam Ratulangi. Tugas petugas sampah tersebut diatur oleh Ketua RW di wilayah masing-masing.

Ada juga Dasa Wisma di salah satu RW, membuat tempat sampah dari ban bekas dan mengusahakan gerobak sampah. Setiap rumah tangga ditarik biaya 100-500 rupiah guna biaya penanganan sampah. Penanganan sampah tersebut dikelola bersama-sama dengan pengurus RT-RW. Demikian juga pengadaan sarana maupun prasarana pembuangan sampah, dikelola oleh pengurus RT-RW setempat berkerjasama dengan PKK atau Dasa Wisma setempat. Biasanya biaya ditanggung bersama dan ditarik secara kolektif.

Besarnya uang untuk petugas sangat bervariasi, tergantung banyak sedikitnya sampah yang dibuang sehari-hari. Pembayarannya ada yang per-rumah tangga, ada yang rombo- ngan. Di samping itu tarikan uang sampah untuk rumah tangga berbeda besarnya dengan anak-anak kost. Tarikan yang sampah tersebut besarnya dari 250 rupiah sampai 300 rupiah per

bulan atau 40.000 rupiah. Kemudian pengurus RT akan memungut iuran ke setiap warga yang membuang sampah lewat pengambil sampah. Setiap rumah tangga tarikkannya tidak sama, tergantung luas tidaknya rumah dan jumlah keluarga. Dari 50 responden, 33 rumah tangga diantaranya membuang sampah di bak umum dan 17 diantaranya (51,5%) tidak ikut kelompok iuran pembuangan sampah, 48,5% yang ikut kelompok iuran.

Retribusi sampah bagi warga tersebut diatur dalam Perda nomor 2 tahun 1984 pasal 5, 8 yang bunyinya sebagai berikut. Pasal 5 berbunyi :

- 1). Setiap keluarga, lembaga dan perusahaan yang membuang di tempat penampungan sampah dan atau pembuangan sampah tersebut pasal 3 Peraturan Daerah dipungut retribusi sampah.
- 2) Wajib retribusi sampah adalah Kepala Keluarga, pengurus/ pemilik lembaga dan perusahaan
- 3) Perhitungan retribusi sampah didasarkan atas faktor- faktor :
 - a. Penggunaan bangunan
 - b. Luas bangunan
 - c. Letak bangunan

Kemudian pasal 8 yaitu mengenai pemungutan/pembayaran retribusi sampah yaitu :

- 1) Pemungutan retribusi sampah tersebut pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Instansi Teknis dan aparat Pemerintah Kelurahan.
- 2) Pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut ayat (1) pasal ini dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Rukun Kampung
- 3) Kepala Kelurahan, Camat dan Kepala Instansi Teknis bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan retribusi sampah
- 4) Hasil pungutan tersebut ayat (1) pasal ini disetor ke Kantor Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tarif retribusi sampah terutama diperuntukan bagi rumah- rumah di tepi Jalan Raya Khusus, rumah-rumah di tepi Jalan Raya Klas I, rumah-rumah di tepi Jalan Raya Klas II, rumah-rumah di tepi Jalan Besar Klas I, rumah-rumah di tepi Jalan Besar Klas II, rumah-rumah di tepi Jalan Samping Klas I, rumah-rumah di tepi Jalan Samping Klas II, rumah-rumah komplek Klas I, rumah-rumah komplek Klas II. Selanjutnya Jalan Raya Khusus adalah jalan-jalan utama seperti Jalan Magelang, Jalan Jend.

Sudirman, Jalan Malioboro, dan sebagainya. Sedangkan jalan raya Klas I misalnya Jalan Simanjuntak, Jalan Cik Di Tiro, Jalan Kusumanegara, jalan-jalan di kompleks Kotabaru dan sebagainya Jalan Raya Klas II yaitu yang berbatasan langsung dengan bangunan yang di tepi Jalan Raya Klas I; Jalan Besar Klas I berbatasan langsung dengan jalan besar/ umum yang diaspal; Jalan Besar Klas II berbatasan langsung dengan bangunan yang di tepi Jalan Besar Klas I; Jalan Samping Klas I berbatasan langsung dengan bangunan di tepi Jalan Samping Klas I; Komplek Klas I, bangunan yang ada di dalam kampung tidak berbatasan dengan jalan umum. Komplek Klas II, bangunan yang ada dalam kampung selain bangunan komplek Klas I atau geografis kurang baik.

c. Sarana dan Prasaran Pembuangan Sampah

Pada umumnya warga masyarakat Terban ada perhatian terhadap masalah kebersihan lingkungan, terutama penanganan sampah. Hal ini bisa dilihat dari usaha-usaha warga setempat untuk mengelola sampah di lingkungannya, baik yang ditangani sendiri maupun yang ditangani oleh pengurus RT-RW, PKK, LKMD dan sebagainya. Usaha-usaha mereka ini antara lain : 1) Hampir setiap rumah sudah memiliki tempat sampah, baik atas usaha sendiri maupun yang diusahakan RT- RW, PKK, dan sebagainya, 2) Usaha untuk pengadaan gerobak, atau keseran untuk mengangkut sampah baik atas usaha masyarakat maupun bantuan dari instansi yang berwenang, 3) Membuat tempat penampungan sementara (TPS) sampah berupa bak-bak permanen, 4) pengurus memantau kegiatan penanganan sampah dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan.

Pemantauan pembuangan sampah ini cukup mempunyai dampak positif untuk mendisiplinkan penduduk dalam hal ketertiban pembuangan sampah. Pemantauan ini dilakukan oleh seorang aparat kecamatan yang kadang-kadang memantau atau nongkrong di tempat - tempat yang menurut laporan atau kebetulan dia melihat hal yang tidak pada tempatnya yang dilakukan warga setempat. Tindakan tersebut kadang - kadang juga dilakukan oleh aparat kelurahan ke tempat-tempat warga yang agak ke dalam, yang sering dilaporkan ada sampah menumpuk belum di tangani. Pantauan dari aparat-aparat tersebut ternyata memang ada hasilnya : sering mereka menangkap basah warga yang tidak berdisiplin terhadap aturan yang sudah ada. Misalnya ada larangan untuk tidak membuang

sampah ditempat dan jam tertentu, tetapi ternyata ada beberapa warga yang melanggar ketentuan tersebut, sehingga terpaksa aparat kecamatan titip pesan lewat ketua RT-RW untuk menegur yang bersangkutan. Demikian juga aparat kelurahan yang memantau masuk kekampung, menemukan sampah yang sudah beberapa hari tidak dibersihkan padahal sudah ada teguran lewat RT-RW, terpaksa aparat kelurahan tersebut bekerja sendiri membawa gerobag mengangkut sampah tersebut. Oleh tindakannya itu warga sekitar menjadi risih, dan ternyata perbuatan menumpuk sampah itu tidak terulang lagi.

Produksi sampah di Kotamadya Yogyakarta per hari kurang lebih 1.240 m³, sedangkan kemampuan DKP untuk menangani sampah baru mencapai 828 m³. Hal tersebut dikarenakan daya dukung untuk pengelolaan sampah belum memadai yaitu sarana untuk mengangkut sampah maupun personil yang menangani pembersihan sampah. Sarana-sarana kerja yang dimiliki DKP sekarang ini terdiri dari :

- 1) Sarana untuk mengangkut sampah yaitu Roll Truck 6 buah, Dump Truck 5 buah, Fixed Truck 25 buah, Pick Up 3 buah, Bulldozer 2 buah, container 30 buah, gerobag 58 buah, becak sampah 3 buah.
- 2) Sarana untuk penampungan sampah, yaitu Tempat Penampungan Sampah Sementara ada 141 buah, dan Tempat Pembuangan Akhir ada 1 buah seluas $\pm$ 2 hektar.

Dengan sarana-sarana tersebut DKP berusaha melakukan pembersihan sampah kota dan mengelola taman-taman kota. Upaya-upaya yang dilakukan DKP untuk mewujudkan kota yang bersih dan indah ternyata diikuti oleh lembaga-lembaga baik negeri maupun swasta dengan misalnya menyumbang alat-alat pengangkut sampah. Sebenarnya pada tahun 1984 pernah dilakukan usaha sampah-sampah rumah tangga didaur ulang lagi yang dilakukan atas kerjasama dengan perusahaan swasta PT Sirna Sampah. Namun pihak kontraktor menghentikan usaha yang berada di Desa Dongkelan tersebut dengan alasan mesin rusak, sehingga kompos tidak bisa di produksi PT tersebut.

Penanganan pembersihan sampah di Kotamadya Yogyakarta dibagi dalam beberapa sektor. Setiap sektor disediakan tempat-tempat penampungan sementara (TPS). Untuk mengangkut sampah dari rumah tangga toko, rumah makan, hotel/losmen, pasar, dan sebagainya dengan menggunakan gerobag dan truk. Proses pengangkutannya dimulai dari bak

tempat penampungan sementara kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) dengan menggunakan Truk, Colt, Toyota Kijang, Dump Truck, Container. Jumlah tempat pembuangan akhir sekarang ini untuk Kodya Yogya ada tempat di daerah Bantul (wilayah Desa Bener dan Brengosan). Menurut hasil laporan penelitian Pemda dan PPLH-UGM 1986 disebutkan ada 4 tempat TPA yaitu : TPA Ngoto, Cambak, Brengosan, dan di Muja Muju.

Secara umum sarana maupun prasarana untuk penanganan sampah di wilayah Kelurahan Terban masih kurang memadai. Terutama tempat penampungan atau pembuangan sampah sementara; untuk meletakkan bak sampah atau container kesulitan tempat, di samping itu warga yang rumahnya ketempatan bak sampah atau container itu tidak mau. Mereka mengeluh mengenai bau dari sampah-sampah tersebut, dan di sekitarnya menjadi kotor. Keberatan dari warga tersebut tidak menyalahi aturan, karena sebenarnya ada syarat-syarat tertentu untuk penempatan container atau tempat penampungan dan pembuangan sampah. Syarat-syarat tersebut ditetapkan oleh Walikotamadya melalui Perda Pembersihan Sampah nomor 2 tahun 1984 pasal 3 , yaitu :

- a) Mudah dicapai
- b) Diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kebersihan, kesehatan lingkungan dan mempunyai daya tampung minimal volume sampah 2 hari dari lingkungan masing-masing.

Ketentuan tersebut agak sulit dilaksanakan dan menjadi masalah di wilayah ini, karena padatnya pemukiman penduduk sehingga kesulitan mencari tempat untuk meletakkan tempat sampah yang tidak mengganggu kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kesulitan masalah tempat penampungan sampah ini misalnya dialami warga yang bermukim di wilayah Terban bagian selatan. Di wilayah tersebut pernah terdapat tempat pembuangan sampah yang setiap hari diambil oleh petugas sampah. Akan tetapi tempat pembuangan sampah itu sekarang sudah tidak ada, sehingga penduduk di wilayah tersebut kalau membuang sampah harus berjalan agak jauh. Demikian juga di wilayah Terban bagian utara, karena kesulitan sarana pembuangan sampah, pernah warga di daerah tersebut akan menyewa truck untuk mengangkut sampah tetapi karena biaya sekali angkut cukup mahal (Rp. 40.000) maka tidak jadi dilaksanakan. Mereka kemudian minta ijin ke DPU untuk membuang sampah di depan RS

Bethesda, dan mengupah seorang petugas yang mengambil sampah dengan gerobag dibawa ke container di depan RS Bethesda dengan upah 40.000 rupiah per bulan dan membayar untuk DPU 20.000 rupiah. Jumlah pengeluaran itu dibagi 6 RT. Sedangkan gerobag berasal dari sumbangan seorang warga yang kebetulan menjadi pejabat.

Wilayah Terban timur, juga kesulitan mencari tempat pembuangan sampah. Wilayah tersebut sebenarnya mendapat bantuan tempat penampungan sampah dari DKP berupa container, tetapi karena kesulitan penempatannya akhirnya warga setempat membuang sampah pada bak sampah yang kurang memadai.

Tidak semua RW di Kelurahan Terban memiliki sarana maupun prasarana pembuangan sampah yang memadai. Jadi tidak semua wilayah RT-RW memiliki gerobag ataupun keseran untuk mengangkut sampah. Misalnya di wilayah Terban bagian selatan, wilayah ini tidak memiliki gerobag atau keseran serta tempat penampungan sampah yang cukup memadai. Padahal wilayah ini sangat padat dan dekat dengan Sungai Code. Oleh karena itu warga di daerah tersebut banyak yang memanfaatkan lereng Sungai Code untuk tempat pembuangan sampah. Di lain pihak untuk menempatkan tempat sampah di wilayah tersebut ternyata sulit karena keterbatasan tempat. Seperti diketahui rumah di wilayah tersebut amat padat dan tidak berhalaman sama sekali, jalan-jalan umum pun sempit. Dahulu pernah ditempatkan semacam gerobag di wilayah tersebut untuk menampung sampah warga setempat, tetapi karena meletakkannya berdekatan dengan rumah-rumah penduduk dan menyebabkan polusi bau di sekitarnya sehingga warga keberatan terhadap penempatan gerobag sampah tersebut akhirnya gerobag tidak dipakai.

Sarana dan prasarana yang ada untuk kebersihan sampah di samping mendapat bantuan dari DKP, juga berasal dari sumbangan dari salah seorang warga, sumbangan dari Panitia HKSAN, dan sebagian usaha swadaya masyarakat yang dikelola RT-RW. Personil pembersih sampah wilayah Terban ada 3 orang sedangkan volume sampah 5 m³ per hari. Kurang memadainya sarana pembuangan sampah menjadikan salah satu faktor warga membuang sampah tidak pada tempatnya. Di lain pihak pelaksanaan pengambilan sampah tidak berjalan dengan semestinya. Sehingga kadang-kadang sampai menumpuk lama hari sampah baru diambil. Pada hal warga merasa sudah membayar retribusi tetapi pelaksanaannya kurang. Jadi di sini diperlukan disiplin yang tinggi baik yang membuang sampah maupun petugas yang mengambil.

Responden pada umumnya juga berpendapat, sebaiknya apabila ada warga yang membuang sampah seenaknya atau tidak pada tempatnya langsung ditegur ditempat (76,0%) dan sebanyak 24,0% menghendaki langsung diberitahu atau diberi pengertian. Menurut mereka disiplin warga dalam penanganan sampah (tabel III.5) 62,0% berjalan cukup baik, artinya sudah melakukan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bersama, dan sebanyak 28,0% bersikap kurang baik, yaitu kurang melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan lingkungan, dan 10% mempunyai disiplin cukup. Responden yang mengatakan disiplin warga dalam pembuangan sampah kurang (28,0%) dengan alasan : 1) Tidak mempunyai tempat pembuangan sampah, 2) Tempat pembuangan sampah jauh dari rumah penduduk, 3) kebiasaan membuang sampah di sungai.

d. Hambatan dan Upaya Penertiban

Hambatan yang dimaksud di sini adalah beberapa hal yang menyebabkan mereka tidak melakukan pembuangan sampah dengan semestinya. Hambatan yang ada pada setiap tempat atau wilayah tersebut tidaksama. Jadi hambatan tersebut dapat bersifat fisik maupun karena faktor manusianya antara lain :

- 1) Banyaknya pendatang atau tempat-tempat kost yang induk semangnya tidak ada. Karena mereka pendatang, biasanya tidak menyadari adanya ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. Ketidakpedulian mereka ini kadang- kadang cenderung mengabaikan lingkungannya karena merasa tidak memiliki.
- 2) Keadaan ekonomi yang pas-pasan, dan tingkat pendidikan yang relatif rendah mempengaruhi tindakan mereka untuk mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungannya. Di samping itu pada umumnya mereka bermukim di kampung-kampung yang agak masuk ke dalam, sehingga hal ini memberikan anggapan kepada mereka bahwa " biarlah begini saya tidak ada yang melihat ". Terutama mereka yang tinggal dekat sungai biasanya mengambil jalan pintas. Di samping itu sehari-harinya mereka disibukkan untuk mencari nafkah, sebagian besar adalah sebagai sopir, montir, buruh bangunan, tukang becak, tukang parkir, penjaga toko, tukang jam, penjaga malam, dan sebagiannya. Di samping itu ajakan untuk menarik iuran setiap rumah

tangga yang dilakukan RW di wilayah Sungai Code agak terhambat, karena warga banyak yang menolak ternyata alasan sudah mempunyai tempat pembuangan sampah di pinggir sungai sampai sekarang program itu belum terealisasi.

- 3) Kurangnya bak-bak penampungan sampah, maupun sarana- sarana lainnya seperti gerobak dan sebagainya
- 4) Kadang-kadang ada beberapa warga yang tidak tertib dalam menyeter iuran bulanan untuk pengangkutan sampah, sehingga petugas pengangkutan sampah cenderung menunda, sehingga mempengaruhi kelancaran pengambilan sampah.
- 5) Seringnya penjual makanan ideran (keliling masuk kampung-kampung) yang biasanya membuang sampah seenaknya. Misalnya bungkus kantong sate, dan sebagainya.

Kelima hal itulah antara lain mengganggu kelancaran usaha kebersihan lingkungan. Namun demikian aparat setempat berusaha semaksimal mungkin untuk ketertiban kebersihan lingkungan. Mereka sebagai aparat maupun warga di lingkungannya mempunyai tanggung jawab untuk ikut menertibkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik peraturan-peraturan dari atas maupun ketentuan-ketentuan Hasil kesepakatan bersama. Untuk itu aparat setempat bersama masyarakat berusaha menertibkan aturan ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini tidak ada sanksi yang sifatnya memberi hukuman ataupun denda terhadap warga yang kurang tertib, mereka hanya melakukan tindakan-tindakan :

- 1) Meningkatkan yang bersangkutan pada setiap pertemuan- pertemuan antar warga di lingkungan RT/RW, sifatnya himbauan kepada warga
- 2) Teguran yang dilakukan secara kekeluargaan
- 3) Masyarakat melapor kepada RT/RW kalau ada warga yang bandel tidak tertib terhadap aturan yang ada. Aparat RT/RW sifatnya menampung, kemudian kalau laporan sudah berulang kali tetap tidak ada perubahan baru ada tindakan yang sifatnya administrasi yaitu,
- 4) Bila warga yang bersangkutan mengurus surat-surat seperti KTP dan surat keterangan lainnya diperingatkan dengan kata-kata misalnya "kalau menginginkan pelayanan yang baik harus tertib mengikuti aturan yang berlaku". Tindakan yang agak keras, mempersulit pengurusan surat-surat dari RT-RW sampai kelurahan.

Jadi bila dilihat dari lingkungan warga bermukim, masalah ketertiban atau kedisiplinan masyarakat dalam kebersihan sampah tergantung pada sarana yang tersedia dan kondisi lingkungan maupun masyarakatnya. Misalnya saja di wilayah Sagan, pada RT tertentu masyarakatnya cukup disiplin dalam kebersihan sampah, demikian juga masyarakat nampak bersih dan sehat. Hal ini karena lingkungan maupun anggota masyarakatnya sangat mendukung untuk itu, selain pendidikan rata-rata cukup tinggi juga tingkat ekonomi relatif cukup, sehingga usaha kebersihan sampah dapat terselenggara dengan lancar. Sebaliknya di wilayah kampung-kampung yang agak ke dalam, di samping lingkungan tidak mendukung karena permukiman sangat padat, juga rata-rata tingkat pendidikannya relatif rendah. Mereka kurang peduli pada masalah kebersihan dan kesehatan. Sementara itu banyak pendatang yang memilih menumpang di kampung-kampung, hal ini ikut mendukung tidak lancarnya usaha kebersihan sampah kerana biasanya mereka ini acuh tak acuh pada tatanan yang berlaku di lingkungannya.

2. Penanganan Limbah

Seperti halnya penanganan sampah, pembuangan limbah di lingkungan wilayah Terban ada yang tertib dan ada yang dibuang sembarangan. Semuanya itu tidak terlepas pada masalah sarana dan prasarana yang tersedia, serta kesadaran penduduk mengenal kebersihan lingkungan. Seperti kita ketahui tidak ditanganinya penanganan limbah secara baik akan berpengaruh pada kesehatan lingkungan, pencemaran air, sehingga timbul penyakit menular seperti penyakit perut, muntaber, dan sebagainya.

a. Sarana dan Prasarana Pembuangan Limbah

Sarana pembuangan limbah rumah tangga pada umumnya terselenggara dengan baik terutama di wilayah-wilayah bukan kampung. Pada umumnya di wilayah bukan kampung sarana pembuangan limbah cukup memadai. Sebaliknya di kampung-kampung sarana pembuangan limbah ada yang cukup memadai dan ada pula yang seadanya. Sehingga kalau hujan deras terjadi banjir, atau kalau terlalu banyak limbah yang masuk, air melimpah keluar saluran. Pada wilayah perkampungan tertentu (Terban Selatan), sarana pembuangan limbah kurang tersedia, sehingga

banyak limbah yang dibuang begitu saja di tempat terbuka (di halaman rumah). Sarana pembuangan limbah rumah tangga yang ada di wilayah Terban antara lain :

- 1) Dua saluran pembuangan limbah air yang cukup besar ada di wilayah Terban bagian timur yaitu pertama di dekat Rumah Sakit Panti Rapih. Rumah-rumah di pinggir jalan sepanjang Jalan Cik Di Tirol, Sagan, Purbonegaran, Pembuangan limbah air bermuara ke selokan tersebut. Sedangkan warga yang berdiam di kampung-kampung, secara gotong-royong, membuat saluran-saluran kecil menuju ke selokan besar itu. Saluran kedua yaitu selokan di Jalan Simanjuntak, limbah-limbah penduduk di wilayah Terban bagian barat mengalir ke selokan ini.
- 2) Secara gotong-royong penduduk membuat selokan atau got tertutup di sepanjang jalan kampung dan setiap 8-10 m dibuat bak pengontrol. Saluran tersebut hanya untuk membuat limbah dapur dan kamar mandi. Jadi kadang-kadang bak pengontrol tersebut dikontrol apakah ada penyalahgunaan, misal untuk pembuangan tinja.
- 3) Pembuangan limbah kamar mandi maupun tinja melalui asenering.
- 4) Membuat sumur peresapan untuk limbah WC.
- 5) Membuang limbah maupun tinja ke sungai, ada yang langsung pergi ke sungai, ada yang membuat saluran dari rumah menuju ke sungai.
- 6) Dibuang ditempat terbuka (limbah kamar mandi/limbah dapur).

Perilaku pembuangan limbah yang dilakukan responden diketahui bahwa yang membuang limbah kamar mandi maupun dapur ke selokan besar (langsung) 46,0%; warga yang membuang limbahnya melalui got-got (saluran) yang dibuat bersama 22,0%; yang dibuang melalui asenering 12,0% dibuang begitu saja di tempat terbuka 8,0% dan 8% dibuang kejugangan sisanya dibuang ke bak peresapan (4,0%) (tabel III.6).

b. Pemeliharaan Tempat-tempat Pembuangan Limbah

Pada umumnya kondisi selokan yang ada di wilayah Terban lancar, artinya tidak pernah macet atau tersumbat. Di wilayah tertentu kadang-kadang ada yang macet; menurut mereka karena selokan tersebut diameternya kecil. Sedangkan selokan-selokan kecil yang ada ditengah-tengah kampung, kadang-kadang tersumbat oleh limbah dapur, kapas, dan sebagainya. Penanganan limbah pada umumnya cukup baik, terutama

di wilayah yang pemukimannya teratur-terata rapi, seperti di wilayah Terban bagian utara. Sedangkan di Terban bagian selatan dan timur ada ketidak lancaran di tengah-tengah lampung. Hal tersebut karena adanya tindakan yang tidak berdisiplin dari warga yang bersangkutan terhadap aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Menurut mereka, keadaan tersebut karena ada sementara warga, terutama anak-anak kost yang membuang kotoran kapas, dan sampah lainnya di got-got terbuka tanpa memperhatikan air yang mengalir cukup atau tidak. Mereka hanya merasa membuang sedikit, tetapi karena dilakukan berkali-kali menjadikan got itu tersumbat.

Untuk mengatasinya dilakukan melalui usaha-usaha pemeliharaan selokan yang dilakukan warga, yaitu :

- 1) Mengadakan kerja bakti secara gotong royong di lingkungan RT-RW untuk membersihkan got, dan bak-bak pengontrol saluran selokan satu bulan dua kali terutama sebelum musim hujan tiba.
- 2) Apabila got tersumbat secara spontanitas langsung dibersihkan oleh warga secara gotong royong
- 3) Pemberitahuan lewat RT-RW untuk tidak memasukan sampah atau benda-benda lain ke selokan.

Saluran bak-bak pengontrol pada selokan itu harus sering dikontrol, karena walaupun sudah ada aturan tak tertulis bahwa selokan tersebut hanya untuk membuang limbah dapur dan kamar mandi ternyata masih terdapat warga yang menyalahgunakan untuk membuang kotoran lain, atau membuat saluran tinja ke selokan tersebut. Jadi disiplin warga dalam kebersihan tempat pembuangan limbah masih kurang.

Pembuangan limbah kamar mandi maupun tinja yang menggunakan jasa asenering tidak banyak. Hal ini disebabkan perlu banyak biaya untuk saluran ke asenering. Walaupun demikian kecepatan dan ketepatan dalam menangani pemeliharaan asenering sangat diperlukan. Misalnya pernah terjadi asenering macet dan terlambat menanganinya karena petugas yang dilapori tidak cepat memperbaiki, sehingga 7 (tujuh) sumur penduduk yang ada di wilayah tersebut terkena pencemaran, air sumur menjadi berbau. Untuk mengatasi hal tersebut warga secara gotong royong mengumpulkan uang untuk menggunakan jasa pompa tinja dengan biaya 25.000 rupiah ditanggung warga RT bersangkutan yang menggunakan jasa pompa tinja.

Penduduk yang menggunakan sumur peresapan pun jumlahnya

tidak banyak. Biasanya yang mempunyai sumur peresap adalah yang mempunyai halaman cukup luas. Hal ini juga memerlukan biaya untuk membuat sumur peresap, sehingga hanya dapat dilakukan oleh warga yang cukup mampu.

Pembuangan limbah kamar mandi, maupun tinja ke sungai, selain disebabkan rendahnya kesadaran masyarakatnya terhadap kesehatan lingkungan tetapi lebih banyak juga disebabkan oleh masalah kemampuan ekonomis, tempat khusus pembuangan tinja diperlukan biaya yang cukup dan tempat yang memadai. Di wilayah Terban bagian selatan, terutama di dekat sungai dan rumah-rumah berhimpitan tidak teratur tanpa halaman tersisa, sehingga untuk membuat tempat WC ataupun sumur peresapan agak kesulitan tempat. Mereka yang melakukan pembuangan tinja ke sungai di samping didukung oleh kebiasaan, juga karena lokasinya dekat jaraknya dari rumah ke sungai kurang dari 300 meter.

Pada umumnya mereka berpendapat bahwa sejak kecil mereka membuang limbah ke sungai tersebut, walaupun sebagian besar warga di daerah tersebut mengetahui bahwa membuang limbah ke sungai tersebut mengganggu lingkungan. Jadi disini, nampaknya kebiasaan terjadi karena keterbatasan tempat dan ekonomi sehingga membuat mereka tidak memperdulikan lingkungannya. Keadaan ini tidak hanya terjadi di wilayah dekat Sungai Code saja, karena dua kawasan sungai lainnya (Sungai Winongo dan Gajah Wong) juga menjadi tempat pembuangan segala macam limbah penduduk yang bermukim didekat sungai tersebut.

Dari hasil penelitian PPLH-UGM 1992, ketiga sungai tersebut merupakan sungai yang terkena proyek Prokasih 1992/1993. Berbagai aktivitas yang dilakukan penduduk di kawasan sungai tersebut menyebabkan ketiga sungai itu terkena pencemaran. Di pinggiran Sungai Code di wilayah Terban terdapat sumur-sumur maupun sumber-sumber yang dipakai penduduk untuk mandi dan mencuci, serta ada pula warga yang mengambil untuk keperluan makan dan minum. Ada kemungkinan air sumur tersebut sudah tercemar, mengingat sangat dekat sekali dengan air sungai, atau terjadi perembesan limbah yang masuk ke sungai tersebut. Di samping itu pembuangan limbah dari warung-warung makan (52 warung), dari toko (60 toko), kaki lima (47), industri rumah tangga (25 buah), rumah makan (2 rumah makan).

Kebanyakan dari mereka yang mempunyai kebiasaan membuang limbah tidak pada tempatnya antara lain disebabkan karena : 1) tidak mempunyai tempat penampungan atau pembuangan, 2) hanya mencari

mudahnya dan dekat. Untuk itu pihak aparat setempat hanya berusaha memberi pengertian terhadap pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya, dan berusaha mengarahkannya dengan gotong-royong untuk membuat saluran yang baik.

Penduduk yang membuang untuk membuat saluran yang baik. Penduduk yang membuang limbah dapur maupun kamar mandi begitu saja (tanpa penampungan) di tempat terbuka, beranggapan bahwa air yang dibuang tersebut akan meresap ke tanah, dan sekaligus menyirami tanah agar tidak berdebu. Mereka tidak menyadari bahwa tindakannya itu mengganggu lingkungan sekitarnya.

3. Usaha-usaha yang Dilakukan Untuk Kebersihan Lingkungan

Aparat setempat maupun organisasi-organisasi sosial yang ada di wilayah Terban secara terpadu bersama-sama warga mengadakan kegiatan-kegiatan bersama untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu :

- 1) Pengurus RT bersama PKK dan Dasawisma secara terpadu bersama warga mengadakan kegiatan-kegiatan bersama untuk menciptakan lingkungan yang bersih, yaitu menyediakan keranjang sampah, menangani sampah dengan biaya dari swadaya warga atau sebagian diambillkan dari kas PKK.
- 2) Usaha untuk menambah dan memperbaiki sarana-sarana pembuangan sampah, yaitu berusaha mendapat gerobag sampah baik pembuatan tempat-tempat penampungan sementara (TPS) baik permanen maupun tidak permanen
- 3) Usaha pembuatan asenering dengan swadaya masyarakat, dan membayar retribusi kepada DPU setiap enam bulan sekali.
- 4) Mengajukan untuk membuat taman di lingkungan rumah masing-masing. Anjuran tersebut selalu dibicarakan setiap ada pertemuan baik di tingkat RT, RW, Kelurahan.
- 5) Setiap sebulan sekali atau dimana perlu diadakan kerja bakti untuk masing-masing RT yaitu membersihkan selokan, air hujan jambangan, membenahi jalan setapak, membenahi tepi-tepi sungai, membuang sampah.
6. Mendatangkan petugas dari Puskesmas lewat Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa atau PKMD bersama Dasawisma.

- 7) Mengadakan lomba kesehatan lingkungan yang diadakan di setiap RW antara lain lomba penanganan sampah, penanganan air limbah, WC, dan sebagainya. Instansi-instansi yang terlibat misal dari Depkes, Depsos, yayasan swasta (Duta Wacana, Taman Siswa) membantu untuk mengkoordinasikan hal tersebut.
- 8) Dianjurkan setiap RT-RW untuk ikut memasyarakatkan Perda tentang sampah pada setiap pertemuan yang diadakan di wilayah masing-masing.
- 9) Penyuluhan mengenai lingkungan pada setiap pertemuan yang diadakan dari tingkat RT, RW, Kelurahan .
- 10) Melalui permainan simulasi masalah lingkungan yang sehat, bersih.
- 11) Aparat pemerintah setempat memberi contoh atau teladan.
- 12) Aparat pemerintah tingkat kecamatan, kelurah RT - RW memantau secara langsung ke tempat-tempat yang dinilai kurang tertib dalam kebersihan lingkungan.
- 13) Memasang slogan-slogan kebersihan lingkungan di sudut - sudut jalan kampung, misalnya lingkungan bersih warga sehat, atau bersih-indah-nyaman, dan sebagainya.
- 14) Anjuran, teguran, peringatan untuk membuang sampah pada tempatnya, dan penampungan air limbah.

Dilihat dari sederetan kegiatan yang dilakukan aparat setempat baik RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, organisasi sosial, dan warga setempat, menunjukkan bahwa warga di wilayah Terban mempunyai perhatian terhadap masalah kebersihan lingkungan. Beberapa upaya tersebut tanpa dukungan warga tidak akan terwujud. Oleh sebab itu partisipasi warga dalam hal ini sangat menentukan. Namun berbagai kendala agak mengganggu kelancaran usaha-usaha tersebut, seperti telah disinggung di muka misalnya keadaan ekonomi yang pas-pasan, keterbatasan tempat, padatnya pemukiman, sarana maupun prasarana yang terbatas, pendidikan yang rendah dan sebagainya. Untuk itu usaha mengajak warga untuk merubah kebiasaan dari tidak memperhatikan lingkungan menjadi peduli pada lingkungan yang sehat dan bersih, memerlukan proses yang panjang dan bertahap. Semuanya itu yang paling penting dilakukan adalah menumbuhkan sikap disiplin warga setempat. Sikap disiplin ini merupakan modal penting untuk mencapai tujuan.

B. DISIPLIN DALAM PERTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN SOSIAL

Sebagaimana kita ketahui untuk menghidupkan dan menggerakkan pranata-pranata sosial yang ada, pemerintah berusaha mewujudkannya melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan. Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada sekarang ini seperti LKMD, PKK dan sebagainya adalah organisasi bentukan pemerintah untuk menghidupkan kembali pranata - pranata sosial yang berakar dari adat kebiasaan. Misalnya gotong royong dapat lebih dihidupkan fungsinya dalam masyarakat bersangkutan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah lembaga sosial yang terdapat baik di desa maupun kelurahan ini merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintah, maupun aspirasi masyarakat baik yang sifatnya suadah melembaga dalam hidup sehari-hari maupun yang tumbuh karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Lembaga ini sebenarnya adalah penyempurnaan lembaga yang sudah ada sebelumnya yaitu Lembaga Sosial Desa (LSD) yang dibentuk berdasarkan Kepres no. 81/1071 dan diubah menjadi LKMD berdasarkan Kepres no. 28/1980. Organisasi ini (LKMD) merupakan lembaga yang bersifat lokal. Untuk mempermudah pelaksanaan maupun pengawasan dibentuk unit-unit pembantu yang langsung bertanggung jawab kepada LKMD yaitu Kelompok Kerja LKMD (KK-LKMD). Selanjutnya untuk menjalankan programnya LKMD mempunyai seksi-seksi antara lain keamanan, penerangan, pembinaan kependudukan dan Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial dan sebagainya. Masing-masing ketua seksi tersebut mempunyai tugas untuk memimpin dan mengendalikan seksinya masing-masing.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa menempatkan gerakan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu program utamanya . Organisasi PKK terdapat pada setiap Propinsi, kabupaten / kotamadya dan kecamatan. Pada tingkat desa/kelurahan PKK merupakan salah satu seksi dari LKMD. Oleh sebab itu kegiatan PKK-LKMD pada tingkat desa/kelurahan diselenggarakan oleh seksi PKK - LKMD desa/ kelurahan. Untuk mempermudah pembinaan, setiap sepuluh keluarga ditunjuk seorang penaggung yang selanjutnya disebut Dasa Wisma.

Dalam kegiatannya baik LKMD maupun PKK, memfungsikan dan menggerakkan kembali semangat gotong royong yang sudah melembaga dalam kehidupan sehari masyarakat ke dalam program-programnya.

Kemudian lembaga-lembaga masyarakat lainnya seperti arisan, menjadi salah satu kegiatannya untuk mengumpulkan anggota.

Pengurus LKMD maupun PKK terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa atau kelurahan setempat, antara lain pemuka adat, agama, pendidik, pemuda wanita dan sebagainya. Sedangkan keanggotannya adalah semua penduduk yang ada di wilayah itu secara otomatis menjadi anggota LKMD yang wajib membantu dan menyalurkan partisipasinya melalui LKMD.

Kelancaran berlangsungnya program-program yang dicanangkan LKMD maupun PKK atau organisasi lainnya, tergantung kepada kesadaran dan tanggung jawab anggota dan pengurusnya. Untuk itu dibawah ini dapat diikuti aktivitas-aktivitas kegiatan sosial masyarakat Terban, yang bisa dilihat antara lain ada tidaknya kerjasama yang baik antara warga dengan pengurus maupun pemerintah, serta kedisiplinan warga maupun pengurus dalam melaksanakan program-programnya.

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Sosial

Kelurahan Terban merupakan bagian dari wilayah kota yang dekat dengan pusat kota Yogyakarta, ternyata, masyarakatnya memiliki semangat yang cukup baik dalam usahanya untuk ikut berpartisipasi mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah mendapat tanggapan positif. Berbagai macam kegiatan sosial tumbuh dan berjalan baik di wilayah ini. Walaupun ada sebagai sebagian kecil yang kurang perhatian terhadap kegiatan sosial yang ada, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa mereka menunjukkan adanya kerja sama yang baik. Hal ini dapat diketahui dari kehadiran warga dalam kerja bakti gotong royong, menghadiri rapat LKMD, melayat, berkunjung pada keluarga yang kena musibah sakit, dan saling bahu membahu dalam mengatasi kesulitan warga. Warga umumnya sadar bahwa kegiatan sosial itu merupakan bagian dari kehidupan bersama dengan warga lain untuk secara bersama-sama saling memberikan bantuan dan menolong sesamanya. Kegiatan arisan yang diadakan warga baik itu ibu-ibu maupun bapak-bapak secara rutin setiap bulan merupakan wujud kebersamaan mereka.

Rapat warga yang diadakan di tingkat RT maupun RW merupakan pertemuan yang sangat baik untuk mewujudkan kebersamaan mereka. Temu warga ini karena kesimbangan mereka masing-masing merupakan saat

yang tepat untuk saling bertemu di antara warga masing-masing. Temu warga semacam ini telah berjalan baik, Pada kesempatan temu warga, mereka dapat saling mengemukakan usulan dan pendapatnya demi keperluan bersama. Pembinaan masyarakat dapat dicapai melalui temu warga ini. Demikian juga program-program pembangunan dari pemerintah Pemuda di wilayah Terban pun tidak ketinggalan dapat diketahui dan ditanggapi bersama sehingga lancar. Pemuda ikut aktif dalam kegiatan sosial. Mereka ini terwadahi dalam organisasi sosial Karangtaruna dari tiap-tiap kelompok ini bertemu secara rutin untuk membicarakan kepentingan mereka dalam hal mencapai tujuan yang diinginkan, juga untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi, jadi secara garis besar kegiatan - kegiatan sosial yang berlangsung di wilayah Terban yaitu arisan, siskamling, bantuan ekonomi lemah, gotong - royong.

Arisan. Arisan merupakan bentuk peguyuban yang menjadi sarana pokok dalam setiap kegiatan pertemuan rutin antar anggota organisasi sosial, misalnya PKK, Dasawisma, Karangtaruna dan sebagainya. Arisan juga merupakan alat pengendali yang dapat mengatur, mengumpulkan anggota sedemikian rupa, sehingga tujuan dan program untuk memupuk kerukunan, kebersamaan untuk saling menolong. Jay menyebutkan arisan berasal dari kata aris yang ada hubungannya dengan kerukunan dan saling tolong menolong yang oleh Jay disebut sebagai *social harmony* atau *mutual helpful* (Syafri, 1977).

Aktivitas maupun jadwal pertemuan antara kelompok arisan satu dengan lainnya tidak sama. Dalam suatu wilayah kecil sampai besar dari tingkat RT, RW, kelurahan sampai kecamatan, ada kelompok-kelompok arisan dari Dasawisma, PKK, Karang taruna. Jadi kelompok-kelompok arisan ini ada di tingkat RT, tingkat RW, kelurahan dan seterusnya. Aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan selain penarikan arisan serta simpan-pinjam, juga menghimpun dana sosial dari para anggota yaitu dana kematian, dan sehat, dan sebagainya mengikuti situasi dan kondisi. Untuk keperluan-keperluan seperti itu anggota biasanya ditarik iuran yang besarnya 500 - 1000 rupiah atau menurut kemampuan. Uang kas yang tersimpan kecuali dimanfaatkan untuk dana kematian, juga dipergunakan untuk keperluan lain yang telah diputuskan. Di wilayah Terban kegiatan-kegiatan sosial yang akan dilaksanakan biasanya diinformasikan oleh pengurus dalam pertemuan-pertemuan arisan. dana sosial yang ditarik dari anggota tersebut merupakan bentuk bantuan yang diberikan anggota dengan penuh kerelaan. Penarikan dana sosial tersebut merupakan bentuk kerjasama sebagai salah satu manifestasi rasa kekeluargaan.

Keanggotaan arisan tersebut tidak memandang golongan, semua anggota diperlakukan sama. Artinya tidak membedakan ekonomi lemah ekonomi tinggi atau yang berpendidikan tinggi dengan yang rendah, mereka sama - sama duduk bersama . Boleh dikata arisan ini disamping mengkrabkan anggota juga memupuk solidaritas sosial.

Acara-acara arisan yang berlangsung di tingkat RT, RW, kelurahan biasanya kurang lebih sama, antara lain : pelaksanaan arisan itu sendiri, demonstrasi ketrampilan dari anggota maupun mengundang dari luar, ceramah, pengumuman-pengumuman, sebagai media untuk menyampaikan pesan - pesan maupun instruksi - instruksi dari kelurahan, kecamatan dan sebagainya.

Hal-hal yang cukup positif dan adanya arisan ini antara lain secara tidak langsung anggota belajar untuk menghargai waktu, membagi waktu, belajar melaksanakan keputusan- keputusan yang telah disepakati bersama, menambah ketrampilan dan pengetahuan, dan sebagainya. Terselenggaranya arisan ini terutama ditentukan juga oleh sikap kedisiplinan anggotanya maupun pengurusnya. Dalam hal ini kelompok- kelompok arisan di wilayah Terban yang terwadahi organisasi sosial PKK, Dasawisma berjalan cukup baik. Meskipun kedisiplinan untuk tepat waktu dalam arisan masih belum mantap, tetapi untuk acara-acara lainnya berjalan cukup lancar.

a. Bantuan Ekonomi Lemah

Bantuan tersebut berbentuk modal yang diberikan kepada rumah tangga yang usahanya memerlukan bantuan modal. Usaha yang dirintis PKK ini bekerjasama dengan Dinas Sosial. Bantuan modal yang sudah terealisasi antara lain kepada tukang cuci untuk membeli alat jemuran, keranjang cucian dan ember. Bantuan juga diberikan pedagang kecil untuk membeli peralatan. Besarnya bantuan rata-rata sama yaitu 50.000 rupiah. dana yang dipinjamkan tersebut dengan harapan untuk dikembangkan. Untuk itu agar usaha tersebut dapat diketahui perkembangannya, setiap sebulan sekali diadakan pertemuan.

Bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan juga dilakukan oleh Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) yang merupakan program dari BKKBN. Jumlah bantuan modal yang diberikan 200.000 rupiah - 500.000 rupiah. Setiap bulannya harus melaporkan perkembangannya ke BKKBN dan angsuran pinjaman disetor lewat BRI.

Usaha Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan (UPPK) juga memberikan pinjaman modal kepada usaha ekonomi lemah. Bantuan tersebut disalurkan kepada anggota dengan diberi bimbingan untuk memanfaatkannya. Personil dari UPPK di wilayah Terban diambil dari PKK. Jadi UPPK ini merupakan seksi tersendiri.

Pemberian bantuan modal dengan harapan untuk meningkatkan perekonomian warga tersebut, dibutuhkan kedisiplinan dalam pengelolaannya. Artinya pemberi dana maupun yang diberi dana konsekuen terhadap keputusan-keputusan yang telah disepakati bersama.

b. Mencarikan Kesempatan Bekerja

Usaha ini sangat positif karena menampung pemuda-pemudi putus sekolah untuk disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang positif. Usaha tersebut ditangani oleh kelompok pemuda Karangtaruna Kelurahan Terban. Untuk mendukung kelancaran usaha ini diusahakan bantuan dari berbagai instansi terkait. Dalam hal ini campur tangan Kepala Kelurahan sangat melancarkan usaha-usaha yang dirintis Karangtaruna.

Pemuda- pemudi putus sekolah yang akan dibina sudah didata terlebih dahulu oleh pihak kelurahan, kemudian lurah bersama Ketua Pemuda Karangtaruna menghubungi instansi terkait seperti Depsos, Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) dan toko-toko, pasar, terminal, yang berada di lingkungan wilayah Kelurahan Terban.

Melalui usaha yang dilakukan pihak kelurahan itu, beberapa pemuda putus sekolah tersebut dilatih atau dikursus ketrampilan, misalnya montir, menjahit, elektronik, tukang cukur. Diharapkan dengan bekal keterampilan tersebut mereka bisa mendapatkan peluang pekerjaan sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya. Usaha ini ternyata cukup berhasil, karena beberapa yang pernah dikursus sudah mendapatkan pekerjaan yang layak.

Adanya Pom Bensin, terminal pasar, sederatan toko, rumah makan, memberikan keuntungan pihak aparat setempat untuk menyalurkan pemuda-pemudi putus sekolah tersebut, menjadi pekerja yang mempunyai penghasilan. Banyak pemuda-pemudi di wilayah Terban yang sudah tertampung di pekerjaan- pekerjaan sektor informal ini, misalnya menjadi tukang parkir di toko Mirota Kampus, Golden Kampus, di rumah makan dan sebagainya, ada juga yang menjadi penjaga malam pom bensin, terminal, pasar, beberapa ada yang menjadi penjaga toko, menjadi sopir, kenek, pengurus terminal, pekerjaan di Hotel Santika, Foto copy dan sebagainya.

Uluran tangan dari para pemilik toko, rumah makan, pasar, terminal, dan sebagainya untuk menerima warga Terban tersebut sebagai pekerja, merupakan bukti keikutsertaan atau partisipasi mereka sebagai warga Terban untuk ikut menjaga ketertiban serta membantu memberikan peluang bekerja bagi yang menganggur.

c. Gotong royong

Di wilayah Terban rasa kebersamaan di antara warga masih tampak sekali. Hal ini bisa dilihat misalnya bila ada warga yang sedang kena musibah kematian. Secara spontan warga disekitarnya memberikan bantuan baik berupa tenaga, pikiran maupun uang. Saling menolong ini tanpa memandang kaya atau miskin. Apabila kesepakatan biaya, urusan pemakaman biasanya dipikul warga bersama pengurus kampung. Ibu-ibu yang tergabung dalam PKK, Dasawisma juga berparti sipasi untuk meringankan beban yang kena musibah. Kelompok ini biasanya yang mengambil inisiatif untuk merawat jenazah yang disesuaikan dengan agamanya. Warga pemilik toko, rumah makan juga ikut melayat, walaupun biasanya yang berangkat pekerjanya.

Bentuk kebersamaan yang lain misalnya bila ada warga yang sakit. Warga secara berkelompok maupun perorangan datang menengok. Apabila membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengobatan, biasanya pengurus-pengurus PKK, Dasawis ma atau RT mengadakan iuran untuk membantu pengobatan. Saling menolong dan memberi tersebut juga tampak bila ada warga yang sedang punya hajad perkawinan atau khitanan. Partisipasi warga tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga tenaga.

Selanjutnya orang-orang jompo juga mendapat perhatian dari warga maupun pengurus PKK setempat. Setiap dua bulan sekali diadakan pertemuan dengan orang-orang jompo. Pertemuan tersebut diisi dengan perbincangan dan sedikit membawa buah tangan untuk mereka.

Gotong royong untuk kebersihan kampung juga berjalan cukup baik. Warga secara bergotong royong mengumpulkan dana untuk membuat bak-bak penampung sampah. Partisipasi masyarakat dalam gotong royong membersihkan got, membuat pos-pos ronda, pembenahan gang-gang kampung dan sebagai nya.

d. Siskamling

Kegiatan jaga - ronda ini oleh beberapa hal ada yang tidak berjalan lancar di tingkat RT-RW. Beberapa RT kegiatan siskamling masih berjalan lancar sedangkan, di RT tertentu siskamling macet. Kemacetan tersebut sebagian besar karena didukung oleh keadaan situasi yang aman, sehingga masyarakat menganggap tidak perlu siskamling. Siskamling digalakan biasanya apabila kebetulan ada gangguan keamanan, atau akan ada pemilu, dan sebagainya. Faktor kedua, banyaknya pendatang (pemondok) di wilayah masing - masing RT-RW menyebabkan siskamling berjalan musiman. Jadi apabila musim ujian siskamling tidak bisa berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan, karena banyak yang belajar, sebaliknya musim liburan sekolah/semester siskamling di wilayah RT-RW tertentu ada yang terhenti kegiatannya karena banyak yang pulang atau pergi. namun demikian keamanan dan ketertiban di wilayah Terban pada umumnya baik.

2. Masalah-masalah yang Ada

Sebagaimana telah disebutkan bahwa di wilayah Terban heterogenitas masyarakatnya cukup tinggi, baik dilihat dari mata pencahariannya, maupun keadaan ekonomi, serta daerah asal. Oleh sebab itu diwilayah Terban ada kelompok elite, kelompok buruh dan sebagainya. Diwilayah Terban bagian timur misalnya ada asrama mahasiswa Aceh, Asrama Kalimantan, Timor-Timur dan sebagainya. Sementara itu kelompok pemilik-pemilik toko, rumah makan terdapat di sepanjang jalan besar wilayah Terban yang merupakan kelompok - kelompok pengusaha. Sedangkan Terban bagian selatan (belakang pasar) banyak yang berprofesi sebagai tukang, buruh, wiraswasta. Di tengah-tengah kampung tersebar tempat-tempat pemondokan baik pemondokan pelajar, mahasiswa, maupun pemondokan pedagang kaki lima misal dari Jawa- Barat, kelompok penjual bakso dari Wonogiri, dan sebagainya. Keanekaragaman ini memberikan kondisi yang kurang menguntungkan bagi pelaksanaan kegiatan sosial.

Warga yang bermukim di pinggir jalan besar yaitu pemilik- pemilik toko, rumah makan, dan sebagainya biasanya kesulitan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial kampung. Kelompok ini biasanya mengirimkan tenaga dari pekerjanya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan kampung. Demikian juga pada kelompok elite, mereka juga mengirimkan pembantunya dengan alasan kesibukkan.

Kelompok ini adalah dokter, dosen, dan sebagainya. Sebaliknya di wilayah yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai tukang, buruh, sopir, sebagainya sulit untuk meluangkan waktu berkumpul bersama. Sementara itu para pemondok biasanya kurang peduli terhadap lingkungannya.

Permasalahan lainnya yaitu di wilayah Terban khususnya warga yang bermukim di pinggir Kali Code. Di wilayah itu ada pemukim yang warganya banyak pendatangannya dari berbagai tempat. Sebagian dari mereka ada yang belum mempunyai rumah tetap untuk tempat tinggal. Warga-warga inilah yang memerlukan perhatian pembinaanya bagi pengurus untuk mengajak mereka itu berpartisipasi dalam kegiatan sosial pengurus harus berja keras melakukan pendekatan secara bertahap. Pada mulanya mengalami kesulitan, akan tetapi berkat ketlatenan sedikit demi sedikit mereka bisa berbaur dan ikut dalam kegiatan kampung.

Dilihat dari keseluruhan: wilayah warga cukup beragam. Akan tetapi antara penduduk asli dan pendatang telah berbaur. Walaupun kadang-kadang mereka tidak dapat bersama-sama mengikuti kegiatan sosial, namun pada kesempatan lain mereka kadang-kadang bertemu.

Kondisi yang demikian itu diperkuat adanya data yang menunjukkan bahwa pendatang (pemondok) pada umumnya kurang peduli terhadap kegiatan-kegiatan kampung (65%), disusul kemudian kelompok-kelompok elite (20%), dan kelompok bawah (14%).

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, bukan berarti kegiatan-kegiatan sosial di wilayah Terban menjadi terhambat, akan tetapi untuk sekedar menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan di wilayah Terban tidak berjalan mulus atau tanpa ada permasalahan. Justru adanya keanekaragaman kelompok ini mamacu kepada aparat setempat baik lurah maupun RT-RW untuk mencari jalan atau alternatif-alternatif lain supaya mereka yang sibuk ini dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kampung. Keadaan ini pada sisi lain malahan memberikan kesempatan kepada warga tersebut (yang tidak bisa ikut kegiatan kampung) untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Hal-hal lain inilah yang sebenarnya juga amat dibutuhkan oleh warga Terban, dan kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh aparat setempat. Jadi para dokter, dosen itu diminta untuk memberikan partisipa sinya dalam bentuk ceramah, penyuluhan kesehatan untuk warga Terban, sedangkan bagi pemilik-pemilik toko tersebut ditunjuk sebagai koordinator. Apabila ada surat-surat undangan dari kampung cukup diserahkan kepada koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada lainnya.

Dengan kata lain setiap permasalahan yang ada oleh aparat setempat diusahakan jalan keluarnya supaya kegiatan-kegiatan sosial dapat dilaksanakan dengan baik. Usaha-usaha tersebut paling tidak dapat menekan seminimal mungkin kesenjangan hubungan antar warga, jadi ada Interaksi dalam bentuk-bentuk lain (misalnya ceramah, penyuluhan dan sebagainya).

Bagi orang-orang yang sibuk karena tugas dan profesinya permintaan untuk memberikan ceramah maupun menjadi donatur merupakan konsekuensi mereka sebagai warga untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kampung.

3. Usaha-usaha Yang Dilakukan

Partisipasi warga dalam kegiatan sosial pada umumnya cukup baik. Hal ini dibuktikan adanya beberapa kejuaran yang telah diraih oleh Kelurahan Terban antara lain mendapat penghargaan dalam lomba Kesadaran Hukum (Kadarkum), kejuaraan lingkungan dalam lomba P2WKSS, serta sebagai daerah percontohan baik di bidang penataan lingkungan maupun lainnya. Semuanya itu di samping partisipasi dari warga juga adanya beberapa upaya yang telah dilakukan oleh aparat setempat.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada umumnya warga di Kelurahan Terban tanggap terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan di wilayahnya. Namun demikian terdapat kendala-kendala yang secara tidak langsung menyebabkan sekelompok warga tidak bisa aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Permasalahan-permasalahan inilah yang diupayakan oleh aparat setempat untuk dicarikan jalan keluarnya. Untuk melakukan hal itu tidaklah mudah, karena permasalahannya cukup kompleks. Tiap-tiap warga yang dianggap kurang tanggap terhadap kegiatan-kegiatan kampung bermacam-macam alasannya.

Berhubung permasalahannya menyangkut kegiatan yang bersifat sosial, maka dalam mencari pemecahannya tidak dapat dipaksakan begitu saja. Dalam hal ini perilaku serta keteladanan dari pengurus maupun tokoh-tokoh masyarakat dapat memotivasi kesadaran warganya. Dengan demikian sifat paksaan kepada mereka sejauh mungkin dihindari, karena akibat dari paksaan hasilnya kurang menguntungkan bagi semua pihak. Apabila ada warga masyarakat yang kurang tanggap terhadap kegiatan sosial tidaklah lalu dikenakan sanksi menghukum atau mengucilkannya, karena sikap ini tidak mendidik mereka. Oleh karena itu pengurus kampung harus berhati-

hati dalam memecahkan dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat di wilayahnya. Oleh karena itu sedikit banyak keberhasilan dalam menggerakkan kegiatan sosial kuncinya terletak di tangan pengurus.

Sikap masyarakat kepada warga yang kurang tanggap terhadap kegiatan sosial biasanya dilakukan dengan secara halus. Misalnya dari warga itu ada yang dengan niat dan etika baik mengingatkan kepada tetangganya dengan cara yang tidak menyinggung perasaan. Namun ada pula sebagian yang bersikap dengan membiarkan saja bila ada yang tidak ikut kegiatan sosial atau tidak hadir dalam rapat. Mereka mengambil jalan demikian karena untuk menghindari timbulnya salah paham. Penguruspun tidak membiarkan begitu saja warganya yang acuh tak acuh serta kurang tanggap dalam kegiatan sosial. Pada kesempatan forum pertemuan warga, masalah - masalah yang demikian itu disinggung agar mereka menyadari selaku anggota masyarakat. Teguran langsung kadang - kadang juga kurang menguntungkan. Dalam hal demikian itu pengurusan RT sebagai ujung tombak turut mengingatkannya.

Untuk mengantisipasi sikap sebagian warga yang kurang tanggap terhadap kegiatan sosial melalui bermacam cara. Pertama membiarkan sementara warga yang kurang mampu atau belum tanggap, selanjutnya diadakan pendekatan dari hati ke hati agar mereka sadar sebagai anggota masyarakat yang perlu bekerja sama dan saling tolong menolong. Kedua, contoh dan keteladanan dari pimpinan dan tokoh-tokoh masyarakat dalam segala hal baik tutur kata dan perilaku, maka langkah yang demikian akan membiasa dan memberi pengaruh kepada mereka. Ketiga, mengadakan pertemuan warga secara rutin untuk membicarakan kepentingan bersama; dimana dalam pertemuan itu segenap anggota masyarakat dapat mengemukakan pandangan, pendapat maupun usulan. Dalam melayani masyarakat yang heterogen diperlukan kearifan pengurus untuk secara sabar memberikan bimbingan dan pembinaan. Pengurus menghimbau kepada penduduk agar jangan sampai permasalahan yang kecil menimbulkan cekcok diantara mereka. Bilamana terjadi silang pendapat segera diadakan pendekatan secara pribadi pengecualian salah seorang warga dari yang lain. Untuk itu perlu dicari jalan keluar agar kehidupan bersama terbina secara baik.

Pengurus mengakui, bahwa diantara sekian warganya ada yang kurang tanggap terhadap kegiatan - kegiatan di lingkungan sehingga mereka perlu diperingatkan. Apabila peringatan yang baik itu berulang kali tidak mendapat perhatian, maka dengan terpaksa menyadarkan dengan kata - kata yang agak pedas yaitu mereka itu

juga memerlukan bantuan dari pengurus kampung. Bilamana peringatan keras itu kurang dimengerti juga, maka pengurus memberitahu apabila mereka ada keperluan dengan pengurus kampung dan tidak mendapat pelayanan yang baik supaya tidak kecewa. Misal pelayanan surat menyurat dapat dipersulit. Sebenarnya tindakan itu adalah untuk mendidik mereka supaya tertib. Seandainya ada kesibukan lain, sehingga tidak dapat hadir dalam pertemuan atau siskamling dapat mewakili orang lain. Ada pula salah satu sebab tidak ikutnya kegiatan warga yang termasuk golongan ekonomi lemah ialah karena besarnya beban tanggungan keluarga, dan anaknya banyak.

Dalam menghadapi sikap warga yang acuh tak acuh dan kurang perhatian terhadap kegiatan-kegiatan kampung, maka pemerintah kecamatan juga memberi imbalan atas partisipasi mereka. Misal, warga yang partisipasinya kurang apabila mengurus KTP kurang diperhatikan. Sebaliknya mereka yang tinggi dedikasinya juga dilayani dengan lancar. Demikian pula apabila ada warga yang mengurus HO juga diberi pelayanan baik.

Sebagai mana telah diungkapkan di muka bahwa antara warga saling memberi penilaian. Bila ada warga yang sering tidak ikut kegiatan sosial, biasanya menjadi pembicaraan orang banyak karena dianggap tidak mau tahu terhadap lingkungannya. Mereka dianggap tidak mau menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya.

Bagi seorang dosen ataupun dokter yang tidak dapat aktif dalam kegiatan sosial di wilayahnya, dimanfaatkan oleh pengurus di wilayah Terban untuk memajukan masyarakatnya. Pemanfaatan potensi yang ada tersebut sangatlah tepat. Pada kesempatan temu warga, dosen bersangkutan diminta memberi ceramah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan di sesuaikan juga dengan bidang keahliannya. Dengan cara ini dosen atau dokter secara tidak langsung dapat berhubungan dengan warga yang lain. Ceramah dan diskusi kecil yang di adakan pada temu warga itu akhirnya membuka jalinan komunikasi yang baik, dan tidak menimbulkan prasangka buruk. Hal serupa seringkali diadakan dan ternyata apa yang disampaikan dalam ceramah itu dapat menambah pengetahuan warga. Dengan cara ini dosen atau dokter tersebut sudah ikut berpartisipasi tetapi dalam bentuk lain. Langkah semacam ini diperlukan kemampuan pengurus di dalam memanfaatkan potensi yang ada. Dalam upaya menggerakkan masyarakat, kemampuan pengurus memegang peranan penting.

Program-program RT maupun RW secara jelas diketahui serta disepakati pelaksanaannya dalam pertemuan warga. Hal tersebut mempermudah untuk menggerakkan masyarakat. Disamping itu untuk memotivasi kelancaran program diper tanggungjawabkan diforum pertemuan warga. Warga harus tahu persis supaya partisipasinya tidak ragu-ragu dan setengah-setengah. Pelaporan uang yang jelas ternyata membuat warga percaya dengan apa yang dilakukan pengurusnya.

Persatuan dan kesatuan warga masyarakat menjadi tanggung jawab pengurus kampung untuk menumbuhkan dan mengembangkannya. Begitu juga rasa tanggung jawab ini perlu dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kerukunan dari semua pihak merupakan hal yang mutlak harus terwujud. Kesempatan pertemuan warga merupakan momentum yang sangat baik untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin menyampaikan program-program kampung sekaligus meminta kesadaran mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Suatu langkah yang positif telah dapat berjalan di Kecamatan Gondokusuman termasuk juga di Terban setiap tahun 2 kali diadakan pertemuan kelompok pembaharuan. Kelompok pembaharuan ini bertemu membicarakan hal yang sebaiknya dilakukan untuk pembangunan wilayah. Misalnya adanya penataran P4 dianggap penting untuk diikuti oleh masyarakat secara keseluruhan. Program-program Keluarga Berencana lebih ditingkatkan lagi. Keluarga-keluarga Cina pada umumnya sulit menanggapi program KB ini dipanggil dan diajak bicara, sebaliknya keluarga Cina dari tiap kelurahan yang aktif diundang dan dijadikan kader. Langkah tercapainya kegiatan bersama ini juga diadakan setahun dua kali melalui kelompok-kelompok di tingkat RW. Perlu diketahui disini bahwa yang digolongkan disini kelompok pembaharuan tersebut ialah warga Cina keturunan. Dalam kesempatan pertemuan ini biasanya yang hadir cukup banyak. Bagi mereka yang telah sadar umumnya cepat menerima program-program yang dicanangkan. Untuk meningkatkan kesadaran, kelompok pembaharuan ini menerima ceramah tersebut kadang-kadang dilontarkan teguran tersamar yang disampaikan secara sentuhan hati. Batasan-batasan diberikan agar tidak konflik dari permasalahan yang ada. Demikianlah cara yang telah ditempuh pengurus dalam menyiapkan pagar untuk mengurangi timbulnya konflik dalam masyarakat.

Peranan PKK dalam menggerakkan masyarakat umumnya berhasil baik. Dimana-mana kegiatan sosial yang ditangani ibu-ibu itu dapat dijadikan

penggerak pembangunan, khususnya dalam upaya meningkatnya peran serta kaum wanita. Kedisiplinan waktu merupakan salah satu unsur berhasilnya suatu organisasi. Dalam hal menepati waktu PKK di wilayah Terban berjalan secara baik. Mereka telah membiasakan memulai pertemuan pukul 16.00 dan diakhiri pada adzan maghrib. Pengaturan agar tepat waktu dibuat sedemikian rupa untuk menghormati waktu ibadah sholat magrib bagi yang beragama Islam. Dalam hal ini efisiensi waktu telah diterapkan dan apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut disiapkan pokok-pokoknya sehingga waktu untuk memenuhi undangan ini semula belum ajeg, namun karena prinsip pemanfaatan waktu harus ditegakkan, maka akhirnya kedisiplinan ini berjalan dengan baik. Pimpinan rapat telah membiasakan supaya setelah sampai waktunya rapat harus dimulai. dalam hal ini ibu lurah selalu memberi contoh hadir dahulu. Pada mulanya untuk mengarah kepada ketepatan waktunya ini yang datang sesuai dengannya bari sedikit. Namun karena terus-menerus dilaksanakan akhirnya menjadi kebiasaan untuk hadir tepat waktunya, dan tidak lagi menjadi beban yang berat untuk ditaati oleh semua pihak.

Untuk melancarkan kegiatan-kegiatan sosial yang ada pengurus RW melalui forum komunikasi juga menghimbau kepada induk semang para kost agar orang-orang baru yang menumpang di rumahnya dilaporkan ke pengurus kampung setempat. Dengan cara ini memudahkan memonitoringnya. Anjuran pengurus kepada para penerima pondokan merupakan salah satu cara yang baik untuk menjaga ketertiban warga. Induk semang diharapkan mempunyai rasa tanggung jawab dan menganggap mereka warganya. Sehingga apabila ada hal-hal yang menyimpang dari mereka dapat diatasi sedini mungkin. Hubungan antara anak kost dengan induk semang dihimbau agar serasi dan selalu ada komunikasi yang baik. Di samping itu atas inisiatif pengurus kampung kelompok-kelompok pemondok itu dikumpulkan, diberi arahan dan motivasi agar dapat berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di wilayah masing-masing. Misalnya bersama masyarakat ikut gotong royong kerja bakti, ikut siskamling, menjaga lingkungan dan sebagainya.

Himbauan pengurus kampung tersebut tampaknya belum semuanya terwujud, banyak usaha-usaha pondokan yang tidak melaporkan penghuninya kepada pengurus setempat. Untuk mengantisipasi keadaan yang demikian itu maka temu warga merupakan media yang sangat baik. Oleh karena itu apabila ada hal-hal yang kurang serasi di wilayahnya. Pengurus juga mengadakan pendekatan-pendekatan. Dalam hal ini

pengurus telah berusaha memantaunya. Mereka diingatkan dan diajak agar ikut membantu ketertiban di wilayahnya. Pengurus juga mengadakan pendekatan-pendekatan. Dalam hal ini pengurus RT adalah orang-orang yang langsung berkaitan dengan warganya, maka peranannya sangat besar.

Kecuali melalui cara-cara yang telah disebutkan ada pula pengurus yang bersikap mendiamkan warganya yang kurang tanggap dan kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial di kampung. Biasanya warga tersebut ditanya, mengapa tidak mengikuti kegiatan tersebut. Pendekatan ini merupakan jalan yang terbaik untuk mengatasi ganjalan-ganjalan yang ada. Langkah semacam ini tidak hanya dilakukan oleh pengurus RT. Kadang-kadang pengurus RW juga datang mengunjungi warga dengan menanyakan alasannya. Apabila alasan mereka dapat diterima misalnya sedang ada keperluan mendesak, maka hal itu dapat dimaklumi. Namun apabila ketidak hadirannya itu karena kurang tanggap terhadap lingkungannya maka langsung diberitahu secara hati ke hati.

Melihat permasalahan-permasalahan yang ada dan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pengurus maupun warga dalam mengaktifkan kegiatan sosial, Menunjukan bahwa warga di wilayah Terban mempunyai perhatian dan partisipasi yang baik terhadap kegiatan sosial. Pelaksanaan kegiatan sosial yang berlangsung di lingkungan RT-RW sedikit banyak ada motivasi dari tokoh-tokoh masyarakat maupun pemuka-pemuka masyarakat dilingkungan masing-masing. Dalam hal ini keteladanan dari pemuka maupun tokoh masyarakat ini mewarnai kegiatan-kegiatan yang berlangsung di wilayah Terban.

C. DISIPLIN TERHADAP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Administrasi, menurut The Liang Gie (1965:9) adalah setiap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Kata "administrasi" berasal dari bahasa latin *ad + ministrare*, yaitu suatu kata kerja yang melayani, membantu atau memenuhi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa administrasi adalah proses penyelenggaraan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kata "pemerintahan" berasal dari kata "perintah" yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Dari kata tersebut tersimpul beberapa unsur yaitu pertama adanya "Keharusan" yang menunjukan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, kedua adanya dua pihak yaitu yang memberi dan menerima ; ketiga adanya hubungan fungsional antara yang memberi

dan yang menerima perintah; keempat adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah (Bayu Suryaningrat, 1980:10)

Disini ada dua pihak yang memberi dan yang melaksanakan, yang memberi adalah pemerintah, sedang pelaksanaannya para aparat dibantu masyarakat. Adanya unsur pemberi, pelaksana dan pendukung tersebut diharapkan dapat melaksanakan administrasi pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna. Keberhasilan administrasi yang baik merupakan cermin suatu masyarakat yang *tertib dan disiplin*. Untuk itu pada kesempatan ini akan dilihat khusus mengenai tertib administrasi kependudukan yang berlangsung di Kelurahan Terban. Administrasi kependudukan tersebut meliputi proses pelaporan dan pencatatan kejadian vital seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, dan perkawinan. Data pelaporan mengenai kejadian vital kelahiran, kematian, mutasi penduduk ini sangat penting untuk mengetahui perkembangan penduduk suatu tempat. Untuk ketertiban pelaporan data kependudukan tersebut, pemerintah telah membagikan formulir atau blanko triplikat untuk masing-masing kejadian vital tersebut keseluruh pedusunan.

Kartu triplikat merupakan salah satu sistem pencatatan dalam pelaksanaan registrasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk tersebut diatur menurut Keputusan Presiden no. 52 tahun 1977, dan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no 8 Tahun 1977.

Dengan adanya blanko triplikat tersebut perkembangan penduduk yang ada bisa dimonitor. Namun hal itu tergantung pada ketepatan dan kedisiplinan aparat maupun masyarakat di dalam melakukan pelaporan dan pengisian blanko tersebut oleh aparat yang bertugas. Karena dengan mengisi blanko triplikat yang tepat, pada saatnya kartu modal C1 (Kartu Keluarga) yang terdapat pada tingkat dusun segera dapat diperbarui dan dengan cepat perubahan tersebut segera dilaporkan kepada penyelenggara pemerintahan diatasnya mulai dari Kelurahan/Desa - Kecamatan - Kabupaten, dengan demikian data kependudukan yang ada selalu mutakhir sesuai dengan perkembangan yang terjadi (Bernas, 12 Juli 1992).

1. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang dimaksud di sini adalah bagaimana pelaksanaan pelaporan maupun pencatatan yang dilakukan penduduk maupun petugas dalam kaitannya dengan ketertiban administrasi kependudukan. Terselenggaranya keteraturan dalam penyelenggaraan

administrasi itu sangat ditentukan oleh disiplin penduduk maupun petugas. Pelaksanaan administrasi kependudukan ini diatur melalui Keppres no 52 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 8 Tahun 1977.

Pelaksanaan registrasi penduduk di tingkat desa/kelurahan itu diatur pada Keppres no 52 Tahun 1977 pasal 7 yang bunyinya sebagai berikut :

Pelaksanaan registrasi penduduk ditingkat desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah yang dibantu oleh Carik.

Merekalah yang bertanggung jawab disertai tugas untuk mencatat keadaan penduduk serta mutasi yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan perpindahan dengan menggunakan daftar-daftar yang telah ditentukan. Hasil dari registrasi (pencatatan) ini harus dilaporkan secara teratur kepada Camat, kemudian Camat melaporkan rekap penduduk dari wilayahnya kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

Pelaksanaan administrasi pemerintahan khususnya di bidang administrasi kependudukan ini bisa dicapai melalui kerja sama antara penduduk dan aparat (petugas). Ketentuan mengenai peranan petugas dan penduduk dalam pelaksanaan registrasi ini telah diatur berdasarkan Keppres no 52 Tahun 1977 (tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk). Keppres maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri ini berisi tentang kewajiban penduduk berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran penduduk. Keppres no 52 Tahun 1977, pasal 3 bunyinya :

Penduduk yang berusia 17 tahun (tujuh belas tahun) yang kawin atau yang pernah kawin wajib memiliki kartu tanda penduduk.

pasal 4,

Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan setiap perubahan yang terjadi atas diri sendiri dan atau diri anggota keluarganya.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri no 8 Tahun 1977,

pasal 1,

Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, ialah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk dalam wilayah RI. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh KTP yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda.

Untuk itu kelancaran penyelenggaraan pencatatan administrasi pemerintahan, khususnya administrasi kependudukan tergantung pada disiplin dan ketertiban warga maupun petugas dalam tingkat RT-RW sampai tingkat kelurahan - Kecamatan. Meskipun dalam peraturan itu disebutkan adanya sanksi denda atau pidana kurungan, tetapi karena tidak dilaksanakan dengan tegas penduduk cenderung melanggar ketentuan tersebut. Berikut ini gambaran pelaksanaan administrasi pemerintahan di Kelurahan Terban yang meliputi pelaporan dan pencatatan kelahiran, kematian, pindah penduduk, Kartu Tanda Penduduk (KTP), penduduk yang datang (pemukim), dan pelaporan penduduk yang meninggal.

a. Pencatatan dan Pelaporan Kelahiran

Menurut Keppres no 52 Tahun 1977 surat kelahiran diperuntukkan bagi semua bayi yang dilahirkan hidup dicatat oleh carik atau pamong desa lainnya yang ditunjuk Kepala Desa. Setiap kejadian kelahiran, Selain dicatat dalam Kartu Keluarga dan Buku Mutasi. Buku mutasi adalah untuk mencatat seluruh kejadian vital (yaitu kejadian kelahiran, kematian, dan perpindahan yang terjadi selama satu bulan) yang diisi berdasarkan surat kematian, kelahiran, keterangan pindah, kartu keluarga (orang yang datang). Kemudian dalam Kartu Keluarga ditambahkan anggota keluarga yang baru lahir tersebut.

Surat kelahiran itu merupakan bagian dari kartu Triplikat yang diterima oleh orang tua wali, setelah mereka melaporkan kelahiran seorang anak kepada petugas. Laporan kelahiran tersebut diterima dan dicatat oleh petugas (Kesra) pada buku registrasi dan kartu triplikat.

Sekarang ini setelah adanya ketentuan bahwa seseorang (anak) harus memiliki akte kelahiran, merupakan salah satu pendorong bagi penduduk

untuk melaporkan kelahiran anak dengan tepat dan cepat. Disamping itu adanya ketentuan bahwa keterlambatan mendaftarkan akte kelahiran permohonannya harus melalui Pengadilan Negeri, mendorong juga warga untuk cepat-cepat melaporkan kelahiran anaknya. Hal ini karena untuk mendapatkan akte kelahiran membutuhkan surat keterangan dari kecamatan lewat surat RT/RW yang dilengkapi dengan KTP, surat pengantar dari kantor Kelurahan, surat nikah dan surat keterangan dari yang menolong kelahiran (dokter atau bidan).

Sebelum ketentuan mengenai akte kelahiran ini diberlakukan, pada umumnya penduduk khususnya diwilayah Kelurahan Terban cenderung kurang tertib dalam melaporkan kelahiran. Warga ada yang tertib melaporkan yaitu langsung mendaftarkan kelahiran ke RT/RW, kelurahan, tetapi ada juga yang kurang perhatian yaitu menunda mendaftarkan, Sehingga setelah sebulan baru lapor mencari surat kelahiran. Akan tetapi setelah ada ketentuan akte , pelaporan surat kelahiran cenderung tertib. Jelas ketertiban dalam pelaporan kelahiran ini sangat mempengaruhi proses pencatatan dan pelaporan selanjutnya.

Tidak tertibnya pelaporan kelahiran juga dipengaruhi tingkat pengetahuan warga mengenai kegunaan surat kelahiran. Ada warga yang kurang tahu kegunaannya, ada yang tahu kegunaan pelaporan kelahiran, tetapi ada pula yang menganggap sepele. Oleh sebab itu untuk ketertiban pelaporan, aparat setempat terpaksa mengingatkan setiap ada pertemuan warga. Untuk kelancaran proses pelaporan kelahiran tersebut, Kelurahan Terban melibatkan PKK yang setiap sebulan sekali membuat laporan kelahiran.

b. Pencatatan dan Pelaporan Kematian

Setiap kejadian kematian yang telah dilaporkan oleh penduduk , oleh petugas kemudian dicatat pada buku induk. Kejadian kematian itu lalu dibuatkan surat kematian. Surat kematian itu digunakan biasanya kalau ada kepentingan yang benar-benar mendesak seperti untuk mengurus pensiun, tunjangan kematian dan sebagainya.

Pelaporan kematian ke RT-RW setempat biasanya secara langsung, karena sekalian memberitahu. Jadi pemberitahuan itu tidak bersifat formal. Setelah peristiwa kematian itu selesai, biasanya baru mengurus surat kematian dengan membawa Kartu Keluarga (C1). Oleh petugas (RT), nama anggota keluarga yang mati itu kemudian dicoret dan diberi keterangan

tanggal meninggalnya. Laporan kematian tersebut dari tingkat TR kemudian ke RW. Oleh RW laporan-laporan kematian tersebut direkap diteruskan ke kecamatan. Perubahan data keluarga tersebut jelas akan mempengaruhi jumlah penduduk, akan tetapi perubahan ini sering tidak cepat-cepat ditanggapi oleh petugas, sehingga kadang-kadang ada keterlambatan untuk menyajikan data penduduk yang baru sesuai dengan perubahan itu.

c. Pencatatan dan Pelaporan Penduduk yang Datang dan Pergi

Penduduk yang bepergian ke luar kota atau daerah lain biasanya tidak melapor, tetapi cukup membawa KTP. Mereka baru melapor ke pengurus RT-RW karena diperlukan surat kelakuan baik dari kepolisian. Untuk memperoleh SKB harus minta surat keterangan dari RT-RW. Bagi warga yang bepergian keluar negeri harus ada surat pengantar dari wilayah setempat untuk memperoleh paspor. Mengenai pentingnya surat bepergian kian hari tertibkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Pemuda-pemuda yang ingin naik gunungpun sekarang diharuskan untuk minta surat keterangan dari kelurahan. Kecenderungan untuk tidak melapor juga dilakukan pada waktu tamu yang menginap cukup lama. Mereka menganggap warga sekitar maupun aparat setempat sudah tahu, karena yang menginap saudaranya sendiri jadi tidak perlu melapor.

Hal yang cukup merisaukan aparat setempat adalah banyaknya pemondok di wilayah Terban. Hal ini karena kehadiran para pemondok itu banyak yang tidak diketahui oleh aparat setempat. Banyak usaha-usaha pemondokan yang tidak melaporkan jumlah penghuninya kepada aparat di wilayahnya RT-RW. Padahal ada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Yogyakarta nomer 145/KD/1985 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan di Wilayah Kotamadya Daerah Tk II Yogyakarta. Keputusan tersebut berisi larangan maupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemondok maupun usaha pemondokan. Warga yang mengusahakan tempat pemondokan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan usaha pemondokan yang menampung pemondok 3 (tiga) orang/lebih wajib memiliki Izin Tempat Usaha.
- b. Dilarang menyelenggarakan usaha pemondokan secara campuran putra/putri dalam satu rumah pemondokan, kecuali suami istri yang dibuktikan dengan surat nikah.

Ketentuan ini pada umumnya belum berjalan dengan semestinya. Khususnya di wilayah Terban usaha pemondokan tersebar di kampung-kampung maupun di daerah-daerah elite. Di Terban ada usaha pemondokan yang penghuninya lebih dari 20 orang. Biasanya Izin Tempat Usaha mereka tidak punya, tetapi hanya diketahui oleh aparat di lingkungannya. Di samping itu banyak usaha-usaha pemondokan yang induk semangnya tidak berada ditempat, tetapi hanya ditunggui pembantunya.

Adanya ketentuan tersebut sebenarnya untuk mengatur dan menertibkan usaha pemondokan yang setiap tahun semakin berkembang. Apalagi di Wilayah Terban ini dekat dengan kampus dan sekolah-sekolah lainnya, usaha-usaha pemondokan maju pesat. Banyak pemondok yang datang dari berbagai daerah tersebut, dari segi ekonomis sangat membantu peningkatan kehidupan penduduk, di lain pihak banyak pendatang memberikan permasalahan-permasalahan tersendiri bagi masyarakat lingkungannya.

Sementara itu usaha-usaha pemondokan diatur melalui peraturan nomor 145/KD/1985 yang mewajibkan penyelenggara usaha pemondokan untuk :

- a. Bertindak atau menunjuk induk semang sebagai penanggung jawab atas ketertiban, dan keamanan serta sesuatu yang berhubungan dengan usaha pemondokan.
- b. Mengatur ruang rumah, kamar tidur/kamar belajar, kamar mandi dan WC, sehingga memenuhi syarat-syarat kesehatan dan ketertiban lingkungan.
- c. Menyediakan khusus untuk ruang tamu yang terpisah dari kamar tidur/belajar.
- d. Melaporkan secara tertulis mengenai jumlah pemondok termasuk identitasnya dengan segala perubahan yang terjadi kepada Lurah setempat dengan diketahui Pengurus Rumah Tangga dan Pengurus Rukun Warga.
- e. Melaporkan kepada Lurah setempat dengan diketahui Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga apabila pemondok menerima tamu yang menginap.
- f. Membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu yang pada malam hari tidak boleh lebih dari jam 21.00 WIB, sehingga tidak mengganggu waktu belajar dan tidak mengganggu suasana lingkungan.
- g. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat

menyesuaikan diri dengan nilai kehidupan masyarakat setempat dan berperan secara aktif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan.

- h. Mengadakan pengawasan terhadap pemondok untuk menghindarkan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para penyelenggara usaha pemondokan itu tidak seluruhnya dipenuhi. Menurut mereka kalau terlalu ketat mengetrapkan aturan-aturan pemondokan, biasanya pemondok menghindari dan mencari pemondokan yang menurut mereka lebih enak. Hal-hal seperti itu kadang-kadang menjadi pertimbangan para penyelenggara usaha pemondokan, sehingga mereka cenderung untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah ada. Di samping itu para penyelenggara para usaha pemondokan tidak menyadari pentingnya pelaporan usaha pondokan mereka bagi ketertiban administrasi maupun lingkungan. Untuk menertibkan usaha-usaha pemondokan aparat setempat RT-RW biasanya melalui pertemuan-pertemuan, arisan warga selalu disisipi anjuran-anjuran, peringatan-peringatan, teguran-teguran kepada warga penyelenggara pemondokan untuk memenuhi kewajibannya, paling tidak melaporkan penghuninya. Hal-hal seperti ini merupakan kendala bagi aparat setempat untuk menertibkan administrasi mereka maupun ketertiban lingkungan. Karena meskipun seringkali ada anjuran, teguran, warga yang melaporkan usaha-usaha pemondokan itu masih sedikit sekali.

Untuk kelancaran dan penertiban administrasi pemerintahan ini pemondok mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Pemondok harus segera melaporkan kedatangannya kepada Lurah setempat lewat Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.
- b. Membawa surat Keterangan Kelakuan Baik dari daerah aslinya dan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku.
- c. Mendaftarkan diri menjadi penduduk tetap apabila bertempat tinggal lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari dengan membawa Surat Keterangan Pindah penduduk dari daerahnya.
- d. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat setempat.

- e. Berperan secara aktif dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan wilayahnya.
- f. Ikut mencegah timbulnya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan umum serta keresahan masyarakat.

Ketentuan-ketentuan tersebut tidak semuanya dilakukan para pemondok. Kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi demi terselenggaranya ketertiban administrasi maupun lingkungan, tidak berjalan dengan semestinya. Artinya pemondok banyak yang belum tertib atau mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun demikian sebenarnya induk semang mempunyai peranan untuk mempengaruhi para pemondoknya supaya berlaku tertib. Sayangnya para induk semang kurang perhatian terhadap masalah ini, sehingga pemondok tidak tahu kewajibannya. Bahkan pemondok banyak yang tidak peduli terhadap lingkungannya. Untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya bisa dilakukan dengan penyebarluasan ketentuan yang memuat kewajiban penyelenggara pondokan maupun pemondok ke RT-RW maupun para induk semang pemondokan.

Beberapa kasus kadang-kadang pemondok khususnya di wilayah Terban kurang ada perhatian terhadap urusan administrasi. Mereka ini datang di tempat yang baru kadang-kadang belum siap dengan surat-surat yang diperlukan, misalnya surat Kelakuan Baik;KTP dan sebagainya. Jadi dalam hal ini belum ada kedisiplinan baik pemondok maupun penyelenggara usaha pondokan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Bila kebetulan ada aparat yang menegur, mereka-mereka ini (penyelenggara pondokan) biasanya mengatakan tidak melapor karena pemondoknya datang dan pergi berganti-ganti. Jadi mereka menganggap tidak perlu lapor ke RT-RW setempat. Dengan kata lain mereka tidak sadar atau tidak tahu bahwa data tentang pemondok diperlukan untuk ketertiban administrasi dan untuk memonitor keberadaan mereka.

d. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa penduduk yang berusia 17 tahun dan penduduk yang kawin maupun yang pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Tanda Penduduk tersebut merupakan kartu bukti diri yang menunjukkan domisili seseorang di wilayah tertentu. Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut berlaku untuk 2 (dua) tahun.

Untuk mendapatkan KTP yang baru (karena masa berlakunya habis) harus meminta surat keterangan dari RT-RW setempat, kemudian ke kelurahan. Pemilik KTP ini sangat vital, karena untuk berbagai keperluan harus menyertakan KTP. Sehubungan pentingnya KTP bagi kelancaran kebutuhan penduduk, tentunya masyarakat akan memperhatikan berlakunya KTP tersebut. Akan tetapi berdasarkan catatan-catatan yang ada, banyak penduduk yang memperbaiki KTP-nya terlambat dari waktu yang tertera dalam KTP. Keterlambatan itu antara lain disebabkan penduduk lalai kalau masa berlakunya KTP sudah habis : ada yang sadar kalau kalau berlakunya sudah habis tetapi selalu di tunda karena sibuk dan sebagainya : penduduk memang tidak tahu aturan tersebut. Gambaran ini juga terdapat diwilayah Terban.

Menurut aparat setempat, dulu pada waktu pendataan untuk KTP dilakukan secara rombongan berjalan cukup tertib. Akan tetapi setelah diatur, warga harus mengurus KTP-nya sendiri sesuai batas-batas waktu yang telah ditentukan, banyak terjadi keterlambatan dan harus selalu di ingatkan setiap ada pertemuan-pertemuan warga. Di lain pihak keterlambatan itu kadang-kadang bukan hanya dari warga tetapi juga dari pemerintah yang mengenai KTP, yaitu blanko habis misalnya, atau KTP baru belum selesai dikerjakan.

Hal-hal seperti inilah kemungkinan ketentuan dalam perda yang menyebutkan adanya sanksi pidana kurungan atau denda uang bagi warga yang terlambat mengurus KTP-nya belum berjalan sebagaimana mestinya. Artinya sanksi belum bisa diterapkan secara tegas, karena penyelenggara KTP sendiri belum secara konsekuen, menepati pelayannya dengan cepat. Pelayanan aparat setempat dari tingkat RT-RW, kelurahan, dalam hal mengurus permintaan maupun kebutuhan warga cukup lancar. Hal ini bisa diketahui dari jawaban responden bahwa pengurusan surat-surat ke RT-RW maupun kelurahan cukup lancar (82,0%), yang menyebut tidak lancar (18%). Dari yang menyebut tidak lancar tersebut, ternyata disebut masalah pengurusan KTP yang sering mengalami keterlambatan karena blanko habis.

2. Hambatan dan Usaha Yang Dilakukan

Tercapainya suatu tertib adminitrasi tidak bisa terlaksana begitu saja, tetapi memerlukan syarat-syarat antara lain kedisiplinan warga maupun petugas yang menangani, tersedianya sarana dan prasarana adminitrasi yang cukup memadai, ketrampilan petugas dalam mengenai adminitrasi

pemerintahan dan sebagainya. Ketiga syarat minimal ini belum secara penuh dapat di miliki Kelurahan Terban. Misalnya kedisiplinan warga maupun petugas dalam masalah penyelenggaraan administrasi pemerintahan khususnya dalam mendukung terwujudnya data administrasi yang tertib. Disamping itu personil yang menangani kurang, sehingga beberapa petugas harus mengerjakan tugas-tugas rangkap. Sarana seperti almari ataupun rak-rak untuk menyimpan data-data kurang memadai, sehingga kadang-kadang kesulitan mencari arsip-arsip yang diperlukan. Satu hal yang cukup penting adalah ketrampilan petugas menangani administrasi pemerintahan, khususnya mengolah data yang masuk sangat mendukung tertipnya administrasi pemerintahan.

Selain yang telah disebutkan tersebut ada beberapa hambatan yang ditemui di Kelurahan Terban dalam upaya menertibkan dan mendisiplinkan warga berkaitan dengan administrasi pemerintahan yaitu :

- a. Tingkat pendidikan masyarakatnya tidak sama, ada yang berpendidikan tinggi, pendidikan rendah, atau tidak sekolah, pada umumnya kurang memperhatikan pentingnya suatu laporan administratif. Mereka ini setiap ada pertemuan-pertemuan warga harus selalu diingatkan, diberitahu akan kewajiban. Sebaliknya bagi mereka yang berpendidikan tinggi walaupun sudah mengetahui pentingnya suatu laporan yang cepat dan tepat kadang-kadang mereka menunda laporan alasan kesibukan.
- b. Heterogenitas masyarakatnya baik dilihat dari daerah asal maupun profesi sangat mempengaruhi terwujudnya kewajiban administrasi pemerintahan baik di tingkat RT-RW maupun kelurahan.
- c. Para pemondok yang umumnya kurang peduli pada lingkungannya dan kurang tanggap terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- d. Kurangnya pengetahuan sementara warga mengenai pentingnya suatu pelaporan administrasi yang merupakan cermin dari kedisiplinan masyarakat bersangkutan.
- e. Tidak adanya sanksi yang tegas dan jelas terhadap warga yang tidak melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan ketertiban administrasi pemerintahan.
- f. Kurangnya dana pendukung untuk peningkatan pengetahuan warga mengenai ketertiban administrasi, khususnya pelaporan secara cepat dan tepat berkaitan dengan kelahiran, kematian, mobilitas, dan sebagainya.
- g. Ketidaksiapan aparat setempat dalam melayani warga, sehingga warga cenderung seenaknya. Misal blanko untuk KTP habis tanpa cepat-cepat melapor atau mencari blankonya. Walaupun keterlambatan ini dari

pemerintah atasnya, tetapi mempengaruhi administrasi secara keseluruhan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut pihak kelurahan hanya dapat memberikan anjuran, himbauan, teguran, kepada warga lewat RT-RW yang dilakukan setiap ada pertemuan-pertemuan warga. Di samping itu diadakan penyuluhan - penyuluhan yang dilakukan tidak hanya oleh aparat setempat, tetapi juga memanfaatkan tokoh masyarakat setempat. Juga ditekankan administrasi kepada warga, dan melaporkan data yang masuk secara rutin ke RW yang kemudian di teruskan kekelurahan. Dengan demikian setiap ada perubahan atau mutasi warga dengan cepat dapat dimonitor. Dengan demikian ada kerjasama yang aktif antara warga dan aparat setempat.

D. DISIPLIN DALAM HUBUNGAN KETETANGGAAN

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak lepas dengan keadaan lingkungan yang ada disekitarnya. Mereka hidup secara berkelompok dan saling mengadakan komunikasi dan saling berhubungan satu dengan yang lain untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dalam hidup bermasyarakat. Menurut Persudi Suparlan (1985), bahwa pengertian kewajiban biasanya mencakup seperangkat aturan-aturan yang seharusnya di gunakan sebagai aturan bertindak, sesuai dengan kedudukan pelaku dalam struktur, yang diatur secara ketat dalam pelaksanaannya melalui sanksi-sanksi yang memberatkannya. Karena itu pengertian kewajiban biasanya selalu dikaitkan dengan pengertian disiplin, yaitu mengikuti aturan-aturan yang digunakannya sebagai pedoman bertindak secara ketat, sebagai pola tindakan yang suka atau tidak suka harus di lakukannya.

Dalam hidup bermasyarakat itu mereka merupakan warga dari suatu ketentangan dimana mereka bertempat tinggal. Perwujudan dari kehidupan ketentangan tersebut ditunjukkan antara lain adanya saling menolong, saling membantu, dan sebaliknya bisa saling tidak ada kecocokan. Kehidupan dalam ketentangan ini sering tidak di sadari oleh warga, hal tersebut menurut Parsudi Suparlan merupakan perwujudan dari mekanisme kehidupan ketentangan yang sudah menjadi bagian dari tradisi hidup bermasyarakat.

Oleh Parsidi Suparlan disebutkan bahwa ketentangan itu dapat dilihat sebagai sebuah kesatuan hidup yang menempati suatu wilayah tertentu

dengan batas-batasnya ditentukan oleh luasnya jangkauan saling hubungan sosial diantara para warganya dan tidak oleh batas-batas administrasi pemerintahan. Walaupun batas-batas hubungan jangkauan sosial tersebut dapat cocok dengan batas-batas. Meskipun demikian secara formal sebenarnya sudah diciptakan satuan-satuan ketetanggaan, dalam artian sebagai satuan sosial. Tetapi RT- RW satuan ketetanggaan dalam bukanlah artian sebagai satuan sosial, merupakan satuan administrasi pemerintahan. Sehubungan dengan itu RT-RW disini! dipandang sebagai tokoh formal yang mempunyai tanggung jawab sebagai pengintegrasi masyarakat dibawah pemerintahan administrasinya, dan bukan pengintegrasi kehidupan sosial bagi masing-masing komunti.

Sebagaimana telah disinggung bahwa warga dalam suatu komunitas hidup dalam hubungan ketetanggaan. Perwujudan dari adanya hubungan ketetanggaan ini bisa saling tolong menolong, saling membutuhkan, tetapi bisa juga saling tidak ada kecocokan. Dalam hubungan ini situasi atau kondisi yang bagaimanapun hubungan ketetanggaan menjadi terganggu, dalam hal ini peran RT-RW sebagai tokoh pengintegrasi masyarakat di wilayahnya cukup penting.

1. Hubungan Ketetanggaan

Dalam kehidupan masyarakat Jawa, pola pergaulannya di tentukan oleh prinsip-prinsip kerukunan dan hormat. Prinsip-prinsip tersebut kurang lebih diartikan bahwa dalam situasi apapun setiap individu Jawa haruslah dapat bersikap untuk tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Selain itu dalam pergaulan, setiap individu Jawa harus dapat menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya (Magnis Suseno, 1987:38). Apabila kedua prinsip tersebut dapat dilakukan, dengan sendirinya tidak akan terjadi konflik. Akan tetapi hal tersebut kadang-kadang sulit diwujudkan, karena apabila masalah yang dihadapi telah sudah memasuki kepada kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, maka akan timbul keretakan yang akhirnya bisa terjadi konflik.

Satuan ketetanggaan di perkotaan coraknya lain dengan ketetanggaan di pedesaan. Di pedesaan satuan-satuan rumah tangga terjalin karena adanya hubungan kekerabatan. Sedangkan di perkotaan, satuan-satuan rumah tangga cenderung berdiri sendiri dengan batas-batas fisik (pagar,pintu) dan batas-batas sosial (daerah asal, kesibukan kerja,

kedudukan sosial) yang merupakan pembatas antara satu sama lainnya (Parsuadi Suparlan, 1985 : 2). Namun demikian hubungan sosial ketetangga tetap berlangsung, misalnya saling berkunjung baik ada kepentingan atau tidak. Hal ini terutama nampak pada masyarakat yang tata ruang tempat pemukimannya dapat mengakomodasi bagi berlangsungnya hubungan-hubungan-sosial diantara sesama warga. Gambaran ini misalnya terdapat di kampung-kampung wilayah perkotaan dengan rumah-rumah yang tak terjarak, berhimpitan satu sama lain. Dengan tataruang pemukiman yang demikian itu intensitas hubungan sosial cukup tinggi, tetapi dilain pihak juga rawan terjadinya konflik-konflik sosial. Sebaliknya pada masyarakat yang tata ruang pemukimannya sedemikian rupa yaitu antara rumah satu dengan lainnya berjarak berupa pagar, tembok-tembok tinggi dan sebagainya intensitas hubungan sosialnya sangat rendah.

Diwilayah Terban misalnya dari 50 responden yang tersebar di daerah permukiman dengan tata ruang berjarak maupun tidak berjarak terungkap bahwa mereka yang sering berkunjung ketetangga (22,0%), kadang-kadang (74,0%, dan yang tidak pernah berkunjung (4,0%). Tujuan mereka untuk mengunjungi tetangga (kadang-kadang maupun sering) yaitu untuk mengobrol/bertukar pendapat (50%), berkunjung bila ada keperluan atau kepentingan (50%) misalnya pinjam koran, pinjam uang, menengok karena sakit, menyumbang, dan lain sebagainya (tabel III, 7).

Dalam berinteraksi dengan tetangga di daerah-daerah perkampungan dengan tata ruang yang berdekatan pada umumnya terjadi secara langsung setiap saat. Di wilayah Terban interaksi itu bisa terjadi di dalam rumah (bertemu), di depan rumah atau di sumur sambil mengambil air, mencuci, sambil belanja di warung terdekat, sambil momong anak dan sebagainya. Jadi dalam kesehariannya mereka itu sering bertatap muka, bahkan karena dekatnya rumah dan seringnya bertemu masalah-masalah pribadi tetangga atau hal-hal lain banyak yang mengetahui. Di samping itu kebersamaan-kebersamaan nampak bila ada tetangga yang sakit di tengok, memberi nasehat bila ada tetangga yang kesulitan, atau saling memberi makanan yang dimasak, dan sebagainya.

Sebaliknya di lingkungan masyarakat yang tata ruang pemukimannya dibatasi oleh pagar-pegar rumah, maupun kedudukan sosial dalam masyarakat, profesi atau kesibukan kerja, intensitas dalam berinteraksi dengan sesama warga kecil. Hubungan-hubungan sosial jarang dilakukan.

Dalam hubungan ketetanggaan di samping terjalin saling memberi, saling menolong kadang-kadang juga terjadi ketidakcocokan atau sampai

perselisihan. Mereka yang mengaku kadang-kadang berselisih dengan tetangga (46,0%) dan yang belum pernah (54,0%). Gangguan dalam hubungan ketetanggaan itu bermacam-macam, akan tetapi perselisihan yang sering terjadi dan dialami responden adalah masalah anak-anak (39,1%), masalah rumah yang "*adu tritis*", sehingga kalau hujan airnya mengenai rumah tetangganya (17,4%), karena salah faham dan kecemburuan sosial (21,7%) misalnya saling menyindir, ngrasani, iri karena tetangga membeli sesuatu dan sebagainya (tabel III.8).

Di daerah-daerah yang tata ruang permukimannya tidak ada jarak, dengan kata lain sangat padat., intensitas hubungan sosialnya cukup tinggi tetapi sebaliknya instensitas terjadinya ketidakcocokan juga tinggi. Hal ini karena interaksi terjadi setiap saat, setiap waktu. Dengan kata lain kondisi permukiman yang begitu itu dapat mengakomodasikan berkembangnya hubungan-hubungan sosial dan sebaliknya. Untuk itu peranan pemuka-pemuka masyarakat maupun tokoh masyarakat sangat diperlukan. Peranan mereka untuk meredakan ketegangan yang terjadi antar warga, paling tidak ikut membantu memujudkan suatu kehidupan masyarakat yang tentram, aman. Dalam hal ini aparat setempat RT-RW yang sering menjadi tumpuan warga.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa antara konflik dan harmoni selalu terjadi dalam kehidupan adanya masyarakat. Hubungan ketetanggaan selalu ditujukan adanya dua hal tersebut yaitu adanya harmoni dalam hubungan sosial dan konflik. Namun demikian dapat dikatakan bahwa di wilayah permukiman Terban perwujudan solidaritas sosial di antara warga masih berlangsung secara informal dan spontan. Hal tersebut bisa ikut mendukung menciptakan keserasian sosial dimana mereka bertempat tinggal. Untuk terciptanya keserasian sosial tersebut, yang berarti menekan konflik-konflik kecil atau ketegangan-ketegangan yang terjadi diperlukan disiplin dari warga. Disiplin yang diperlukan adalah untuk saling mengendalikan diri, menahan diri dalam batas-batas hubungan ketetanggaan. Disiplin dalam hubungan ketetanggaan di wilayah Terban, dilihat dari permasalahan-permasalahan yang timbul nampaknya warga kurang disiplin dalam menghormati batas-batas hak pribadi, serta tenggang rasa dalam kehidupan bersama. Ketegangan atau perselisihan yang terjadi ada yang diselesaikan sendiri, ada yang melibatkan aparat setempat, terutama di lingkungan masyarakat yang tata ruang permukimannya padat.

Untuk menjaga keserasian sosial tersebut, atau supaya hubungan ketetanggaan tidak terganggu responden berpendapat bahwa antar warga

harus saling menghormati, menghargai, pengertian dan melakukan tegur sapa (78.0%), sering melakukan kegiatan bersama-sama : pengajian, olah raga, bergotong royong (14,0%) disamping itu harus saling menjaga kepentingan masing-masing, saling tenggang rasa (8,0%). Untuk menggambarkan sisi lain dari adanya hubungan ketetanggaan yang harmonis, berikut diuraikan ketegangan- ketegangan atau perselisihan-perselisihan yang ada di wilayah Terban.

2. Ketetanggaan/Masalah Yang Timbul

Wilayah Terban heteroginitas masyarakatnya cukup tinggi. Oleh sebab itu permasalahan-permasalahan yang timbul juga beragam antara lain yang menyangkut polusi lingkungan, persaingan, profesi, permasalahan-permasalahan anak, masalah " adu tritis", pergaulan, penggunaan air bersih, dan sebagainya. Penyulut terjadinya ketegangan tersebut juga bervariasi.

Di wilayah Terban ini banyak dijumpai adanya anak-anak pendatang, yaitu para pelajar dari luar daerah yang idekost. Untuk itu di daerah Terban banyak dijumpai adanya warung-warung usaha rumah tangga yang menyediakan kebutuhan makan para anak-anak kost tersebut. karena banyaknya warung, maka diantara pemilik warung ada yang saling bersaing, seperti uang dijumpai di lapangan, warung makanan tersebut tempat jualannya bersebelahan (bertetangga). Di sini, penjual satu banyak pembelinya, sedang yang satunya agak sepi pembelinya. Pada mulanya hubungan mereka baik, tapi lama kelamaan mereka tidak saling menyapa (jothakan). Terutama untuk warung yang sepi pembeli ini, bila kebetulan ada pembeli sambil melayani ia menyebar gosip yang intinya menjelek-jelekan warung yang laris itu. Keadaan ini tidak mempengaruhi tetangga yang lainnya, mereka hanya bersikap pasif dengan mendingankan hubungan yang tegang diantara pemilik warung makan tersebut.

Kasus selanjutnya adalah masalah batas tritis, yaitu pada rumah bertingkat, dengan rumah biasa. Dalam hal ini masalah yang timbul biasanya pada musim hujan, yaitu tumpahan air hujan dari rumah tingkat masuk ke tritis rumah biasa dan akhirnya terjadi ketegangan. Apabila yang menempati rumah itu adalah pemiliknya, maka masalah yang akan segera teratasi. Tetapi kalau diantara rumah tersebut yang menempati hanya anak kost atau penunggunya, maka akan berbuntut panjang; bahkan sampai berusan ke RT atau ke RW. Jadi permasalahan tersebut kemudian

diselesaikan lewat RT atau RW atas laporan dari yang bersitegang tersebut. Kejadian ini merupakan cermin bahwa dalam hidup bertetangga harus saling pengertian dan menjaga, batas-batas hak milik supaya tidak merugikan orang lain.

Hubungan ketetanggan juga sering terganggu yang akhirnya terjadi ketegangan yaitu masalah-masalah anak-anak. Masalah anak-anak ini banyak terjadi di wilayah yang rumahnya berhimpitan satu sama lain. Anak-anak yang pada mulanya bersama, kadang-kadang berkembang menjadi pertengkaran dan perkelahian. Biasanya orang tuanya mendapat laporan dari anaknya mengenai perkelahian tersebut. Karena merasa tersinggung orang tua tersebut tanpa pikir panjang mendatangi orang tua yang anaknya telah berkelahi dengan anaknya. Akhirnya yang bertengkar beralih ke orang tuanya, hubungan ketetanggan menjadi tidak laras lagi, tidak rukun karena masing-masing tidak mau bertegur sapa.

Ketidaklarasan dalam hubungan ketetangaan yang paling sering terjadi adalah pergunjingan, sindir-menyindir, khususnya di daerah yang permukimannya cukup padat. Misalnya adanya kabar seorang suami tetangga A mempunyai hubungan dengan wanita lain, maka dari mulut ke mulut berita itu akan tersebar. Akhirnya pergaulan antar tetangga menjadi terganggu. Pertengkaran yang sering terjadi diantara suami isteri itu mengganggu ketentraman tetangga sekitarnya. Oleh sebab itu terpaksa RT atau RW turun tangan untuk meredakan masalah tersebut.

Masalah lain yang muncul yaitu masalah perselisihan karena terjadinya mabuk-mabukan (minuman keras dan penganiayaan, jelas hal tersebut mengganggu tetangga kanan kirinya. Setiap malam terjadi keributan, maka warga lain terpaksa lapor ke RT atau RW, namun karena sulit diatasi persoalannya berlanjut ke kepolisian.

Masalah pencemaran lingkungan yang mengganggu hubungan ketetangaan juga terjadi di wilayah Terban, Tidak hanya disiplin kebersihan dan tidak pekanya terhadap lingkungan, menyebabkan harmoni sosial terganggu. Masalah itu timbul karena ada rumah tangga yang beternak ayam tanpa ada dijaga kebersihannya, sehingga mengganggu tetangga kanan kirinya karena kandang ayam tersebut menyebarkan bau tidak sedap. Oleh warga hal tersebut diadukan ke RT atau RW, oleh pengurus warga beternak ayam tersebut. diperingatkan untuk mentaati peraturan beternak ayam yang antara lain harus menjaga kebersihan. Gangguan lain yaitu usaha rumah tangga berupa pengolahan cengkeh. Pengolahan cengkeh ini ternyata menimbulkan polusi bau. Polusi bau ini,

diprotos oleh tetangga dan aparat setempat turun tangan untuk mengadakan pendekatan, dan memperingatkan supaya berdisiplin dalam mengelola usahanya.

Kondisi kehidupan ekonomi yang berbeda juga mengganggu hubungan dalam bertetangga. Diantara kondisi ekonomi lemah (miskin) dan ekonomi kuat (kaya) menjadi penghalang atau pembatas komunikasi. Warga yang ekonominya kuat cenderung bersifat egois dan tidak mau membarui dengan sesama warga lain. Kondisi seperti ini sulit dicapai suatu kehidupan yang rukun, dan saling pengertian antar warga. Anak-anak muda putus sekolah yang tiap malam begadang dengan mabuk-mabukan, jelas mengganggu lingkungannya. Biasanya karena mabuk ada yang bersitegang. Oleh aparat setempat pemuda-pemuda tersebut diberi arahan supaya ikut menjaga ketertiban sosial.

Corak hubungan ketegangan di wilayah Terban di beberapa tempat tidak sama. Hal ini karena dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungannya serta kepadatan penduduk, dan tingkat status sosialnya, dan sebagainya. Melihat kasus-kasus tersebut, menunjukkan bahwa warga kurang mempunyai rasa tanggung jawab sosial. Perilaku mereka menunjukkan bahwa mereka bertindak hanya memikirkan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan lingkungan kehidupan bersama mereka.

3. Usaha - Usaha Yang Dilakukan.

Untuk menanamkan rasa disiplin bertetangga diantara warga ada berbagai macam cara yang dilakukan aparat maupun warga setempat. Usaha yang tetap berlangsung dan dilakukan pada kelompok-kelompok pertemuan seperti PKK, Dasawisma, LKMD yaitu melalui arisan. Dengan adanya pertemuan-pertemuan dalam arisan tingkat RT tersebut sangat membantu memperlancar komunikasi diantara warga. Dalam arisan itu kadang-kadang juga diisi penyuluhan-penyuluhan sopan santun bertetangga, penjelasan bagaimana hidup bertetangga dengan baik dan sebagainya. Demikian juga pada pertemuan-pertemuan muda-mudi, disisipi pengertian-pengertian untuk ikut mewujudkan ketertiban sosial dan mempertebal solidasitas sosial antar sesama.

Kegiatan gotong royong baik yang dilakukan secara spontanitas maupun instruksi dapat memperlancar komunikasi dan memupuk pengertian untuk saling membantu. Untuk itu kegiatan gotong royong juga diterapkan dalam kegiatan dasa wisma, PKK. Dalam hidup bertetangga,

gotong royong dapat membantu memupuk rasa solidaritas sosial diantara warga. Untuk menjaga ketertiban sosial tersebut dilingkungan warganya, seksi Kantibmas bekerja sama dengan seksi KLH mengatur jam tamu untuk berkunjung. Hal ini karena wilayah Terban banyak dihuni anak-anak sekolahan mahasiswa yang indekost. Namun karena jangkauannya luas sulit untuk memonitor. Hal ini karena para pendatang tersebut kurang tanggung jawab sosialnya. Untuk menjaga ketertiban sosial tersebut Kantibmas kelurahan berusaha mendirikan Bintara Pembina Masyarakat (Bapimas) untuk memberikan penyuluhan.

Mengaktifkan pengajian-pengajian bagi warga yang beragama Islam, dan kelompok-kelompok sembahyang Kristiani, dengan demikian warga masyarakat di samping meningkatkan ketakwaan bersama sebagai umat beragama untuk saling hidup rukun, berdisiplin menghormati haknya masing-masing.

Pertemuan tingkat RT - RW, juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan interaksi antar warga, terutama warga di lingkungan elite, yang karena kesibukan profesinya jarang berkomunikasi. Disini hubungan ketetanggaan agak formal. Hubungan-hubungan sosial diantara sesama warga intensitasnya kecil, dalam arti rasa kebersamaan mereka dalam hidup ketetanggaan juga kurang.

TABEL III.1
JENIS SAMPAH DAN VOLUME SAMPAH
PER HARI DI KODYA YOGYAKARTA

Jenis Sampah	Volume (m³)	%
Daun-daunan	1288,02	48,14
Plastik	746,48	27,90
Kertas	376,98	14,09
Buah-buahan	96,32	3,60
Campuran : nasi, sayuran, dan lain-lain	69,83	2,61
Sisa sayuran	67,95	2,54
Tanah	8,29	0,31
Tulang dan daging	4,00	0,15
Kulit	3,73	0,14
Kulit telur	3,47	0,13
Kotoran burung	3,20	0,12
Kayu-kayuan dan bambu	2,40	0,09
Textil	2,40	0,09
Air	1,60	0,04
Logam	1,60	0,04
Kaca/gelas	0,27	0,01
Kapas	0,08	0,003
Nasi	0,05	0,002
Jumlah	2675,58	100

Sumber : diambil dari hasil penelitian yang dilakukan Pemda dan PPLH UGM 1986.

TABEL III.2
SUMBER SAMPAH DAN VOLUME SAMPAH
PER HARI DI KODYA YOGYAKARTA 1986

Sumber Sampah	Volume (m³)	%	Berat (ton)	%
Rumah Tangga	1965,45	73,46	143,26	66,54
Penginapan	380,00	14,20	11,55	5,36
Pasar	144,12	5,39	29,92	13,90
Jasa	40,29	1,50	9,46	4,40
Toko & warung	34,41	1,29	1,49	0,70
Instansi/kantor	33,62	1,26	0,43	0,20
Rumah Makan	29,31	1,09	12,85	5,92
Rumah sakit	16,35	0,61	2,96	1,37
Industri	15,00	0,56	2,85	1,32
Sekolah	11,45	0,43	0,31	0,14
Tempat Hiburan	5,57	0,21	0,22	0,10
Jumlah	2675,57	100	215,30	100

Sumber : diambil dari hasil penelitian yang dilakukan Pemda dan PPLH UGM 1986.

TABEL III.3
CARA PEMBUANGAN SAMPAH

Cara Pembuangan	f	%
1. Di bak sampah/container	33	66,0
2. Ditimbun di halaman rumah	4	8,0
3. Ditimbun-dibakar	6	12,0
4. Dibuang di sungai	7	14,0
Jumlah	50	100

TABEL III.4
JARAK BAK SAMPAH DARI RUMAH

Jarak (m)	f	%
25	10	30,3
25 - 100	7	21,2
100 - 300	16	48,5
Jumlah	33*	100

Keterangan : * Jumlah responden yang membuang sampah di bak sampah

TABEL III.5
TINGKAT DISIPLIN PEMBUANGAN SAMPAH

Tingkat Disiplin	f	%
1. Kurang Baik	14	28,0
2. Cukup	5	10,0
3. Baik	31	62,0
Jumlah	50	100

TABEL III.6
TEMPAT PEMBUANGAN LIMBAH DAPUR

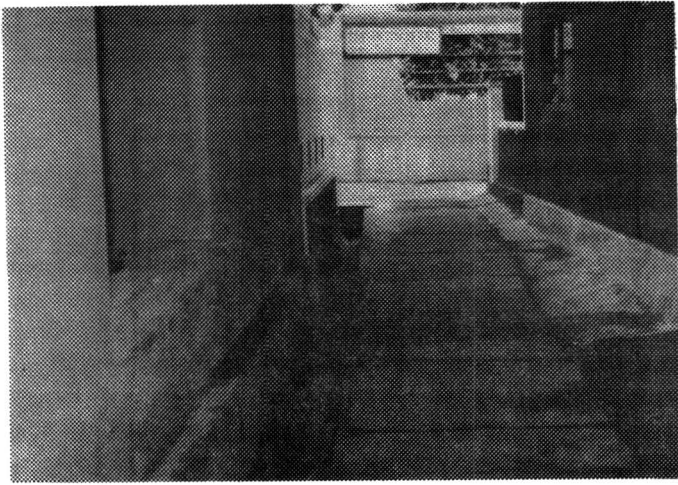
Tempat Pembuangan	f	%
1. Selokan besar	23	46,0
2. Sungai	11	22,0
3. Pembuangan limbah (tempat terbuka dan jugangan)	8	16,0
4. Asainering	6	12,0
5. Bak peresapan	2	4,0
Jumlah	50	100

TABEL III.7
SALING BERKUNJUNG KE TETANGGA

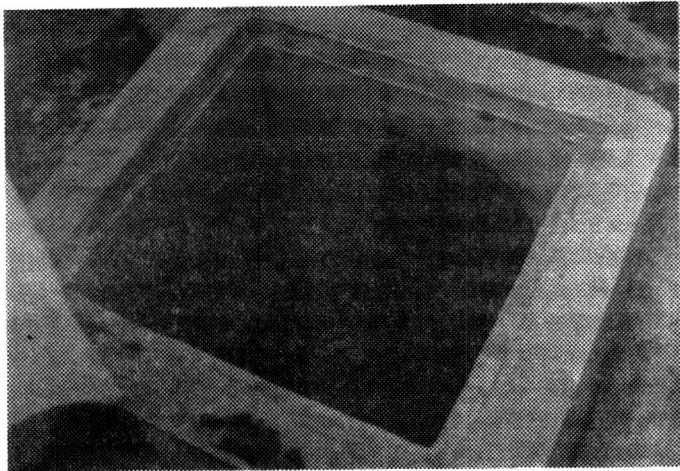
Saling berkunjung	f	%
1. Tidak pernah	2	22,0
2. Kadang-kadang	27	74,0
3. Sering-sering	11	4,0
Jumlah	50	100
Keperluan Berkunjung (kadang-kadang + sering)	f	%
1. Mengobrol/tukar pendapat	24	50,0
2. Bila ada keperluan	24	50,0
Jumlah	48	100

TABEL III.8
PERNAH/TIDAK TERJADI PERSELISIHAN

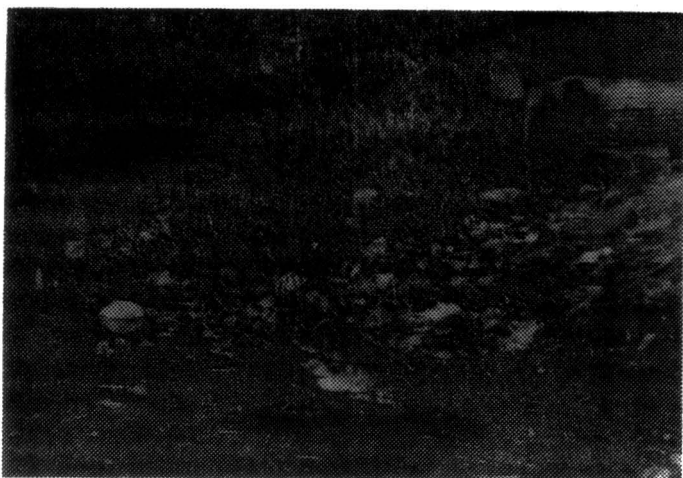
Pernah/Tidak	f	%
1. Tidak Pernah	27	
2. Kadang-kadang	23	
Jumlah	50	
Masalah yang terjadi (Kadang-kadang)	23	
1. Anak-Anak	9	39,1
2. Salah Paham	5	21,7
3. Adu tritis	4	17,4
4. Saling menyindir	3	13,1
5. Menyetel radio/tape keras	2	8,7
Jumlah	23	100



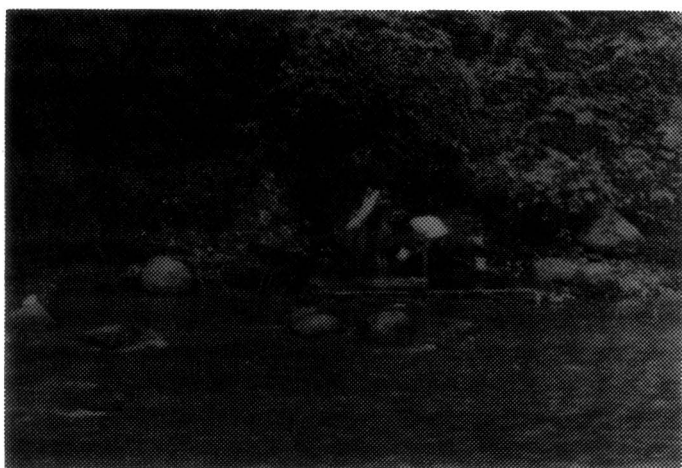
Gambar 7. Sarana saluran limbah (tertutup) dan saluran air hujan



Gambar 8. Tempat penampungan limbah rumah tetangga



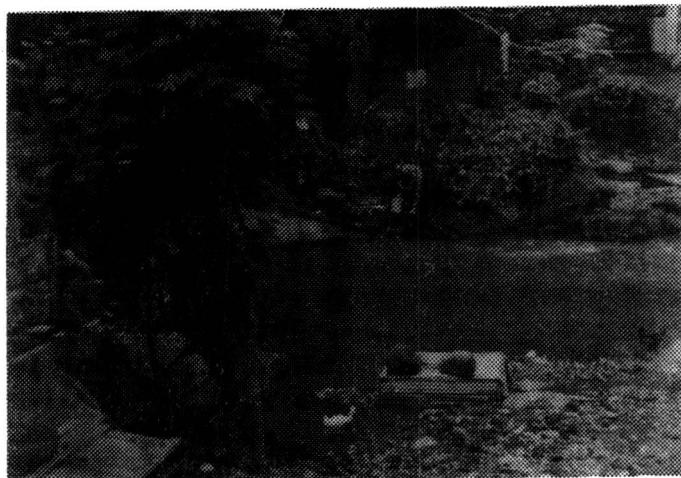
Gambar 9. Pembuangan sampah di sungai



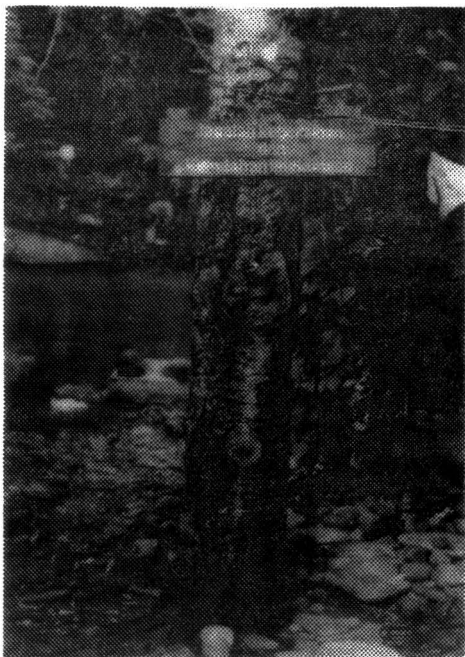
Gambar 10. Mandi di sungai



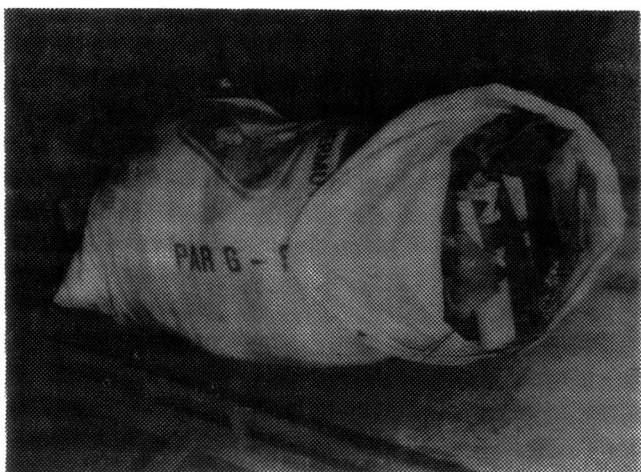
Gambar 11. Buang hajat di sungai



Gambar 12. Mengambil air bersih di sumber air dekat sungai



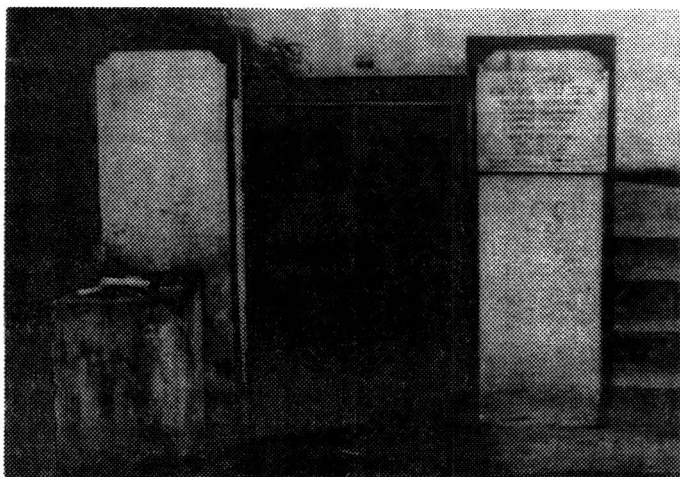
Gambar 13. Slogan kebersihan di pinggir sungai



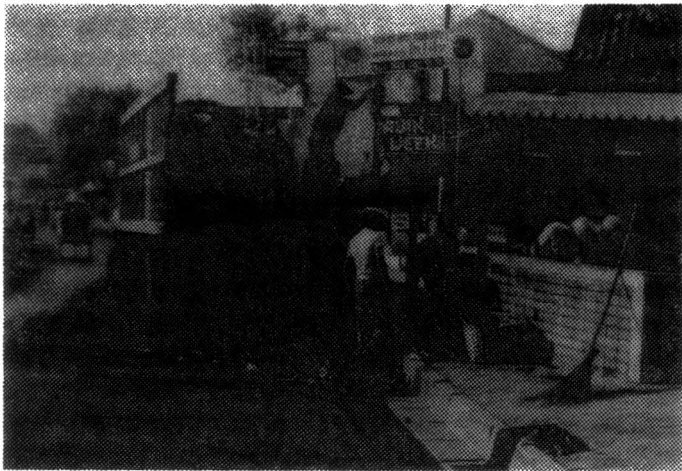
Gambar 14. Bagor tempat membuang sampah rumah tangga



Gambar 15. Tempat pembuangan Sampah Sementara (TPS) di tengah kampung



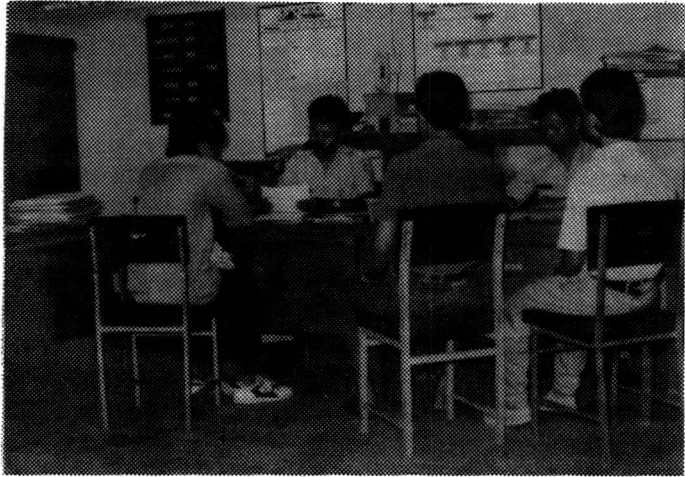
Gambar 16. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) milik beberapa RT



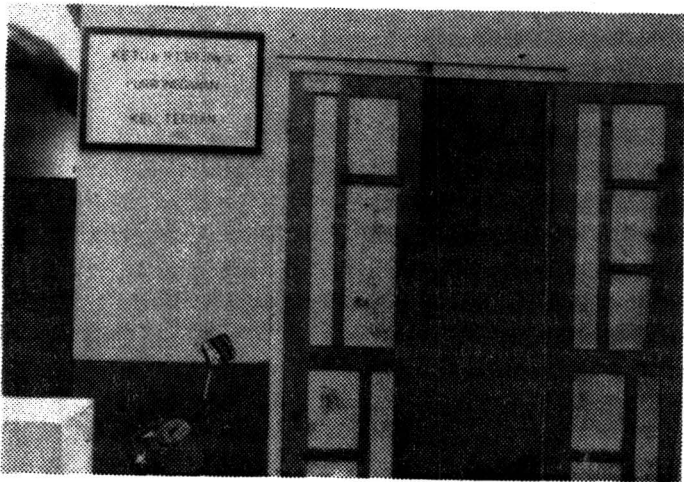
Gambar 17. Truk dari Dinas Kebersihan sedang mengangkut sampah



Gambar : 18 Gerobag kampung istirahat sejenak untuk membuang sampah ke TPA



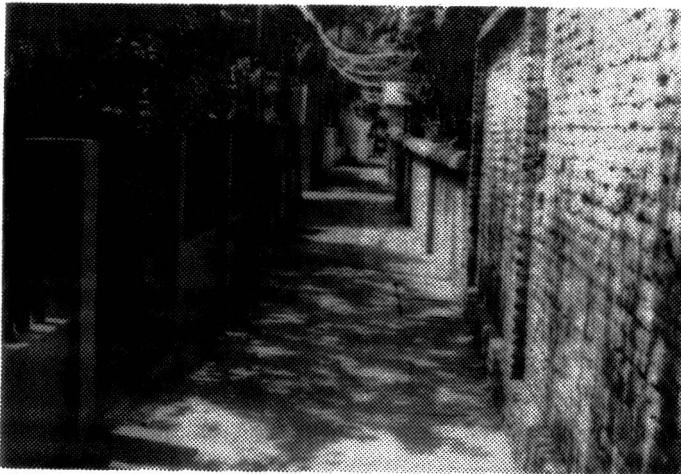
Gambar 19. Penduduk sedang menyelesaikan urusan administrasi



Gambar 20. Salah satu kantor RT yang ada di Kelurahan Terban



Gambar 21. Perkampungan di Lembah Code



Gambar 22. Perkampungan di wilayah Terban

BAB IV

DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DI KELURAHAN TERBAN

Perilaku disiplin seseorang bisa dilihat dari tingkah laku yang teratur, tertib, serta mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Pengendalian diri yang baik itu bisa di lingkungan rumah, sekolah, lingkungan kerja maupun di tempat-tempat umum. Dengan kata lain aktualisasi perilaku disiplin itu bisa dimana saja manusia itu berada. Karena pada dasarnya sikap disiplin itu merupakan sifat bawaan atau sifat dasar, atau yang diperoleh dari pengaruh lingkungannya.

Lingkungan tempat-tempat umum di kota diantaranya adalah tempat-tempat rekreasi, terminal, pasar, jalan raya. Fasilitas tempat-tempat umum tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat baik primer maupun sekunder. Dengan adanya fasilitas tempat-tempat, mempermudah masyarakat kota khususnya masyarakat Terban untuk memenuhi kebutuhannya.

Penyelenggaraan ketertiban di tempat-tempat umum tersebut yaitu di pasar, terminal, tempat-tempat hiburan (bioskop), jalan raya, dan sebagainya diatur dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pengguna tempat-tempat umum tersebut. Dalam hal ini ketertiban tersebut dapat terwujud tergantung disiplin dari kedua belah pihak yaitu pengelola pasar, terminal, bioskop, jalan raya maupun yang menikmati tempat-tempat tersebut. Sehubungan dengan itu bagaimanakah disiplin yang harus dilakukan bagi penjual maupun pembeli di pasar, pengunjung tempat-tempat hiburan (bioskop), penumpang maupun sopir di terminal, pengguna jalan raya.

A. DISIPLIN DI LINGKUNGAN PASAR

Pasar, menurut Ensiklopedi Indonesia (1980), adalah suatu organisasi tempat para penjual dan pembeli dapat untuk saling berhubungan dengan mudah. Dalam arti terbatas, sebagai pusat memperjualbelikan dagangan yang biasanya barang-barang untuk keperluan hidup. Pasar yang merupakan arena tempat jual beli sekaligus juga tempat terjadinya interaksi. Jadi yang dimaksud pasar disini adalah tempat, baik terbuka atau tertutup, yang digunakan untuk melaksanakan salah satu keaktifan ekonomi berupa jual beli bersama secara langsung.

Pasar, sebagai tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga kota pada umumnya terletak di wilayah pemukiman yang padat dan di daerah lalu-lintas yang ramai. Di wilayah Kotamadya Yogyakarta jumlah pasar ada 31 buah dan 5 diantaranya adalah pasar khusus (burung, sepeda, ketela, material). Pasar-pasar tersebut sebagian sudah berupa bangunan yang cukup representatif dan beberapa masih dalam bentuk sederhana.

Dilihat dari areal luas pasar yang digunakan, paling luas adalah pasar Beringharjo (tabel IV.1). Sedangkan jumlah pedagang secara keseluruhan dari 31 pasar di Kotamadya Yogyakarta ada 11.119 pedagang (yang terdaftar). Jumlah pedagang antara pasar yang satu dengan lainnya tidak sama tergantung luas pasar, dan kondisi pasar. Jumlah pedagang paling banyak adalah Beringharjo, disusul kemudian pasar Kranggan. Sedangkan pasar dengan jumlah pedagang paling sedikit adalah pasar Suryobrantan (13 pedagang), dan Ledok Gondomanan (17 pedagang) (tabel IV.2).

Pasar-pasar di Kotamadya Yogyakarta tersebut ada di bawah koordinasi Dinas Pasar. Berdasarkan Perda no 1 tahun 1987 pasal 3 dan 4 disebutkan bahwa:

- (1) Dinas Pasar adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang urusan pasar
- (2) Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah

Selanjutnya pasal 4 (a) menyebutkan:

Dinas Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah di bidang urusan pasar

Untuk mengkoordinasikan pasar-pasar yang ada, menurut pasal 7 Dinas Pasar mempunyai susunan organisasi yaitu :

Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bina Program, Seksi Pendapatan, Keamanan dan Ketertiban, Kebersihan, Pemeliharaan

Pasar Terban sebagai salah satu daerah pasar-pasar yang ada di Kotamadya Yogyakarta yang terletak di wilayah Terban akan dilihat bagaimana perilaku disiplin pedagang-pedagang maupun pembeli di pasar tersebut.

1. Pasar Terban

Pasar Terban terletak di wilayah Terban bagian selatan. Tepatnya di Jalan Raya C. Simanjuntak. Pasar Terban menempati tanah seluas

6.435 m², dan bagian depan pasar digunakan untuk sub-terminal colt Yogya-Kaliurang dan Yogya-Prambanan. Di belakang pasar adalah kampung Terban yang berbatasan dengan Sungai Code.

Penyelenggaraan pasar Terban terdiri dari 3 macam jenis kegiatan yaitu jual beli kebutuhan sehari-hari, jual beli ayam baik ayam yang masih hidup maupun yang sudah mati, dan menjual sepeda. Ketiga jenis jual beli ini berlangsung di tempat yang sama, yaitu menempati tempat-tempat dasaran atau los-los Pasar Terban. Jadi bagian depan untuk jualan makanan dan bumbu, bagian tengah sepeda, dan belakang untuk jualan ayam.

Perlu diketahui pasar Terban berada di bawah pengawasan pasar induk. Dahulu pasar induk berada di Pasar Reksonегaran, tetapi karena Pasar Reksonегaran setelah dipugar menjadi sepi akhirnya induk pasar berada di Pasar Demangan. Induk pasar ini membawahi pasar-pasar kecil yang ada di wilayah Gondokusuman di antaranya Pasar Reksonегaran, Gendeng, Terban dan sebagainya.

Pasar Terban dengan tanah seluas 6.435 m² digunakan untuk melengkapi sarana pasar di antaranya untuk : kios sebanyak 56 buah (ukuran 3 x 3 m), los lantai 21 buah, tempat parkir, tempat titipan sepeda, Kantor Pasar, sumur, kamar mandi/WC, bak sampah, bak peresapan, jalan. Untuk los lantai supaya pedagang yang berhak menempati itu bisa tepat penempatannya dibuat garis pembatas dengan cat. Sedangkan untuk kios pintunya dibuat dua yaitu satu yang menghadap keluar dan yang satunya menghadap ke dalam pasar. Hal ini untuk mempermudah pembeli yang dari luar pasar maupun yang dari dalam pasar.

Saat ini menurut data dari Dinas Pasar jumlah pedagang di Pasar Terban 174 pedagang, tetapi menurut petugas pasar ada sekitar 190 pedagang. Hal ini kemungkinannya karena data dari Dinas Pasar berdasarkan pemilikan tempat jualan, sedangkan petugas Pasar Terban menurut penarikan retribusi. Jadi kemungkinan pedagang yang tidak termasuk dalam daftar Dinas Pasar itu hanya menumpang pedagang yang mempunyai tempat jualan. Misalnya kapling los milik pedagang ditempati untuk 2-3 orang pedagang. Pedagang yang "nunut" itu harus ikut menanggung pembayaran kontrak los tersebut. Ada juga pedagang-pedagang yang berjualan di jalan-jalan los.

Kios-kios pasar digunakan untuk berjualan macam-macam di antaranya kelontong, rumah makan, kantor-kantor sub terminal Yogya-Kaliurang, Yogya - Prambanan, kantor agen-agen koran, Kantor Koperasi

Angkutan, Kantor agen-agen bus, dan sebagainya. Sedangkan los-los pasar yang ada di dalam pasar, sebanyak 7 los untuk berjualan kebutuhan sehari-hari, untuk pasar sepeda 3 los, pasar ayam 11 los. di samping itu diluar pasar ada kios-kios yang berjualan makan-minum, tetapi kios ini retribusinya yang menarik Pasar Lempuyangan karena menjadi wewenang Dinas Pasar (lihat Dinas Pasar).

Penempatan pedagang pada los atau kios harus mendapat izin dari Kepala Dinas Pasar. Tetapi untuk pedagang yang berada di jalan atau yang sifatnya sementara ijinnya hanya melalui petugas pasar setempat. Pemberian izin kepada pedagang-pedagang yang tak resmi ini dengan syarat tidak mengganggu kelancaran pedagang maupun pembeli.

Lain halnya dengan pedagang sepeda. Mereka ini menempati los yang ada di Pasar Terban sebanyak tiga buah los. Pedagang sepeda di Pasar Terban merupakan pendatang, karena tempatnya yang dulu di gusur. Sebelumnya mereka ini berjualan sepeda di depan toko jamu "Ginggang" di Paku Alaman. Demikian pula pasar ayam, pedagang ayam tersebut merupakan pendatang baru. Para pedagang ayam ini dulunya berjualan di Pasar Beringharjo yaitu di utara Beteng Vredenburg. Tempat tersebut akan di gunakan untuk tempat parkir kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, maka akhirnya pedagang ayam di gusur lagi dan kemudian di pindahkan ke Pasar Terban sampai sekarang. Mengenai kepindahan pasar maupun penempatan berjualan, diatur oleh koordinator pasar ayam. Tetapi khusus untuk tempat pemotongan ayam, tempat tersebut merupakan bangunan tambahan. Bangunan tersebut biayanya di tanggung bersama oleh sesama pedagang ayam, sedangkan untuk mesin bubut dan pompa air membeli secara rombongan.

2. TATA TERTIB DI PASAR

Tata tertib yang dimaksud disini adalah ketentuan-ketentuan yang harus ditarik oleh pedagang-pedagang yang berada di Pasar Terban. Tata tertib tersebut di antaranya menyangkut penempatan jualan, jam berjualan, kebersihan, retribusi, dan sebagainya. Peraturan itu di dikeluarkan oleh Dinas Pasar yang disebarkan keberbagai Induk Pasar, kemudian oleh Induk Pasar diteruskan ke pasar-pasar yang berada di bawahnya di antaranya adalah Pasar Terban.

Tata tertib yang dikeluarkan Dinas Pasar untuk para pedagang itu antara lain sebagai berikut :

1. Pedagang tidak boleh meletakkan dagangan dengan ketinggian sampai lebih dari 160 cm
2. Pedagang harus membayar retribusi berdasar pada luas tempat yang digunakan
3. Pedagang tidak boleh tidur di pasar
4. Jam berjualan antara jam 06.00 - 18.00 malam
5. Penempatan dagangan sesuai dengan jenisnya

Tata tertib untuk pedagang ini bertujuan untuk menertibkan dan mendisiplinkan para pedagang supaya kegiatan pasar dapat berjalan lancar. Selain peraturan tertulis, ada peraturan yang sifatnya lisan terutama untuk kebersihan pasar. Peraturan tersebut mewajibkan para pedagang setelah selesai berjualan untuk mengeluarkan dan mengumpulkan sampah yang ada di sekitar dagangannya. Demikian pula dalam hal pembuangan air limbah harus pada tempatnya.

Mengenai tata tertib kebersihan pasar, sudah diatur dalam Peraturan Daerah no 1 Tahun 1987. Menurut ketentuannya yang dimuat dalam pasal 26 ayat 1 bahwa untuk pengelolaan kebersihan pasar ditangani Seksi Kebersihan yang terdiri dari :

a) Sub Seksi kebersihan pasar, dan b) Sub Seksi Angkutan/Armada.

Kedua sub seksi tersebut penjabarannya dimuat dalam pasal 27 yaitu :

1. Sub Seksi Kebersihan Pasar mempunyai tugas
 - a. Menyelenggarakan kebersihan lingkungan pasar
 - b. Melaksanakan pengelolaan terhadap sarana angkutan sampah
 - c. Menyelenggarakan administrasi Seksi Kebersihan
 - d. Menyampaikan informasi, saran, laporan periodik dan laporan sebagai bahan pertimbangan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kebersihan.
2. Sub Seksi Angkutan/Armada mempunyai tugas
 - a. Menyelenggarakan angkutan sampah dari lingkungan pasar ke tempat pembuangan akhir
 - b. Mengelola kendaraan yang digunakan oleh armada sampah
 - c. Mengelola perbengkelan dan tempat pool yang di butuhkan
 - d. Menyampaikan informasi, saran, laporan periodik dan laporan sebagai pertimbangan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kebersihan

Berdasarkan Perda tersebut jelas bahwa yang menangani kebersihan adalah Seksi Kebersihan dari Dinas Pasar. Oleh sebab itu petugas kebersihan di Pasar Terban adalah karyawan Dinas Pasar. Untuk itu kehadirannya selaku pembersih sampah di Pasar Terban harus mengisi daftar hadir di pasar Induknya yaitu di Pasar Demangan.

Meskipun pengelolaan kebersihan sampah sudah diatur dalam Perda no 1 Tahun 1987, tetapi dalam prakteknya Sub Seksi Kebersihan maupun Sub Seksi Angkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan tuntas. Hal ini karena sarana maupun prasarana untuk kebersihan sangat kurang. Berdasarkan informasi data dari Dinas Pasar sarana kebersihan untuk mengangkut sampah berupa gerobak untuk keseluruhan pasar ada 18 buah yang tersebar di Pasar Beringharjo 5 buah, Kranggan 3 buah, Reksonegaran 3 buah, Ngasem 1 buah, Sentul 4 buah, Kota Gede 1 buah dan Serangan 1 buah. Sedangkan untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA saat ini Dinas Pasar baru memiliki sebuah truk (1 buah) yang ditangani 6 personil. Truk tersebut harus keliling ke pasar-pasar untuk mengambil sampah dari TPS atau bak-bak sampah yang ada di pasar di bawa ke TPA. Oleh karena armada pengangkutan sampah pasar hanya sebuah truk jadi yang bisa teratasi pengangkutan sampah oleh Dinas Pasar baru 4 pasar yaitu : pasar Sentul, pasar Demangan, pasar Terban dan pasar Kranggan. Untuk itu pengelolaan sampah pasar tidak secara total dilakukan Dinas Pasar tetapi masih dibantu DKP kurang lebih 75%-nya. Meskipun sudah dibantu DKP sampah-sampah pasar kadang-kadang tidak terangkut semuanya. Di samping itu bak sampah di pasar tidak hanya menampung sampah dari pasar saja tetapi juga digunakan oleh penduduk sekitarnya untuk tempat pembuangan sampah mereka. Pengambilan sampah pasar itu ada yang dilakukan pagi hari ada yang siang hari.

3. Disiplin Terhadap Tata Tertib Pasar

Ketentuan-ketentuan yang diterapkan pasar kepada para pedagang antara lain mengenai letak dagangan, pembayaran retribusi, tidak boleh tidur di pasar, jam berjualan, penempatan jenis dagangan dan sebagainya, pada umumnya dipatuhi oleh para pedagang baik yang berada di los-los pasar maupun kios pasar. Untuk itu bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dilaksanakan oleh para pedagang Pasar Terban, berikut ini akan dilihat satu persatu.

a. Disiplin Terhadap Letak, Jenis Dagangan, dan Retribusi

Biasanya untuk menarik pembeli, pedagang menata dagangannya sedemikian rupa yang kadang-kadang sampai menutup jalan, atau menutupi pedagang yang lain; atau penataan barang-barang yang dijual tidak memperhatikan tempat jualan yang sempit dan sebagainya. Namun pada umumnya pedagang cukup tertib dalam meletakkan dagangannya. Satu, dua pedagang memang pernah ada yang menatanya tidak menghindahkan ketentuan yang ada, tetapi setelah mendapat teguran, hal itu tidak terjadi lagi. Namun dalam penataan menurut jenis jualan (untuk sayuran, makanan, maupun bumbu-bumbu) belum dapat dilaksanakan. Hal bukan berarti pedagang melanggar peraturan atau tidak disiplin, tetapi karena dulunya waktu penempatan pertama tempat dagangan ditentukan berdasarkan undian. Oleh sebab itu hasil yang diperoleh adalah penempatan dagangan yang tidak sejenis. Disamping itu oleh beberapa hal, para pedagang itu kadang-kadang berganti jenis dagangan yang di jual untuk kepentingan ekonominya.

Masalah disiplin dalam hal pembayaran retribusi (istilah pedagang pasar "sapon") pada umumnya tertib, khususnya untuk pedagang-pedagang yang sudah memiliki tempat-tempat berjualan yang tetap. Akan tetapi untuk pedagang-pedagang yang tidak memiliki tempat jualan cenderung menghindari dari tarikan retribusi, atau enggan membayar dengan alasan dagangan tidak/belum laku. Biasanya untuk kesempatan satu atau dua kali masih didiamkan oleh petugas penarik retribusi, tetapi kalau berkelanjutan terpaksa ditindak untuk membayar retribusi.

Ketentuan pedagang untuk tidak boleh tidur di pasar juga dipatuhi oleh para pedagang. Larangan tersebut adalah untuk menjaga keamanan pasar. Sedangkan ketentuan jam berjualan untuk pedagang yang berjualan di dalam pasar bisa berjalan dengan tertib, tetapi untuk mereka yang berjualan di pinggir pasar maupun kios-kios pasar banyak yang buka di atas ketentuan jam buka maupun tutup. Pelanggaran ini dimaklumi dan tidak ada teguran untuk menghentikan kegiatan itu.

b. Disiplin Kebersihan

Dalam hal pembuangan sampah, khusus bagi pedagang yang ada di Pasar Terban sudah mempunyai tata tertib, mereka harus mengeluarkan sampah dari tempat jualan masing-masing. Adanya aturan tersebut,

umumnya pedagang sudah mematuhi sehingga akan mempermudah petugas kebersihan untuk menanganinya. Jadi petugas kebersihan tinggal menyapu di bagian luar dagangan atau mengumpulkan sampah untuk selanjutnya dipindahkan ke gerobag kecil atau ditumpuk di tempat penampungan sementara (TPS). Namun kadang-kadang dijumpai adanya pedagang yang tidak mengeluarkan sampah dari tempat jualannya. Untuk itu petugas kebersihan tak segan-segan sering mengingatkan kepada para pedagang untuk tidak lupa mengeluarkan sampah.

Petugas kebersihan setiap harinya membersihkan sampah rata-rata tiga kali. Pertamakali pada pagi hari sebelum petugas tersebut pergi absen ke kantor induk. Pada saat itu belum banyak penjual atau pedagang yang datang, sehingga membersihkannya lebih leluasa. Pada setiap los dan jalan terdapat tong-tong sampah. Setelah menyapu, sampah-sampah yang ada dimasukkan ke gerobag kecil di bawa ke tempat berhentinya truk sampah yang biasa mengangkut sampah. Truk sampah tersebut mengangkutnya satu hari satu kali pada pagi hari dan dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA). Untuk itu sampah yang menumpuk pada siang dan sore hari hanya ditumpuk di tempat penampungan sementara (TPS). Pekerjaan menyapu kedua kalinya dilakukan siang hari antara pukul 11.00. setelah itu pukul 13.30. absen lagi ke pasar induk, petugas kebersihan ini kembali lagi ke Pasar Terban untuk membersihkan pada sore hari.

Untuk pengangkutan sampah Pasar Terban ini tidak ada masalah, karena bisa langsung setiap harinya dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sebab truk tersebut garasinya ada di Pasar Terban. Truk pengangkut sampah ini milik Dinas Pasar yang digunakan untuk mengangkut sampah-sampah pasar Sekotamadya Yogyakarta. Untuk itu pengangkutan sampah di pasar-pasar lainya dibantu oleh truk DKP.

Sarana kebersihan yang dimiliki Pasar Terban yaitu : tempat-tempat sampah berupa tong sampah, bak penampungan sampah (TPS), gerobag kecil (keseran), bak peresapan pembuangan limbah, keranjang sampah, sekop, sapu lidi, sumur, kamar mandi/WC.

Dalam hal kebersihan pemakaian kamar mandi/WC yang ada di Pasar Terban termasuk tertib. Menurut petugas pasar, bahwa kamar mandi/WC di pasar tersebut ada pengelolaanya sendiri. Untuk itu setiap hari selalu dibersihkan, yaitu lantainya di *kosek* memakai sapu lidi supaya tidak licin dan baknya sering di kuras supaya bersih. kemudian air limbah dari kamar mandi/WC ini langsung dialirkan ke bak peresapan. Karena kamar mandi/WC tersebut ada yang mengelola sendiri, maka bagi orang

yang akan memenuhi hajat di kamar mandi/WC tersebut dikenal biaya sebesar Rp 100,- bila kencing dan Rp 150,- bagi yang mandi. Penarikan biaya tersebut untuk dana pemeliharaan dan menggaji petugas yang jaga.

Untuk pembuangan air limbah, di Pasar Terban ada bak penampungan yang terletak disebelah selatan Pasar Terban. Namun tidak semuanya limbah dari pasar tersebut masuk ke bak peresapan. Misalnya saja limbah penyembelihan ayam dialirkan ke selokan, yang menuju ke Sungai Code. Ternyata limbah pemotongan ayam yang dialirkan ke Sungai Code tersebut menyebabkan pencemaran Sungai Code.

Sebagaimana diketahui di Pasar Terban ada tempat pemotongan ayam ($\pm$ 4 usaha pemotongan ayam). Limbah dari potong ayam seperti kotoran ayam dikumpulkan untuk makanan lele. Sedangkan bulunya di jual yang biasanya diambil pedagang dari Surabaya untuk diolah menjadi makanan ternak sebulannya 25 ribu rupiah. Sedangkan usus ayam di jual untuk membuat sate. Dengan demikian limbah pemotongan ayam bisa dimanfaatkan. Ongkos pemotongan ayam per ekornya 100 rupiah. Jadi pembeli bisa membeli ayam kemudian langsung minta untuk di sembelih dan di bersihkan.

Kebersihan tempat ayam tersebut walaupun sudah ada retribusinya, penjual harus membersihkan terlebih dahulu jika akan pulang. Oleh karena tempat penyembelihan ayam berbau amis dan nampak kotor, setiap membersihkan diperlukan air yang banyak untuk membersihkan kotoran maupun darah ayam yang berceceran. Untuk kebersihan tempat usaha harus membayar petugas kebersihan per bulan Rp 1000 rupiah, untuk membeli air pencuci ayam seharinya 1.500 rupiah. Air tersebut diambil dari sumur pasar dengan menggunakan dinamo yang dibeli dan di ongkosi bersama oleh para pemotong ayam. Untuk penjaga malam membayar 1000 rupiah per minggu. Sedangkan karcis "sapon" sehari 600-700 rupiah.

Dilihat dari kewajiban-kewajiban pembayaran kebersihan para pemotong ayam cukup tertib, demikian juga dalam menjaga kebersihan tempat pemotongan ayam. Satu hal yang sangat perlu untuk dicari jalan keluarnya adalah pembuangan limbah pencuci ayam disembelih. Menurut beberapa informasi dari penduduk di sekitar Sungai Code, ternyata limbah ayam tersebut mencemari sungai tersebut, karena menjadi sangat bau dan keruh. Pada hal sungai tersebut masih sering di manfaatkan penduduk sekitarnya untuk keperluan-keperluan cuci, mandi dan sebagainya. Keadaan itu oleh aparat setempat pernah dilaporkan ke kelurahan dan pihak kelurahan menurut informasi sudah membuat teguran. Namun

sampai sekarang keadaan itu masih berlasung terus, belum ada tindakan-tindakan selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut. karena nampaknya juga tidak ada usaha-usaha untuk menaggulangi pembuang limbah ayam tersebut. Pedagang-pedagang pemotongan ayam sendiri sudah merasa melakukan kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, mereka tidak memikirkan atau tidak mau tahu permasalahan itu. Mereka hanya merasa sarana yang ada membuang limbah ayam adalah selokan yang langsung ke sungai.

4. Hubungan Pedagang dengan Pedagang

Dalam hubungan sehari-hari antara pedagang dengan pedagang satu sama lain saling kenal. Setiap harinya mereka selalu bertatap muka, dan mereka kenal baik di mana rumahnya, berjualan apa, dan namanya, bahkan ada yang kenal sampai pada anak-anaknya. Gambaran ini terutama di lingkungan pedagang atau penjual di pasar kecil, dalam hal ini khususnya Pasar Terban.

Dalam berinteraksi, terutama pada saat-saat sedang sepi pembeli pedagang-pedagang ada yang mengobrol meninggalkan jualannya ke tempat tetangganya sesama pedagang yang juga sedang sepi. Ada juga yang ngobrol atau mendengarkan radio milik pedagang di dekatnya. Bahkan ada yang minta tolong dipijit atau "dikeroki" oleh pedagang lain. Kadang-ladang juga di sela-sela kesibukannya melayani pembeli mereka tetap bercakap-cakap dengan sesama penjual yang berada di kanan kirinya. Percakapan antara sesama pedagang itu kadang-kadang berhubungan dengan dagangan/jualan, tetapi kadang-kadang di luar urusan itu. Masalah-masalah yang sedang hangatpun ada yang mengikuti, sehingga pedagang tersebut menjadi sumber penyebar berita, misalnya saja ada demonstrasi, kebakaran, perampokan di suatu tempat dan sebagainya. Pada saat seperti itu terjadi saling tukar menukar informasi.

Di saat-saat ramainya pembeli, sering ada penjual yang sepi pembeli. Waktu tersebut kadang-kadang oleh penjual tersebut digunakan untuk membantu penjual di kanan-kirinya yang sedang ramai pembeli. Misalnya saja pada penjual makanan yaitu gethuk. Pada waktu itu penjual gethuk ramai oleh pembeli dan kebetulan yang duduk di sebelahnya adalah penjual bumbu dapur (bumbon) dan sayuran yang sepi pembeli. Karena melihat temannya sibuk dan ditunggu oleh beberapa orang yang antri, penjual yang sedang sepi itu membantu membungkuskan (mbitingi)

sehingga dapat memperlancar yang belanja. Cara seperti ini umumnya dilaksanakan oleh para penjual dan menunjukkan kerukunan diantara mereka. Disamping itu menunjukkan adanya kerja sama yang baik antara sesama (penjual). Contoh-contoh semacam itu banyak dijumpai sesama pedagang saling membantu. Contoh lainnya yaitu bila penjual yang di sebelahnya meninggalkan jualannya misalnya ke kamar mandi atau ke tempat lain, padahal ada orang yang mau berbelanja, maka penjual yang di sebelahnya dengan sukarela akan membantu untuk melayani pembeli.

Selain contoh-contoh seperti tersebut di atas, guna menunjukkan kesetia kawan dan keakraban dengan sesama penjual juga ditunjukkan pada masalah tukar menukar uang atau saling pinjam meminjam uang. Misalnya saja ada pembeli yang membayar dengan uang Rp 10.000,- padahal penjual tersebut tidak mempunyai uang untuk kembalinya, maka penjual itu akan menukarkan uang itu pada penjual yang ada di kanan atau kirinya atau kalau tidak ada meminjam dulu untuk dikembalikan pada pembeli.

Akan tetapi dalam hubungan dagang sehari-hari satu dengan yang lainnya tidak terlepas dari ikatan-ikatan komersial. Ikatan-ikatan komersial ini terlepas dari ikatan-ikatan sosial persahabatan bahkan ketetanggaan. Artinya segala sesuatunya penuh perhitungan untung maupun rugi. Mereka juga punya disiplin dalam hal berjualan, artinya meskipun di sebelahnya penjualnya kosong dan kebetulan ada yang beli, maka ia tidak akan meminta pembeli itu untuk membeli miliknya.

Hubungan/interaksi diantara pedagang, selain di pasar juga berlanjut dengan urusan-urusan lain di luar kegiatan pasar, misalnya kegiatan sosial. Kalau diantara pedagang itu ada yang sedang mengalami musibah, misalnya sakit, kesripahan keluarganya. Apabila salah satu pedagang di pasar tersebut mengetahui, biasanya beritanya langsung menyebar ke penjual-penjual dan kemudian terjadi kesepakatan bersama untuk mendatangi secara rombongan. Rombongan tersebut datangnya secara bergiliran sehingga pasarnya tidak sepi penjual. Demikian juga jika penjual itu ada yang mempunyai hajat dan para penjual itu di undang untuk datang, biasanya juga datangnya juga secara rombongan tetapi tidak sekaligus bersama-sama melainkan secara bergiliran. Dengan demikian penjual yang belum berangkat dapat menjagakan dagangan penjual yang ada di sekitarnya yang sudah berangkat lebih dulu. Dengan demikian mereka dapat saling bergantian untuk menjaganya.

Dengan sesama pedagang, selain hubungan itu dapat menjurus ke hal-hal yang positif juga dapat menjurus ke hal-hal yang negatif, misalnya saling "rasan-rasan", saling bersaing dan sebagainya. Mengenai persaingan di antara pedagang umumnya tidak begitu menyolok dan biasanya hanya masalah harga yang di turunkan sedikit dari harga yang di tawarkan pedagang lainnya. Sedangkan saling "ngrasani" biasanya kalau pedagang satunya meminjam uang lama mengembalikannya kepada pedagang lainnya, atau ada gosip- gosip di antara pedagang.

5. Hubungan Pedagang Dengan Pembeli

Interaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli terutama karena ada transaksi jual beli. Penjual menawarkan dan pembeli membutuhkan, maka terjadilah tawar-menawar penjual menginginkan keuntungan yang tinggi sebaliknya pembeli ingin harga semurah-murahnya. Di sini penjual berusaha melakukan penawaran dengan sebaik-baiknya supaya pembeli bisa menjadi pelanggan tetapnya. Apabila hal itu berhasil, maka setiap belanja pembeli itu akan selalu belanja ke tempat pedagang tersebut. Biasanya jarang terjadi tawar-menawar lagi, karena pedagang berusaha menawarkan dengan harga pas.

Untuk yang sudah berlangganan atau terbiasa belanja di pasar tersebut, belanjanya langsung menuju ke tempat penjual langganannya. Dengan cara ini akan dapat menyingkat waktu belanja dan mempererat persahabatan di antara penjual dan pembeli. Khususnya untuk penjual yang juga melayani *grosir* atau *kulakan*, hubungan antara penjual dan pembeli tampak lebih akrab. Keakraban antara penjual dan pembeli tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan ataupun perjanjian-perjanjian dalam hal jual beli, masing-masing menghormati sebagai pembeli atau sebagai penjual. Setiap hutang diperhitungkan juga harganya. Jadi dalam transaksi itu kadang-kadang terjadi *ngutangke*. Hal ini terjadi biasanya karena kurang membayarnya atau karena uang belanjanya besar dan tidak mempunyai uang kembalinya. Maka dari itu penjual menyarankan untuk uangnya dibawa dahulu dan pembayarannya nanti sesuai belanja atau besok paginya sekalian belanja lagi.

Dalam transaksi ini tidak jarang adanya cara "ngebon" atau istilahnya "ngalap nyaur", yakni sekarang belanja kemudian membayarnya lain hari atau besoknya lagi sewaktu pembeli itu datang untuk kulakan lagi. Cara tersebut dipakai supaya langganannya banyak. Di samping itu

pedagang sendiri toh modalnya juga ngalap nyaur atau barangnya dititipkan dahulu dan bila sudah laku barulah dibayar.

Dalam masa transaksi jual beli yang kemudian berlanjut ke utang piutang, umumnya pedagang sudah memaklumi. Memang sering terjadi di antara orang yang "ngebon" atau hutang itu sulit pengembaliannya atau istilahnya "mbeler". Namun umumnya pedagang sudah memaklumi karena yang dilayani itu orang banyak sehingga tingkah lakunya bermacam-macam termasuk yang *ngebon mbeler* itu. Untuk yang *ngebon mbeler* ini biasanya mereka tidak lagi belanja di situ melainkan berganti kepada penjual lainnya. Di tempat yang baru itu biasanya mereka dengan membayar langsung atau kontan.

Pergaulan antara penjual dan pembeli, terutama yang sudah saling mengenal biasanya ada yang berlanjut sampai di luar pasar. Artinya jika sewaktu-waktu di antara penjual dan pembeli itu saling ketemu dengan sendirinya akan saling menyapa. Kadang-kadang hubungan di antara mereka ini sampai berlanjut, misalnya antara penjual dan pembeli ada yang mempunyai hajat atau lainnya kemudian mengundang, atau ada yang sedang kesusahan yaitu ada anggota keluarganya yang meninggal dan sebagainya, pasti tanpa dikomando apabila di antara mereka itu tahu atau diberitahu umumnya saling berdatangan atau menyempatkan diri datang sebagai tanda tali kasih atau persahabatan. Bahkan bila berhalangan datang, mereka akan menitip pada teman atau kenalannya yang akan menghadiri.

6. Hubungan Pedagang Dengan Petugas Pasar

Menurut informasi, bahwa petugas pasar atau pak carik pasar di Pasar Terban ini sudah sering kali ganti. Biasanya mereka itu bertugas hanya 3-4 tahun lalu dipindah ke pasar lain dan di ganti oleh petugas baru. Meskipun sering berganti petugas, namun para pedagang akan selalu kenal dengan baik. Mereka ini setiap harinya selalu di datangi oleh pak carik terutama sewaktu menarik sapon atau retribusi. Pada waktu itu biasanya terjadi/diselingi sidikit percakapan misalnya "laris yu/mbak?". Karena petugas pasar sebagai penguasa di pasar itu, maka para pedagang merasa segan.

Dalam kegiatan sehari-hari petugas pasar adalah menarik retribusi dari para pedagang. Untuk itu hampir setiap hari meskipun hanya sekejap para pedagang itu akan bertatap muka dengan petugas pasar, yaitu pada

waktu menarik *sapon* atau retribusi. Sedangkan untuk waktu selebihnya berada di kantor yang terletak di belakang pasar jauh dari kerumunan pedagang. Untuk itu bila terjadi sesuatu di antara pedagang, maka petugas pasar biasanya tidak mengetahui. Sebagai contoh, bila ada di antara pedagang itu ada yang bentrok atau cekcok, maka kalau tidak ada laporan dari para pedagang tidak akan tahu. Seandainya tahu pun tidak akan diurus bila tidak mendapat pengaduan dari yang bersangkutan. Justru yang biasa meleraikan adalah pedagang yang berada di sebelah kiri atau kanannya.

Hubungan sosial antara pedagang dan petugas pasar jarang terjadi, misalnya melayat, perhelatan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi. Tetapi bila yang mempunyai hajat petugas pasar biasanya begitu mendengar langsung seluruh pedagang itu banyak yang datang ke rumah. Komunikasi petugas pasar dengan sesama pedagang pasar kurang begitu terjalin dikarenakan letak kantornya sangat berjauhan, yaitu berada di belakang pasar.

Bagi masyarakat di wilayah Terban, adanya pasar tersebut ada untung maupun ruginya. Keuntungan bagi warga setempat, yaitu bila berbelanja dekat sehingga bisa menghemat waktu dan tenaga. Selain itu bisa membuka kesempatan kerja bagi warga sekitar, misalnya menjadi penjaga pasar, berjualan, membuka usaha jasa, dan sebagainya. Kemudian dari segi kerugian, dengan adanya bakul-bakul ayam membawa masalah pencemaran lingkungan, yaitu air Sungai Code menjadi tercemar karena pembuangan limbah pemotongan ayam. Kemudian di sekitar pasar tersebut bahkan masuk kampung sering digunakan untuk arena sabung ayam. Adanya sabung ayam di wilayah itu jelas mengganggu ketertiban lingkungan, yaitu pada mulanya warga hanya melihat, tetapi akhirnya juga ikut-ikutan. Dalam hal sabung ayam ini sebetulnya sudah dilaporkan dan dilakukan pengawasan yaitu dari polisi desa mengadakan kontrol kemudian gropyokan. Usaha tersebut cukup berhasil untuk mencegah masyarakat sekitar tercemar oleh sabung ayam.

B. DISIPLIN DI LINGKUNGAN TERMINAL

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah pada dasawarsa ini membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat. Gejala yang nampak salah satunya adalah semakin berkembangnya jasa angkutan maupun perdagangan. Tingkat kompleksitas yang tinggi dari mobilitas,

membawa konsekuensi tersedianya sarana transportasi yang memadai. Menurut Djamaster A Simamarta (tt=7) fasilitas transportasi adalah kebutuhan dasar dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Khususnya kota yang dipandang sebagai simpul dalam jaringan jasa distribusi terjadi gejala peningkatan sarana transportasi.

Meningkatnya sarana transportasi desa-kota dan angkutan dalam kota memerlukan pengorganisasian yang cermat supaya berjalan lancar dan tertib. Pengorganisasian itu terutama masalah perlalulintasan sarana angkutan tersebut, dan tempat-tempat di mana angkutan tersebut mangkal. Oleh sebab itu untuk keperluan ini dikenal adanya terminal, sub terminal, selte. *Terminal* merupakan tempat pemberhentian terakhir armada angkutan umum guna menaikkan dan menurunkan penumpang yang menampung dari berbagai jurusan dalam kota propinsi maupun luar propinsi. Sebaliknya *sub terminal* merupakan tempat pemberhentian terakhir armada angkutan jurusan tertentu untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Sedangkan *selte* tempat pemberhentian sementara armada angkutan untuk mengambil penumpang dan sekaligus mengatur jarak angkutan berikutnya. Terminal di Kodya Yogyakarta hanya satu di Umbulharjo, sedangkan sub terminal ada beberapa diantaranya sub terminal Yogya-Kaliurang dan Yogya-Prambanan. Sedangkan selte cukup banyak misalnya di Jalan KH. Dahlan tempat pemberhentian sementara bus-bus kota jalur 12, 15 kemudian Wirobrajan colt-colt jurusan Kulonprogo - Wates, di sebelah utara rumah sakit Panti Rapih untuk colt-colt jurusan Prambanan, Sala, dan sebagainya. Ketertiban dan kelancaran pengoperasian armada angkutan tersebut di pengaruhi oleh disiplin dan tata tertib yang berlaku di terminal.

1. Transportasi di Kotamadya Yogyakarta

Sarana transportasi untuk penduduk Kotamadya Yogyakarta cukup. Berbagai angkutan umum untuk pergi antar kota tersedia ke berbagai jurusan di antaranya bus kota (Kopata), Aspada, Kobutri, Taksi (ada sekitar 6 koperasi taksi). Sedangkan yang melayani sampai keluar kotamadya cukup banyak misalnya Damri, Kopades, Puskopar dan sebagainya. Pendeknya penduduk tidak kesulitan untuk melakukan mobilitas yang di inginkan.

Arus penumpang di Yogyakarta ini hampir seluruh jalur bersentrum ke Kotamadya Yogyakarta baik dari Sleman, Prambanan, Gunung Kidul,

Bantul, Kulon Progo. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, angkutan-angkutan umum tidak diperbolehkan masuk kota, khususnya kendaraan mini bus yang berplat kuning

Untuk mengatur kelancaran dan ketertiban transportasi, diperlukan suatu wadah bagi pengusaha transportasi dan bagi kru armada transportasi itu sendiri. Antara pengusaha dan kru armada ini ada hubungan kerja yang saling membutuhkan. Pengusaha armada tersebut tidak dapat menjalankan usahanya kalau tidak ada kru (sopir dan kernet), demikian juga kru. Atas dasar hubungan kerja itu, mereka bergabung dalam bentuk Koperasi (untuk pengusaha) sedangkan kru bergabung dalam satu wadah SPSI merupakan sahabat kerja yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya ketentuan bahwa pengusaha angkutan yang tergabung dalam Koperasi Angkutan tidak dapat "cuci tangan" atas perbuatan apapun pelanggaran yang dilakukan oleh kru armadanya. Di samping itu di dalam UULL no 3 Tahun 1965 pasal 24 (1) ditegaskan pula bahwa :

Pengusaha kendaraan umum bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian penumpang serta kerusakan - kerusakan barang yang berada di dalam kendaraan tersebut, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu terjadi di luar kesalahannya atau kesalahan kru.

Dengan demikian antara Koperasi Transportasi dan SPSI merupakan sahabat kerja yang tidak dapat dipisahkan, atau merupakan "Dwi Tunggal Karya". Sebagai anggota koperasi mereka mempunyai persyaratan yang harus dipatuhi yaitu KTP pemilik kendaraan, surat kendaraan, KIR, STNK harus ada, membayar saham koperasi dan simpan wajib setiap bulannya.

2. Sub Terminal Terban

Sub terminal Terban letaknya di Jalan C. Simanjuntak tepatnya di jalan utara menuju Kaliurang. Terminal yang letaknya menjadi satu dengan pasar tersebut terbagi dua usaha angkutan yaitu sebelah selatan trayek jurusan Yogya-Kaliurang dan sebelah utara jurusan Yogya-Prambanan. Masing-masing memiliki kantor dan pengurus sendiri-sendiri serta aturan-aturan yang kurang lebih sama. Kendaraan yang dioperasikan di sub terminal Terban adalah colt dan L 300 dengan jumlah armada Terban-Kaliurang 80 armada dan Terban-Prambanan 90 armada. Usaha transportasi tersebut berada di bawah naungan Koperasi Angkutan Transportasi Pemuda. Kegiatan armada angkutan di Terban dimulai jam 06.00 pagi sampai dengan jam 17.00. Dalam arti apabila ada armada

angkutan mengoperasikan kendaraannya di atas jam kerja yang telah di tentukan itu, dikenakan ongkos TPR 500 rupiah. Perlu diketahui bahwa masing-masing trayek angkutan umum itu dikelola atau diurusi sejumlah pengurus terminal yang masing-masing pengurus mempunyai tugas sebagai ketua, sekretaris, bendahara, sebagai penanggungjawab keamanan dan ketertiban, penjual karcis.

Pada masing-masing Sub Terminal Terban-Kaliurang maupun Terban-Prambanan dibagi dalam tiga koordinator wilayah (Korwil) yaitu wilayah Kaliurang, wilayah Pakem dan pusatnya adalah wilayah Terban. Sedangkan untuk jurusan Terban-Prambanan terbagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah Proliman Prambanan dan wilayah Terban yang merupakan pusatnya.

Pembagian beberapa wilayah koordinator itu untuk memperlancar komunikasi sesama anggota perkumpulan tersebut. Jumlah anggota perkumpulan itu atas dasar di mana anggota (sopir, kernet, dan pengurus terminal) berdomisili.

Untuk kelancaran dan ketertiban pengoperasian angkutan tersebut, serta keharmonisan kerja kelompok diadakan beberapa tertib. Tata tertib tersebut berlaku untuk kedua jurusan trayek ini, yaitu tata tertib di dalam terminal dan di luar terminal (jalan raya).

Sub Terminal Terban dengan jumlah armada 170 buah sangat padat oleh keluar masuknya armada angkutan ketujuh terminal tersebut, khususnya jalan raya kadang-kadang menjadi semrawut. Dengan luas $\pm 1.100 \text{ m}^2$, Sub terminal Terban nampaknya tidak mampu untuk menampung armada yang beroperasi di situ. Meskipun dalam pemarkiran kendaraan sudah diatur saling berhadapan membentang dari arah selatan ke utara tetapi masih belum teratasi. Hal ini didukung oleh banyaknya kendaraan yang masuk dan asal parkir demi untuk memperoleh nomor antrian pemberangkatan.

Untuk mengatasi kesemrawutan kendaraan yang keluar-masuk di tentukan aturan bahwa untuk jurusan Terban-Prambanan jam pemberangkatan 2 menit sekali, dan untuk Terban-Kaliurang jam pemberangkatan 3 menit sekali. Adanya terminal di Jalan C. Simanjuntak tersebut mempengaruhi kesibukan arus lalu-lintas di sepanjang jalan itu sampai ke kampus. Kepadatan lalu-lintas tersebut terutama pada saat-saat berangkat sekolah atau ke kantor. Di tambah lagi dengan adanya Pom Bensin di sebelah selatan Terminal Terban yang pada saat-saat tertentu pula (pagi

dan siang hari) di sekitar tempat tersebut padat kendaraan yang antre bensin.

3. Tata Tertib Di Dalam Terminal

Tata tertib yang di maksud di sini adalah ketentuan-ketentuan yang harus di patuhi kru armada angkutan, yaitu sopir, kernet, guna kelancaran pengoperasian armada angkutan dari Terban-Kaliurang maupun Terban-Prambanan. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pengurus terminal untuk kru armada angkutan yaitu :

- 1) Setiap armada yang masuk harus melapor dan membayar retribusi
2. Surat-surat kendaraan harus lengkap (STNK, KIR, surat izin trayek dan sebagainya)
3. Pengemudi mempunyai SIM
4. Pengemudi harus, berpakaian rapi (misal tidak boleh memakai kaos oblong)
5. Melayani penumpang harus sopan
6. Bila menemukan barang penumpang harus melapor keamanan terminal
7. Kru armada tidak boleh judi di lingkungan terminal
8. Kalau keluar terminal harus sesuai antrian

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dikenakan sanksi. Jadi bila pengemudi tidak memenuhi kewajibannya, terutama ketentuan nomor dua, tiga dan delapan. Pelanggaran pada ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya akan diperingatkan sampai tiga kali. Bila peringatan tidak diindahkan akan dikenakan sanksi hukuman perpal yaitu sopir tidak boleh menjalankan kendaraannya selama 3-7 hari. Sedangkan kernet dan kendaraan tetap berjalan dengan sopir pengganti. Berdasarkan ketentuan yang pertama itu memang seorang pengemudi syarat utamanya adalah harus memiliki SIM. Kemudian untuk surat-surat kendaraan dan perlengkapan lainnya seperti izin trayek, KIR dan sebagainya menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan atau juragannya. Persyaratan surat-surat tersebut (selain SIM) sering diabaikan oleh para pengemudi, karena merasa yang bertanggung jawab surat-surat perlengkapan tersebut juragan atau pemilik kendaraan. Sikap seperti ini di tunjukkan oleh seorang pengemudi angkutan umum sebagai berikut : "Sebagai seorang pengemudi apabila surat-surat kendaraannya atau perlengkapannya kurang seperti izin trayek habis masa berlakunya bagi saya tidak menjadi masalah. Disini pengemudi hanya bisa dapat melapor atau meminta kepada pemiliknya/juragan agar

segera izin trayeknya di perbaharui. Seandainya pemilik beralasan tidak mempunyai uang, pengemudi tetap jalan terus. Apabila di jalan ada operasi atau pemeriksaan mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan biasanya mencari jalan lain untuk menghindari"

Oleh hal ini kecenderungan para pengemudi untuk tidak berlaku tertib atau mengabaikan persyaratan-persyaratan sebagai pengemudi cukup tinggi. terbukti dari hasil operasi terpadu Polri dan DLAJR wilayah kodya Yogyakarta menemukan bahwa angka pelanggaran angkutan adalah tinggi. Kerja sama itu meliputi ketaatan angkutan umum untuk melakukan uji coba kendaraan dan izin trayek (Bernas 11 Maret 1992).

Armada angkutan yang masuk ke Terminal Terban diharuskan melapor ke petugas terminal, dan harus membayar 200 rupiah yang di beri bukti pembayaran selebar karcis. Dengan melapor dan membayar tersebut pengemudi nomor antrian pemberangkatan yang berikutnya. pada saat menunggu giliran pemberangkatan itu para sopir di harus memarkirkan kendaraannya dengan rapi. Posisi parkir diatur berjajar dari selatan ke utara berderet pada sisi sebelah timur menghadap kebarat dan sebelah barat menghadap ke timur. Sehingga dibagian tengah halaman terminal tampak lenggang, ini merupakan tempat hilir mudik calon penumpang dan para pedagang asongan menjajakan dagangan nya. Sebagaimana telah di sebutkan jarak waktu pemberangkatan jurusan Yogyakarta-Kaliurang antara kendaraan yang satu dengan berikutnya adalah selama 3 menit. Sedangkan untuk jurusan Yogyakarta-Prambanan di atur selang 2 menit. Selain itu pengemudi setiap harinya pengemudi di tarik retribusi sebanyak Rp 100,- rupiah dan untuk TPR Rp 400,- . Pengaturan waktu dilakukan dengan maksud pengemudi agar tidak saling berebut penumpang, sehingga dalam mengendarai kendaraannya tidak semaunya sendiri. Sebab sebelum diatur koperasi, para pengemudi saling berebut penumpang, bahkan sering terjadi perkelahian. Dengan cara itu penghasilan pengemudi dapat seimbang. Uang tarikan Rp 200 rupiah itu di gunakan untuk menggaji petugas terminal dan petugas lapangan yang berada di luar terminal yang tugasnya mengatur start armada dengan lainnya.

Namun begitu, ketentuan-ketentuan terminal sering dilanggar, misalnya saja belum waktunya berangkat mereka sudah berangkat tanpa izin. Pengemudi melakukan pelanggaran itu biasanya karena kebetulan hari itu banyak penumpang. Mereka minta ijin ke terminal dengan berbagai alasan untuk keluar terminal sebelum urutannya, misalnya saja ijin membeli

bensin, membeli peralatan lainnya tetapi sudah kembali lagi. Pelanggaran yang di lakukan pengemudi ini dikenakan sanksi perpal selama 7 hari kerja.

Selain tata tertib yang mengatur perlalulintasan armada, diatur pula mengenai kebersihan lingkungan di terminal antara lain tidak boleh kencing sembarangan, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat (kotoran, sampah yang berada di dalam kendaraan tersebut). Untuk mengatasinya di sediakan kamar mandi/wc yang terletak di sebelah selatan terminal Terban, dan untuk menampung sampah disediakan bak/tong sampah yang diletakkan di sekitar terminal. Untuk kebersihan di lingkungan terminal, menggaji sering petugas kebersihan sebesar 6000 rupiah/bulan. Sedangkan untuk menjaga kebersihan wc/kamar mandi, setiap perfiakai di kenakan ongkos 100 rupiah. uang tersebut di gunakan untuk pemeliharaan dan memberi upah kepada petugas pembersih.

Walaupun sudah ada mengenai tata tertib mengenai kebersihan lingkungan, namun sering juga ada pelanggaran-pelanggaran mengenai membuang sampah seenaknya, kencing di sembarangan tempat dan sebagainya. Pelanggaran-pelanggaran itu sudah sering ditegur oleh petugas terminal, tetapi pelanggaran itu masih sering terjadi. Jadi turun dari kendaraan biasanya sopir maupun kernet kadang-kadang langsung di sembarangan tempat. Pernah terjadi sering kernet kencing di terminal tidak di kamar mandi, maka orang itu langsung disuruh mengguyur dengan air oleh petugas terminal. Di samping mereka kurang disiplin dan kurang peduli terhadap kebersihan, mungkin karena kencing harus membayar uang 100 rupiah mereka enggan ke kamar mandi yang telah disediakan.

Penampungan sampah yang tidak tertib di terminal ternyata tidak hanya penghuni terminal saja yang tidak tertib, tetapi juga petugas pengambil sampah. Misalnya ada seorang pengemudi membuang bungkus rokok seenaknya, oleh petugas terminal didiamkan saja, karena merasa pekewuh (sungkan) pengemudi tersebut sudah ikut membayar tukang sapu. Sampah-sampah yang disapu ditampung di utara Pom Bensin, masalahnya sering sampah sudah penuh tidak diangkut. Jadi sampah yang tertimbun di utara pom bensin itu kalau tidak dilaporkan tidak diambil, bahkan sudah lapor kadang-kadang tidak langsung diambil oleh truk sampah.

4. Tata Tertib Di Luar Terminal

Tata tertib di luar terminal yang harus dipatuhi pengemudi jurusan Yogya-Kaliurang maupun Yogya-Prambanan pada prinsipnya sama. Untuk

mengatur tata tertib jalanya armada angkutan tersebut setelah berangkat dari terminal, dikontrol oleh petugas lapangan. Petugas lapangan untuk jurusan Yogya-Kaliurang berada di perempatan sekip dan utara selokan Mataram. Sedangkan untuk jurusan Yogya-Prambanan petugas lapangan ada di utara Panti Rapih, dengan Kampus IAIN, dan di Janti. Jadi di tempat-tempat tersebut angkutan umum tersebut menunggu penumpang dan mengatur jarak kendaraan berikutnya.

Pengaturan armada angkutan pada waktu beroperasi hanya dilakukan lewat pos-pos yang telah disebutkan di atas. Untuk jurusan Yogya-Prambanan, setelah berangkat dari Terminal Terban, kemudian berhenti di perempatan Sekip melapor pada petugas dan mencari penumpang, hal ini hanya sebentar. Bila dari arah selatan telah tampak ada kendaraan berikutnya yang sama maka petugas memberi tahu pada sopir tadi untuk berangkat karena sudah *didudul*. Untuk itu kendaraan yang hendak *kedudul* tadi segera meneruskan perjalanan dan posisinya diganti oleh kendaraan berikutnya.

Setelah meneruskan perjalanan, kendaraan tadi harus berhenti lagi di sebelah utara selokan UGM untuk melapor kepada petugas yang berjaga di tempat dan sambil mencari penumpang. Sama halnya dengan di perempatan Sekip, bila kendaraan yang berikutnya sudah nampak, maka petugas selalu memberitahukan pada sopir untuk segera berangkat karena sudah *didudul*. Selanjutnya posisinya akan diganti oleh kendaraan yang baru datang tadi. Demikian seterusnya aturan perjalanan angkutan umum jurusan terminal Terban-Kaliurang maupun Terban-Prambanan, yang merupakan aturan tata tertib di jalanan supaya sopir tidak menjalankan kendaraanya semaunya (tidak ngebut).

Jadi pos-pos tadi sebagai pengontrol petugas lapangan dalam mengatur keberangkatan pada waktu berhenti di halte (*selte*) atau istilahnya *thethek, ngetem*. Dengan adanya pos-pos dan petugas angkutan umum tersebut tidak bisa seenaknya menunggu penumpang. Dengan adanya aturan jarak kendaraan satu dengan yang lainnya stabil dan yang paling penting agar terhindar dari kecelakaan. Di samping itu mengurangi arus kepadatan lalu lintas.

Aturan untuk selalu berhenti di pos-pos yang telah ditentukan itu juga dilakukan armada angkutan jurusan Yogya-Prambanan. Oleh karena jarak keberangkatannya hanya selang 2 menit dapat mempengaruhi jarak antara kendaraan yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu angkutan

umum jurusan Terban-Yogya nampak lebih sibuk dibanding yang jurusan Terban -Kaliurang.

Selain adanya pengawas lapangan atau jalanan itu, untuk menjaga kesetabilan jarak dan pemerataan penghasilan maka bagi semua kendaraan yang telah keluar dari terminal tidak boleh kembali lagi atau "*puter walik*" walaupun dalam keadaan "*nglondang*" tanpa penumpang. *Puter walik* ini boleh kecuali karena ada kerusakan pada kendaraan tersebut yang untuk sementara tidak dapat melanjutkan perjalanan, misalnya ban bocor. Dengan alasan ini pun harus di buktikan dengan seleksi (biasanya sopir yang lain yang nyalib).

Untuk menjaga ketertiban agar para sopir selalu patuh pada tata terib yang di buat oleh pengurus terminal maka ada sanksi bagi pelanggarnya. Misalnya bagi pelanggar *puter walik* kalau ketahuan petugas atau karena laporan sesama sopir, sanksinya adalah kena *skors* atau kena *perpa* antara 1-3 hari kerja. Sedangkan bagi pelanggar surat-surat kendaraan dan SIM (sudah habis masa berlakunya), bagi sopir di kenakan *perpa*/selama 7 hari kerja.

Apabila dengan alasan-alasan tertentu terpaksa harus *puter walik*, maka bila masuk terminal tidak dipungut biaya retribusi. Tetapi hanya melaporkan saja kepada petugas terminal tentang keadaan kendaraanya. Kemudian sesuai dengan aturan yang ada kendaraan tersebut disuruh menunggu antrian.

Menurut pengakuan dari petugas terminal usaha untuk menjaga ketertiban tersebut tidak seluruhnya berjalan, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh sopir dan kernet misalnya buang sampah, kencing masih seenaknya. Pelanggaran di terminal maupun di jalanan masih banyak juga seperti yang di sampaikan oleh seorang sopir terutama saat jam pulang sekolah "saya ijin untuk beli solar tapi langsung saja saya thetek di Demangan kalau tunggu antrian enggak dapat penumpang".

a. Kedisiplinan Pengemudi

Berbicara mengenai kedisiplinan pengemudi bisa dikatakan mereka ini tingkat kedisiplinanya rendah. Namun hal ini bukan berarti mereka ini sama sekali tidak tahu disiplin atau tidak pernah disiplin, tetapi oleh karena situasi dan kondisi tertentu yang memaksa para pengemudi tersebut sering melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah di gariskan.

Pengaturan jarak pemberangkatan antara kendaraan satu dengan

kendaraan berikutnya (2 dan 3 menit), sedikit banyak mempengaruhi tingkat kedisiplinan pengemudi untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. seperti yang sering dialami para pengemudi pada waktu menaikkan penumpang. Persaingan untuk mendapatkan penumpang terlebih dahulu menyebabkan mereka melanggar tata tertib. misalnya bila ada penumpang di daerah traffic light pas lampu hijau, berdasarkan peraturan tidak boleh diambil, tetapi oleh pengemudi di ambil apa kata mereka mengenai hal ini

"Kalau saya ya diambil, itu kan penumpang memang ini melanggar, tapi kan duwit namanya. Jelas ini melanggar, tetapi bagaimana ya yang namanya ada penumpang nyetop, kan yah susah juga".

Seorang pengemudi lainnya menyebutkan :

"peraturan menaikkan penumpang di dekat traffic light bila jaraknya 50 m dari traffic light. Seandainya tidak ada petugas (kita kontrol dulu) jalan pelan-pelan kalau penumpang hanya satu diambil, tetapi kalau rombongan mengambilnya sesudah 50 meter dari lampu, kernet yang turun".

Demikian juga pelanggaran dilakukan kalau mereka menaikkan atau menurunkan penumpang di tempat yang ada rambu-rambu tanda S. Sebenarnya bila ada rambu-rambu tanda S tidak boleh menaikkan dan menurunkan penumpang. Akan tetapi, biasanya mereka maju sedikit sekitar 10-15 meter dari tanda S yang seharusnya 50 meter lagi berhentinya.

Pelanggaran-pelanggaran lainya dalam menaikkan-menurunkan penumpang seperti dapat dilihat di sekitar perempatan Sekip (depan Mirota Kampus) di mana banyak calon penumpang yang berdiri berderet di tepi jalan. Tanpa menghiraukan rambu-rambu lalu lintas sopir menghentikan kendaraanya untuk menaikkan beberapa penumpang yang berjubel tadi, sehingga mengakibatkan kendaraan yang dibelakangnya berhenti tidak dapat lewat "ada penumpang ya kita ambil, kalau tidak di ambil belakngnya ini untung-untungan memang tempatnya penumpang disitu, walaupun melanggar".

Pelanggaran mengenai jumlah penumpang yang boleh naik pada satu kendaraan juga sering terjadi. Ketidak tertiban ini bila dilihat dari kasus-kasus yang ada tersebut adalah untuk memburu uang baik untuk setor maupun diri sendiri. Seperti dituturkan oleh seorang pengemudi :

"setiap hari kita mengangkut penumpang melebihi batas muatan yang di tentukan oleh kapasitas kendaraan. Dalam surat uji kendaraan tercantum batas angkutan mobil 9 orang. tetapi kita

biasa mengangkut sampai 15 - 16 orang penumpang. Karena semakin banyak penumpang berarti banyak pula uang yang di dapat".

Dari pengalaman para pengemudi tersebut, atas pelanggaran yang mereka lakukan kadang-kadang ada yang kena tilang karena tertangkap basah oleh petugas. tetapi banyak juga yang lolos dengan berbagai cara. Ada juga pengemudi yang berpendapat demikian :

" Seandainya tertangkap pada waktu melanggar, lebih baik didenda saja tetapi tidak banyak-banyak. Saya sebagai pengemudi lebih baik damai saja, sebab kalau di tilang banyak urusan, harus sidang banyak waktu yang terbuang. Memang kalau kita mau bicara disiplin lebih baik ditilang, tetapi kalau mau mencari enaknyanya sendiri ya damai saja. Kebanyakan para pengemudi itu lebih senang dengan jalan damai dari pada di tilang".

Jelas sikap ini hanya didasari kebutuhan untuk mengumpulkan uang. Mereka di tuntut kebutuhan untuk menopang kehidupan, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak semestinya. mereka tahu ada peraturannya, tetapi terpaksa hal itu mereka abaikan. Jadi disini untuk membuat mereka tertib di jalan memerlukan waktu, dan permasalahannya tidak sederhana karena menyangkut beberapa pihak. Di samping itu dalam hal pelanggaran tata tertib lalu lintas ini, para pengemudi sangat kompak. Dalam arti bila ada petugas penertiban jaga atau ada operasi, mereka saling memberi kode pemberitahuan.

Sikap para pengemudi untuk cenderung melanggar tata tertib berlalu lintas tersebut cukup memprihatinkan. Bila hal tersebut berlanjut tanpa ada perubahan-perubahan secara masal, akhirnya setiap pelanggaran yang dilakukan di anggap hal yang biasa, tanpa merasa melanggar apalagi rasa bersalah. Hal ini nampak dari pernyataan mereka :

" Biasanya kalau kita pegang setir (nyopir) plat kuning lebih leluasa, karena kita punya anggapan bahwa kendaraan yang lain masa bodoh. Kalau berhenti mendadak, plat kuning memang sok menang-menangan karena sudah menjadi kebiasaan".

Berdasarkan pengakuan para pengemudi Yogya-Kaliurang maupun Yogya-Prambanan, mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan-penyuluhan, maupun penjelasan-penjelasan masalah ketertiban lalu lintas. Mereka mengetahui hal-hal yang ada kaitanya dengan masalah ketertiban lalu lintas dari membaca koran, mendengarkan radio dan sebagainya. Jadi

mereka belum pernah di kumpulkan bersama untuk mendapatkan penyuluhan yang bersipat penerangan dan pembinaan.

b. Keuntungan dan Kerugian Adanya Terminal

Bagi masyarakat di lingkungan di wilayah Terban adanya terminal, memberikan keuntungan maupun kerugian bagi masyarakat sekitarnya khususnya yang dekat dengan lokasi terminal. Terminal tersebut menjadi alternatif pilihan untuk bekerja bagi warga sekitarnya yang pendidikannya rendah antara lain menjadi kernet, sopir, maupun membantu pengurus terminal. Seperti yang dikatakan oleh Bejo, SMP tidak tamat "sulit mencari pekerjaan, saya menemukan pekerjaan disini". Bejo adalah kernet terminal di terminal Terban.

Adanya terminal juga memberi kemudahan-kemudahan bagi warga setempat, misalnya kalau akan bepergian tidak kesulitan masalah transport. Di samping itu sering warga setempat tidak disuruh bayar, kalau kebetulan kernet atau sopirnya dari warga Terban.

Di lain pihak adanya terminal di wilayah tersebut memberikan dampak lainnya, yaitu warga di sekitar terminal merasa bising atau terganggu oleh keluar masuknya kendaraan ke terminal. Di samping itu di lingkungan terminal nampak tidak bersih dan berdebu, hal ini meluas mempengaruhi warga yang bermukim dekat terminal.

Hilir-mudiknya armada-armada angkutan itu setiap harinya menambah lalu lintas di sekitar terminal bertambah semrawut sehingga mengganggu jalan sekitarnya.

C. DISIPLIN DI LINGKUNGAN TEMPAT HIBURAN

Fasilitas yang ada di kota, khususnya di tempat-tempat hiburan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri. Para pengunjung tempat-tempat hiburan tersebut mempunyai tujuan maupun latar belakang yang berbeda. Persepsi mereka terhadap obyek yang dikunjungi masing-masing tidak sama. Tempat-tempat hiburan tersebut ada berbagai macam misalnya bangunan peninggalan bersejarah, kompleks keraton, museum, candi, kebun binatang, dan sebagainya; tempat-tempat hiburan lainnya seperti bioskop, bilyard, tempat-tempat pemandian, diskotek, pemancingan dan sebagainya. Di Kodya Yogyakarta terdapat berbagai macam tempat-tempat hiburan antara lain Kompleks

kraton, Tamansari, Kebun Binatang GembiraLoka, kolam renang, pemancingan, bilyard, diskotek, panti pijat, bioskop, pusat seni dan pameran, dan sebagainya (tabel IV.3 dan IV.4). Biasanya para pengunjung, terutama dari luar kota kurang mengindahkan kebersihan. misalnya pengunjung yang datang ke kompleks keraton, di alun-alun kraton sering banyak bertebaran sampah-sampah plastik maupun kertas.

Oleh karena pengunjung di tempat hiburan dan rekreasi itu mempunyai latar belakang sendiri yang berbeda, sikap mereka terhadap obyek yang dikunjungi pun tidak sama. Ada pengujung yang mengagumi, ada yang hanya menikmati, ada yang sekedar ingin tahu dan ada pula yang tertarik pada jenis hiburan tersebut. namun tak jarang pula ada pengunjung di samping mencari hiburan tetapi juga melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab yaitu merusak lingkungan obyek yang di kunjungi misalnya membuat coret-coretan pada bangunan-bangunan yang dikunjungi, membuang sampah seenaknya, meludah dan sebagainya. Jadi di sini pengunjung tempat-tempat hiburan ada yang mempunyai sikap menghargai dan menjaga lingkungan sekitar, ada juga yang tidak peduli. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat kedisiplinan yang dimiliki oleh mereka, yaitu sikap disiplin untuk menjaga lingkungan dengan mematuhi aturan-aturan yang ada. Jadi sikap disiplin itu dibutuhkan di mana saja individu-individu itu berada, termasuk juga di tempat hiburan bioskop juga dibutuhkan tata krama baik di luar gedung bioskop maupun di dalam gedung bioskop.

1. Keadaan dan Fasilitas Bioskop

Gedung bioskop merupakan tempat hiburan layar lebar, yang menempati sebuah gedung yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti tempat duduk, tempat parkir, toilet, kantin, tempat sampah dan sebagainya. Keberadaan gedung bioskop ini sangat membantu masyarakat kota untuk memenuhi kebutuhan hiburan guna melepas kejenuhan. Gedung-gedung bioskop tersebut terletak di pusat kota, di tempat pemukiman padat maupun di kompleks pertokoan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta ada gedung bioskop yang menyebar di empat kabupaten dan Kotamadya, 30 gedung bioskop di antaranya terletak di Kodya Yogyakarta (tabel IV.5). Perkembangan bioskop di Yogyakarta mengalami pasang surut, pada tahun 1989 jumlah 24, kemudian tahun 1990 menjadi 21, dan tahun 1991 ada 30 gedung bioskop. Gedung-gedung boskop tersebut

mempunyai kualifikasi berbeda di lihat dari fasilitas yang disediakan serta film- film yang di putar. Oleh sebab itu ada gedung-gedung bioskop yang masuk kualifikasi A, AA, B, utama, dan sebagainya (tabel IV.6). Kualifikasi yang dimiliki gedung-gedung bioskop tersebut berpengaruh pada jumlah pengunjung atau penontonnya. Misalnya saja penonton yang melihat film di gedung Bioskop Empire atau Mitra akan lain dengan penonton gedung Bioskop Arjuna, atau Permata. Kapasitas penonton dalam bioskop juga berpengaruh terhadap sikap di dalam gedung maupun di luar gedung. Untuk di dalam penelitian ini hanya diambil dan diamati dua bioskop yang terletak di wilayah Kelurahan Terban, yaitu Bioskop Presiden dan Mitra.

Di gedung-gedung bioskop biasanya ada tempat untuk membeli karcis (loket), cafe (kantin), dan tempat duduk baik di luar (lobby) maupun di dalam gedung. Masing-masing gedung bioskop biasanya mempunyai aturan-aturan demi kelancaran dan ketertiban pemutaran film di bioskop yang bersangkutan. Untuk itu ada beberapa personal yang mengurus bioskop (mitra dan presiden) antara lain :

- 1 Portir, bertugas di muka pintu masuk untuk menyobek kertas tanda masuk, dan ada yang sebagai pengantar ke tempat duduk;
- 2 Satpam, mengawasi ketertiban dan keamanan;
- 3 Kasir, mengurus keuangan;
- 4 Penjual karcis;
- 5 Petugas piket;
- 6 Petugas yang mengurus iklan;
- 7 Petugas yang mengurus proyektor;
- 8 Petugas yang mengurus sound system;
- 9 Petugas kebersihan;
- 10 Petugas administrasi;
- 11 Sekretaris;
- 12 Pimpinan;

Personalnya masing-masing gedung bioskop tidak sama. gedung bioskop Mitra misalnya mempunyai 18 karyawan, 3 staf, sekretaris dan pimpinan. Sedangkan gedung bioskop Presiden mempunyai 30 personal.

Kelangsungan pertunjukkan di gedung bioskop antara lain tergantung pada jumlah penonton yang mencari hiburan ke bioskop yang bersangkutan. Untuk itu petugas-petugas di gedung bioskop tersebut harus bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada penonton. Dalam hal ini para petugas di gedung bioskop yang bersangkutan (Mitra dan Presiden) harus berdisiplin menjalankan tugas-

tugasnya, petugas penjual karcis, portir, harus tepat waktu, fasilitas-fasilitasnya harus rapi dan bersih misalnya di ruang tempat tunggu, tempat parkir, tempat duduk di dalam gedung, toilet. Untuk itu petugas harus datang lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan tugasnya masing-masing. Bila petugas penyobek karcis, portir maupun penjual karcis harus melayani penonton sebelum film diputar; maka petugas kebersihan harus bekerja capat untuk membersihkan tempat-tempat duduk penonton di dalam gedung setiap film selesai di putar , dan membersihkan ruang tunggu, toilet dan sebagainya. Petugas kebersihan di bioskop Mitra di sebut *Karsam* (*karyawan sampah*), pembersihan gedung bioskop dilakukan oleh 4 orang dalam sehari yang dibagi dalam dua periode yaitu dari jam 07.00 sampai 15.00 dan dari jam 15.00 sampai selesai. Menjelang film diputar atau awal dibukanya bioskop, biasanya pimpinan bioskop mengontrol apakah pelaksanaannya lancar, hal ini di lakukan untuk menjamin kepuasan penonton.

2. Perilaku Penonton Di Dalam dan Di Luar Gedung Bioskop

Seperti telah di sebutkan bahwa pengunjung atau penonton mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, sehingga hal ini akan berpengaruh kepada mereka dalam menanggapi sesuatu. Studi ini akan mengamati perilaku atau sikap para penonton di dalam gedung maupun di luar gedung, dalam hal a) pembelian karcis, b) menjaga kebersihan, c) ketentuan umur penonton, d) sopan-santun di dalam gedung.

a. Saat Pembelian Karcis

Pelayanan pembelian karcis di bioskop dilakukan di loket-loket penjualan karcis yang biasanya jumlahnya pada 1-2 loket. Loket-loket tersebut biasanya dibuka seperempat jam sebelum film diputar. Kalau loket belum saatnya dibuka, biasanya penonton menunggu dengan tertib. Mereka duduk-duduk di kursi yang telah disediakan, atau ada yang melihat gambar-gambar film yang akan di putar. Kadang-kadang kalau filmnya bagus dan banyak pengunjungnya, sebelum loket dibuka mereka sudah antri di depan loket. Di kedua bioskop tersebut (Mitra dan Presiden) tidak pernah terjadi percaloan. Pernah terjadi pada salah satu bioskop tersebut penontonnya sangat penuh, terhubung tempat duduk sudah habis otomatis juga karcis distop; bagaimana reaksi penonton ? ternyata penonton

menyadari situasi ini, dan menanyakan sampai kapan film itu di putar, dan setelah mendapat jawabannya masih dua hari lagi mereka pergi tanpa melakukan tindakan ataupun perbuatan negatif seperti berteriak, menggedor-nggedor loket, dan sebagainya.

Pada umumnya pembelian karcis di gedung bioskop Presiden dan Mitra berjalan dengan tertib. hal ini karena di samping loket karcis tidak hanya satu, penontonnya sebagian besar adalah dari golongan menengah ke atas. Tulisan di loket yang meminta supaya penonton antri secara tertib ternyata dipatuhi penonton. Selama loket karcis dibuka penonton jarang sampai berdesakan. Di samping itu gedung bioskop di kota ini cukup banyak (30 buah), sehingga untuk mencari hiburan mereka bisa ke bioskop lain. Dengan kata lain untuk mendapatkan tiket masuk, penonton antri dengan tertib di depan loket (biasanya antrinya tidak panjang) yang di atur sampai portir membuka pintu. Kedisiplinan penonton juga dapat di lihat pada waktu penonton memilih tempat duduk, misalnya di Mitra tempat duduknya tanpa nomor tetapi penonton tidak saling berebut. Sedangkan di Presiden tempat duduknya bernomor, tetapi jarang terjadi penonton dengan sengaja duduk di tempat yang bukan nomornya. Pernah juga terjadi ada penonton yang duduk di bukan nomornya, tetapi setelah yang berhak datang dan mencocokkan nomor kursinya, penonton tersebut pindah tempat dengan minta maaf.

Di sini kualifikasi suatu gedung mempengaruhi penontonnya. Pada gedung bioskop yang mempunyai kualifikasi yang agak rendah, biasanya juga konsumennya agak tertentu. Misalnya pada bioskop- bioskop kelas-kelas biasa bukan elite, kadang-kadang saja terjadi ada penonton mengedor loket, atau berteriak "ayo buka", karena loket karcis belum di buka pada saat jamnya harus di buka. Jenis film yang di putarpun ikut menentukan penontonnya. Di Presiden secara bergantian ikut memutar film Nasional, barat, mandarin, konsumennya juga tertentu. Sedangkan Mitra hanya film barat dan mandarin, dan lebih banyak memutar film berbau seks karena pertimbangan selera penonton. Pada gedung-gedung bioskop bukan elite, jenis film-film yang diputar adalah film-film yang sudah agak lama dan biasanya dipilih mengikuti selera penonton, konsumennya juga tertentu, karena harga karcisnya pun sangat murah sehingga menjangkau semua lapisan masyarakat. Di bioskop-bioskop kelas ini biasanya penontonnya cenderung kurang tertib.

b. Menjaga Kebersihan

Pada umumnya penonton berlaku tertib dalam hal menjaga kebersihan. Sarana kebersihan seperti tempat sampah maupun tempat membuang rokok disediakan digunakan dengan semestinya. Jadi di luar gedung, yaitu di ruang tempat tunggu pada umumnya penonton membuang sampah pada tempatnya. Namun karena pengunjung itu bermacam-macam kepekaannya juga tidak sama, ada juga penonton yang sembarangan membuang puntung rokok asal dilemparkan, tetapi tidak masuk tempat sampah, ada juga kesana-kemari sehingga abunya kemana-mana. Sedangkan kalau di dalam gedung memang tidak disediakan tempat pembuangan sampah. Di dalam gedung, biasanya penonton membuang bungkus atau kulit kacang begini saja, kemungkinan keadaan gedung yang gelap membuat orang lebih sembarangan. Kebiasaan penonton untuk membuang kulit kacang begitu saja, kemungkinan keadaan gedung yang gelap membuat orang lebih sembarangan. Kebiasaan penonton untuk membuang kulit kacang dan bungkus-bungkus lainnya di dalam gedung dianggap wajar dan suatu hal yang biasa. Jadi perbuatan penonton itu dimaklumi, membuang sampah makanan, kertas, meninggalkan botol minuman dan sebagainya. Akan tetapi ada penonton yang cukup tertib, memasukkan kulit kacang maupun bungkus-bungkus makanan ke dalam kantong plastik dan dibawa keluar lagi dan di buang ke tempat sampah di luar gedung pada waktu film selesai diputar. Oleh sebab itu setiap akan dimulai show atau pertunjukkan berikutnya, petugas kebersihan berkeliling membersihkan sampah yang ada di dalam gedung maupun di luar gedung, termasuk ke toilet mereka bersihkan.

Kebersihan di luar gedung maupun di dalam gedung memang selalu diutamakan oleh pengusaha jasa hiburan. Hal ini disamping untuk memberikan kenyamanan bagi penontonnya, mereka berpendirian apabila fasilitas tersedia dengan bersih dan teratur, tentunya penonton akan menghargai dan tidak akan berbuat sembarangan. Sebaliknya kalau tempatnya tidak bersih dan awut-awutan, penonton juga ikut awut-awutan. Namun begitu juga tergantung pada manusianya. Pernah salah satu bioskop tersebut kedatangan rombongan anak yang study tour dari Jakarta, mereka ini melakukan perbuatan mencoret-coret di gedung bioskop, karena tidak ada petugas yang tahu coret-coret itu langsung di bersihkan saja.

Disiplin dalam menjaga kebersihan, secara tidak langsung di pengaruhi oleh fasilitas yang di berikan oleh bioskop yang bersangkutan. Kondisi gedung yang cukup representatif, bersih, dan nyaman akan mempengaruhi juga sikap pengunjungnya. Salah satu bioskop elite di wilayah kawasan Jalan Sala (Empire) menyajikan fasilitas yang nyaman bagi

penontonnya, sehingga film apa pun yang diputar kebersihan lingkungan di luar maupun di dalam gedung tetap terpelihara.

c. Larangan Merokok

Larangan merokok biasanya diberlakukan di dalam gedung pada waktu film diputar. Larangan tersebut bersifat himbauan yang bunyinya "terima kasih anda tidak merokok". Atau ada juga yang berbunyi "dilarang merokok". Pada umumnya penonton sudah tahu adanya larangan merokok di dalam gedung ber AC. Himbauan untuk tidak merokok dibuat ramah dan sopan seperti "terimakasih kesediaan anda tidak merokok", dan penonton merasa di hargai sebagai konsumen. Berdasarkan pengamatan maupun pemantauan para penjaga maupun pimpinan kedua gedung bioskop (Mitra dan Presiden), penonton jarang merokok di dalam gedung asapnya akan nampak sekali dan pasti akan ditegur oleh petugas bioskop. Biasanya orang yang merokok di dalam gedung ber AC itu orang pendatang yang kurang pengalaman. Kadang - kadang ada juga penonton yang merokok di luar gedung, setelah pintu masuk dibuka penonton tersebut masih merokok di oleh petugas akan ditegur. Penonton tersebut menyadari, ia lalu mematikan rokok tersebut karena masih panjang dimasukkan ke dalam sakunya. Jadi penonton tersebut tidak marah atau tersinggung oleh teguran tadi karena ia tahu bahwa di dalam gedung tidak boleh merokok.

Jadi ada kesadaran yang tinggi dari penonton untuk mematuhi peraturan yang ada, dan hampir tidak ada kejadian-kejadian keributan karena masalah merokok di dalam gedung. Artinya jarang ada pelanggaran dari penonton, bahkan tidak ada penonton yang merokok di dalam gedung saat film diputar. Lain halnya di gedung-gedung bioskop yang tidak masuk klas, biasanya ada yang melanggar larangan merokok selama pertunjukan berlangsung.

d. Ketentuan Umur

Penentuan umur biasanya berkaitan dengan film yang akan diputar. Misalnya film seks, kekerasan ditujukan untuk orang yang usia 17 tahun ke atas dan diberi peringatan "untuk 17 tahun ke atas", atau film tersebut untuk anak-anak remaja ketentuan umurnya "13 tahun ke atas", sebaliknya kalau film anak-anak ketentuannya "untuk segala umur". Jadi ketentuan

ketentuan mengenai umur tergantung film yang akan di putar, penonton yang menyesuaikan.

Apabila film yang di putar diperuntukkan bagi penonton yang berumur 17 tahun ke atas, maka kebetulan penonton yang berada di bawah 17 tahun tidak diperbolehkan menonton. Hal ini bisa dilihat dari penampilan penonton itu sendiri. Apalagi kalau memakai seragam sekolah meskipun filmnya mencukupi kalau filmnya berbau seks terpaksa ditolak. Di patuhi tidaknya peraturan mengenai batasan umur penonton ini tergantung sikap petugas bioskop dan penontonnya. Jadi kalau petugas tersebut mempunyai disiplin yang tinggi yang akan menjalankan aturan itu dan sebaliknya. Sedangkan penonton pun demikian, yang menyadari bahwa film tersebut hanya diperuntukkan bagi penonton berumur 17 tahun ke atas tentunya tidak akan nekat menonton, tetapi ada juga walaupun sudah tahu ketentuan umur penonton, berusaha nekat menonton meskipun sebenarnya tidak boleh. Jadi penonton berusaha untung-untungan kalau ada penjaganya tidak begitu ketat ia akan lolos. Untuk gedung-gedung bioskop elite, Termasuk juga Mitra dan Presiden, jarang sekali ada pelanggaran mengenai ketentuan umur penonton. Tetapi di bioskop klas tertentu, batasan mengenai umur penonton cenderung diabaikan oleh kedua belah pihak yaitu petugas bioskop maupun penontonnya.

e. Sopan Santun di Dalam Gedung

Keadaan remang-remang di dalam gedung, kadang-kadang mendorong penonton untuk duduk seenaknya, ada kakinya yang di naikan diatas kursi (jegang) ada yang ditumpangkan ke kursi di depannya, sehingga penonton yang duduk di depannya merasa terganggu. Keluhan dari penonton lain yang merasa terganggu pernah di muat dalam surat kabar. Keluhan tersebut karena sesama penonton tidak ada saling pengertian atau toleransi, yaitu kakinya usil menyodok-nyodok sandaran kursi penonton yang ada di depannya. Meskipun dengan secara halus perbuatannya itu sudah di ingatkan (yaitu penonton yang merasa terganggu tersebut sering memalingkan kepalanya kebelakang) tetapi nampaknya penonton yang ada di belakangnya (kebetulan seorang pemuda) tidak memperhatikan atau mungkin merasa tidak berbuat, karena setiap saat perbuatannya itu diulangi terus tanpa merasa risih.

Jenis film yang diputar pun mempengaruhi perilaku penonton di dalam gedung. Misalnya saja kalau filmnya yang diputar film horor, atau

adegan maut pasti ada yang berteriak, dan ini dimaklumi oleh penonton yang lainnya. Asal reaksi penonton tersebut masih dalam batas wajar di maklumi, karena dari berbagai penonton itu sifatnya berbeda-beda, jiwanya juga berbeda. Demikian juga kalau film humor semua penonton tertawa spontan tanpa dikomando. Reaksi penonton tersebut ketakutan, gemas, senang, geli, dan sebagainya merupakan hal yang wajar dimana pun baik di gedung bioskop klas maupun yang biasa. Akan tetapi di gedung bioskop klas agak terkendali di dibandingkan di gedung bioskop bukan klas. Biasanya penonton tidak hanya bereaksi apa yang dilihat dengan ketakutan dan sebagainya tetapi kadang-kadang berteriak atau berkomentar macam-macam; atau kadang-kadang para penonton berbicara sambil melihat film, sehingga mengganggu penonton yang ada di dekatnya. Kalau ada adegan yang agak berani, penonton sudah berkomentar dan berteriak macam-macam.

Kekacauan penonton terhadap film yang diputar kadang-kadang dapat berakibat buruk. Kekecewaan penonton tersebut misalnya film terputus karena ada gangguan atau listrik mati, biasanya hal-hal seperti ini penonton tanpa dikomando, lebih-lebih pas adegan yang menegangkan. Selama film tersebut belum hidup lagi atau selama menunggu film yang terputus itu diperbaiki, para penonton biasanya ada yang tak bertanggung jawab yaitu merusak tempat duduk (tidak semua) yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun wanita.

Reaksi semacam itu dilakukan penonton terutama kalau ada gangguan pada waktu film diputar. Ada yang menggunakan pisau kecil (*pemes*), ada yang menggunakan fulpen, oleh karena tempat duduknya empuk jadi mudah dirusak. Pada salah satu bioskop tersebut kebetulan petugasnya pernah memergoki pengrusak tempat duduk yang dilakukan oleh penonton yang kebetulan seorang mahasiswa/mahasiswi. Mereka ini lalu di tegur baik-baik. Bagi pengelola bioskop sendiri reaksi penonton yang langsung berteriak, berkomentar dan sebagainya dianggap wajar karena mereka berhak untuk mendapat pelayanan yang baik, akan tetapi kalau sudah menjurus merugikan yaitu melakukan pengrusakan, harus ada tindakan tegas.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan petugas yang mengelola gedung film baik Mitra maupun President, mayoritas penggemar film mandarin, film barat, maupun film nasional penontonnya tertentu. Secara umum pengunjung ketiga film berlaku tertib baik film mandarin, film nasional, maupun film barat. Secara umum pengunjung ketiga film tersebut

berlaku tertib, tetapi bila ketiganya dibandingkan, ada kecendrungan film-film nasional penontonnya kurang tertib.

D. DISIPLIN DI JALAN RAYA

Permasalahan jalan raya pada mulanya hanya terdapat di wilayah pertokoan saja. Namun dengan semakin majunya perkembangan transportasi serta jaringan komunikasi, permasalahan jalan raya sampai juga ke wilayah - wilayah pedesaan. Manusia sebagai pengguna jalan raya memerlukan disiplin dan kebebasan (Soekanto, 1991:437). Artinya manusia dapat menggunakan jalan raya dengan bebas, asal tidak mengganggu kebebasan orang lain Dalam hal ini ketertiban dan disiplin di jalan raya terletak kepada kepatuhan pengguna jalan raya untuk tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain.

Faktor-faktor penting yang menimbulkan permasalahan jalan raya menurut para ahli di bidang lalu lintas adalah manusia, kendaraan, kondisi jalan raya, dan lingkungan. Manusia sebagai pengguna jalan raya terdiri dari beranekaragam perilaku maupun kepribadian. Pengguna jalan raya tersebut bisa yang menggunakan kendaraan bermotor maupun yang tidak (pejalan kaki). Sedangkan faktor lingkungan di antaranya adanya daerah-daerah tertentu yang memungkinkan terjadinya kemacetan atau kesemerautan lalu lintas yaitu daerah pasar, sekolah, perkantoran, pertokoan, permukiman.

Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 kilometer persegi harus menanggung beban yang cukup kompleks yaitu persediaan tempat pemukiman , jalan-jalan raya sebagai sarana maupun prasarana untuk melaksanakan aktivitas, dan sebagainya. Keadaan tersebut masih didukung adanya pendatang yang semakin memadati tempat-tempat pemukiman maupun jalan raya. Dengan kondisi demikian, jelas timbul berbagai macam permasalahan lalu lintas antara lain kemacetan lalu lintas, kecelakaan, pelanggaran, polusi dan sebagainya. keadaan tersebut juga didukung banyaknya tempat-tempat parkir yang kurang teratur., pedagang kaki lima yang memenuhi trotoar-trotoar.

1. Sarana dan Prasarana

Seiring dengan perkembangan transportasi dan komunikasi, prasarana jalan raya pun secara bertahap dibenahi dengan menambah luas jalan

jalan maupun panjang jalan. Pembenahan jalan-jalan untuk memperlancar komunikasi ini tidak hanya di perkotaan, tetapi meluas ke pelosok-pelosok pedesaan.

Yogyakarta merupakan kota transit bagi para pendatang. Mobilitas yang mereka lakukan dengan berbagai tujuan, sekolah, bekerja, berdagang, dan sebagainya. Mereka ini ada yang menggunakan bus umum, kendaraan pribadi, dan sebagainya. Oleh hal yang demikian itu lalu lintas bertambah padat.

Padatnya lalu lintas bisa dikatakan merata di sepanjang jalan yang ada di wilayah Yogyakarta. Di lingkungan-lingkungan tertentu malahan nampak semrawut, misalnya jalan-jalan yang berada di lingkungan pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan. Jalan-jalan yang membentang di wilayah Kodya Yogyakarta berdasarkan data statistik (1990) ada 229,664 kilometer yang meliputi jalan aspal sepanjang 219,475 kilometer, jalan yang berkerikil 4,049 kilometer dan yang masih berwujud jalan tanah 6,140 kilometer. Jenis jalan yang beraspal tersebut dinyatakan sebagai jalan aktif artinya jalan tersebut setiap saat selalu ramai digunakan.

Untuk kelancaran ketertiban jalan raya, dipasang rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan di tempat-tempat tertentu yaitu di persimpangan jalan yang padat lalu lintas ditempatkan polisi lalu lintas, serta di tempat-tempat lain yang dipandang rawan terjadinya kecelakaan. Di beberapa tempat juga disediakan halte-halte menaik dan menurunkan penumpang. Namun nampaknya halte-halte ini belum berfungsi sebagai mana mestinya.

Padatnya lalu lintas di Yogyakarta di samping karena jumlah penduduknya yang terus bertambah, antara lain juga karena penambahan kendaraan bermotor yang tiap tahun mengalami kenaikan yang pesat. Misalnya saja munculnya produk-produk baru kendaraan bermotor, menjamurnya sepeda gembira, banyaknya usaha-usaha angkutan umum yang dikelola oleh beberapa pihak, belum lagi di tambah kendaraan-kendaraan lainya milik pribadi, travel, kendaraan-kendaraan pendatang. Berdasarkan catatan dari lain angkutan jalan raya (1991) DIY ada 412 unit yang terdiri dari 12 di antaranya unit cadangan, 400 lainnya beroperasi di jalan raya (di sekitar kodya, pinggiran Sleman, Bantul). Kopata 175 unit, Aspada 61 unit, Damri 50 unit, Puskopkar 49 unit Kobutri 78 unit (Bernas 10 Oktober, 1991).

Bila dibayangkan bila angkutan umum tersebut beroperasi semuanya, bisa jadi ruas jalan untuk menampung jumlah kendaraan yang

berjalan di atasnya tidak mampu. Masih di tambah lagi jumlah kendaraan milik pribadi yang menurut data dari polwil Yogyakarta (1990) jumlahnya ada 252.986 kendaraan, dari jumlah itu 73,4% nya adalah jenis sepeda motor, truck, ambulance, pick up jumlahnya sekitar (18,3% dan scuter 8,3% (tabel IV.7). Sedangkan sesama transportasi yang non mesin seperti becak, andong, sepeda, jumlahnya cukup banyak. Kendaraan-kendaraan tersebut baik yang mesin maupun non mesin berbaur menjadi satu di jalan raya. Akibat kadang-kadang terjadi kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas di tempat-tempat tertentu misalnya jalan Suryotomo, Jalan Senopati, Jalan Sultan Agung dan sebagainya.

Sementara itu untuk mengendalikan ketertiban di jalan raya di Yogyakarta ini ada kurang lebih 292 personal polantas. Apabila jumlah kendaraan sekarang ini (1992) sekitar 288.850 maka satu polantas harus mengawasi 922 kendaraan. Keadaan ini jelas belum berimbang, demikian juga bila dilihat dari kapasitas panjang jalan, satu petugas mengawasi 8,39 kilometer (Kedaulatan Rakyat, 23 September 1992).

Melihat sarana maupun prasarana yang ada, jelas, menciptakan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas tidak hanya di butuhkan rambu-rambu maupun petugas serta sarana-sarana lainnya tetapi perlunya penekanan pembinaan disiplin berlalu lintas dari pengguna jalan raya. Masalah ini memang memerlukan proses yang panjang, karena di latar belakang kultural masyarakat yang heterogen.

2. Keadaan Lalu Lintas

Arus lalu lintas kepadatan jalan raya di Yogyakarta sehari-harinya cukup padat, terutama pada saat-saat tertentu bertambah padat dan semrawut. Tingkat kepadatan dan kesemrawutan lalu lintas yang paling tinggi berdasarkan survei Polresta Yogyakarta adalah pada saat jam-jam tertentu. Antara saat jam berangkat sekolah, ke kantor yaitu antara jam 06.30-08.00. Menurut survei pasar pada jam-jam tersebut ibu-ibu dan pedagang-pedagang pergi ke pasar. Sebaliknya siang hari antara jam 12.00-14.30, saat mereka pulang sekolah dan pulang dari kantor serta pedagang pasar sudah mulai pulang kerumah.

Selain kepadatan lalu lintas jalan raya yang disebabkan aktivitas rutin oleh masyarakat tersebut, pada bulan-bulan tertentu setiap tahunnya warganya bertambah. Hal ini disebabkan karena Yogyakarta menjadi tempat tujuan para pendatang yang pada bulan Juni-Juli banyak

masyarakat dari luar daerah yang berdatangan ke Yogyakarta untuk melanjutkan studynya.

Yogyakarta juga menjadi tempat untuk tujuan wisata. Hal tersebut berpengaruh pula terjadinya kepadatan lalu lintas jalan raya. Situasi tersebut dapat dilihat pada saat-saat liburan semesteran. Dengan adanya daerah wisata seperti Kraton, kebun binatang, museum, dan monumen, serta daerah pantai maka saat-saat liburan tersebut banyak pengunjung yang berekreasi ke lokasi tersebut. kebanyakan rombongan pengunjung yang datang dari kota-kota lain itu menggunakan kendaraan bus, sehingga sering terjadi kemacetan di jalan raya. kecuali tempat-tempat wisata, daerah-daerah yang tampak pada lalu lintasnya antara lain : Jalan Malioboro, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Sala (Urip Sumaharjo) dan sekitar pasar, misalnya, Jalan Mayor Suryotomo, Yaitu daerah sekitar pasar Beringharjo ini tampak paling ruwet di Yogyakarta.

Hal ini karena parkir roda empat yang melintang di kanan kiri jalan, masih ditumpuk dengan parkir andong dan becak. Tambah ruwet lagi banyak becak yang melanggar arus searah tersebut. ini mencerminkan bagaimana berdisiplin lalu lintas dihayati oleh para pengguna jalan. Di samping itu bus-bus angkutan mengambil penumpang dan menurunkan penumpang seenaknya, dan tak berfungsi halte, sehingga menambah kesemrawutan lalu lintas jalan raya.

Di wilayah Terban sendiri, Jalan C. Simanjuntak termasuk jalan yang dianggap rawan kecelakaan. Di Jalan C. Simanjuntak terutama di dekat pom bensin, Jalan di depan Terminal Terban, depan Mirota Kampus sering terjadi kemacetan. Di sepanjang jalur tersebut cukup padat lalu lintasnya karena bus-bus kota berbagai jalur atau jurusan lewat di tempat tersebut, kemudian colt angkutan umum Kobutri juga melewati jalur tersebut. Kesemrawutan jalan di daerah tersebut semakin bertambah, karena bus-bus maupun colt-colt angkutan tersebut berhenti seenaknya sendiri untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Penumpang-penumpang sendiri-pun saling berebut naik duluan, sehingga keadaan ini menyebabkan lalu lintas di daerah tersebut macet. Hal ini di padati juga dengan mobil-mobil pribadi, becak, sepeda, andong, sepeda motor berbaur menjadi satu di ruas jalan yang relatif sempit. keadaan tersebut didukung dengan adanya tempat-tempat parkir di kanan kiri jalan, terutama di kompleks-kompleks penonton, juga penataan trotoar di Jalan C. Simanjuntak, Terban semakin menampakkan kesemrawutan lalu lintas di wilayah Terban. Kehadiran terminal, pom bensin, pasar, pedagang kaki lima, sebagai jalur bus kota

dan sebagainya menunjukkan kesibukan yang luar biasa dari alur lalu lintas ke arah utara maupun selatan.

Kurang seimbangnya perkembangan atau jumlah kendaraan dengan prasarana transportasi (jalan) yang ada menyebabkan kemacetan lalu lintas. Untuk itu Pemda Yogyakarta merencanakan akan membangun tiga jalan layang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas tersebut.

3. Disiplin di Jalan Raya

Pengendalian ketertiban dan kelancaran di jalan raya perlu dukungan kedisiplinan yang tinggi baik dari pengguna jalan maupun petugasnya. Seseorang disebut mempunyai perilaku disiplin bila orang tersebut memiliki pengendalian diri yang baik antara lain tingkah laku yang teratur, tertib serta memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Perilaku disiplin ini bisa di lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja dan di tempat-tempat umum misalnya jalan raya (Warnaen, 1985:1-6). Untuk itu agar tercapai suasana lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar, maka setiap pengguna jalan di haruskan mengendalikan segala peraturan-peraturan dan rambu-rambu lalu lintas.

Manusia menggunakan jalan raya beranekaragam jenisnya terutama dari segi kepribadian maupun sikap tindak tanduknya. Pengguna jalan raya tersebut terdiri dari pejalan kaki dan yang menjalankan kendaraan baik kendaraan bermesin maupun tidak (Soekanto, 1988:437). Sebagai pengguna jalan mereka di tuntutan untuk menggunakan jalan tersebut sesuai dengan aturan, dan melaksanakan sopan santun di jalan raya. Menurut Kanit Laka Lantas Polres Yogyakarta mematuhi larangan dan sopan santun berlalulintas"Jadi sopan santun juga diperlukan di jalan raya, karena dengan sopan santun berarti juga menghargai peraturan yang ada, menghargai petugas, dan tidak saling mengganggu kebebasan pengguna jalan raya. Dengan demikian sopan santun tersebut dapat terlaksana bila di dukung oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pengguna jalan dan petugas (Poltas).

Melihat kejadian sehari-hari di jalan raya maupun data pelanggaran lalu lintas yang ada, pada dasarnya disiplin berlalu lintas masyarakat menunjukkan disiplin yang rendah. Mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran misalnya menerobos lampu merah (traffic light), tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, surat-surat tidak lengkap dan sebagainya. Sopan santun di jalan raya banyak tidak mengetrapkan

karena masih banyak mengebut, di jalan berjajar lebih dari satu (terutama sepeda), berhenti di sembarang tempat yang tidak semestinya. Becak-becak pun demikian sering melanggar rambu lalu lintas yang ada, belok seenaknya, kalau malam tidak berlampu dan sebagainya. Peraturannya sebenarnya kalau becak berwarna putih, dan siang hari merah. Sedangkan pejalan kaki banyak yang tidak memanfaatkan *zebra cross* sebagai sarana untuk menyeberang jalan.

Pada umumnya pelanggaran dilakukan kalau tidak dijaga oleh polisi. Terutama nampak di tempat-tempat misalnya ada rambu-rambu tidak boleh parkir di tempat tersebut, di traffic light. Di tempat-tempat lampu pengatur lalu lintas tersebut, pada saat lampu merah menyala atau kuning bening dilanggar oleh pengendara kendaraan. Sering juga batas jalur jalan tidak diperhatikan, sehingga sering mengganggu pemarkir jalan dari arah yang berlawanan.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa para pengguna jalan rata-rata masih beranggapan bahwa aturan lalu lintas identik dengan petugas lalu lintas. Dengan kata lain kalau tidak ada petugas yang jaga berarti tidak ada aturan. Menurut Soejono Soekanto sikap tindak yang demikian itu mendatang adanya taraf kepatuhan yang rata-rata disebabkan rasa takut pada sanksi yang dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran (1988:438). Dengan demikian penegak aturan harus diawasi dengan ketat. Oleh Koentjaraningrat (1985:1- 7) disiplin yang didasarkan pada rasa takut pada atasan, pada orang senior, orang yang berkuasa, harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat. Dalam arti menurut Koentjaraningrat tersebut belum terkait dengan upaya pengendalian diri, yaitu disiplin yang lahir dari kesadaran sendiri.

Kondisi yang demikian itu disadari oleh para petugas (Poltas), karena menurut Kanit Laka Lantas Polresta Yogyakarta disebutkan :

" walaupun tidak ada petugas yang jaga diharapkan mereka itu patuh pada dirinya sendiri. Karena jalan raya itu untuk kepentingan umum, untuk keselamatan bersama sehingga dapat tercipta suasana berlalu lintas yang tertib, aman, lancar. Namun demikian kalau pengguna jalan masih banyak yang tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas sulit hal tersebut bisa terwujud".

Menurut Kapolwil, lalu lintas di Yogyakarta ini baru mencapai tahap aman, lancar tetapi belum tertib. Ketertiban jalan raya tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga masyarakat.

Berdasarkan pelanggaran dari Polresta Yogyakarta (1991), di temukan pelanggaran lalu lintas sejumlah 78.707. Dari jumlah pelanggar itu, sebanyak 44.483 (56,5%) adalah pelajar/mahasiswa di susul pedagang (18,8%) (tabel IV.8). Data ini menunjukkan bahwa bahwa tingkat disiplin berlalulintas tidak selalu di pengaruhi oleh pendidikan. Menurut kenyataan data ini justru mahasiswa/pelajar pemakai jalan yang tergolong mempunyai pendidikan yang cukup banyak melakukan pelanggaran. Keadaan ini cukup memprihatinkan dan perlu penanganan yang lebih serius.

Jenis pelanggaran yang sering di lakukan oleh para pengguna jalan cukup bervariasi, yaitu pelanggaran terhadap pemakaian perlengkapan kendaraan misalnya helm, perlengkapan surat-surat, kecepatan, peruntukan, penumpang/muatan, berhenti di tempat terlarang, lain- lain. Jenis pelanggaran tertinggi yang sering terjadi adalah pemakaian helm 26.779 (79,0%), perlengkapan surat-surat (10,7%), berhenti di tempat terlarang (3,7%), dan lain-lain (5,0%) (lihat tabel IV.9).

Ketidak disiplin para pengguna jalan dapat menimbulkan masalah- masalah lalu lintas. Masalah yang sangat berat dan merugikan beberapa pihak adalah terjadinya kecelakaan. Di samping bisa merugikan material, juga bisa meninggal,. Data dari Polresta Yogyakarta (1991) menunjukan perkembangan jumlah kecelakaan yang terjadi dari 1987-1991 (tabel IV.10).

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan sebanyak 323 kasus kejadian kecelakaan terjadi dari tahun 1987-1991. Dari kejadian kecelakaan tersebut jumlah korban yang mati di tempat (MD) ada 108 sedangkan korban jumlah luka berat (LB) 158 dan korban yang luka ringan (LR) 194. Pada periode 1988-1989 ada kenaikan kasus kejadian lebih dari 47%, dan kasus kejadian melonjak lagi tahun 1989- 1990 lebih 75% tetapi korban MD menurun. Tahun 1990-1991 kejadian kecelakaan menurun cukup banyak yaitu 71%

Tahun 1990-1991 merupakan periode tahun yang penuh perhatian bagi Poltas untuk menertibkan lalu lintas jalan raya. Untuk mengendalikan tertib jalan raya tersebut, poltas secara rutin selama 4 bulan berturut-turut mengadakan "Operasi Zebra" (1992) dan "Operasi Patuh". Operasi tersebut di tujukan kepada semua pemakai jalan yang mengendarai kendaraan bermotor. Tujuannya adalah agar para pemakai jalan raya mempunyai disiplin lalu lintas dan sekaligus untuk memantau secara langsung kesibukan jalan raya. Dari operasi zebra tersebut ternyata jenis pelanggaran lalu lintas

masih di dominasi jenis pelanggaran surat-surat dan perlengkapan (82,5%) yang di lakukan oleh sebagaian besar pengemudi sepeda motor. Selain itu sebanyak 2084 pelanggaran mendapat teguran dari petugas karena melanggar marka jalan, tidak berhenti pada tempat yang benar dan sebagainya (Bernas, 18 Maret 1992).

Dalam menjalankan tugas mengendalikan ketertiban jalan raya, petugas lalu lintas dalam tugasnya menempuh dua macam cara yaitu secara preventif dan represif. Tindakan preventif ini dengan mengadakan pos-pos tetap dan pos-pos sementara. Pos-pos tetap artinya tempat-tempat penjagaan dan pengawasan yang sifatnya permanen. Pos-pos tetap ini diletakkan pada setiap perempatan jalan yang besar dan di tempat-tempat rawan kecelakaan, yaitu di tempat-tempat di mana arus lalu lintas atau pemakaian jalan sangat padat. Di kawasan Kota Yogyakarta ini kurang lebih ada 10 tempat pos tetap di sudut-sudut perempatan jalan antara lain: Gejayan, Korem, Pingit, Gondomanan, Pojok Beteng, Sentul, SGM, Tugu, stasiun tugu dan Terban. Untuk setiap pos tetap tersebut dalam jam-jam tertentu 06.30-14.00 dan jam 14.00-22.00 selalu ada yang tugas antara 2-3 orang personel. Sedangkan pos-pos sementara di sebar menurut kebutuhannya yang merupakan simpul-simpul kecil. Sedangkan represif yaitu mengadakan pengendalian dengan menindak mereka yang melakukan pelanggaran secara langsung di jalan raya setiap saat pada waktu petugas sedang piket

Selain penempatan pos-pos pada tempat-tempat yang padat kendaraan, juga di lakukan pembinaan disiplin berlalu lintas yang di mulai dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Juga pendekatan-pendekatan untuk memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas kepada mereka. Usaha-usaha penyuluhan kepada pengendara-pengendara kendaraan yang bermesin maupun non mesin, juga penyuluhan-penyuluhan tertib lalu lintas atau sopan santun berlalulintas untuk masyarakat umum yang di lakukan Polsek-Polsek bagian Kaptibbanbinmas melalui tingkat kelurahan. Serta masih banyak lagi usaha-usaha yang di lakukan petugas lalu lintas untuk mewujudkan tertib lalu lintas.

4. Partisipasi Pengguna Jalan Dalam Kebersihan

Masih banyak kendaraan bermotor maupun non motor yang belum memikirkan kebersihan lingkungan jalan raya. Hal ini sering terjadi pada kendaraan roda empat(pribadi) di mana pengendara atau penumpangnya

membuang sampah (kulit buah-buahan, bungkus rokok, tissue dan lain-lain) di lempar melalui jendela kaca. Jelas hal tersebut menunjukkan ke tidak disiplin pengendara tersebut dalam kebersihan jalan raya. Di samping mereka tidak punya sopan santun, juga mereka tidak peduli terhadap kebersihan.

Ketidak peduli terhadap kebersihan jalan raya juga dilakukan oleh para pejalan kaki yang membuang sampah seenaknya, padahal jalan-jalan tersebut di tempatkan tong-tong untuk pejalan kaki. Hal ini karena pada umumnya mereka menganggap kebersihan jalan raya bukan tanggung jawab mereka, tetapi petugas sampah.

Kebersihan jalan raya juga di ganggu oleh kotoran-kotoran kuda dari kendaraan tradisional yang di sebut andong. Andong-andong tersebut masuk kota untuk pengantar para wisman maupun wisnu, akan tetapi mereka tidak menyadari, bahwa kudanya membawa polusi udara atau mengotori jalan raya yaitu kotoran maupun air kencingnya. Keadaan ini di tanggap oleh Dharma Wanita Pemda Yogyakarta yang membuat kantong-kantong untuk pantat kuda. Dengan alat tersebut membantu mengurangi kotoran kuda yang keluar (Bernas, 30 November 1992).

5. Pengguna Trotoar untuk Pedagang Kaki Lima dan Parkir

Kesemrawutan lalu lintas di wilayah Yogyakarta juga di pengaruhi oleh semakin berkembangnya usaha di luar angkutan. Usaha ini menyita fasilitas yang menunjang fasilitas yang menunjang arus lalu lintas seperti trotoar. Trotoar tersebut kini lebih banyak di kuasa oleh pedagang kaki lima, yang berupa warung-warung, kios-kios, bengkel, dan sebagainya.

Mereka menjajakan dagangannya melampaui ketentuan yang telah ada. Menurut ketentuan yang di keluarkan Pemda bagian Tib-Um hanya seluas 1 m² dan dilarang meninggalkan kotak-kotak tempat dagangannya. Artinya setelah buka kotaknya dibawa pulang, kemudian kalau tutup di ambil lagi. untuk mengatur pedagang kaki lima yang terus berkembang ini WalikotaMadya mengeluarkan surat keputusan no 056/KD/1987, tentang pengaturan pedagang kaki lima. Dalam surat keputusan tersebut di jelaskan dan di tentukan mengenai tempat-tempat pada pedagang kaki lima boleh menjajakan dagangannya. di Wilayah Kodya Yogyakarta ini hanya ada 48 jalan yang boleh di gunakan untuk pedagang kaki lima.

Pada kenyataannya banyak pedagang kaki lima yang tidak mematuhi ketentuan yang ada. mereka menata dagangannya kadang-

kadang sampai menutupi jalan. Padahal jalan trotoar tersebut di peruntukkan untuk pejalan kaki. Adanya pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar tersebut, kebebasan dan kenyamanan pejalan kaki menjadi terganggu. Apalagi pedagang kaki lima yang berjualan makanan atau warung-warung kecil, mereka juga sering dengan seenaknya membuang limbah, maupun sampah jualanya. tindakan mereka ini menyebabkan tempat di sekeliling trotoar tersebut menjadi berbau, dan ini mengganggu pejalan kaki. Adanya pedagang kaki lima yang tidak memasuki ketentuan yang ada tersebut secara tidak langsung mengganggu kelancaran lalu lintas. seperti halnya di sepanjang Jalan C.Simanjuntak, Terban jalan rayanya yang sudah sempit itu kelihatan bertambah sempit, karena trotoarnya yang juga sempit di gunakan untuk pedagang kaki lima maupun tempat parkir.

Salah satu pemanfaatan trotoar lainnya adalah untuk tempat parkir. Tempat-tempat parkir banyak tersebar di tempat-tempat dekat kompleks pertokoan, rumah-rumah makan, tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Misalnya tempat-tempat parkir yang berada di wilayah Terban yaitu di sepanjang jalan C.Simanjuntak di deretan pertokoan toko Gardena kebarat. Adanya usaha-usaha parkir di sepanjang trotoar, maupun pinggir jalan ini jelas mengganggu ketertiban lalu lintas.

Aturan-aturan untuk ketertiban parkir di berikan oleh Pemda supaya usaha parkir berjalan lancar. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain :

1. Untuk kendaraan roda dua (khususnya sepanjang jalan Sala harus berada/di parkir sebelah selatan jalur dan di tata sejajar menghadap ke selatan, tidak boleh bersap dua. Sedangkan untuk roda empat di sebelah utara jalan
2. Mengenai setoran, bila dalam satu bulan tidak menyeter sebanyak dua kali (lowok dua) petugas parkir tersebut akan di perhentikan oleh pihak Dipenda
3. Para petugas parkir di haruskan memakai seragam yang di beri dari Dipenda
4. Karcis harus dipakai hanya satu kali parkir, setelah di pakai harus di sobek
5. Besarnya pungutan retribusi sekali parkir 50 rupiah

Dari berbagi peraturan yang di keluarkan Dipenda, belum semuanya di jalan oleh petugas parkir. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh para petugas parkir. Misalnya saja penggunaan parkir yang melibihi ketentuan (di pakai lebih dari sekali), besarnya ongkos pungutan

parkir tidak sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada (yang tertera pada karcis), penataan kendaraan yang di parkir sering terjadi tumpang tindih. Hal ini terjadi pada saat-saat tertentu, misalnya tanggal muda, atau banyak toko-toko yang obral discount sehingga banyak pengunjung , terpaksa tempat- tempat parkir yang sudah penuh itu melambung ke pinggir-pinggir jalan. Penempatan sepeda motor pun arahnya sudah tidak teratur lagi, hal ini jelas mengganggu kelancaran lalu lintas. Keadaan tersebut bukan semata-mata kesalahan petugas parkir tetapi juga di lakukan pengunjung yang sering meninggalkan kendaraannya begitu saja dalam keadaan terkunci, sehingga kalau di tata sampai kerepotan. Pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan petugas parkir tersebut juga didorong oleh target setoran yang di tentukan oleh pihak Dipenda.

Pelanggaran besarnya pungutan parkir (retribusi) tidak sesuai dengan harga yang tertera di karcis, memang di putuskan oleh para petugas parkir yang tertampung dalam paguyuban parkir. Keputusan itu didasari adanya helm sebagai perlengkapan kendaraan pernah hilang, dan pemiliknya minta ganti. Pada hal di dalam karcis tertulis barang-barang yang hilang bukan tanggung jawab petugas.

Petugas-petugas parkir tersebut memanfaatkan fasilitas dengan sistem kontrak atau target yang telah di tentukan oleh Pemda. Aturan sebelumnya adalah 40% untuk petugas parkir, dan 60% untuk di setor ke Dipenda. Namun sekarang tidak demikian halnya. sistem setoran di buat tiap hari, dan jumlah setoran berbeda-beda menurut lokasinya. Misalnya lokasi parkir di depan toko Gardena Jalan Sala di target dari Dipenda pada siang hari 5000 rupiah dan malam hari 3000rupiah. Perbedaan ini di perhitungkan panjang waktu yang berbeda, yaitu siang jam 08.00-14.00, dan malam hari 17.00-21.00. Setoran itu langsung di tarik petugas dari Dipenda. Sedangkan lokasi yang berada di kanan kiri toko Gardena setornya lebih kecil. Jadi toko Gardena di gunakan untuk patokan. Untuk sebelah barat kalau malam 2000 rupiah, siang 2500 rupiah. Sedangkan sebelah timur 1300 rupiah malam hari, dan 1750 rupiah siang hari. Mengenai luas wilayah tempat parkir di tentukan dengan lebar toko tersebut. Untuk menentukan berapa jumlah setoran, oleh Dipenda di tentukan dengan mengklasifikasi tingkat keramaiannya antara lain (khusus Jalan Sala):

Klas A = meliputi depan toko Gardena

Klas B = meliputi sebelah barat toko Gardena, dari toko Viva, Dynasti,Keio, dekat pasar dan apotik

Klas C = Sebelah timur Gardena sampai Bank BHS (karena kalau malam hari tutup)

Ketentuan besar kecilnya jumlah setoran kepada DiPenda telah ditentukan dengan penandatanganan kontrak. Hal ini menjadi tanggung jawab penuh petugas parkir, sebab bagaimanapun keadaannya setiap hari/malam harus setor kepada DiPenda.

Pendapatan sebagai petugas parkir, berfluktuasi. Jadi melihat situasi sebab bila seharian hujan dan tanggal tua sepi perolehannya sekitar 10.000 rupiah, tetapi kalau pas tanggal muda antara tanggal 1-10 dan kebetulan cuaca baik lumayan, Rp 20.000,- sampai Rp 30.000,- sehari atau semalam, lain lagi kalau tanggal muda, malam minggu, dan toko-toko ada obral atau discount lebih besar lagi.

Tetapi hasil tersebut tidak menjadi milik petugas parkir sebab di samping harus di setor ke DiPenda, mereka harus setor pula kepada "pemilik" lokasi parkir, baru kemudian sisanya untuk petugas parkir dan teman-teman yang membantu.

Usaha parkir yang termasuk sepanjang Jalan di wilayah Terban ini yaitu di depan pertokoan seperti Mirota Kampus, Golden Kampus, rumah makan, dan di Jalan Sala sebelah barat petugasnya banyak yang dari warga Terban sekitarnya.

Jadi dapat dikatakan di sepanjang Jalan yang termasuk wilayah Terban, disiplin jalan raya kurang mendapat perhatian dari pengguna jalan. Hal tersebut di samping prasarana jalan yang kurang memadai (sempit) dan kurang tertata, juga banyak trotoar untuk pejalan kaki di gunakan untuk tempat parkir dan pedagang kaki lima. Di samping itu di wilayah tersebut terdapat terminal dan pasar yang menambah padatnya lalu lintas di wilayah tersebut. Wilayah tersebut juga merupakan jalur untuk ke kampus UGM, UII, dan sekolah-sekolah lainnya SMP, SMA dan sebagainya.

TABEL IV.1
DATA PASAR KOTAMADYA YOGYAKARTA

NO	KECAMATAN	P A S A R			
		JENIS	LUAS (M2)	NAMA TEMPAT/PASAR	KEADAAN LOKASI
1.	Gondomanan	Umum	25.004	Beringharjo	Jl. A. Yani
2.	Gondomanan	Umum	2.500	Sriwedani	Jl. P. Senopati
3.	Gondomanan	Umum	2.464	Pathuk	Jl. Bayangkara
4.	Jetis	Umum	6.900	Kranggan	Jl. P. Diponegoro
5.	Gedongtengen	Umum	1.086	Kembang	Jl. Pasar Kembang
6.	Gedongtengen	Umum	3.224	Pingit	Jl. Kyai Mojo
7.	Tegalrejo	Umum	828	Karangwaru	Jl. Magelang
8.	Gondokusuman	Umum	4.785,28	Demangan	Jl. Gejayan
9.	Umbulharjo	Umum	222	Sanggrahan	Jl. Mawar
10.	Gondokusuman	Umum	220	Gendeng	Jl. Tridarma
11.	Gondokusuman	Umum (Sepeda)	833,75	Reksonegaran	Jl. Urip Sumowiharjo
12.	Gondokusuman	Umum/Khusus	6.435	terban	Jl. C. Simanjuntak
13.	Kraton	Umum/Khusus	6.136	Ngasem	Jl. Polowijan
14.	Mergangsari	Umum (Burung)	3.307,90	Prawirotaman	Jl. Parangtritis
15.	Mantriheron	Umum	1.168,40	Gading	Jl. MT> Haryono
16.	Mergangsari	Umum	650	Pujokusuman	Jl. Brigjen Katamso
17.	Kraton	Umum (Ketela)	633	Ngadikusuman	Jl. Suryoputran
18.	Mergangsari	Umum/Khusus	1.875	Karangtajan	Jl. Sisingamangaraja
19.	Mergangsari	Khusus (Material)	1.815	Ciptomulyo	Jl. Kol. Sugiono
20.	Pakualaman	Umum	3.672	Sentul	Jl. Sultan Agung
21.	Danurejan	Umum	2.675	Lempuyangan	Jl. Hayam Wuruk
22.	Gondomanan	Umum	285	Gondomanan	Jl. Brigjen Katamso
23.	Gondomanan	Umum	130	Ledok Gondomanan	Jl. Brigjen Katamso
24.	Umbulharjo	Umum	90	Semaki	Jl. Kusumanegara
25.	Wirobrajan	Umum	3.441	Serangan	Jl. RE. Martadinata
26.	Ngampilan	Umum	3.113	Senen	Jl. KS. Tubun
27.	Wirobrajan	Umum	1.813	Legi	Jl. Bugisan
28.	Ngampilan	Umum	236	Suryobrantan	Jl. KHA. Dahlan
29.	Kotagede	Umum	4.578	Kotagede	Jl. Mondorakan
30.	Umbulharjo	Khusus (Sepeda)	1.287	Tujungsari	Jl. Menteri Supeno
31.	Kotagede	Umum	585	Gedongkuning	Jl. Gedongkuning

Sumber : Data Dinas Pasar Kotamadya Yogyakarta, 1992

TABEL IV.2
JUMLAH PEDAGANG PASAR KOTAMADYA YOGYAKARTA

NAMA TEMPAT/PASAR	JUMLAH PEDAGANG
Beringharjo	4.932
Sriwedari	
Pathhuk	155
Kranggan	1.066
Karangwaru	136
kembang	54
Pingit	149
Demangan	722
Reksonegaran	81
Terban	174
Gendeng	53
sanggrahan	34
Sentul	452
Ledok Gondomanan	17
Gondomanan	28
Semaki	30
Lempuyangan	262
Serangan	377
Legi	305
Suryabrantan	13
Senen	234
Ngasem	6227
Ngadikusuman	26
Pujokusuman	87
Ciptomulyo	34
prawirotaman	482
Gading	136
karangkajen	30
kotagede	807
Gedongkuning	75
tunjungsari	41
JUMLAH	11.119

Sumber : Data Dinas pasar Kotamadya Yogyakarta, 1992

TABEL IV.3
PERKEMBANGAN JUMLAH PENGUNJUNG OBYEK WISATA
DI KOTAMADYA YOGYAKARTA
1989/1991

Obyek Wisata	1989	1990	1991	Perkembangan %
	Wisman+Wisnu	Wisman+Wisnu	Wisman+Wisnu	Wisman+Wisnu
Kraton Yogyakarta	401.023	485.757	447.304	8,40 - 15,56
Tamansari	86.725	97.095	110.293	5,76 - 21,15
Bonbin Gembiraloka	928.330	921.406	917.798	27,21 - 0,60

Sumber : Data dan statistik.Kepariwisataan DIY. Dinas pariwisata. Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

TABEL IV.4
PERKEMBANGAN USAHA REKREASI
DAN HIBURAN KODYA YOGYAKARTA
1990-1991

Jenis Hiburan/Rekreasi	1990	1991
Taman Rekreasi	4	4
Kolam Renang	9	9
Pemancingan	17	12
Bilyard	41	12
Club Malam	-	1
Diskotek	3	3
Panti Pijat	35	29
Bioskop	27	35
Pusat Seni/Pameran	3	4
Panggung Terbuka	2	3
Teater Tertutup	18	13
Fasilitas Olah Raga	11	12
Fitness	3	4

Sumber : Data Dan Statistik Kepariwisataaan DIY, 1991. Dinas
Pariwisata. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

TABEL IV.5
JUMLAH GEDUNG BIOSKOP DI DIY
1989-1990

Daerah/Lokasi	1989	1990	1991
Kodya Yogyakarta	24	21	30
Kabupaten Sleman	3	3	2
Kabupaten Bantul	-	-	1
Kabupaten Gunung Kidul	2	2	1
Kabupaten Kulon Progo	1	1	1
Jumlah	30	27	35

Sumber : Data Dan Statistik Keperiwisataan DIY, 1991. Dinas
Pariwisata. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

TABEL IV.6
NAMA GEDUNG BIOSKOP DI KODYA YOGYAKARTA
MENURUT GOLONGAN, 1990

Nama Bioskop	Golongan
Istana	B
Regent 1	A
Regent 2	A
Regent 3	A
Regent 4	A
Mitra	AA Utama
President	AA
Mataram	AA Utama
Permata	A
Indra	I-1
Yogya	A
Senopati	A
Soboharsono	II-B
Widya	B
Ratih 1	II-B
Ratih 2	II-B
Arjuna 1	C
Arjuna 2	C
Galaxiy	Utama
Golden	Utama
Royal	B

Sumber : Kotamadya Yogyakarta Dalam Angka, 1990, Kantor Statistik
Propinsi DIY.
: tahun 1992, ditambah Bioskop Empire 1-8 dan
Bioskop Wijaya

TABEL 1V.7
JENIS KENDARAAN 1986-1990

Jenis Kendaraan	1986		1987		1988		1989		1990	
Sedan	6.555	3,5	7.318	3,5	8.103	3,7	8.818	3,7	9.610	3,8
Station Wagon	9.126	4,6	10.027	4,8	11.218	5,1	12.368	3,7	19.676	5,4
Jeep	2.441	1,2	2.718	1,3	2.893	1,3	3.105	1,3	3.389	1,3
Atobus/bus	2.595	1,3	2.201	1,1	2.778	1,3	3.098	1,3	3.626	1,4
Truck	4.281	2,2	4.440	2,1	4.547	2,1	4.396	1,9	4.717	1,9
Ambulance	162	0,1	166	0,1	175	0,1	177	0,1	187	0,1
Pick Up	8.742	4,4	9.011	4,3	9.825	4,5	10.257	4,4	10.913	4,3
Sepeda motor	142.219	72,4	151.659	72,9	159.854	72,7	172.648	73,2	185.746	73,5
Scuter	20.711	10,2	20.686	9,9	20.672	9,5	20.890	8,9	21.122	8,3
Jumlah	196.832	100	208.226	100	220.065	100	235.757	100	252.986	100

Sumber data : Polwil Yogyakarta

TABEL IV. 8
PELANGGARAN MENURUT PROFESI 1991

Profesi	Jumlah	%
Pengemudi	6.862	8,7
Mahasiswa/Pelajar	14.425	56,5
Pegawai Negeri	8.650	11,0
Karyawan	3.940	5,0
Pedagang, dll	14,772	18,8
Jumlah	78.707	100

Sumber Data : Polresta Yogyakarta,1991.

TABEL IV.9
JENIS PERLENGKAPAN 1991

Pelanggaran	Jumlah	%
Helm/Perlengkapan	26.779	79,0
Surat-surat	3.624	10,7
Kecepatan	92	0,3
Peruntukan	124	0,4
Penumpang/muatan	314	0,9
Berhenti di tempat terlarang	1.242	3,7
Lain-lain	1.719	5,0
Jumlah	33.894	100

Sumber data : Bagian Lantas Polwil Yogyakarta,1991

TABEL IV. 10
JENIS KECELAKAAN 1987 - 1991

Tahun	Kejadian	MD	LB	LR
1987	46	8	52	9
1988	45	17	58	10
1989	85	35	23	59
1990	114	28	13	105

Sumber data : Polresta Yogyakarta, 1991

Keterangan : MD : Mati di tempat

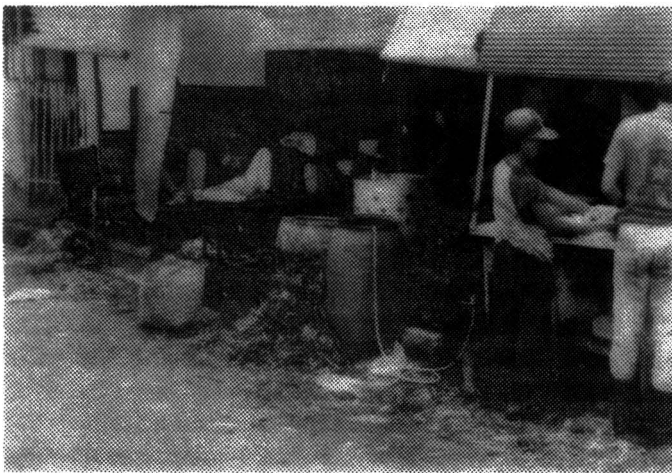
LB : Luka berat

LR: : Luka ringan

Hand-drawn sketch of a bus terminal layout. The terminal is a large rectangle divided into sections. The top section is labeled "SUB TERMINAL" and contains several rows of boxes, some labeled "LOS" and "AYAM". The bottom section is labeled "BUS TERMINAL" and contains a grid of boxes, some labeled "AYAM" and "JORDA". The terminal is surrounded by a fence and has a road on the left side. A compass rose is in the top right corner.



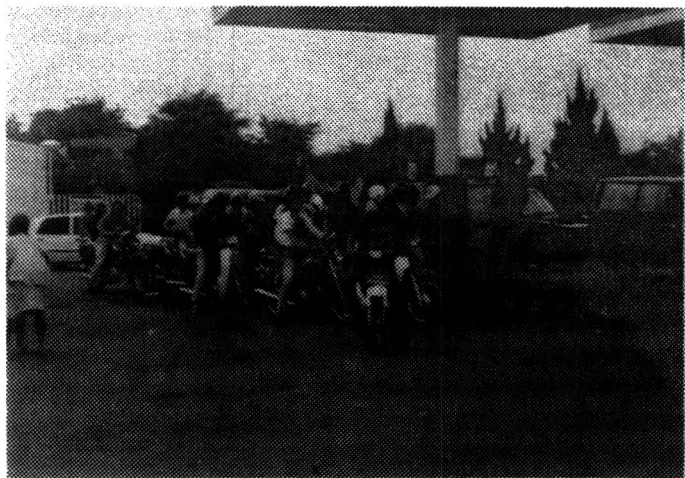
Gambar 23. Suasana Pasar Terban



Gambar 24. Tempat penyembelihan ayam di Pasar Terban



Gambar 25. Sub Terminal di depan Pasar Terban



Gambar 26. Pom Bensin dekat Terminal Terban



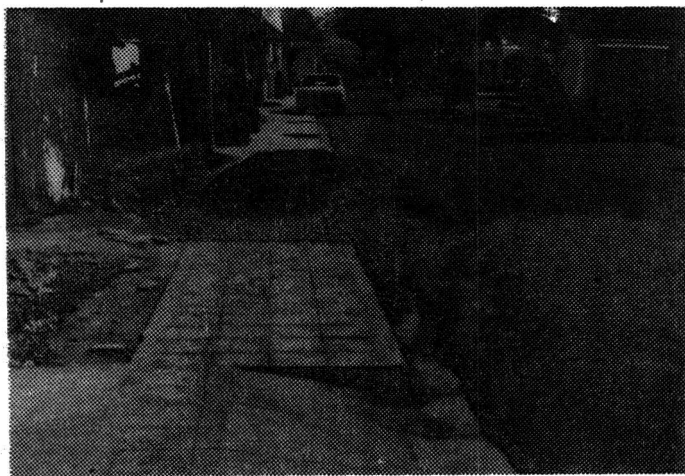
Gambar 27. Lalu linats padat dan semrawut di Jalan C. Simanjuntak



Gambar 28. Petugas mengatur lalu lintas



Gambar 29. Bus kota menunggu penumpang



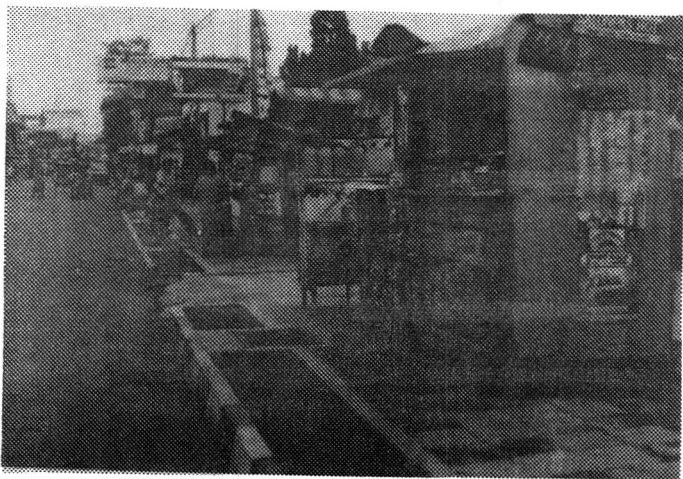
Gambar 30. Melanggar peraturan, meletakkan material di trotoar



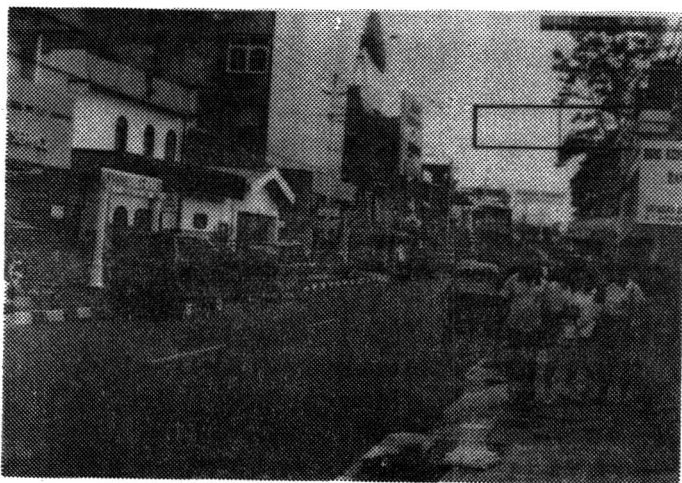
Gambar 31. Tertib menyeberang, di Zebra Cros



Gambar 32. Kendaraan mesin, non mesin menjadi satu



Gambar 33. Kaki lima di Jalan C. Simanjuntak



Gambar 34. Suasana di Jalan C. Simanjuntak wilayah Terban

BAB V

UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKAT KOTA

Menurut Bintarto (1982 : 1-16), perilaku disiplin mempunyai peran yang sangat menentukan untuk mewujudkan kerukunan dan ketertiban. Kehidupan yang serasi dan tertib tersebut banyak dipengaruhi oleh disiplin perorangan, kelompok, keluarga, masyarakat. Perilaku disiplin merupakan sifat dasar seseorang, yang dapat pula diperoleh dari pengaruh luar atau oleh pengaruh lingkungan. Untuk itu disiplin sebagai sumberdaya manusia, diperlukan pembinaan dan pengembangannya.

Pembinaan, berarti melakukan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan sehingga kaidah-kaidah kehidupan benar-benar dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pembinaan disiplin akan terwujud kesatuan sikap dan tindakan antara aparatur pemerintah dan rakyat dalam proses pembangunan. pembinaan disiplin tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, baik di kalangan aparatur pemerintah maupun di kalangan masyarakat (Sudjana, 1985 : 18-22). Upaya pembinaan disiplin dalam masyarakat bisa dilakukan oleh pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat.

A. PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH

Pembinaan disiplin dalam masyarakat oleh pemerintah yang dimaksud di sini adalah pembinaan yang dilakukan oleh para pemuka-pemuka masyarakat dari jalur formal, yaitu dari camat, lurah, RT-RW, dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya seperti Ketua Dasawisma, Ketua PKK, dan sebagainya. Di samping itu pembinaan disiplin bisa juga melibatkan pihak-pihak instansi terkait, misalnya dari Dep Sos, Dik Bud, Puskesmas, Dep Kes, dan sebagainya. Campur tangan dari pihak-pihak yang berkompeten dalam pembinaan disiplin seperti polisi juga sangat menentukan.

Sebagaimana telah diungkapkan, bahwa masyarakat di daerah penelitian sangat heterogen baik bila dilihat dari keadaan ekonomi, pendidikan, profesi, daerah asal. Oleh kondisi masyarakatnya yang demikian itu, para pemuka masyarakat di wilayah Terban terus faham dan tahu betul karakteristik warga masyarakat yang dipimpinnya. Wilayah

Terban letaknya sangat strategis yaitu dekat kampus UGM maupun kampus UII, sekolah SMP dan SMA yang sudah punya nama, rumah sakit, bank, kompleks pertokoan, sederetan usaha foto copy, sederetan rumah makan, dan merupakan daerah jalur bus kota maupun angkutan umum lainnya. Oleh sebab itu usaha pemondokan pun berkembang di daerah tersebut. Ternyata para pemondok atau pendatang ini menjadi salah satu kendala masalah kedisiplinan di wilayah tersebut. Sementara itu di wilayah Terban ada kelompok warga yang cukup mapan kehidupan ekonominya, ada yang sedang-sedang saja, dan ada pula kelompok yang kekurangan baik materi maupun pendidikannya. Bahkan antara 150-200 KK warga di wilayah Terban ada yang dalam kondisi yang parah mentalnya yaitu sebagai penjudi, pemabuk, dan penganggur. Tempat pemukiman mereka pun kontras, ada lingkungan elite, kampung, maupun yang dilembah Code atau dekat Sungai Code.

Melihat kondisi masyarakat yang demikian itu, pemuka- pemuka masyarakat setempat bekerjasama untuk melakukan upaya-upaya pembinaan. Beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu : 1) Mengetrapkan Tribina, 2) Mengkoordinasikan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk dijadikan ujung tombak kelurahan yaitu menjadi pemuka-pemuka masyarakat tingkat RT-RW, 3) Kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk membina masyarakat baik dibidang mental, spiritual, kebersihan, kesehatan, dan sebagainya, 4) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.

Tribina yaitu bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha. Tribina tersebut memfokus terutama untuk bina manusia yaitu pembinaan manusia itu sendiri. Sasaran pembinaan terutama warga masyarakat Terban baik dari segi sosial, budaya, ekonomi. Warga Terban yang belum/tidak memperoleh kesempatan pendidikan formal, termasuk juga disini warga yang mempunyai anak usia sekolah tetapi tidak sekolah menjadi perhatian dan didata, kemudian dicarikan jalan keluarnya. Pembinaan terhadap warga ini supaya untuk selanjutnya mereka ini mempunyai bekal (bisa baca tulis) dan dapat menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri maupun masyarakat di lingkungannya.

Warga yang telah didata tersebut kemudian dipelajari dan dilihat yang berpotensi untuk dikembangkan. Mereka yang dipandang berpotensi disalurkan ke kursus-kursus praktis misalnya tentang montir, mesin, menjahit dan sebagainya yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Industrial (BLKI) dan beberapa ada yang dibantu dari Departemen Sosial.

Diharapkan mereka ini kelak menjadi manusia-manusia mandiri yang mempunyai disiplin kerja. Sedangkan bagi warga yang kurang mempunyai bakat dalam ketrampilan disalurkan ke tempat-tempat parkir (sebagai petugas parkir) pertokoan maupun rumah makan sekitarnya, pelayan toko, dan sebagainya. Itu semua dilakukan supaya warga tersebut mempunyai kegiatan dan pegangan hidup, tidak hanya menganggur kemudian mabuk-mabukan atau judi. Pembinaan ini sebagian besar adalah pemuda-pemuda putus sekolah yang jumlahnya cukup banyak di wilayah tersebut.

Di samping itu pembinaan juga dilakukan lewat pendekatan-pendekatan para pemuka-pemuka masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan. Penyuluhan-penyuluhan kadang-kadang dilakukan oleh RT-RW di lingkungan masing-masing, lurah, maupun camat kadang-kadang juga menghadiri pertemuan-pertemuan yang dilakukan warga biasanya lewat rapat, arisan dan sebagainya. Pada saat tertentu juga mendatangkan penceramah yang mempunyai keahlian tertentu dari instansi misalnya mengenai masalah sertifikat tanah, dan sebagainya. Melalui ceramah, penyuluhan-penyuluhan tersebut berarti dilakukan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan warga.

Pembinaan manusia juga dilakukan dari sudut pendalaman beragama. Pendalaman di bidang beragama baik dilakukan oleh pemeluk agama Islam, Kristen, Katholik. Masing-masing mengintensifkan pertemuan-pertemuan misalnya pengajian untuk para pemeluk agama Islam, atau pendalaman kitab-kitab suci untuk yang beragama Kristen dan Katholik. Juga diadakan ceramah-ceramah agama pada hari-hari besar agama masing-masing misalnya mengundang KH Fahrudin, Romo Mangun dan sebagainya. Dengan pembinaan dalam bidang spiritual ini memungkinkan adanya manusia-manusia yang tangguh dan beriman.

Pembinaan manusia juga melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan baik dari kepolisian mengenai ketertiban dan disiplin, dari Dep Kes, Dinas Sosial dan sebagainya. Jadi dengan pembinaan tersebut diharapkan warga hidup sehat, dan terpupuk sikap disiplin baik dari segi kebersihan dan kesehatan maupun disiplin di jalan raya.

Bina lingkungan, yaitu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah. Pembinaan terutama ditujukan untuk rumah sehat, disiplin penanganan sampah/limbah, dan gotong royong kebersihan lingkungan. Bina lingkungan ini juga banyak melibatkan organisasi-organisasi sosial seperti

PKK, Dasawisma. Bina lingkungan terprogram lewat RT-RW di lingkungan masing-masing. Dengan pembinaan lingkungan diharapkan warga mempunyai sikap disiplin terhadap lingkungan yang bersih, sehat. Untuk memupuk sikap disiplin terhadap kebersihan, ketertiban lingkungan juga diadakan lomba-lomba kebersihan atas instruksi kecamatan, misal lomba pembuangan sampah, lomba kebersihan limbah, kebersihan WC/kamar mandi dan sebagainya. Lomba tersebut sering diadakan tidak hanya pada hari-hari besar, terutama di tempat-tempat yang kebersihan lingkungannya jelek, untuk itu penyelenggaraanya melibatkan instansi lain dari Dep Kes, Puskesmas, Dep Sos.

Pembinaan disiplin juga dilakukan dengan cara melihat kepatuhan warga terhadap aturan-aturan yang ada dengan jalan memantau di tempat. Misal mengenai aturan pembuangan sampah tidak boleh dibuang di tempat yang dilarang, ternyata masih juga ada warga yang melanggar. Kejadian ini termonitor secara langsung oleh Lurah dan aparat dari kecamatan, dan langsung ada teguran. Hari berikutnya tempat sampah itu ditinjau lagi, ternyata sampah belum dibuang di tempat yang benar langsung Lurah mencari gerobak diambil sendiri. Dengan cara ini untuk menunjukkan kepada warga bahwa mereka tidak tertib, di samping itu warga bersangkutan menjadi "rikuh". Ternyata cara seperti ini bisa membuat warga patuh mengikuti petunjuk.

Bina usaha, yaitu pembinaan yang ditujukan kepada golongan ekonomi lemah. Untuk itu bantuan uang dari Bangdes dikembangkan dengan usaha mendirikan koperasi khusus untuk ibu-ibu. Koperasi ini cukup maju dan menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga relatif murah. Pembinaan juga ditujukan kepada pedagang kaki lima. Pedagang-pedagang kaki lima di Terban didata oleh pihak kelurahan dan diberi pengarahan-pengarahan ketertiban berjualan seperlunya. Keberhasilan tegaknya koperasi dan tertibnya pedagang kaki lima ditentukan oleh disiplin mereka.

Untuk melaksanakan program-program pemerintah dan mengendalikan ketertiban. Kepala Kelurahan berusaha menempatkan tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan masing-masing untuk menjadi ujung tombak kelurahan. Dalam hal ini tokoh-tokoh tersebut sebagian besar adalah pegawai negeri, sarjana, dan cukup berpengaruh di lingkungan masing-masing. Mereka ini ditunjuk untuk menjadi Ketua Rukun Warga (RW) di tempatnya masing-masing. Dengan ujung tombak yang cukup potensial itu, Kepala Kelurahan mempunyai harapan pemuka-pemuka masyarakat yang

ditunjuk itu ((juga dipilih warganya) dapat dengan cepat dan tepat mempelajari, menanggapi, serta melaksanakan semua program-program yang telah dimusyawarahkan bersama maupun yang datang langsung dari pemerintah. Misal instruksi dari kecamatan mengenai pemasyarakatan Perda sampah kepada masyarakat lewat RT/RW. Dengan menempatkan mereka sebagai pemuka masyarakat, instruksidari atas bisa langsung dapat ditanggapi dan membuat keputusan-keputusan bersama untuk dilaksanakan bersama warga. Oleh karena mereka berprofesi, pandai, dan menjadi panutan warga, tujuan-tujuan dari program-program yang dilaksanakan dapat direalisasikan. Jadi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di wilayah Terban, mereka yang berprofesi dan mempunyai potensi di wilayah masing-masing, dimanfaatkan oleh lurah sebagai tokoh pengintegrasikan tingkat formal administrasi pemerintahan dan diharapkan juga berperan dalam pengintegrasian kehidupan sosial di lingkungannya.

Selanjutnya untuk melakukan pembinaan di bidang lainnya, pemerintah kelurahan memanfaatkan warga yang mempunyai keahlian khusus untuk memberikan ceramah, penyuluhan-penyuluhan. Secara kebetulan di wilayah Terban mempunyai warga yang berprofesi sebagai dokter, psikolog, yang bergerak di bidang sosial, tokoh-tokoh agama, dibidang pemerintahan dan sebagainya. Mereka-mereka ini termasuk warga yang sibuk, sehingga sulit mengadakan komunikasi dengan warga lainnya. Untuk menjembatani komunikasi ini, mereka diminta memberikan penyuluhan-penyuluhan sesuai dengan keahliannya. Dengan cara seperti ini secara tidak langsung mereka berkomunikasi dengan warga lainnya, karena dalam penyuluhan ada dialog (tanya jawab), dilain pihak warga mendapat pengetahuan baru. Misalnya ceramah tentang penyakit kanker, bagaimana hidup sehat, makanan bergizi, dan sebagainya.

Pemupukan rasa kebersamaan, solidaritas sosial dilakukan dengan cara pada acara-acara hari besar seperti 17 Agustus, hari-hari besar agama syawalan, Natalan, dengan pembentukan kepanitiaan yang terdiri dari warga yang jarang berkomunikasi dengan warga lainnya. Dengan dijadikan panitia mau tidak mau warga tersebut harus membaur dan berkomunikasi dengan warga lainnya.

Pembinaan supaya warga mempunyai kesadaran diri dilakukan dengan menyebut nama seorang warga yang telah bersikap baik dan berperilaku tertib misal penataan lingkungan rumah, kebersihan, atau menyebut warga di RW sekitar, RT sekitar tertib dalam membayar iuran

sampah dan sebagainya pada setiap kesempatan ada pertemuan warga. Dengan cara ini diharapkan warga termotivasi untuk mengikuti jejak atau meniru. Jadi pemupukan sikap tertib dengan jalan menyebut nama warga tersebut dalam setiap pertemuan-pertemuan sebagai contoh.

Pemuda/pemudi yang putus sekolah dikoordinasi oleh Karangtaruna. Supaya mereka mempunyai kegiatan, dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat sekitarnya disalurkan untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka ini tergabung dalam paguyuban ASTER (Agawe Sentosaning Terban). Pembinaan terhadap keluarga yang parah mentalnya dilakukan dengan kunjungan-kunjungan, pemanggilan ke kantor kelurahan, minta tolong pihak lain misalnya dari psikologi untuk membantu mencari pemecahannya.

Itulah antara lain langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemimpin-pemimpin formal tingkat kelurahan, kecamatan. Upaya-upaya pembinaan dengan melibatkan, memanfaatkan potensi dari dalam dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait. Meskipun demikian pembinaan bukannya berjalan dengan sekejap, tetapi memerlukan proses yang panjang, bertahap, dan dilakukan secara terus menerus. Apalagi sikap disiplin, yang tergantung oleh sikap bawaan manusia yang bersangkutan, memerlukan proses belajar yang panjang.

Upaya pemerintah untuk menumbuhkan disiplin berlalulintas, dalam hal ini polisi memupuk dengan berbagai cara. Di antaranya menerapkan *sanksi yuridis* maupun *sanksi sosiologis* (Saljipto Rahardjo, 1992). Sanksi yuridis adalah penilangan dan kemudian membawa ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman. Sedangkan sanksi sosiologis adalah tindakan polisi untuk menahan mobil, SIM, atau memberi teguran serta nasehat. Realisasi dari pengetrapan sanksi yuridis maupun sosiologis itu tercermin dari dilancarkannya operasi tertib kendaraan dalam hal kelengkapan surat, mematuhi rambu-rambu yang ada dan sebagainya, misalnya Operasi Zebra, Operasi Patuh, Operasi Keris. Upaya penertiban ini untuk melakukan pembinaan disiplin di jalan raya terhadap para pengguna jalan raya, khususnya pengendara kendaraan.

Pembinaan dilakukan dengan memasyarakatkan rambu-rambu lalulintas kepada masyarakat dimulai dari sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dalam hal ini digunakan slogan "polisi sahabat anak", "polisi mitra remaja". Dengan slogan tersebut polisi turun kebawah berkunjung ke sekolah mulai dari sekolah taman kanak-kanak, Polwan memperkenalkan gambar tanda-tanda rambu-rambu lalu

lintas yang dipasang di sekitar halaman dan dinding ruang sekolah tersebut. Lebih lanjut pada tingkat pendidikan SD sampai dengan SMA selain diperkenalkan berbagai macam rambu-rambu dan peraturan lalu lintas, dibentuk pula Polisi Keamanan Sekolah (PKS). Tugas PKS membantu penyeberangan jalan pada saat-saat murid-murid akan masuk dan saat pulang sekolah di lingkungannya. Hal yang sama dilakukan juga pada perguruan tinggi dengan dibentuk BPL (Bantuan Polisi Lalu Lintas). Mereka ini membantu polisi mengatur lalu lintas tidak hanya di lingkungannya sendiri (sekitar kampus) namun mereka juga menyebar di berbagai tempat yang dianggap ramai dan rawan kecelakaan.

Kecuali dengan berbagai macam pendekatan tersebut, Polri juga mengadakan tatap muka secara langsung yaitu dengan penyuluhan-penyuluhan melalui organisasi-organisasi yang ada antara lain dengan para pengemudi becak yang tergabung di dalam PSBY (Persatuan Sopir Becak Yogyakarta). Diharapkan supaya pengemudi becak ikut mengamankan penumpang dengan barang-barangnya. Penyuluhan-penyuluhan tertib lalu lintas kepada pelajar/mahasiswa dan sebagainya. Di samping itu penyuluhan meluas ke tingkat kalurahan yang dilakukan Polsek-Polsek bagian Kaptibbanbinmas.

Jadi dengan pengenalan rambu-rambu lalu lintas, peraturan-peraturan lalu lintas lebih dini diharapkan nantinya ketertiban di jalan raya sudah mereka pelajari, sudah dihayati sejak awal. Dengan demikian disiplin tertanam dalam diri warga. Di samping itu dengan penyuluhan-penyuluhan dan upaya-upaya lainnya tersebut bisa terwujud adanya slogan "mempolisikan masyarakat dan memasyarakatkan polisi". Dalam arti masyarakat harus dapat menjadi polisi bagi diri sendiri maupun masyarakat lingkungannya.

Pembinaan tertib lalu lintas juga dilakukan dengan spanduk-spanduk, slogan-slogan "aku cinta ketertiban" dan sebagainya, melalui Pramuka, cerdas cermat, taman lalu lintas, dan masih banyak lagi.

B. PEMBINAAN OLEH TOKOK MASYARAKAT

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pemerintah (Kelurahan Terban) dalam rangka melakukan pembinaan terhadap warganya, melibatkan para tokoh masyarakat yang ada di lingkungan wilayah Terban. Tokoh masyarakat yang ikut berperan dalam pembinaan warga yaitu tokoh masyarakat yang mempunyai profesi (dokter, psikolog, dan sebagainya)

atau mempunyai keahlian tertentu, dan tokoh masyarakat yang perannya tidak memberi penyuluhan tetapi sebagai penyumbang saran atau sebagai konsultan pemuka-pemuka masyarakat wilayah Terban.

Tokoh-tokoh masyarakat yang berprofesi perannya cukup besar dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada warga setempat. Secara tidak langsung mereka ikut berperan dalam pembinaan warga dalam hal kesehatan, kebersihan lingkungan, pendidikan anak, rumah sehat, dan sebagainya. Tokoh-tokoh masyarakat tersebut ada yang sebagai dokter, dosen, psikolog, insinyur bangunan, dan sebagainya. Secara tidak langsung materi-materi yang diberikan dalam penyuluhan dapat menumbuhkan sikap positif yaitu sikap untuk bersih, untuk sehat, dan sebagainya yang memerlukan sikap disiplin untuk merealisasikannya.

Tokoh masyarakat di bidang agama juga berperan besar dalam ikut membina warga. Pada saat-saat tertentu juga diadakan penyuluhan-penyuluhan, ceramah baik dari seorang Kyai di lingkungan Terban, atau mengundang dari luar. Pembinaan juga dilakukan lewat pengajian-pengajian. Pembinaan di lingkungan yang beragama Kristen/Katholik juga melalui perkumpulan warga dengan pendalaman alkitab, dan diadakan ceramah-ceramah agama. Di samping itu keterlibatan Romo Mangun sebagai seorang tokoh yang sangat dikenal oleh warga Terban, baik dalam hal rumah sehat, keberhasilan lingkungan, berkarya yang baik, dalam bidang mental spiritual, membuat sanggar pertemuan anak-anak untuk belajar, mengundang anak-anak kost di daerah tersebut untuk mengisi kegiatan misal menari, melukis dan sebagainya.

Tokoh masyarakat yang perannya sebagai penasihat jumlahnya tidak banyak. Seorang tokoh masyarakat pensiunan pegawai negeri suatu instansi, mempunyai peran yang cukup menonjol dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kelurahan maupun pembinaan warga di wilayah Terban. Tokoh tersebut cukup berpengaruh baik di tingkat kelurahan, maupun RT-RW. Beberapa hal yang telah dilakukan di antaranya yaitu memberi jalan pemecahan atau operasionalnya suatu peraturan, instruksi, yang sifatnya dari pemerintah atasnya (misal dari kecamatan). Jadi dalam rapat-rapat, pertemuan-pertemuan tingkat kelurahan, tokoh ini sering diundang untuk ikut rapat. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut ia ikut memecahkan instruksi-instruksi yang datangnya dari atas sekaligus mencari jalan keluarnya bagaimana supaya instruksi itu dapat diterapkan di semua wilayah Terban dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat. Setiap ada peraturan, tugas, yang harus diteruskan

ke warga perlu mempertimbangkan masyarakat yang bersangkutan, khususnya Terban masyarakatnya mempunyai heterogenitas yang tinggi. Untuk itu karakteristik masyarakat yang dipimpinnya harus diketahui betul, supaya realisasi program-program kelurahan dapat terlaksana dengan lancar. Untuk itu ia kadang-kadang ikut membuat konsep supaya diterima warga, terutama kalangan bawah.

Selanjutnya dengan melihat karakteristik masyarakat yang seperti itu (heterogen) ia memberikan saran langkah-langkah yang perlu dilakukan, dan ini sebagian sudah dicoba diterapkan :

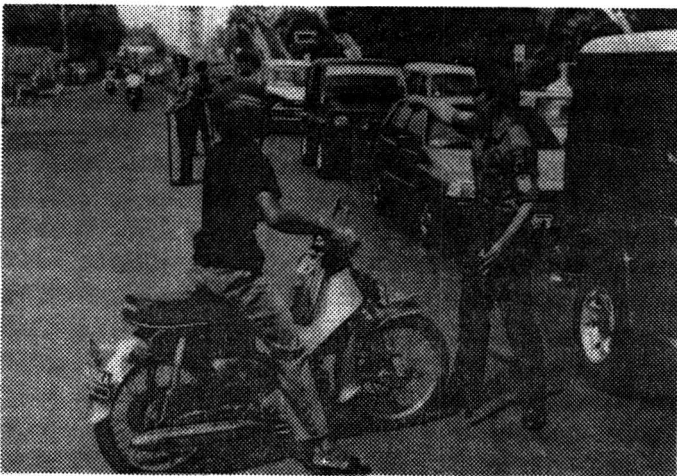
- 1). Mempertinggi frekuensi penyuluhan kepada warga. Dengan demikian komunikasi terjalin karena penyuluhan diambil dari warga sendiri yang mempunyai keahlian khusus dan mampu untuk itu. Di samping itu warga bertambah pengetahuannya.
- 2). Mengajukan untuk menyebarluaskan undang-undang yang berlaku supaya masyarakat tahu apa dan bagaimana mereka harus berlaku atau menempatkan diri.
- 3). Sering terjun ke bawah (pemuka masyarakat) untuk melakukan dialog, berkomunikasi, sehingga bisa melihat kebutuhan mereka.
- 4). Mengajukan, dalam rangka menertibkan dan melancarkan tujuan diperlukan paksaan dan ancaman. Misal "kalau tidak tertib tidak dilayani dalam mengurus surat-surat, misal KTP.

Selain mempunyai peranan di tingkat kelurahan, ia juga sering memberi nasihat-nasihat di tingkat RT-RW di lingkungan sendiri. Selain itu ia membuat arisan semacam "rembug desa" yang dihadiri kepala keluarga. Dalam arisan itu dibicarakan masalah-masalah yang terjadi atau pembicaraan lainnya.

Tokoh ini juga sering dimintai nasihat-nasihat oleh tetangga kanan-kirinya yang berhubungan dengan pendidikan, perselisihan, dan sebagainya. Ia juga sering mendamaikan keluarga yang baru konflik, memberi nasihat perselisihan antara tetangga karena masalah anak, masalah hutang, dan sebagainya.



Gambar 36. Slogan kebersihan salah satu upaya pembinaan kebersihan lingkungan.



Gambar 37. Polisi memberitahu kepada pengendara, ssalah satu upaya pembinaan ketertiban lalu lintas.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kotamadya Yogyakarta merupakan sentrum dari berbagai kegiatan sosial, budaya, ekonomi, tidak hanya oleh penduduk sekitarnya tetapi juga bagi penduduk yang datang ke kota tersebut. Sebagai kota yang heterogenitas masyarakatnya tinggi, banyak masalah-masalah yang dihadapi kota tersebut. Masalah-masalah yang juga tumbuh di kota-kota lainnya di antaranya adalah masalah kepadatan lalu lintas, masalah sampah/limbah, penyediaan sarana maupun prasarana warga kota. Dari berbagai permasalahan tersebut, sumber utamanya adalah masalah kedisiplinan warga kota.

Sikap disiplin mempunyai peran yang sangat menentukan bagi terwujudnya ketertiban. Kehidupan yang tertib tersebut sangat dipengaruhi oleh disiplin perorangan, kelompok, dan masyarakat. Di dalam masyarakat yang heterogen kualitas disiplinnya beragam. Hal ini didukung banyaknya pedatang/ pemondok di wilayah Terban.

Disiplin masyarakat di lingkungan pemukiman Kelurahan Terban dilihat dari kegiatan masyarakat Kelurahan Terban dalam penanganan limbah/sampah, maupun partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sosial maka disiplin mereka belum berjalan secara mantap. Program-program kebersihan lingkungan, kesehatan lingkungan yang dicanangkan pemerintah lewat RT-RW pada umumnya berjalan berdasarkan instruksi. Belum menjadi kegiatan yang bersifat gerakan dari bawah yang dimiliki bersama. Artinya, di luar instruksi itu kegiatan-kegiatan kebersihan jarang dilakukan.

Satuan RT-RW di sini merupakan satuan administrasi pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya program-program tersebut. Realisasi pelaksanaan program-program tersebut menuntut partisipasi warga masyarakat. Partisipasi warga ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, Pendidikan, profesi, dan sebagainya. Oleh sebab itu di wilayah tertentu dijumpai program pemerintah yang berjalan dengan baik yang didukung oleh warga, sebaliknya di lain tempat program-program tersebut kurang berjalan lancar dan warga kurang perhatian.

Program-program kebersihan khususnya penanganan sampah/limbah yang berjalan baik dan didukung warga, mencerminkan adanya partisipasi terhadap kegiatan tersebut. Partisipasi warga dalam kegiatan kebersihan sampah/limbah tersebut menunjukkan bahwa warga di daerah

tersebut sudah disiplin. Pada umumnya warga sudah membuang sampah ke dalam sarana maupun prasaran yang dimiliki yaitu di bak sampah, dibakar, ditimbun di lubang dan sebagainya.

Perda yang mengatur penanganan sampah belum seluruhnya terlaksana dengan baik. Misal, masih sering terjadi warga membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang bongkaran bangunan di tempat pembuangan sampah dan sebagainya. Sebaliknya petugas yang bertanggungjawab mengangkut sampah pun sering tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misal ketentuan bahwa sampah yang tertimbun di TPS selambat-lambatnya 2 (dua) hari harus segera diangkut, ternyata sering berlarut-larut. Di samping itu sanksi bagi yang melanggar pembuangan sampah tidak pada tempatnya, juga belum diterapkan dengan semestinya. Untuk menegakkan disiplin demi terwujudnya bersih lingkungan kiranya pelaksanaan Perda sampah tersebut perlu dipertegas pelaksanaannya.

Khusus warga yang dekat Sungai Code kurang disiplin dalam pembuangan sampah/limbah. Keadaan lingkungan yang padat perumahan maupun padat penghuni di kampung Code, tidak memungkinkan warga di daerah tersebut untuk membuat tempat pembuangan sampah. Keadaan ekonomi yang relatif pas-pasan juga menyulitkan mereka, karena bila ikut pembuangan sampah gerobag mereka harus membayar iuran. Mereka kemudian memanfaatkan sungai untuk tempat pembuangan sampah, di samping praktis karena letaknya dekat, mudah dicapai, dan tidak mengeluarkan biaya. Kebiasaan ini sudah sejak dulu dilakukan oleh penghuni-penghuni sekitar lembah Code. Kebiasaan ini jelas dapat mencemari sungai maupun sumur-sumur yang terdapat di sekitar Sungai Code. Untuk itu diperlukan jalan keluar guna mengatasi hal tersebut. Usaha dari Dasawisma maupun PKK dengan pengadaan tempat sampah yang seragam dari plastik, atau ban bekas (dibeli) belum dapat menuntaskan masalah, karena warga masih tetap membuang sampah di sungai. Pada hal di daerah tersebut kesulitan tempat bila diletakkan bak sampah/gerobag sampah untuk TPS nya. Untuk itu perlu subsidi dari pemerintah setempat untuk meringankan beban warga, yaitu mereka dipungut biaya seringan mungkin untuk biaya mengangkut sampah ke TPS dengan gerobag, misalnya Rp 250,- per bulan. Tentunya warga mampu untuk membayar iuran tersebut.

Kepatuhan mereka dalam melaksanakan instruksi lewat RT-RW, bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Akan tetapi hal

tersebut belum tentu menunjukkan adanya tanggung jawab sosial di lingkungannya tidak nampak, sehingga cenderung berbuat untuk kepentingan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan kehidupan bersama. Hal ini terbukti adanya warga yang hanya mengirimkan pembantu/ pekerjaannya untuk menunjukkan partisipasinya dalam kerja bakti atau kegiatan-kegiatan bersama lainnya. Sikap seperti ini cenderung dilakukan warga yang pendidikannya relatif tinggi dan mempunyai profesi yang cukup mapan. Untuk itu menarik mereka untuk mempunyai peranan di bidang lain dalam masyarakat, merupakan tindakan yang tepat yang telah ditempuh oleh aparat setempat.

Kelompok pendatang/pemondok yang cukup banyak terdapat di wilayah Terban, pada umumnya kurang mempunyai kepedulian sosial terhadap lingkungannya. Mereka cenderung acuh tak acuh terhadap lingkungan sosialnya. Kemungkinannya karena hubungan antara pemondok dengan induk semang hanya sebatas antara penyewa dan pemilik, sehingga pemondok kurang/tidak merasa mempunyai kewajiban-kewajiban yang perlu diikuti. Apalagi induk semang tidak berada di tempat mereka jarang sekali mengikuti kegiatan-kegiatan kampung. Kemungkinan lainnya ialah bahwa mereka merasa bukan warga di kampung tersebut. Melihat cukup banyaknya pemondok yang ada di wilayah Terban, perlu kiranya diadakan pendekatan-pendekatan untuk mengetahui potensi yang dimiliki para pemondok. Dengan demikian bila nantinya ada kegiatan-kegiatan tertentu bisa melibatkan para pemondok.

Kegiatan-kegiatan sosial cenderung berkembang di lingkungan warga yang pola pemikirannya rapat atau padat. Solidaritas sosial lebih nampak di sini daripada di lingkungan yang pola pemukimannya antara rumah satu dengan yang lainnya dibatasi pagar-pagar yang terkunci. Solidaritas sosial yang berkembang di pemukiman yang padat tersebut didasari oleh adanya hubungan-hubungan yang spontan, dan akrab. Hubungan-hubungan sosial tersebut terpupuk karena adanya saling membutuhkan dan saling membantu.

Intensitas dalam berinteraksi dipengaruhi oleh tata ruang pemukiman. Pola pemukiman yang merapat intensitas berinteraksi cenderung tinggi, memungkinkan terjadinya kerjasama dan kebersamaan sekaligus rawan terjadinya konflik. Gejala-gejala sosial ini nampak mewarnai dalam hubungan ketetangaan di wilayah Terban. Rumah-rumah yang rapat padat memudahkan terjadinya interaksi. Mereka tidak sekedar saling mengenal, tetapi lebih dari itu meluas sampai ke hal-hal

yang sifatnya pribadi. Hal ini karena disiplin dalam hubungan ketetanggaaan bersifat longgar. Di sini rasa kebersamaan menyatu dalam kehidupan sosial sehari-hari. Di lain pihak dekatnya hubungan itu sering menimbulkan konflik. Hal ini terbukti di wilayah Terban tersebut (wilayah tertentu) sering terjadi konflik karena kesalahpahaman, sindir-menyindir, hutang-piutang, masalah-masalah "tritis" rumah yang terlalu berdekatan, masalah anak, dan sebagainya.

Satuan ketetanggaaan di wilayah perkotaan bercirikan adanya batas-batas sosial (profesi, kedudukan sosial, kesibukan dan sebagainya) dan batas-batas fisik (pagar, pintu). Di wilayah Terban, di daerah pemukiman yang rumahnya merapat padat, batas-batas fisik tidak nampak, sedangkan batas-batas sosial yang memisahkan satu sama lainnya tidak begitu menjadi pertimbangan mereka dalam berinteraksi. Justru karena itu hubungan sosial, solidaritas sosial dapat berkembang di daerah tersebut. Sebaliknya di lingkungan pemukiman yang batas-batas fisiknya lebih nampak (daerah elite), agak menghambat perkembangan hubungan sosial di antara tetangga. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan sosial di tempat pemukiman seperti ini kurang berkembang.

Ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan tergantung pada disiplin warga dalam melaporkan kejadian-kejadian vital seperti kelahiran, kematian, dan pengurusan surat-surat lainnya. Kedisiplinan dalam pelaporan kejadian-kejadian tersebut harus didukung oleh kedua-dua pihak yaitu warga dengan petugas. Dalam hal ini perilaku warga dalam pelaporan kejadian-kejadian vital tersebut, pada umumnya kurang disiplin. Pelaporan kejadian-kejadian vital tersebut kepada petugas yang menangani, biasanya hanya apabila mereka memerlukan surat-surat keterangan tersebut. Akibatnya perubahan-perubahan yang terjadi (administrasi laporan penduduk) kadang-kadang terlambat diketahui petugas. Hal ini akan mempengaruhi pelaporan selanjutnya ke tingkat yang lebih tinggi.

Ketidaktertiban dalam urusan administrasi pemerintahan, kadang-kadang tidak hanya dilakukan oleh warga tetapi juga oleh pemerintah. Misal dalam hal pembaharuan KT. Warga sudah berdisiplin untuk mengurus, tetapi ternyata pihak pemerintah penyelenggara KTP terlambat pengadaan formulirnya, sehingga pengurusan KTP menjadi terlambat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal yang cukup mengganggu kelancaran administrasi pemerintahan di wilayah Terban adalah ketidakpedulian para pendatang

/pemondok untuk melaporkan kedatangannya kepada aparat setempat. Oleh sebab itu keadaan maupun jumlah pemondok sulit untuk dipantau. Keadaan ini juga didukung oleh ketidakpedulian induk semang untuk melaporkan penghuninya ke aparat setempat. Padahal sebenarnya ada Perda yang mengatur usaha-usaha pemondokan yang isinya mencakup kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh induk semang maupun oleh pendatang/pemondok. Namun karena tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak aparat maka hal tersebut tidak pernah dipatuhi.

Melihat kasus itu, perlu adanya pendataan usaha-usaha pemondokan. Kemudian setiap usaha pemondokan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi Perda maupun ketentuan-ketentuan yang mengatur induk semang dengan pemondok, harus dimiliki dan diketahui oleh kedua belah pihak. Dengan pendataan usaha pemondokan, disamping mudah memantaunya juga mudah mengkoordinasikannya.

Ketidakdisiplinan dalam mematuhi aturan ternyata juga terjadi di lingkungan terminal, pasar, dan sebagainya. Misalnya masalah pencemaran penyembelihan ayam yang lokasinya di Pasar Terban. Keadaan tersebut merupakan bukti rendahnya kepedulian mereka terhadap sesamanya, yaitu warga Terban, yang air sungainya tercemar oleh limbah sembelihan ayam. Ketidakpedulian pedagang ayam tersebut karena mereka sudah merasa membayar retribusi kebersihan. Sedangkan pihak pasar sendiri tidak bisa menyediakan sarana untuk tempat pembuangannya. Kejadian tersebut pernah diprotes oleh warga, dan pihak kelurahan pun turun tangan tetapi pencemaran limbah ayam tersebut masih tetap berlangsung. Mungkin pencegahan ini perlu campur tangan pihak lain misal Pemda, atau pihak-pihak yang terkait dengan masalah pencemaran limbah.

Kesan kotor dan kesemrawutan terlihat di Pasar Terban karena lokasinya menjadi satu dengan Sub Terminal Terban. Lingkungan pasar kebersihannya menjadi tanggung jawab Dinas Pasar, sedangkan lingkungan terminal menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan. Hal ini menjadikan lingkungan di pasar maupun terminal sering terbelengkalai, karena masing-masing mempertahankan wewenangnya.

Disiplin di jalan raya dari para pengemudi angkutan umum sebagian besar rendah. Pada umumnya tidak tertib dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku maupun dalam kelengkapan surat-surat. Dari jawaban mereka ada kesan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan gambaran pengemudi pada umumnya. Ketidaktertiban yang

dilakukan oleh pengemudi yaitu 1) membawa penumpang melebihi ketentuan yang ada, 2) surat-surat tidak lengkap (surat ijin trayek, STNK, Kir, dan sebagainya) meskipun hal ini menjadi tanggung jawab pemilik, 3) sering melanggar rambu-rambu untuk menaikkan/menurunkan penumpang. Pelanggaran-pelanggaran ini dianggap bisanya, dan mereka lebih baik memilih damai daripada ditilang. Faktor penumpang adalah uang menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran. Jelas hal ini lebih menguatkan ketidakdisiplinan sopir angkutan umum. Jelas sebenarnya penegakan disiplin tergantung kedua-dua pihak yaitu petugas dan pengemudi. Melihat kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang sebagian besar banyak dilakukan oleh para pengemudi angkutan umum maka perlu petugas terkait untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan.

Di wilayah Terban, yaitu sepanjang Jalan C. Simanjuntak dan jalan-jalan umum lainnya pada jam-jam tertentu sangat padat kendaraan. Melihat kondisi jalan C. Simanjuntak tersebut, nampaknya jalan tersebut sudah tidak mampu lagi untuk menampung beban kendaraan non mesin maupun tidak yang jumlahnya akan terus bertambah. Melihat kesemrawutan Jalan C. Simanjuntak di wilayah Terban tersebut perlu dicari alternatif pemecahan. Jalan yang cukup sempit tersebut dilalui untuk dua jalur, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di daerah tersebut perlu diatur dengan satu arah saja. Di samping itu penertiban kaki lima di sepanjang jalan-jalan yang sempit, serta tukang parkir-parkir, akan membantu kelancaran lalu lintas di sepanjang Jalan C. Simanjuntak.

Pembinaan-pembinaan yang dilakukan secara formal maupun informal dalam kaitannya untuk menumbuhkan sikap disiplin, perlu diimbangi dengan perealisasiian ketentuan-ketentuan yang ada dengan secara tegas, khususnya dalam hal penerapan sanksi. Kontrol eksternal ini sangat membantu untuk berlakunya tertib, namun perlu juga ditekankan perlunya penanaman nilai-nilai patuh kepada aturan baik dalam keluarga maupun sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Ancok, Djamaludin

- 1991 "Aspek Sosial-Budaya Dalam Perencanaan Kota Baru". Seminar Kependudukan di Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan PPLH

- 1987 *Penelitian Sampah di Kotamadya Yogyakarta*. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UGM, Yogyakarta

Bintarto, R

- 1983 *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia, Jakarta

-
- 1982 "Disiplin Suatu Sumberdaya Manusia Tersembunyi". Seminar Geografi II tanggal 4-5 Oktober, Yogyakarta

- "Bioskop dan Sopan Santun". *Kedaulatan Rakyat*, 12 Juni :
1992 hal 4. Pikiran Pembaca

Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda

- 1986/1987 *Pedoman Penyelenggaraan Usaha Pemandokan di Kotamadya Dati II Yogyakarta*

Budhisantoso, S

- 1991 "Disiplin Nasional dan Kebudayaan ". *Majalah ketahanan Nasional*. Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS), Jakarta

Departemen Dalam negeri

- 1982 *Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penduduk Berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1977*

Dinas Pariwisata. Prop DIY

- 1991 *Data dan Statistik Kepariwisataaan DIY*. Dinas Pariwisata. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

- Dister, Evers
1982 *Sosiologi Perkotaan*, LP3ES, Jakarta
- Hubungan Masyarakat. Kodya Yogyakarta
1990 *Yogyakarta Berhati Nyaman*
- Kantor Statistik. Kodya Yogyakarta
1990 *Penduduk Kotamadya Yogyakarta 1990. Hasil Pencacahan Lengkap*
- Kantor Statistik. Kodya Yogyakarta
1990 *Kotamadya Yogyakarta Dalam Angka 1990*
- Kantor Statistik . Prop DIY
1990 *Penduduk menurut Umur Kotamadya Yogyakarta : Hasil Sensus Penduduk 1990*
- Kantor Statistik. Prop DI Yogyakarta
1990 *Statistik Kriminal Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990*
- Koetjaraningrat
1985 "Masalah Disiplin Nasional Pada Bangsa Indonesia".
Seminar Disiplin Pada Proyek Pengembangan Nilai Budaya di Tugu, Bogor
- Magnis Suseno, Franz
1984 *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. PT Gramedia, Jakarta
- Munandar, Utami S.C.
1985 "Disiplin Diri Sebagai Dasar Disiplin Nasional Tinjauan Dari Sudut Psikologi Pendidikan".
Seminar Disiplin Pada Proyek Pengembangan Nilai Budaya di Tugu, Bogor

Pemerintah Daerah Tingkat II. Yogyakarta

- tt *Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II. Yogyakarta no. 1 tahun 1987 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pasar Kotamadya Daerah Tk II Yogyakarta. Pemda Kodya.*

Rahadjo, Satjipto

- 1992 "KKP Sebagai Karya Kepolisian". *Kompas*, 13 Juni hal 6

- 1987 "Disiplin Sosial: Tata tertib atau Tatakrama ?"
Prisma, no 3, th XVI, Maret. LP#ES, Jakarta

Simarmata, Djamester. A

- tt *Perencanaan Transportasi Kota*. ITB, Bandung

Soekanto, Soejono

- 1988 *Beberapa Permasalahan di Jalan Raya*. Dalam Masyarakat dan Kebudayaan : Kumpulan Karangan untuk Prof. Dr Selo Soemardjan. Djambatan, Jakarta

Sugiarta, Sy

- 1992 "Peranan Koperasi Angkutan Dalam Pengembangan Budaya Disiplin Lalu Lintas Menghadapi UU Lalu Lintas Angkutan Jalan no 14 th 1992". Seminar di P3PK UGM diselenggarakan Mahasiswa (Kopema) UGM, Yogyakarta

Suparlan, Parsudi

- 1985 "Peranan Ketetangaan Dalam Turut menciptakan rasa Tanggung Jawab Sosial dan Disiplin Pada Proyek Pengembangan Nilai Budaya di Cisarua 21 25 Januari. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta.

Suratman, Ki

1988 *Disiplin Nasional dan Pembangunan Nasional Ditinjau Dari Pandangan Ajaran Taman Siswa dan Kebudayaan*. Majelis Luhur Tamansiswa, Yogyakarta

Warnaen, Suwarsih

1985 "Disiplin Sebagai Suatu Kebiasaan Dilihat Dari Pandangan Psikologi Sosial". Seminar Disiplin Pada Proyek Pengembangan Nilai Budaya di Cisarua 21-25 Januari. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta

Lampiran nama-nama responden dan informan

Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Organisasi sos Ketua	Alamat
1. Winik Kartini	47 th	SGA	Perhutani	RW I	Terban GK V/134
2. E. Triono Widadi	42 th	Sarmud	Guru	RW II	Terban GK V/180
3. Sumaryono	44 th	Sarmud	PNS Proyek Merapi	RW III	Terban GK V/267
4. Siswa Soeharjo	54 th	SLTA	Pensiunan	RW IV	Terban GK V/564
5. Slamet Haryanto	42 th	Sarmud	Assuransi	RW V	Terban GK V/630
6. Sumarman Harnady	47 th	Sarjana	Kep. SMA	RWVI	Terban GK V/t35
7. Sugeng Wiyono	50 th	Sarjana	PNS	RW VII	Sagan GK V/925
8. Sumadi	72 th	Sarjana	PNS	RW VIII	Sagan GK V883
9. Ir. Sayuri R	39 th	Sarjana	Dosen	RW IX	Sagan GK V/1056
10. Drs. Suprantara	44 th	Sarjana	PNS	RW X	Purbonegaran/1241
11. Tejoatmojo	58 th	SGA	Kep. SD	RW XI	Purbonegaran/1334
12. Willy Prasetyo	47 th	Sarmud	Wiraswasta	Lurah	Simanjuntak 8, Yk
13. Patah Sutrisno SH	40 th	Sarjana	Sekwilcam	-	-
14. Triasrini W.P	45 th	AKTK	IRT	PKK	Simanjuntak 8, Yk
15. Nuryadi	39 th	SMA	Wiraswasta	Karangtaruna	Terban/RW V
16. Drs. Suprantara	44 th	Sarjana	PNS	LKMD	Purbonegaran/1241
17. Jayeng Projo	64 th	SMP	Pensiunan	Tokoh Masy	Terban GK V/RW II
18. Drs. Sardjiyo	61 th	Sarjana	Pensiunan	Tokoh Masy	Gondokusuman
19. Banten Cokrodirjo	64 th	SD	Tk. Parkir	RT	Terban/RW II
20. Sugiyo	46 th	SMP	Tk. Parkir	RT	Purbonegaran 1226

21. Fx. Sukino	54 th	SLTA	PNS	Komdes RW I	Terban GK/66/RW I
22. Subandi	51 th	SMA	PNS	RT/RW I	Terban GK/91/RW I
23. Minterejo	50 th	TS	Kaki lima	-	Terban GK/06/RW I
24. Mamik	42 th	SD	Jualan Makan	-	Terban GK/)*RW II
25. Banten Cokrodirjo	64 th	SD	Tk. Parkir	RT	Terban GK/ RW II
26. Jayeng Diprojo	64 th	SMP	Pensiunan	Tokoh masy	Terban?RW II
27. Suharti	64 th	SLTA	jual makanan	-	Terban/224/RW II
28. Suherjono	48 th	SMA	Kary. UBN	bend RT	Terban/336/RW III
29. Agus Suparmanto	37 th	Sarjana	Guru SMSR	-	Terban/267/RW III
30. Sardi Partoatmojo	57 th	SGA	Guru	RT	Terban/330/RW III
31. Hadi Sukarji	51 th	SD	Juru Kunci	RT	Terban/330/RW III
32. Sugiyono	43 th	SLTA	Kary. swasta	-	Terban /553/RW IV
33. Supriyanto	35 th	SLTA	Kary Bank	LKMD	Terban/575/RW IV
34. Uttadi	40 th	SD	Tk Kelontong	-	Terban/659/RW V
35. Umiyah S Haryanto	40 th	SD	Panin Group	PKK	Terban/654/RW V
36. Suparman	40 th	SD	Tk. Parkir	-	Terban/60/RW V
37. Nuntak	37 th	Jualan	Ds. Wisma	-	Terban/655/RW V
38. Jillaldi. S	32 th	SMP	reparasi	-	Terban/652/RW V
39. A. Mois	57 th	SMA	Kary. perus	RT	Terban /113/Rw V
40. Sadiyo	32 th	SD	Kary. Perush	RT	Terban/674/RW V
41. Hartosuyono	45 th	SD	Jualan	-	Terban/677/RW V
42. Siswacipta	37 th	SMP	Sopir	-	Terban/666/RW V
43. FX. Dwiyono	33 th	SLTA	PHS	RT	Terban /730/RW VI
44. Suyanto	36 th	SMA	Kary. Betesda	Sek. RT	Terban/368/RW VI
45. Sutopo	40 th	SMP	Toko	RT	Terban/385/RW VI
46. Istiawan Basuki	29 th	SMA	Sopir	-	Terban/706/RW VI
47. Wagiyono	37 th	SMP	Sopir	-	Terban 752/RW VI
48. Janimin	36 th	SMP	Kary. Proyek	RT	Terban/687/RW VI
49. Sukiran	34 th	SD	Kary. Sabo	Sek.RT	Terban/682/RW VI

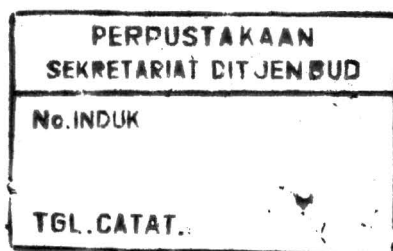
50. Sutarno	30 th	SMP	Pesr.h LIPPO	-	Terban 689/RW VII
51. Hermanus Hermawan	33 th	SMA	Kary. RS. Yap	Bend RT	Sagan/942 RW VII
52. Priyo	33th	SD	Sopir	RT	Terban/674/RW VI
53. Edy Suseno	35 th	SGPLB	Wrg. Makan	Bend. RT	Sagan/942/RW VI
54. Joko Prasetyo	31 th	SMA	Bk. Ft. Copy	-	Sagan /941/RW Vili
55. B. Agus Santoso	30 th	Sarjana	Wiraswasta	Org. pemuda	Sagan /924/RW VII
56. Sutopo	40 th	SMP	Toko	RT	Sagan/1003/RW VII
57. Sukamto	40 th	SMA	PNS	Bid. sos	Sagan/1015/RW VII
58. Kuncoro	34 th	SD	PNS	-	Sagan/1052/RW/IX
59. Suparjiati	34 th	SMKK	Kary Garmen		Sagan/1049/RW IX
60. Mujiwal	50 th	SD	Buruh bangn	Kesenian	Sagan/1049/RW IX
61. Suwardi	39 th	SMA	Penjahit	RT	SaganTimur /RW IX
62. Sugiyo	46 th	SMP	TK. parldir	RT	Purbonegaran/RWX
63. S. Soebarjo	59 th	SMP	Pensiunan	Bend. Rt	Purbonegaran/RWX
64. Tuswantara	47 th	SMA	IRT	PKK	Purbonegaran/RWX
65. Sukirman	40 th	SMA	PNS	-	Resonegaran/RW XI
66. Endang I.	41 th	Sarmud	Pimp. Panti	Sek. BKB	Purbonegaran/RWX
67. Wahidi	41 th	SMP	Buruh/becak	-	Resonegaran/RW XI
68. Wiji S.	33 th	Kursus	IRT	Ds. Wisma	Resonegaran/RW XI
69. B. Sugiyanto	42 th	SMA	Sopir	-	Resonegaran/RW XI
70. Sunarti	39 th	SMP	Jualan	Apsari	Terban/1394/RW XI
71. Bambang Djuwita	33 th	SMA	Kanit Laka Lantas Polres	-	Perum Polisi
72. Rahmat (Lettu)	48 th	KPAA	Ka. Kapolsek	-	Perum Polisi

DAFTAR ISTILAH

Didudul	= Sebutan untuk kendaraan umum yang datang, dan giliran kendaraan yang berhenti di halte untuk segera berangkat
Gerobag	= Alat untuk mengangkut sampah
Grosir	= Pedagang yang melayani pembeli dalam jumlah besar
Inceneration	= Penanganan sampah dengan cara dibakar
Jothakan	= Tidak bertegur sapa
Jugangan	= Lubang buatan dit tanah dengan ukuran yang dikehendaki untuk tempat membuang sampah
Karsam	= Sebutan untuk pekerjaannya sebagai karyawan sampah di salah satu tempat hiburan
Kartu Triplikat	= Sistem pencatatan dalam pelaksanaan registrasi penduduk dengan menggunakan formulir sebagai bukti pencatatan kejadian vital (kelahiran, kematian) yang masing-masing keterangan tersebut rangkap tiga untuk kelurahan, Dinkes dan keluarga
Keseren	= Alat angkut sampah semacam gerobag tetapi lebih kecil
Kru	= Sebutan untuk pengemudi dan kernet (awak kendaraan angkutan umum)
Lesehan	= Pedagang yang berjualan di bawah biasanya dengan alas plastik atau bago
Losa	= Bangunan memanjang di dalam pasar untuk tempat berjualan

Mbeler	= Orang yang hutang/barang tetapi pembayarannya tidak lancar
Ngelap-nyaur	= Cara membeli yang pembayarannya dalam tempo tertentu
Ngetem, thethek	= Cara yang dilakukan kendaraan angkutan umum untuk mencari penumpang dengan berhenti dalam waktu cukup lama
Nggldhong	= Kendaraan yang tidak ada penumpangnya
Open Dumping	= Cara penanganan sampah dengan dibuang begitu saja ke tempat terbuka (TPA)
Perpal	= Sanksi bagi pengemudi kendaraan umum untuk mencari penumpang dengan jalan memutar kembali jalan sebelum sampai ke pos yang harus dilewati
Puter walek	= Usaha yang dilakukan pengemudi kendaraan umum untuk mencari penumpang dengan jalan memutar kembali jalan sebelum sampai ke pos yang harus dilewati
Sapom	= Istilah dari pedagang setempat untuk menyebutkan retribusi kebersihan
Sanksi sosiologis	= Sanksi yang secara tidak langsung menghukum kepada pelanggar misal berupa nasihat, menahan kendaraannya
Saksi yuridis	= Sanksi yang dikenakan kepada pelanggar yang berupa hukuman atau putusan pengadilan
Sanitary land fill	= Sampah dibuang ditutupi ddengantanah kemudian dipadatkan ditumpuki sampah lagi dan seterusnya sampai rata dengan permukaan tanah

- Selte** = Pos-1.3 membantu untuk mengatur lalu lintas armada angkutan umum supaya tidak saling mendahului
- Sub Terminal** = Tempat pemberhentian sementara maupun terakhir armada angkutan umum guna menurunkan/menaikan penumpang, biasanya sub terminal ini hanya satu jurusan saja
- TPA** = Tempat Pembuangan Akhir, yaitu tempat pembuangan sampah yang diambil dari tempat-tempat penampungan sampah yang ada
- TPS** = Tempat pemanpungan Sementara, yaitu tempat-tempat untuk menampung sampah sebelum dibawa ke TPA
- Terminal** = Tempat Pemberhentian sementara terakhir armada angkutan umum guna menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang serta mengawali pemberangkatan dengantujuan tertentu secara teratur



001558.3

B1.3